

BEYOND CONNECTIVITY, BUILDING NEW FRONTIERS



SANGGAHAN BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer

Laporan Tahunan dan Keberlanjutan ini memuat pernyataan-pernyataan mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, strategi, serta tujuan yang tergolong sebagai pernyataan ke depan, mencakup pada kaitannya sebagai pelaksanaan peraturan/undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, pernyataan-pernyataan tersebut bersifat prospektif dan memiliki risiko untuk menghadirkan perbedaan material terhadap perkembangan aktual. Pernyataan-pernyataan tersebut disusun berdasarkan analisis mengenai kondisi terkini serta perhitungan atas kemungkinan situasi mendatang. Tidak ada jaminan bahwa berbagai tindakan yang kemudian dilakukan berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut akan secara menyeluruh menghadirkan hasil seperti yang dinyatakan.

Laporan Tahunan dan Keberlanjutan ini memuat kata "Perseroan" atau "Perusahaan" yang seluruhnya mengacu pada PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. Penggunaan kata ganti tersebut semata dilakukan demi kemudahan penyebutan nama perusahaan dalam Laporan ini.

This Annual and Sustainability Report contains statements regarding the financial condition, operational results, policies, projections, strategies, and objectives that are considered forward-looking statements, including their relevance to the implementation of applicable laws and regulations. Hence, these statements are prospective in nature and carry risks that may result in material differences from actual developments. These statements are based on an analysis of current conditions and estimates of possible future scenarios. There is no assurance that the actions taken based on these statements will lead to the results as described.

This Annual and Sustainability Report uses the term "Company" which refers to PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. The use of this term is solely for convenience in referring to the company throughout this Report.



PENJELASAN TEMA

Theme Explanation



BEYOND CONNECTIVITY, BUILDING NEW FRONTIERS

Di tengah percepatan transformasi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi yang lebih cepat, stabil, dan terintegrasi, PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (Perseroan) terus berinovasi dalam rangka merespon perkembangan industri dan memperkuat posisinya sebagai penyedia konektivitas telekomunikasi Indonesia. Tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi semata, kini Perseroan juga merambah sektor jaringan *fiber optic* dan pengembangan layanan *Fiber to the Home* (FTTH).

Melalui investasi berkelanjutan, inovasi layanan, dan kemitraan strategis, Perseroan membangun frontier bisnis yang lebih luas, mulai dari layanan digital berbasis rumah tangga hingga solusi konektivitas bagi berbagai sektor industri. Pendekatan ini membuka peluang nilai tambah yang lebih kuat, sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam ekosistem digital nasional.

Amid the acceleration of digital transformation and the increasing public demand for faster, more stable, and integrated telecommunications services, PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (the Company) continuously innovates in response to industry developments and solidifies its position as a leading provider of telecommunications connectivity in Indonesia. Moving beyond a sole focus on telecommunications tower infrastructure, the Company is now expanding into the fiber optic network sector and the development of Fiber to the Home (FTTH) services.

Through sustainable investment, service innovation, and strategic partnerships, the Company is establishing a broader business frontier, ranging from household-based digital services to connectivity solutions for various industrial sectors. This approach unlocks stronger value-added opportunities while reinforcing the Company's position within the national digital ecosystem.

DAFTAR ISI

Table of Contents

Sanggahan Batasan dan Tanggung Jawab Disclaimer	ii	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	37
Penjelasan Tema Theme Explanation	1	Profil Direksi Profile of the Board of Directors	39
KILAS KINERJA Performance Highlights	4	Profil Sumber Daya Manusia Profile of Human Resources	41
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	5	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	44
Ikhtisar Operasional Operational Highlights	7	Informasi Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	44
Ikhtisar Saham Share Highlights	7	Information on Majority and/ or Controlling Shareholder	
Informasi terkait Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information related to Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds	8	Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures	45
Peristiwa Penting Event Highlights	9	Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	45
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	9	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities	46
Keanggotaan dalam Asosiasi Association Membership	9	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and/or Professionals	46
LAPORAN MANAJEMEN Management Report	10	Informasi Situs Web Perusahaan Company Website Information	48
Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	11	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis	49
Laporan Direksi Report of the Board of Directors	17	Tinjauan Makroekonomi Macroeconomic Overview	50
PROFIL PERUSAHAAN Company Profile	26	Tinjauan Industri Telekomunikasi Telecommunications Industry Overview	51
Informasi Umum Perusahaan Corporate Identity	27	Tinjauan Operasional Operational Overview	52
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History	28	Tinjauan Keuangan Financial Overview	54
Informasi Perubahan Nama Information on the Name Change	29	Kemampuan Membayar Utang Ability to Pay Debt	59
Jejak Langkah Milestones	30	Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility Level	61
Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Corporate Vision, Mission, and Values	32	Rasio Keuangan Lainnya Other Financial Ratios	62
Nilai dan Budaya Kerja Corporate Value and Culture	32	Struktur Modal Capital Structure	62
Nilai Keberlanjutan Sustainability Value	32	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment	63
Kegiatan Usaha Line of Business	33	Investasi Barang Modal Capital Goods Investment	64
Wilayah Operasional Operational Area	34	Informasi dan Fakta Material Setelah Laporan Akuntan Material Information and Facts After the Accountant's Report	64
Struktur Organisasi Organizational Structure	36		

Prospek Usaha Business Outlook	65	Perkara Penting Legal Case	110
Target Pencapaian Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 Achievement Targets for 2025 and Projections for 2026	66	Sanksi Administratif Administrative Sanction	110
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	66	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	111
Kebijakan Dividen Dividend Policy	66	Kode Etik Code of Conduct	113
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Public Offering Proceeds	67	Kebijakan Antikorupsi Anti-Corruption Policy	115
Informasi Material mengenai Transaksi Pihak Berelasi Material Information regarding Related Party Transactions	67	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	115
Informasi Material terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information related to Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring	67	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Implementation of Corporate Governance Guidelines	117
Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampak terhadap Perusahaan Amendments to Laws and Regulations and Impact on the Company	68	LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report	123
Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes to Accounting Policies	68	Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	124
TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance	70	Strategi Kinerja Keberlanjutan Perusahaan Corporate Sustainability Strategy	124
Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	71	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlight	126
Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure	74	Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance	128
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	75	Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance	133
Dewan Komisaris Board of Commissioners	83	Kinerja Ekonomi Economic Performance	133
Direksi Board of Directors	87	Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance	134
Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors	91	Praktik Pengadaan Procurement Practices	134
Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors	93	Kinerja Sosial Social Performance	138
Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors	93	External Assurance External Assurance	144
Manajemen Risiko Risk Management	107	Hasil Umpan Balik Pemangku Kepentingan pada Tahun Sebelumnya Results of Stakeholder Feedback in the Previous Year	144
Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan Perusahaan Share Ownership Program by Company Management and/or Employees	110	Referensi Kriteria POJK No. 51/POJK.03/2017 Reference for POJK No. 51/POJK.03/2017 Criteria	145
		Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	168
		Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 Statement of Members of Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.	170
		LAPORAN KEUANGAN Financial Report	171

KILAS KINERJA

Performance Highlights

1



IKHTISAR KEUANGAN

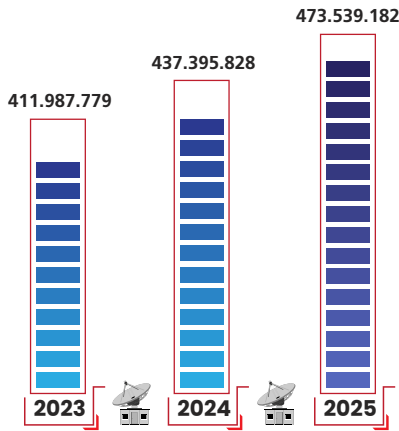
Financial Highlights

dalam ribuan Rupiah | in thousand Rupiah

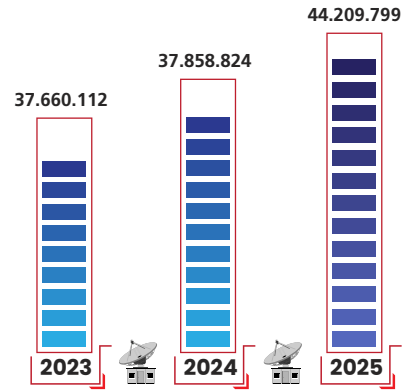
Uraian Description	2025	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan Statements of Financial Position			
Aset Lancar Current Assets	49.129.791	61.541.291	60.648.835
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	424.409.391	375.854.537	351.338.944
Jumlah Aset Total Assets	473.539.182	437.395.828	411.987.779
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	39.756.055	33.947.445	33.764.002
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	4.453.744	3.911.379	3.896.110
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	44.209.799	37.858.824	37.660.112
Ekuitas Equity	429.329.383	399.537.004	374.327.667
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income			
Pendapatan Revenues	55.504.823	52.041.658	47.726.683
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	20.671.969	19.984.011	18.680.652
Laba Kotor Gross Profit	34.832.854	32.057.647	29.046.031
Beban Usaha Operating Expenses	11.993.306	10.758.247	9.878.647
Laba dari Operasi Operating Profit	22.839.546	11.993.308	19.167.384
Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih Other Income (Expenses) – Net	1.915.957	291.880	2.077.863
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Profit Before Final Tax and Income Tax	24.755.503	21.591.280	21.245.247
Pajak Penghasilan Final Final Income Tax	4.987.095	4.144.035	3.756.383
Beban Pajak Penghasilan – Bersih Income Tax Expenses – Net	725.474	582.973	1.290.730
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	19.042.934	16.864.272	16.198.134
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity	19.042.757	16.864.119	16.198.079
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	29.792.379	25.209.337	5.902.392
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity	29.792.202	25.209.184	5.902.337
Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk (nilai penuh) Basic Earnings per Share Attributable to Ordinary Shareholders of the Parent Entity (full value)	14,91	13,20	12,68
Rasio Keuangan Financial Ratio			
Rasio Laba Bersih Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset Ratio of Net Profit for the Year to Total Assets	4,02%	3,86%	3,93%
Rasio Laba Bersih Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas Ratio of Net Profit for the Year to Total Equity	4,44%	4,22%	4,33%
Rasio Lancar Current Ratio	123,58%	181,20%	179,63%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas Debt to Equity Ratio	10,30%	9,48%	10,06%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset Debt to Asset Ratio	9,34%	8,66%	8,12%

dalam ribuan Rupiah
in thousand Rupiah

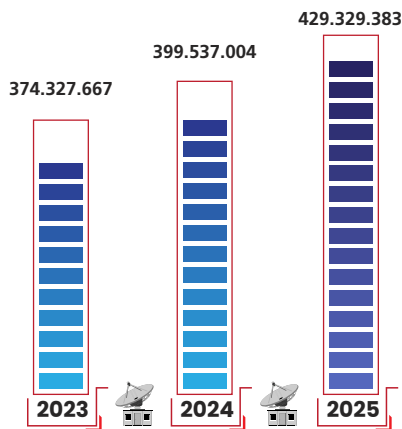
Jumlah Aset
Total Assets



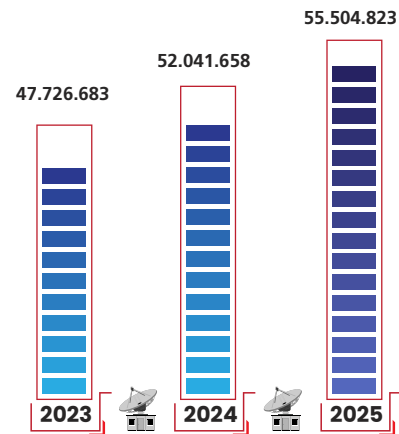
Jumlah Liabilitas
Total Liabilities



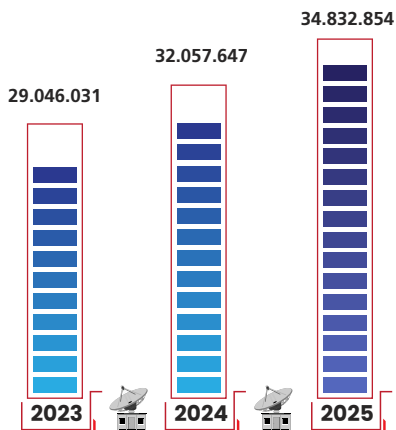
Ekuitas
Equity



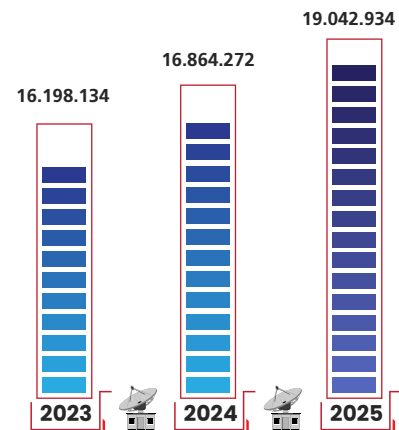
Pendapatan
Revenues



Laba Kotor
Gross Profit



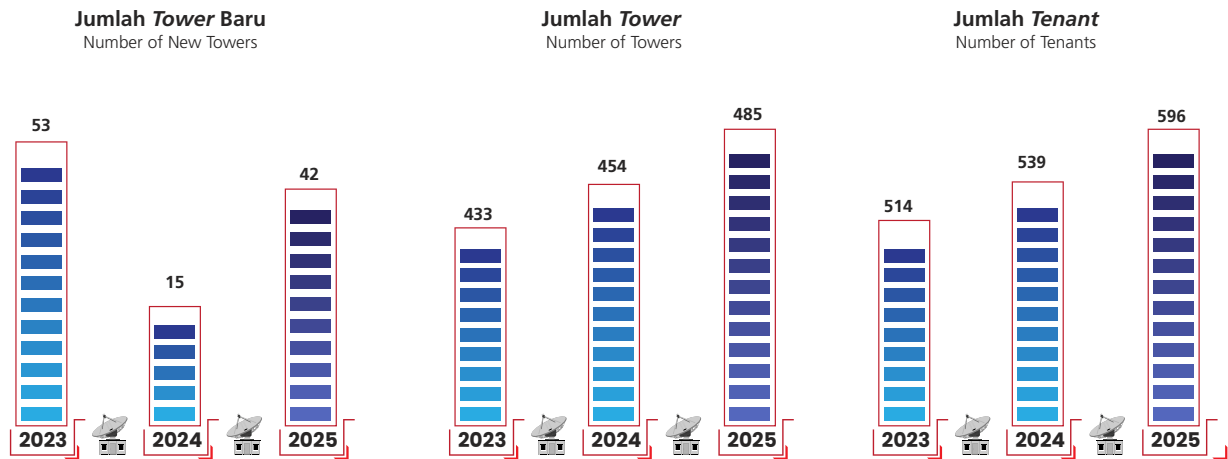
Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year





IKHTISAR OPERASIONAL

Operational Highlights



IKHTISAR SAHAM

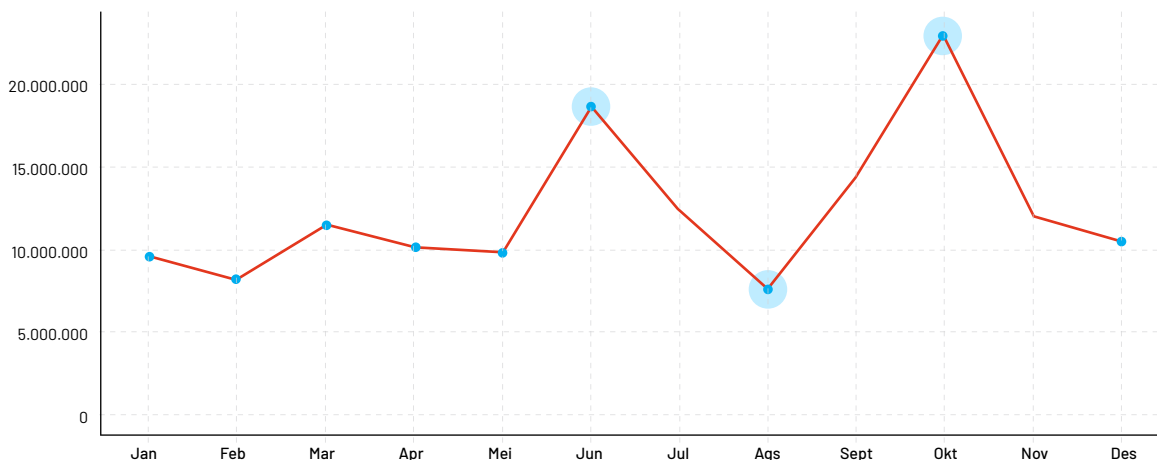
Share Highlights

Pada tanggal 7 Juli 2010, Perseroan melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "GOLD". Berikut kinerja saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

On July 7, 2010, the Company conducted its initial public offering on the Indonesia Stock Exchange under the stock code "GOLD". The following is the Company's share performance over the last 2 (two) years:

Periode Period	Jumlah Saham Beredar (lembar) Total Outstanding Shares	Harga Saham Tertinggi Highest Price	Harga Saham Terendah Lowest Price	Harga Saham Penutupan Closing Price	Volume Perdagangan Trade Volume	Kapitalisasi Pasar (Rp Juta) Market Capitalization (Million Rupiah)
2025						
Triwulan I 1 st Quarter	1.277.276.000	320	250	300	120.184.000	383.182.800.000
Triwulan II 2 nd Quarter	1.277.276.000	310	240	290	111.672.000	370.409.040.000
Triwulan III 3 rd Quarter	1.277.276.000	300	230	270	96.455.000	344.864.520.000
Triwulan IV 4 th Quarter	1.277.276.000	290	220	260	82.913.000	332.091.760.000
2024						
Triwulan I 1 st Quarter	1.277.276.000	410	236	316	135.260	403.619.216.000
Triwulan II 2 nd Quarter	1.277.276.000	410	236	314	144.937	401.064.664.000
Triwulan III 3 rd Quarter	1.277.276.000	378	236	328	270.808	418.946.528.000
Triwulan IV 4 th Quarter	1.277.276.000	368	254	284	204.608	362.746.384.000

Total Volume Saham 2025
Total Share Volume 2025



Selama tahun 2025, Perseroan tidak melakukan aksi korporasi terkait saham, baik berupa pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), maupun perubahan nilai saham.

In 2025, the Company did not undertake any corporate actions related to its shares, including stock splits, reverse stock splits, or changes in share value.

Saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama tahun buku tidak pernah mengalami penghentian perdagangan sementara (*suspension*) maupun pencabutan hak perdagangan saham (*delisting*).

The Company's shares traded on the Indonesia Stock Exchange during the fiscal year did not experience any trading suspension or delisting.

INFORMASI TERKAIT OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

Information related to Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak pernah menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/ imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

As of December 31, 2025, the Company did not issue any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no information regarding the outstanding amount of bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/ returns, maturity dates, or bond/sukuk ratings.



PERISTIWA PENTING

Event Highlights



- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan.
- Penyelenggaraan Paparan Publik di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan.
- Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the fiscal year 2024 at Royal Kuningan Hotel, South Jakarta.
- Implementation of a Public Expose at Royal Kuningan Hotel, South Jakarta.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

Selama tahun 2025, Perseroan tidak menerima penghargaan maupun sertifikasi dari pihak eksternal.

Throughout 2025, the Company did not receive any awards or certifications from external parties

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

Association Membership

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan belum tergabung dalam asosiasi manapun.

As of December 31, 2025, the Company has not joined any association.

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

2



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report of the Board of Commissioners

HELMY YUSMAN SANTOSO

Presiden Komisaris
President Commissioner

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dapat melewati tahun 2025 yang cukup menantang.

Melalui Laporan Tahunan ini, izinkan kami selaku jajaran Dewan Komisaris untuk melaporkan kegiatan pengawasan terhadap kinerja Perseroan selama tahun 2025 sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan bisnis Perseroan.

Dear shareholders and stakeholders,

We would like to express our gratitude to God Almighty for His blessings and guidance, enabling PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk to navigate the challenging year of 2025.

Through this Annual Report, we, the Board of Commissioners, are pleased to present our supervisory activities regarding the Company's performance in 2025. This reflects our responsibility in monitoring the management of the Company's business operations.



Pandangan terhadap Dinamika Makroekonomi dan Industri 2025

Tahun 2025 ditandai oleh pertumbuhan ekonomi global yang moderat seiring berlanjutnya pemulihan pasca pandemi dan penyesuaian kebijakan moneter di berbagai negara. Laju pertumbuhan dunia tetap berada pada kisaran tren pertumbuhan menengah, dengan tekanan geopolitik dan ketidakseimbangan permintaan global menjadi faktor risiko yang harus terus diwaspadai.

Dalam konteks makroekonomi nasional, Indonesia mencatat pertumbuhan PDB yang positif sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11% secara tahunan. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,03%. Hal tersebut merefleksikan kelanjutan tren pemulihan dan ekspansi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, dengan komposisi pertumbuhan yang ditopang baik dari sisi produksi maupun pengeluaran.

Industri telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting di era digital saat ini dalam mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi digital. Berdasarkan laporan terbaru dari *Data Insight Market*, industri telekomunikasi Indonesia diprediksi mencapai nilai USD13,66 miliar atau setara Rp222 triliun pada tahun 2025. Meski pertumbuhan tergolong rendah, permintaan layanan data terus meningkat berkat penetrasi *smartphone* dan OTT (*over-the-top*) seperti layanan *streaming*.

Pertumbuhan industri telekomunikasi juga mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong tercapainya inklusi digital nasional. Pemerintah berupaya memperkecil kesenjangan digital dengan mempercepat pertumbuhan layanan *broadband* di desa dan kota kecil. Program digitalisasi nasional dan promosi pembayaran digital mendorong konektivitas lebih luas dan memperkuat ekosistem digital lokal. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur *digital* dalam rangka mendukung percepatan adopsi jaringan 5G di Indonesia dan transformasi *digital* nasional.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Dewan Komisaris mencatat bahwa sepanjang tahun 2025, Direksi telah menjalankan tugas operasional dan strategis secara konsisten dalam menghadapi tantangan pasar dan dinamika eksternal sekaligus memanfaatkan momentum dan peluang. Perseroan berhasil mempertahankan jalur investasi pada infrastruktur telekomunikasi melalui perluasan jaringan *tower* sebanyak 61 unit di tahun 2025, penguatan jaringan fiber optik, dan merambah ke pasar perumahan/ rumah tangga.

Macro-Economic and Industry Review for 2025

The year 2025 was marked by moderate global economic growth as countries continued post-pandemic recovery and adjusted monetary policies. Global growth remained within a mid-range trend, with geopolitical pressures and imbalances in global demand representing ongoing risks that require close attention.

On the national front, Indonesia recorded positive GDP growth throughout 2025. According to Statistics Indonesia (BPS), the economy grew by 5.11% year-on-year, surpassing the 5.03% growth achieved in 2024. This reflects continued economic recovery and expansion over recent years, driven by growth in both production and expenditure.

The telecommunications industry continues to play a critical role in supporting connectivity, economic growth, and digital transformation. According to the latest report from Data Insight Market, Indonesia's telecommunications industry is projected to reach US\$13.66 billion (approximately Rp222 trillion) in 2025. While overall growth is moderate, demand for data services continues to rise due to smartphone penetration and over-the-top (OTT) services such as streaming.

Government support has further bolstered the industry, focusing on achieving national digital inclusion. Efforts include expanding broadband access in rural areas and smaller towns, promoting digital payments, and strengthening the local digital ecosystem. The government is also supporting digital infrastructure development to accelerate 5G adoption and national digital transformation.

Performance Assessment of the Board of Directors

The Board of Commissioners notes that throughout 2025, the Board of Directors consistently executed operational and strategic responsibilities, addressing market challenges and external dynamics while seizing opportunities. The Company successfully maintained its telecommunications infrastructure investments by expanding the tower network by 61 units in 2025, enhancing fiber optic networks, and entering the residential market.



Penilaian tersebut diperkuat dari pencapaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2025, antara lain pendapatan yang mengalami peningkatan sebesar 6,65% dan laba bersih tahun berjalan yang mengalami peningkatan sebesar 12,94% dari tahun 2024. Dewan Komisaris juga mencermati bahwa Direksi melakukan penyesuaian operasional yang responsif terhadap perubahan struktur permintaan pasar, dengan tetap menjaga efisiensi biaya dan kinerja finansial.

Selain itu, Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam memperkuat tata kelola risiko dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk pemantauan terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan nasional yang berdampak pada industri telekomunikasi. Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi sejauh ini telah berada pada jalur yang sejalan dengan tujuan strategis perusahaan.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Peranan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah melakukan pengawasan dalam upaya menjaga agar pelaksanaan operasional perusahaan tetap berada dalam koridor visi dan tujuan strategis perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan faktor eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan dengan mekanisme *check and balances* dengan tujuan akhir untuk mencapai peningkatan kinerja dan kemajuan usaha perusahaan.

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan, selama tahun 2025 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal sebanyak 4 (empat) kali, dengan agenda pembahasan tentang *review* pencapaian kinerja Perseroan. Hasil dari rapat tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direksi untuk menjadi bahan pertimbangan Direksi dalam memutuskan suatu kebijakan serta arah dan strategi pelaksanaan bisnis dan operasional Perseroan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian terhadap langkah-langkah strategis Direksi dalam pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional melalui penyampaian arahan dan rekomendasi kepada Direksi agar setiap inisiatif strategis tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kelayakan jangka panjang. Salah satu forum penyampaian arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan melalui rapat bersama Direksi, yang mana selama tahun 2025 diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali.

Melalui pengawasan yang berkesinambungan, Dewan Komisaris memastikan bahwa implementasi strategi Perseroan tetap selaras dengan tujuan jangka panjang Perseroan.

This assessment is supported by performance achievements during 2025, including revenue growth of 6.65% and net profit growth of 12.94% compared to 2024. The Board of Commissioners also acknowledges the Directors' proactive operational adjustments in response to changing market demand, while maintaining cost efficiency and financial performance.

Furthermore, the Board appreciates the Directors' efforts to strengthen risk governance and regulatory compliance, including monitoring developments in national regulations impacting the telecommunications industry. Overall, the Board of Commissioners evaluates the Board of Directors' performance as aligned with the Company's strategic objectives.

Supervision of the Implementation of the Company's Strategy

The role of the Board of Commissioners is to oversee the Company's operations to ensure that business activities align with the Company's vision and strategic objectives, while also taking into account external factors and compliance with applicable laws and regulations. Oversight by the Board of Commissioners is carried out through a system of checks and balances, with the ultimate goal of enhancing the Company's performance and advancing its business.

In 2025, to monitor the implementation of the Company's strategy, the Board of Commissioners held 4 (four) internal meetings, focusing on reviewing the Company's performance achievements. The outcomes of these meetings were submitted to the Board of Directors as input for decision-making regarding the direction, policies, and operational strategies of the Company.

The Board of Commissioners also provided guidance on strategic initiatives undertaken by the Board of Directors, offering directions and recommendations to ensure that all strategic activities consider prudence and long-term feasibility. One of the main forums for providing such guidance was joint meetings with the Board of Directors, held 4 (four) times in 2025.

Through continuous oversight, the Board of Commissioners ensures that the implementation of the Company's strategy remains aligned with its long-term objectives.



Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan menyadari bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi bagi keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan GCG, Perseroan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kaidah tata kelola terbaik secara internasional.

Pengembangan sistem pengendalian internal turut dilakukan melalui optimalisasi proses bisnis, pemantauan ketaatan terhadap ketentuan kontraktual, serta implementasi strategi mitigasi risiko yang komprehensif. Perseroan juga secara berkala melakukan evaluasi independen untuk memastikan efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan operasional.

Dalam aspek pelaporan dan pengungkapan, Perseroan terus meningkatkan kualitas informasi kepada pemangku kepentingan melalui keterbukaan data sesuai standar pelaporan yang berlaku. Pengungkapan tersebut mencakup kinerja keuangan, operasional, dan inisiatif keberlanjutan, yang menjadi bagian integral dari praktik tata kelola yang baik.

Ke depannya, Dewan Komisaris berharap agar penerapan GCG dalam lingkup Perseroan dapat lebih ditingkatkan dalam upaya mendorong penciptaan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, investor, serta memberikan manfaat positif dan sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Penilaian terhadap Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pengelolaan Perseroan, khususnya di bidang pencatatan transaksi keuangan, proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian internal, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit.

Menurut penilaian kami, seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah menjalankan tugasnya dengan baik selama tahun 2025, tercermin dari keaktifan seluruh anggota Komite Audit dalam menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pengelolaan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan serta perbaikan penerapan tata kelola dan sistem pengendalian internal Perseroan pada rapat bersama Dewan Komisaris.

Views on Good Corporate Governance Implementation

The Company recognizes that applying Good Corporate Governance (GCG) principles is fundamental to business sustainability and the creation of long-term value for stakeholders. In implementing GCG, the Company adheres to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in accordance with prevailing regulations and international best practices.

Internal control systems are further developed by optimizing business process, monitoring compliance with contractual obligations, and implementing comprehensive risk mitigation strategies. The Company also conducts periodic independent evaluations to ensure the effectiveness of internal controls and operational compliance.

Regarding reporting and disclosure, the Company continuously enhances the quality of information provided to stakeholders through transparent reporting in line with applicable standards. Disclosures include financial and operational performance as well as sustainability initiatives, all integral to good governance practices.

Looking ahead, the Board of Commissioners expects GCG implementation to be further strengthened to promote sustainable long-term economic value creation for shareholders and investors, while providing positive impact and synergy with all stakeholders.

Assessment of Committees under the Board of Commissioners

To support the Board of Commissioners in supervising the management of the Company, particularly in financial recording, financial reporting, audit implementation, internal control, and application of good governance principles, the Board of Commissioners established an Audit Committee.

Our assessment indicates that all members of the Audit Committee performed their duties well in 2025, demonstrated by their active engagement in providing advice and recommendations to the Board of Commissioners concerning accounting records, financial reporting, and improvements in governance and internal control systems.



Pandangan atas Prospek Usaha

Lembaga *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan perekonomian global 2026 akan tumbuh moderat di kisaran 2,6%–3,3%. Ketidakpastian geopolitik dan penyesuaian kebijakan moneter diperkirakan masih mewarnai dinamika makroekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dan prospek pertumbuhan yang positif. Dalam satu dekade terakhir, perekonomian Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan di kisaran 5%, mencerminkan daya tahan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan makroekonomi yang ditempuh. Fundamental ekonomi yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang kuat, dan bauran kebijakan yang konsisten menjadi modal utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Dalam lanskap industri telekomunikasi, tren pertumbuhan konektivitas digital diproyeksikan akan berlanjut dalam beberapa tahun mendatang melalui peningkatan penetrasi *broadband* dan jaringan 5G. Pertumbuhan pengguna telekomunikasi dan *demand* untuk layanan data berkecepatan tinggi terus menjadi pendorong utama pengembangan jaringan, termasuk ekspansi *tower* dan *fiber backbone*.

Nilai pasar operator seluler domestik juga diperkirakan meningkat, dengan pertumbuhan berkelanjutan dalam segmen *mobile data* dan *fixed broadband*. Hal ini dapat menjadi peluang yang menjanjikan bagi pelaku usaha infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung ekspansi jaringan telekomunikasi melalui kolaborasi dengan beberapa operator seluler di Indonesia.

Dewan Komisaris akan terus mendukung kebijakan dan langkah strategis Direksi dalam rangka mengoptimalkan peluang sehubungan dengan program transformasi ekosistem digital nasional bagi momentum pertumbuhan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun buku berjumlah 2 (dua) orang, sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Helmy Yusman Santoso
Komisaris Independen : Theignatius Agus Salim

Business Outlook

The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth in 2026 to be moderate, ranging between 2.6% and 3.3%. Geopolitical uncertainty and adjustments in monetary policies are expected to continue influencing global macroeconomic dynamics in the coming years.

Amid ongoing global economic uncertainty, Indonesia's economy remains resilient with positive growth prospects. Over the past decade, Indonesia has achieved an average growth rate of around 5%, reflecting the nation's economic strength and the effectiveness of implemented macroeconomic policies. A solid economic foundation, strong macroeconomic stability, and consistent policy mix provide the primary support to sustain Indonesia's economic growth momentum moving forward.

In the telecommunications industry, the trend of expanding digital connectivity is expected to continue through increased broadband penetration and 5G network deployment. Growth in telecommunications users and demand for high-speed data services remains a key driver for network development, including tower expansion and fiber optic backbone infrastructure.

The domestic mobile operator market is also projected to grow, with continued expansion in mobile data and fixed broadband segments. This presents promising opportunities for telecommunications infrastructure providers to support network expansion in collaboration with multiple mobile operators in Indonesia.

The Board of Commissioners will continue to support the policies and strategic initiatives of the Board of Directors to optimize opportunities arising from the national digital ecosystem transformation program, promoting growth and the long-term sustainability of the Company.

Changes in the Board Composition

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners. The Board consisted of two members during the fiscal year:

President Commissioner : Helmy Yusman Santoso
Independent Commissioner : Theignatius Agus Salim



Apresiasi

Sebagai penutup, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direksi dan segenap karyawan atas dedikasi dan integritas yang telah diberikan, sehingga Perseroan mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang baik selama tahun 2025. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya atas setiap dukungan dan masukan yang diberikan kepada Perseroan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha Perseroan. Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat terus memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang usaha di masa depan.

Appreciation

In closing, the Board of Commissioners expresses its sincere appreciation to the Board of Directors and all employees for their dedication and integrity, which contributed to the Company's strong performance in 2025. We also extend our gratitude to shareholders and other stakeholders for their support and valuable input, which have been instrumental in maintaining the Company's sustainability. The Board of Commissioners hopes that the Company will continue strengthening its capabilities to face future challenges and capitalize on business opportunities.

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk

HELMY YUSMAN SANTOSO

Presiden Komisaris
President Commissioner



LAPORAN DIREKSI

Report of the Board of Directors

PAULUS RIDWAN PURAWINATA

Presiden Direktur
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kekuatan yang diberikan kepada Perseroan untuk terus beroperasi dan melayani kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di sepanjang tahun 2025. Tahun ini merupakan periode transformasi bagi banyak sektor industri, termasuk telekomunikasi, yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar dan tekanan eksternal global.

Perseroan berupaya menjalankan fungsi strategisnya dalam penyediaan infrastruktur konektivitas nasional, dengan fokus pada konstruksi tower, perluasan jaringan fiber optik, dan peningkatan kapabilitas layanan, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan memungkinkan pertumbuhan *bandwidth* yang semakin dibutuhkan oleh konsumen dan korporasi.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We express our gratitude to God Almighty for the opportunity and strength granted to the Company to continue operating and serving Indonesia's telecommunications infrastructure needs throughout 2025. The year 2025 was a period of transformation across many industrial sectors, including telecommunications which continues to adapt to changing market demands and global external pressures.

The Company has focused on fulfilling its strategic role in providing national connectivity infrastructure, emphasizing tower construction, fiber optic network expansion, and enhancing service capabilities. These efforts contribute to the growth of Indonesia's digital economy and enable the increasing bandwidth demands of both consumers and corporate clients.

Tinjauan Makroekonomi dan Industri 2025

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 menunjukkan tren moderat di tengah dinamika geopolitik, ketegangan perdagangan internasional, serta perubahan kebijakan moneter di berbagai negara maju. Menurut perkiraan IMF, pertumbuhan ekonomi dunia berada di kisaran antara 3,2% hingga 3,3%, didorong oleh investasi teknologi dan adaptasi model produksi di tengah pergeseran ketergantungan pada rantai pasok tradisional.

Meski dinamika perekonomian global masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh solid sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2024 sebesar 5,03%, dengan PDB mencapai Rp23.821,1 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), serta didominasi secara spasial oleh Pulau Jawa.

Stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Inflasi terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% dan tercatat sebesar 2,72% (yoy) pada November 2025. Di pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menguat dan berada di level 8.644,26 pada 29 Desember 2025. Nilai tukar rupiah juga relatif stabil di kisaran Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025.

Industri telekomunikasi Indonesia tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang 2025, tercermin dalam indikator konektivitas digital nasional. Berdasarkan laporan Indonesia Telecom Market Size, Share, Trends and Forecast by Services and Region, 2026-2034 yang dirilis oleh IMARC Group, nilai pasar industri telekomunikasi tahun 2025 mencapai USD25,9 juta. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penetrasi internet seluler di Indonesia, yang didukung oleh harga *smartphone* yang terjangkau dan paket data yang kompetitif. Data dari Statista menyatakan bahwa penetrasi internet Indonesia mencapai sekitar 79,23 % di tahun 2025 dengan 100% cakupan 4G dan 3G, menunjukkan basis konektivitas yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan banyaknya pengguna internet, permintaan akan konektivitas berkecepatan tinggi semakin meningkat, terutama di daerah perkotaan, mendorong operator seluler untuk memperluas jaringan 4G dan 5G. Pada awal tahun 2025, Indonesia memiliki 212 juta pengguna internet, atau 74,6% dari populasi, dengan 143 juta individu (50,2% dari populasi) aktif di media sosial. Koneksi seluler mencapai 356 juta, melampaui jumlah penduduk nasional secara keseluruhan, yang menggarisbawahi perkembangan pesat lanskap digital di Indonesia.

Macroeconomic and Industry Review for 2025

Global economic growth in 2025 showed a moderate trend amid geopolitical dynamics, international trade tensions, and shifting monetary policies in various developed countries. According to the IMF, global economic growth was projected to be between 3.2% and 3.3%, driven by technology investment and the adaptation of production models amid shifting dependence on traditional supply chains.

Despite ongoing global economic uncertainty, Indonesia's economy demonstrated resilience and solid performance throughout 2025. Data from Statistics Indonesia (BPS) shows that Indonesia's GDP grew by 5.11% year-on-year, higher than the 5.03% growth recorded in 2024, reaching Rp23,821.1 trillion. This growth was supported by strong household consumption, Gross Fixed Capital Formation (PMTB), and predominantly driven by economic activity on Java Island.

Indonesia's macroeconomic stability remained well-maintained. Inflation was controlled within the target range of 2.5% ±1%, recorded at 2.72% year-on-year in November 2025. In the financial markets, the Indonesia Stock Exchange (IDX) Composite Index strengthened to 8,644.26 by December 29, 2025, while the rupiah remained relatively stable at approximately Rp16,785 per US\$.

The Indonesian telecommunications industry continued to show positive growth throughout 2025, as reflected in national digital connectivity indicators. According to the report Indonesia Telecom Market Size, Share, Trends and Forecast by Services and Region, 2026-2034 by IMARC Group, the telecommunications market was valued at US\$25.9 million in 2025. This growth was driven by rising mobile internet penetration, supported by affordable smartphones and competitive data packages. Data from Statista indicates that Indonesia's internet penetration reached approximately 79.23% in 2025, with full 4G and 3G coverage, demonstrating a strong connectivity foundation nationwide.

With a large number of internet users, demand for high-speed connectivity continues to grow, particularly in urban areas, prompting mobile operators to expand their 4G and 5G networks. At the beginning of 2025, Indonesia had 212 million internet users, representing 74.6% of the population, with 143 million individuals (50.2% of the population) active on social media. Mobile connections totaled 356 million, surpassing the total national population and highlighting the rapid growth of Indonesia's digital landscape.



Upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat infrastruktur digital memainkan peran penting dalam membentuk pasar telekomunikasi. Salah satu inisiatif utama adalah peningkatan konektivitas penyediaan jaringan 4G ke setiap desa pada tahun 2025. Pemerintah juga mendorong adopsi jaringan 5G di sektor industri dan manufaktur untuk mendukung industri 4.0, meningkatkan efisiensi manufaktur, dan mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Selain itu, pertumbuhan layanan digital, termasuk *e-commerce*, *fintech*, dan *platform streaming* konten/OTT, serta solusi meningkatnya permintaan *cloud* dan IoT (*Internet of Things*) untuk mendukung ekosistem ekonomi digital juga menciptakan permintaan berkelanjutan untuk layanan telekomunikasi yang andal.

Untuk mendukung transformasi dan ekosistem ekonomi digital, kebutuhan akan infrastruktur yang dapat mendukung teknologi tersebut menjadi peluang baru bagi pelaku usaha infrastruktur telekomunikasi di masa depan.

Analisis Kinerja Perusahaan

Kebijakan Strategis Perusahaan

Perseroan telah menetapkan strategi bisnis yang selaras dengan dinamika pasar telekomunikasi tahun 2025, yang berfokus pada perluasan portofolio infrastruktur dan peningkatan efisiensi operasional. Hingga tahun 2025, Perseroan telah melakukan pembangunan tower sebanyak 46 unit di wilayah Jawa dan Sumatera. Selain itu, Perseroan juga merambah di sektor kabel fiber optic dan memperluas jaringan pasar perumahan/rumah tangga.

Perseroan juga menerapkan pendekatan berorientasi pasar dalam menjalin kemitraan strategis dengan operator jaringan dan integrator teknologi, serta mengembangkan model *co-location* yang meningkatkan utilisasi inti infrastruktur. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 3 operator seluler (IOH, TSEL, XLSMART) telah menjalin kemitraan strategis dengan Perseroan.

Melalui optimalisasi model *co-location*, Perseroan berhasil mencatatkan tingkat utilisasi menara sebesar 1,22x. Pencapaian ini mencerminkan titik keseimbangan yang ideal antara pemanfaatan aset saat ini dengan ketersediaan ruang (*headroom*) yang luas, sehingga Perseroan memiliki kesiapan penuh untuk menangkap peluang ekspansi jaringan operator tanpa memerlukan belanja modal tambahan yang besar.

Dari aspek investasi, Perseroan mengalokasikan *capital expenditure* (*capex*) yang terukur untuk ekspansi jaringan fiber *backbone* dan penguatan menara di wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan trafik data yang tinggi. Alokasi *capex* 2025 sebesar Rp31,7 miliar.

The Indonesian government's efforts to strengthen digital infrastructure have played a significant role in shaping the telecommunications market. Key initiatives include expanding 4G network coverage to all villages in 2025 and promoting 5G adoption in industrial and manufacturing sectors to support Industry 4.0, enhance manufacturing efficiency, and accelerate the country's digital transformation.

Furthermore, the growth of digital services, including *e-commerce*, *fintech*, streaming/OTT platforms, as well as cloud and IoT solutions, continues to drive demand for reliable telecommunications services, supporting the broader digital economy ecosystem.

To facilitate this transformation and the evolving digital economy, the demand for robust infrastructure represents a significant opportunity for telecommunications infrastructure providers in the years ahead.

Company Performance Analysis

Strategic Policies of the Company

The Company has established a business strategy aligned with the telecommunications market dynamics of 2025, focusing on expanding its infrastructure portfolio and improving operational efficiency. By 2025, the Company had constructed 46 towers across Java and Sumatra Regions. Additionally, the Company has ventured into the fiber optic sector and expanded its network to residential markets.

The Company also adopts a market-oriented approach in establishing strategic partnerships with network operators and technology integrators, while developing a *co-location* model that enhances core infrastructure utilization. Throughout 2025, a total of three mobile operators (IOH, TSEL, XLSMART) have entered into strategic partnerships with the Company.

Through optimization of the *co-location* model, the Company recorded a tower utilization rate of 1.22x. This achievement reflects an optimal balance between current asset utilization and ample available headroom, positioning the Company to fully capture network expansion opportunities from operators without requiring significant additional capital expenditure.

From an investment perspective, the Company allocated measured capital expenditure (*CapEx*) to expand the fiber backbone network and strengthen towers in areas with high data traffic growth potential. The total *CapEx* for 2025 amounted to Rp31.7 billion.



Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Proses Review Kinerja

Dalam merumuskan strategi perusahaan yang adaptif dan berkelanjutan, Direksi melakukan analisis mendalam terhadap tren industri, kondisi pasar, dan kebutuhan pelanggan. Kami senantiasa memastikan bahwa strategi yang diambil sejalan dengan visi dan misi Perseroan.

Dalam rangka mengevaluasi pencapaian kinerja dan mengidentifikasi peluang perbaikan, Direksi secara rutin menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris dan rapat bersama tim manajemen Perseroan. Masukan dari tim operasional dan manajerial senantiasa diintegrasikan untuk menciptakan strategi yang holistik, meninjau dan mengevaluasi kinerja, dan mengidentifikasi peluang. Penguatan kolaborasi antar departemen juga turut dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergi dalam implementasi strategi dan kebijakan strategis Perseroan.

Pencapaian Kinerja Perusahaan

Perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional yang relatif stabil di tengah tantangan industri selama tahun 2025. Pendapatan usaha tahun 2025 sebesar Rp55,50 miliar, tumbuh sebesar 6,65% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp52,04 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kinerja operasional.

Dari sisi profitabilitas, Perseroan mencatatkan laba kotor tahun 2025 sebesar Rp34,83 miliar, tumbuh sebesar 8,66% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp32,06 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari tahun sebelumnya. Laba bersih periode berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp19,05 miliar, tumbuh sebesar 12,92% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp16,86 miliar. Sebagai akibat dari peningkatan laba, *Gross Profit Margin* (GPM) dan *Net Profit Margin* (NPM) Perseroan masing-masing berada di level 62,76% dan 34,31%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 61,60% dan 32,41%.

Untuk posisi keuangan, Perseroan membukukan jumlah aset tahun 2025 sebesar Rp473,54 miliar, tumbuh sebesar 8,26% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp437,40 miliar. Jumlah liabilitas tahun 2025 sebesar Rp44,21 miliar, tumbuh sebesar 16,78% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp37,86 miliar. Persentase liabilitas terhadap aset tahun 2025 sebesar 9,34%, lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar 8,66%. Sementara itu, nilai ekuitas tahun 2025 sebesar Rp429,33 miliar, tumbuh sebesar 7,46% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp399,54 miliar. Persentase ekuitas terhadap aset tahun 2025 sebesar 90,66%, lebih rendah dari 2024 sebesar 91,34%.

Roles of the Board of Directors in Strategy Formulation and Performance Review

In formulating adaptive and sustainable corporate strategies, the Board of Directors conducts in-depth analyses of industry trends, market conditions, and customer needs. The Company ensures that all strategic decisions are aligned with its vision and mission.

To evaluate performance achievements and identify areas for improvement, the Board of Directors regularly holds meetings with the Board of Commissioners and with the Company's management team. Input from operational and managerial teams is integrated to develop holistic strategies, review and assess performance, and identify growth opportunities. Strengthening inter-departmental collaboration is also emphasized to enhance synergy in implementing the Company's strategic policies.

Company Performance Achievements

The Company recorded relatively stable operational performance amid industry challenges in 2025. Revenue for 2025 amounted to Rp55.50 billion, representing a 6.65% increase compared to Rp52.04 billion in 2024. This growth was driven by improvements in the operational performance.

Regarding profitability, the Company achieved a gross profit of Rp34.83 billion, growing by 8.66% from Rp32.06 billion in 2024. This increase was driven by an increase in revenue from the previous year. The Company's net profit for the period reached Rp19.05 billion, increasing by 12.92% compared to the previous year's Rp16.86 billion. As a result of this growth, the Company's *Gross Profit Margin* (GPM) and *Net Profit Margin* (NPM) stood at 62.76% and 34.31%, higher than the previous year's 61.60% and 32.41%, respectively.

In terms of financial position, the Company's total assets in 2025 amounted to Rp473.54 billion, representing an 8.26% change from Rp437.40 billion in 2024. Total liabilities in 2025 amounted to Rp44.21 billion, growing by 16.78% change compared to Rp37.86 billion recorded in 2024. The debt-to-assets ratio in 2025 was 9.34%, higher than 8.66% in 2024. Meanwhile, total equity in 2025 amounted to Rp429.33 billion, growing by 7.46% change from Rp399.54 billion in 2024, with an equity-to-asset ratio of 90.66%, lower than 91.34% in the previous year.



Kendala yang Dihadapi dan Langkah Strategis yang Dilakukan

Pelaksanaan aktivitas operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai kendala selama tahun 2025, termasuk tekanan biaya material dan logistik yang meningkat, terutama pada pembangunan jaringan fiber di wilayah terpencil. Fluktuasi nilai tukar dan biaya modal turut mempengaruhi struktur biaya investasi, mendorong Perseroan untuk menerapkan strategi lindung nilai (*hedging*) serta mengoptimalkan sumber pembiayaan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan luar negeri.

Selain itu, ketidakpastian regulasi dan izin usaha di beberapa wilayah mengharuskan Perseroan memperkuat hubungan dengan otoritas lokal dan nasional untuk mempercepat proses perizinan dan koordinasi lintas instansi terkait.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Direksi meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi untuk penguatan fundamental Perseroan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di seluruh lini organisasi, baik pada proses pengambilan keputusan strategis maupun aktivitas operasional sehari-hari. Direksi memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta kebijakan internal yang telah ditetapkan.

Komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dilakukan melalui pengelolaan hubungan kerja antara organ GCG, yaitu Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Seluruh organ GCG menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sebagaimana yang telah dituangkan dalam prosedur dan mekanisme GCG. Direksi senantiasa berkoordinasi dengan Dewan Komisaris untuk menjaga agar pelaksanaan tanggung jawab tidak tumpah tindih antara satu organ dengan organ lainnya, dan menghindari adanya tanggung jawab yang tidak terlaksana (*void*).

Challenges and Strategic Measures Undertaken

The execution of the Company's operational activities in 2025 encountered several challenges, including rising material and logistics costs, particularly in the construction of fiber networks in remote areas. Exchange rate fluctuations and the cost of capital also affected the investment cost structure, prompting the Company to implement hedging strategies and optimize local financing sources to reduce reliance on foreign funding.

Furthermore, regulatory uncertainties and business licensing requirements in certain regions required the Company to strengthen relationships with local and national authorities to accelerate licensing processes and coordinate across relevant agencies.

Good Corporate Governance Implementation

The Board of Directors believes that Good Corporate Governance (GCG) serves as the foundation for strengthening the Company's fundamentals and achieving sustainable long-term business growth. The Company has consistently applied GCG principles across all organizational levels, both in strategic decision-making and day-to-day operational activities. The Board of Directors ensures that all policies and business decisions comply with prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, and internal policies.

The Company's commitment to GCG is demonstrated through the management of relationships among the GCG organs, consisting of Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Each organ performs its respective roles and responsibilities as defined in the established GCG procedures and mechanisms. The Board of Directors continuously coordinates with the Board of Commissioners to prevent overlapping responsibilities and avoid gaps in accountability.



Sebagai bagian dari penerapan GCG, Perseroan memiliki sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi. Sistem pengendalian internal tersebut mencakup pemisahan fungsi yang jelas, prosedur operasional standar, mekanisme persetujuan berjenjang, serta fungsi pengawasan yang dijalankan secara independen. Direksi secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan skala dan kompleksitas usaha Perseroan.

Selain itu, Direksi juga menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan usaha. Risiko yang dikelola mencakup risiko operasional, risiko keselamatan dan lingkungan, risiko keuangan, serta risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan Perseroan. Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui penerapan prosedur operasional yang ketat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Direksi memandang bahwa penerapan GCG yang efektif, didukung oleh sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai, akan memperkuat ketahanan bisnis Perseroan dalam menghadapi dinamika industri. Penerapan kode etik dan budaya kepatuhan juga terus diperkuat dalam rangka meminimalkan potensi benturan kepentingan dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip GCG.

Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus menyempurnakan praktik tata kelola sejalan dengan perkembangan regulasi dan *best practices*. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pengelolaan Aspek Keberlanjutan di Perusahaan

Kami menyadari bahwa indikator kesuksesan Perusahaan kini tidak lagi hanya diukur dari angka pertumbuhan finansial, melainkan dari sejauh mana aktivitas bisnis kami mampu memberikan kontribusi positif bagi kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dalam lanskap industri telekomunikasi yang kami geluti, kontribusi kami terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam kemampuan Perseroan dalam mengelola dampak operasional serta sejauh mana kehadiran infrastruktur kami mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar titik-titik pembangunan.

As part of its GCG implementation, the Company has established an internal control system designed to provide reasonable assurance regarding operational efficiency and effectiveness, reliability of financial reporting, and compliance with legal and regulatory requirements. The system includes clear separation of duties, standard operating procedures, hierarchical approval mechanisms, and independent oversight functions. The Board of Directors periodically evaluates the effectiveness of the internal control system to ensure its alignment with the Company's evolving scale and complexity.

The Company also implements an integrated risk management system to identify, measure, monitor, and control risks that could potentially affect the achievement of business objectives. Managed risks include operational, safety and environmental, financial, and compliance risks associated with the construction of telecommunications infrastructure. Mitigation measures include strict operational procedures, enhanced human resource competencies, and ongoing monitoring and supervision.

The Board of Directors views that effective GCG, supported by robust internal controls and risk management, strengthens the Company's business resilience in navigating industry dynamics. The enforcement of a code of conduct and a compliance culture continues to be emphasized to minimize potential conflicts of interest and practices inconsistent with GCG principles.

Looking ahead, the Company remains committed to continuously enhancing governance practices in line with regulatory developments and best practices. This commitment forms part of the Company's effort to create sustainable long-term value for all stakeholders.

Sustainability Management at the Company

The Company recognizes that success is no longer measured solely by financial growth but also by the extent to which our business activities contribute positively to ecosystem preservation and community well-being. Within the telecommunications industry, the Company's contribution to sustainable development is reflected in how we manage operational impacts and the extent to which our infrastructure delivers tangible value to the environment and surrounding communities.



Pada aspek lingkungan, fokus utama Perseroan terletak pada pengelolaan dampak fisik dari pembangunan infrastruktur jaringan. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tahap konstruksi, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan menara dan penarikan kabel, dilakukan dengan standar mitigasi risiko yang ketat untuk menjaga stabilitas ekosistem lokal. Melalui optimalisasi penggunaan lahan dan manajemen limbah konstruksi yang bertanggung jawab, Perseroan berupaya meminimalkan jejak ekologis dari setiap proyek ekspansi yang dijalankan.

Dalam dimensi sosial, peran Perseroan menjadi sangat krusial sebagai penggerak inklusi digital. Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah bukan sekadar proyek teknis, melainkan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui terbukanya akses informasi dan peluang ekonomi baru. Kami mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar area operasional serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM), memastikan bahwa kehadiran Perseroan membawa harmoni dan dampak kesejahteraan yang merata.

Seluruh upaya tersebut dikonsolidasikan ke dalam sebuah Strategi Keberlanjutan yang menjadi landasan operasional Perusahaan. Strategi ini menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai acuan, Perseroan memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan tanggung jawab etis terhadap para pemangku kepentingan.

Melalui integrasi strategi yang komprehensif ini, Perseroan optimis dapat membangun fundamental bisnis yang lebih resilien dan relevan dengan tantangan masa depan. Kami percaya bahwa dengan memperkuat integritas dalam beroperasi dan memperluas dampak positif bagi sosial-lingkungan, Perseroan akan terus tumbuh menjadi mitra strategis yang tepercaya dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Analisis Prospek Usaha

Makroekonomi global 2026 diproyeksikan tumbuh moderat di kisaran 2,6%–3,3%, berdasarkan laporan yang dirilis oleh IMF. Kondisi perekonomian tahun 2026 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perlambatan produktivitas dan tantangan perdagangan global. Ketegangan perdagangan dan fragmentasi global juga turut menciptakan ketidakpastian tinggi. Inflasi masih menjadi perhatian, meski diprediksi melambat di negara maju. Harga komoditas sangat bergantung pada situasi geopolitik, dengan potensi guncangan pada energi dan emas akibat permintaan *safe haven*.

On the environmental front, the Company focuses on managing the physical impacts of network infrastructure development. We are committed to ensuring that each stage of construction, from land acquisition to tower installation and cable deployment, is executed with strict risk mitigation standards to safeguard local ecosystems. Through optimized land use and responsible construction waste management, the Company strives to minimize the ecological footprint of each expansion project.

In the social dimension, the Company plays a critical role in promoting digital inclusion. Infrastructure development is not merely a technical endeavor but an effort to improve community living standards by providing access to information and new economic opportunities. We prioritize the empowerment of local communities around our operational areas and uphold principles of fairness and human rights (HR), ensuring that the Company's presence fosters harmony and equitable socio-economic benefits.

All these efforts are consolidated into a Sustainability Strategy that underpins the Company's operations. This strategy integrates economic, environmental, and social aspects into a cohesive framework. By embedding sustainability principles into decision-making, the Company ensures that every business decision balances growth with ethical responsibility toward stakeholders.

Through this comprehensive integration, the Company is confident in building a more resilient business foundation aligned with future challenges. By strengthening operational integrity and expanding positive socio-environmental impact, the Company aims to remain a trusted strategic partner in accelerating Indonesia's digital transformation.

Business Outlook Analysis

The IMF projects global economic growth in 2026 to be moderate, ranging from 2.6% to 3.3%. Economic conditions next year are expected to be influenced by slowing productivity and global trade challenges. Trade tensions and global fragmentation are creating heightened uncertainty, while inflation remains a concern, though expected to ease in developed countries. Commodity prices are highly sensitive to geopolitical developments, with potential shocks in energy and gold due to safe-haven demand.



Di tengah ketidakpastian kondisi makroekonomi global tahun depan, stabilitas ekonomi nasional diprediksi akan tetap terjaga melalui rangkaian kebijakan yang responsif dan kolaboratif. Pemerintah dalam RAPBN 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4%, dengan inflasi 2,5%. Nilai tukar rupiah dipatok Rp16.500 per dolar AS, sedangkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di kisaran 6,9%. Selain itu, GNI per kapita diproyeksikan mencapai USD 5.520.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah tetap akan berfokus untuk mengembangkan program-program pembangunan nasional, terutama program-program yang berdampak kuat pada konsumsi rumah tangga, investasi, mendorong ekspor, dan modal tetap bruto berkelanjutan. Sementara pada aspek moneter, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah makroprudensial, termasuk pengelolaan suku bunga yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha dan memperluas investasi di sektor riil.

Dengan mempertimbangkan kondisi eksternal di tahun 2026, Direksi meyakini bahwa prospek industri telekomunikasi masih sangat menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan, seiring dengan meningkatnya permintaan layanan digital berikut konektivitas pendukung layanan digital. Pertumbuhan investasi infrastruktur di sektor telekomunikasi dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung transformasi digital nasional, terutama dalam rangka mengoptimalkan arus informasi dan mendukung produktivitas ekonomi digital.

Tren evolusi teknologi seperti adopsi 5G dan perluasan *fixed broadband* di pasar Asia menjadi faktor yang mendukung kebutuhan *backhaul network* dan kapasitas fiber yang lebih tinggi di Indonesia, di mana permintaan data dari segmen rumah tangga dan *enterprise* diproyeksikan akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Penguatan kebijakan nasional di bidang digital, termasuk program perluasan akses digital di daerah *underserved*, diperkirakan akan memperluas basis proyek infrastruktur dan membuka peluang kerja sama strategis dengan operator besar, penyedia *cloud*, dan layanan *data center*.

Permintaan akan solusi konektivitas yang efisien dan berkualitas tinggi diperkirakan akan terus meningkat. Hal tersebut menjadi prospek usaha bagi penyedia infrastruktur telekomunikasi seperti Perseroan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif melalui inovasi teknologi dan pemanfaatan model bisnis yang adaptif.

Amid global macroeconomic uncertainties, Indonesia's economic stability is expected to remain robust through responsive and collaborative policy measures. The 2026 state budget (RAPBN) targets 5.4% economic growth, with inflation at 2.5%. The rupiah is pegged at Rp16,500 per US\$, while the 10-year government bond (SBN) yield is projected at 6.9%. Additionally, GNI per capita is projected to reach US\$5,520.

To support national economic growth, the government will continue to prioritize programs with strong impact on household consumption, investment, exports, and sustainable gross fixed capital formation. On the monetary side, macroprudential measures, including interest rate management, will aim to encourage business growth and expand investment in the real sector.

Considering these external conditions, the Board of Directors believes that the telecommunications industry's prospects remain highly promising over the coming years, driven by increasing demand for digital services and supporting connectivity. Investment growth in telecommunications infrastructure is seen as a crucial pillar for national digital transformation, optimizing information flows and supporting digital economy productivity.

Technology trends such as 5G adoption and expanded fixed broadband in Asia support the need for higher-capacity backhaul networks and fiber infrastructure in Indonesia, where household and enterprise data demand is projected to increase.

National digital policies, including programs to expand access in underserved areas, are expected to broaden infrastructure project bases and create opportunities for strategic partnerships with major operators, cloud providers, and data center services.

The demand for efficient, high-quality connectivity solutions is projected to continue rising, representing a business opportunity for telecommunications infrastructure providers like the Company to maintain competitive advantage through technological innovation and adaptive business models.



Perubahan Komposisi Direksi

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi. Anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun buku berjumlah 2 (dua) orang, sebagai berikut:

Presiden Direktur : Paulus Ridwan Purawinata
Direktur : Alexandra Yota Dinarwanti

Penutup

Akhir kata, Direksi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, tak terkecuali mitra usaha, regulator, serta pelanggan/pengguna jasa, atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin sepanjang tahun 2025, sehingga Perseroan mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas setiap rekomendasi, saran, dan nasihat yang diberikan, sehingga pengelolaan Perseroan tetap berada dalam koridor visi, misi, dan tujuan jangka Panjang.

Ke depannya, Direksi berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kinerja operasional dan strategis demi menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya melalui tata kelola bisnis yang solid dan adaptif terhadap dinamika pasar.

Changes in the Board of Directors

There were no changes to the composition of the Board of Directors in 2025. The Board consisted of two members during the fiscal year:

President Director : Paulus Ridwan Purawinata
Director : Alexandra Yota Dinarwanti

Closing

In closing, the Board of Directors expresses appreciation to all stakeholders, including business partners, regulators, and customers, for their support and collaboration throughout 2025, enabling the Company to achieve stronger performance results. We also thank the Board of Commissioners for their recommendations, advice, and guidance, which ensured the Company's management remained aligned with its vision, mission, and long-term objectives.

Going forward, the Board of Directors is committed to optimizing operational and strategic performance to create sustainable value for shareholders and stakeholders alike, through solid corporate governance and adaptive business practices in response to dynamic market conditions.

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk

PAULUS RIDWAN PURAWINATA

Presiden Direktur
President Director

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

3





INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk
Tanggal Pendirian Date of Establishment	8 November 1995 November 8, 1995
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta No. 136, tanggal 8 November 1995 Deed No. 136, dated November 8, 1995
Kegiatan Usaha Line of Business	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang penunjang telekomunikasi. Providing telecommunications infrastructure, including investing or participating in other companies operating in the field of telecommunications support
Modal Dasar Authorized Capital	Rp150.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Up Capital	Rp127.727.600.000
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia Date of Share Listing on the Indonesia Stock Exchange	7 Juli 2010 July 7, 2010
Kode Saham Ticker Symbol	GOLD
Kontak Perusahaan Company Contact	Menara Imperium Lt. 18 Suite C Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav 1, Guntur, Setiabudi Jakarta Selatan – 12980 Telp/Phone: +62 21 83707370 Fax: +62 21 83707370 www.ptvti.co.id corporatesecretary@ptvti.co.id





RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang penunjang telekomunikasi yang berkedudukan di Indonesia.

Pada awalnya, Perseroan didirikan pada tanggal 8 November 1995 dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka berdasarkan Akta Notaris No. 136 Afdal Gazali, S.H., No. 136 tanggal 8 November 1995 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.467.HT.01.01 tanggal 29 Desember 1995. Pada waktu tersebut, Perseroan menjalankan aktivitas usaha di bidang ritel, yaitu pengoperasian *Department Store* dengan merek "Golden Truly". Selain bidang ritel, Perseroan juga mengembangkan usaha di bidang pengelolaan ruang usaha komersial untuk berbagai *tenant*, seperti toko buku, restoran, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 26 Maret 2002, Perseroan melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT Golden Retailindo. Kemudian, pada tanggal 7 Juli 2010, Perseroan resmi berstatus sebagai perusahaan publik setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK terkait dengan Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) dengan kode saham "GOLD" kepada masyarakat umum, dengan jumlah saham sebanyak 86.000.000 lembar. Harga penawaran yang ditawarkan berada di angka Rp350 per saham dan sudah efektif melantai di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2016, Perseroan melihat adanya peluang usaha di bidang telekomunikasi. Karenanya, Perseroan mengakuisisi PT Permata Karya Perdana dalam upaya mengganti kegiatan usaha utamanya menjadi penyedia infrastruktur telekomunikasi dan berganti nama menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 120 tanggal 26 Mei 2016 dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011039.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12851 tanggal 26 Juli 2016.

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (hereinafter referred to as the "Company") operates in the provision of telecommunications infrastructure services, including making investments or equity participations in other companies engaged in supporting telecommunications activities and domiciled in Indonesia.

The Company was initially established on November 8, 1995 under the name PT Bima Nuansa Cempaka, based on Notarial Deed No. 136 dated November 8, 1995 of Afdal Gazali, S.H., and obtained approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. C2-17.467.HT.01.01 dated December 29, 1995. At that time, the Company conducted business activities in the retail sector, specifically operating department stores under the "Golden Truly" brand. In addition to retail operations, the Company also developed business activities in the management of commercial spaces for various tenants, such as bookstores, restaurants, and others.

On March 26, 2002, the Company changed its name to PT Golden Retailindo. Subsequently, on July 7, 2010, the Company officially became a public company after obtaining an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) in connection with its Initial Public Offering (IPO) under the ticker symbol "GOLD", offering 86,000,000 shares to the public. The offering price was set at Rp350 per share, and the shares were officially listed on the Indonesia Stock Exchange.

In 2016, the Company identified business opportunities in the telecommunications sector. Accordingly, the Company acquired PT Permata Karya Perdana as part of its strategic initiative to shift its main business activities to telecommunications infrastructure services and subsequently changed its name to PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

The change of name was effected based on Notarial Deed No. 120 dated May 26, 2016 of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. AHU-0011039.AH.01.02. Year 2016 dated June 10, 2016, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 59, Supplement No. 12851 dated July 26, 2016.



Hingga akhir 2025, Perseroan telah memiliki jumlah tower sebanyak 485 menara yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total *tenancy* sebanyak 596. Dengan bisnis yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, baik dari sisi *tenant* maupun *tower*, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha Perseroan.

As of the end of 2025, the Company owns a total of 485 towers spread across Indonesia, with total *tenancy* of 596. With business performance continuing to grow year by year, both in terms of tenants and towers, this development is expected to have a positive impact on the Company's business growth.

Sejalan dengan visi dan misi, Perseroan memiliki objektif untuk menjadi perusahaan yang dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di masa depan, dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan nilai tambah untuk pemegang saham dan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh *stakeholders*.

In line with its vision and mission, the Company is committed to becoming an organization that continues to grow and develop sustainably in the future, while upholding good corporate governance practices, enhancing value for shareholders, and maintaining harmonious relationships with all stakeholders.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Information on the Name Change

8 November 1995
November 8, 1995

PT Bima Nuansa Cempaka



26 Maret 2002
March 26, 2002

PT Golden Retailindo



7 Juli 2010
July 7, 2010

PT Golden Retailindo Tbk



26 Mei 2016
May 26, 2016

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk





JEJAK LANGKAH

Milestones

1995

Pendirian pertama dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka, yang bergerak di bidang perdagangan umum. Kegiatan utama Perseroan antara lain perdagangan ritel dan pengelolaan ruang usaha komersial, meliputi pengoperasian *Department Store* serta ruang sewa komersial untuk berbagai *tenant* antara lain *food court*, supermarket, restoran, dan lainnya.

The Company was first established under the name PT Bima Nuansa Cempaka, which operated in the general trading sector. The Company's main activities included retail trade and management of commercial business space, including the operation of Department Stores and commercial rental space for various tenants, including food courts, supermarkets, restaurants and others.

2002

Perseroan berganti nama menjadi PT Golden Retailindo.
The Company changed its name to PT Golden Retailindo.

2010

Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/"IPO") di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham "GOLD".
The Company conducted Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange (BEI) with the stock code "GOLD".

2018

Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dari PT Amanda Cipta Persada menjadi PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, seiring dengan pengambilalihan 51% saham Perseroan pada tanggal 17 Desember 2018.

Change of Controlling Shareholder of the Company from PT Amanda Cipta Persada to PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, following the acquisition of 51% of the Company's shares on December 17, 2018.

2019

Penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sebanyak 962.676.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp221 per saham. Additional capital by granting Pre-emptive Rights (HMETD) to shareholders, through a limited public offering mechanism with HMETD of 962,676,000 shares with a nominal value of Rp100 per share with an offering price of Rp221 per share.

2016

- Perubahan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi.
- Akuisisi PT Permana Karya Perdana yang bergerak di bidang penyewaan ruang pada menara telekomunikasi.
- *Spin-off* bisnis perdagangan ritel dan pengelolaan ruang usaha komersial.
- Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 28,6 juta lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp535 per saham.
- The Company shifted its main business activity to telecommunications infrastructure provider.
- Acquisition of PT Permana Karya Perdana which operated in the space leasing sector on telecommunications towers.
- Spin-off of retail trade business and management of commercial business space.
- Additional capital without pre-emptive rights (HMETD) of 28.6 million shares with an exercise price of Rp535 per share.



2020

- Kerja sama Fasilitas Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia melalui Entitas Anak Perseroan, PT Permata Karya Perdana, senilai Rp200 miliar dalam jangka waktu 1 tahun.
- Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dari PT Amanda Cipta Persada menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, seiring dengan pengambilalihan 51% saham Perseroan pada tanggal 17 Desember 2018.
- Loan Facility Agreement with PT Bank UOB Indonesia through the Company's Subsidiary, PT Permata Karya Perdana, worth Rp200 billion for a period of 1 year.
- Change of the Controlling Shareholder of the Company from PT Amanda Cipta Persada to PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, following the acquisition of 51% of the Company's shares on December 17, 2018.

2021

Kerja sama Fasilitas Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia melalui Entitas Anak Perseroan, PT Permata Karya Perdana, senilai Rp100 miliar. Loan Facility Agreement with PT Bank UOB Indonesia through the Company's Subsidiary, PT Permata Karya Perdana, of Rp100 billion.

2022

Kerja sama Fasilitas Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia melalui Entitas Anak Perseroan, PT Permata Karya Perdana, senilai Rp100 miliar. Loan Facility Agreement with PT Bank UOB Indonesia through the Company's Subsidiary, PT Permata Karya Perdana, of Rp100 billion.

2024

Kerja sama Fasilitas Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia melalui Entitas Anak Perseroan, PT Permata Karya Perdana, senilai Rp100 miliar. Loan Facility Agreement with PT Bank UOB Indonesia through the Company's Subsidiary, PT Permata Karya Perdana, of Rp100 billion.

2025

Kerja sama Fasilitas Kredit dengan PT CIMB melalui entitas anak perseroan, PT Permata Karya Perdana, senilai Rp100 Miliar. Credit Facility Agreement with PT CIMB through the Company's subsidiary, PT Permata Karya Perdana, amounting to Rp100 Billion.



VISI, MISI, DAN NILAI PERUSAHAAN

Corporate Vision, Mission, and Values

VISI Vision

Menjadi penyedia telekomunikasi infrastruktur yang terkemuka di Indonesia.

To be the leading provider of telecommunications infrastructure in Indonesia.

MISI Mission

Memfasilitasi perkembangan industri telekomunikasi dengan menyediakan infrastruktur yang berkualitas.

To facilitate industrial development of telecommunications by providing quality infrastructure.

PENETAPAN VISI DAN MISI

DETERMINATION OF VISION AND MISSION

Visi dan Misi Perseroan senantiasa ditinjau oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Visi dan Misi Perseroan masih relevan dengan kondisi saat ini.

The Company's Vision and Mission are always reviewed by the Board of Commissioners and Board of Directors. Based on the results of this review, the Company's Vision and Mission are still relevant to current conditions.

NILAI DAN BUDAYA KERJA

Corporate Value and Culture



Profesionalisme
Professionalism



Integritas
Integrity



Kerja Sama
Team Work

NILAI KEBERLANJUTAN

Sustainability Value



Perseroan mengadopsi konsep *Triple Bottom Line* (*People, Planet, dan Profit*) sebagai salah satu pendekatan untuk menerapkan praktik keberlanjutan bisnis yang disatukan dalam tema Pengembangan Berkelanjutan (*Sustainable Improvement*). Dengan mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan tersebut, Perseroan terus berupaya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pelaksanaan bisnis dan operasional.

The Company adopts the Triple Bottom Line concept (*People, Planet and Profit*) as an approach to implementing business sustainability practices which are aligned under the theme of Sustainable Improvement. By adopting these sustainability values, the Company continues to strive to achieve sustainable growth and provide positive benefits for the community, the environment and the economy.



KEGIATAN USAHA

Line of Business

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 22 tanggal 3 Juni 2022, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0045363.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022.

Kegiatan usaha Perseroan menurut Pasal 3 Anggaran Dasar adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Kegiatan Usaha yang Telah Dilakukan

Hingga tahun 2025, Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama, yaitu:

1. Aktivitas Perusahaan *Holding* dan;
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga menawarkan jasa-jasa lain sebagai kegiatan usaha penunjang, meliputi:

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
2. Instalasi Telekomunikasi; dan
3. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel.

Line of Business According to the Articles of Association

The Company's Articles of Association have undergone several amendments, with the most recent change made through Deed No. 22 dated June 3, 2022, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, regarding the amendment to Article 3 concerning the company's objectives, purposes, and business activities. This amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as per Decree No. AHU-0045363.AH.01.02. of 2022, dated July 1, 2022.

According to Article 3 of the Articles of Association, the Company's business activities include providing telecommunications infrastructure services, as well as making investments or equity participation in other companies engaged in telecommunications-related supporting activities and services, particularly those supporting the telecommunications sector.

Line of Business Conducted

As of 2025, the Company primarily conducts the following business activities:

1. Holding Company activities; and
2. Other management consulting services.

In addition to its core business activities, the Company offers various supporting services, including:

1. Telecommunications central construction;
2. Telecommunications installation; and
3. Cable-based telecommunications activities.



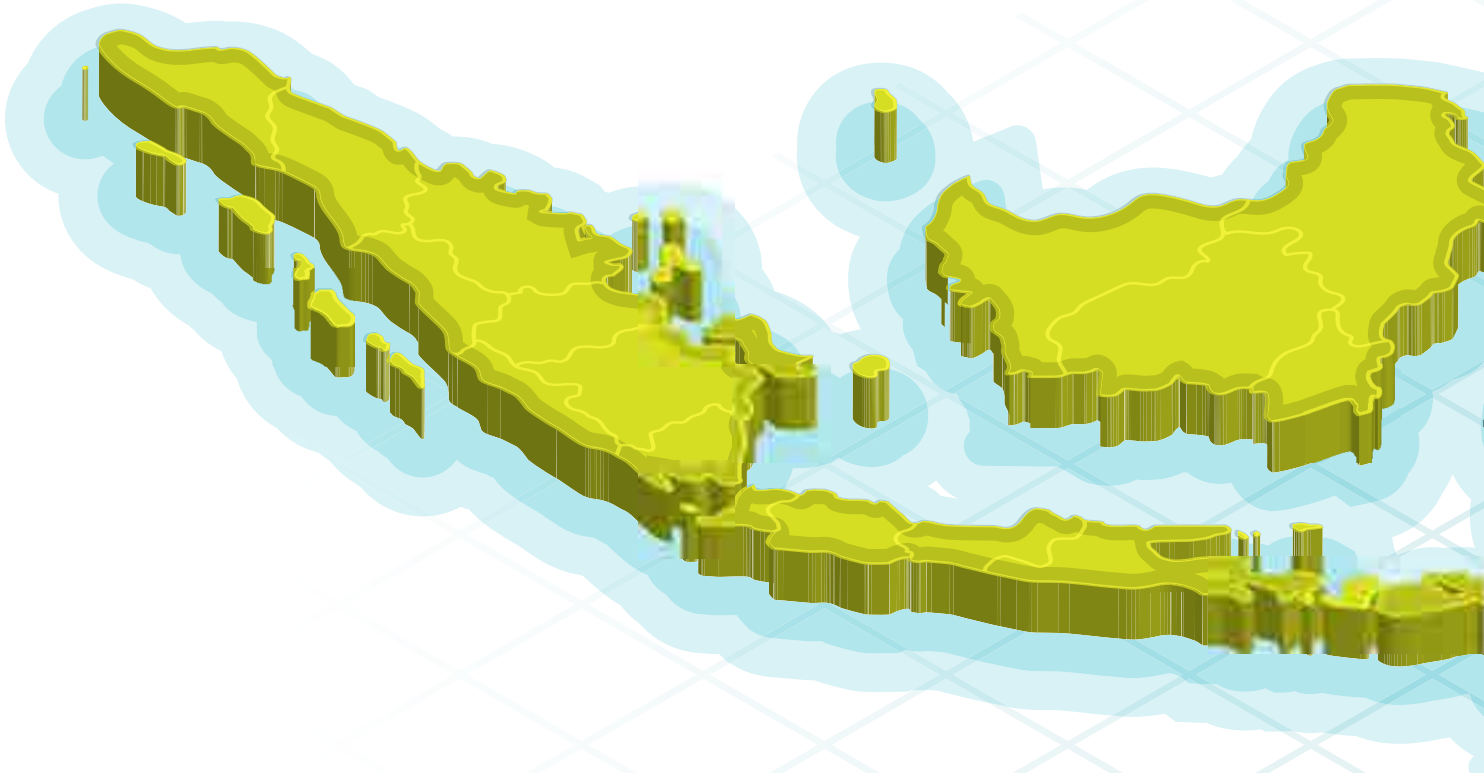


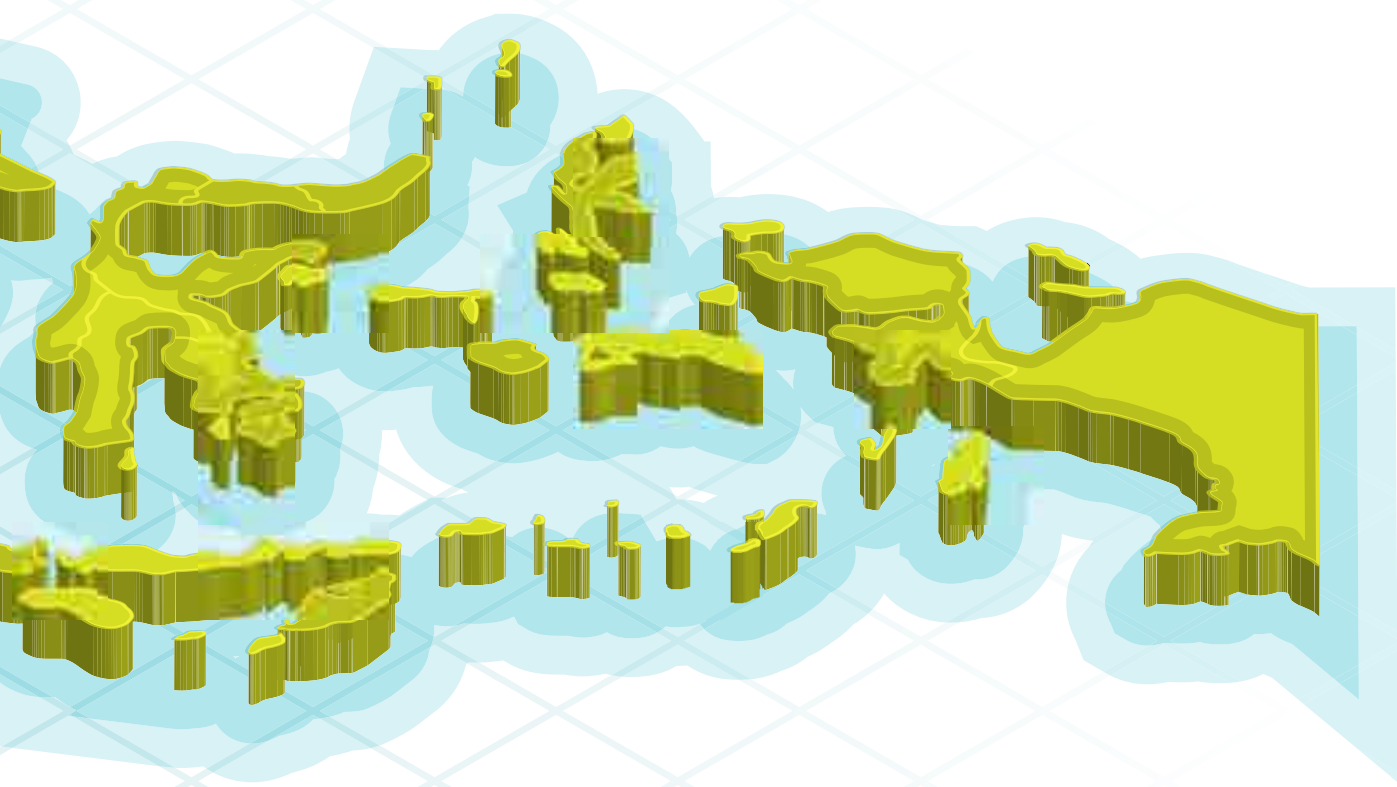
WILAYAH OPERASIONAL

Operational Area

Perseroan berkantor pusat di Menara Imperium, Lt. 18, Suite C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980. Hingga tahun 2025, Perseroan telah memiliki jumlah tower sebanyak 485 menara yang tersebar di 27 provinsi dan 207 kota di wilayah Indonesia.

The Company's headquarters is located at Menara Imperium, 18th Floor, Suite C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, South Jakarta 12980. As of 2025, the Company has a total of 485 towers spread across 27 provinces and 207 cities in Indonesia.

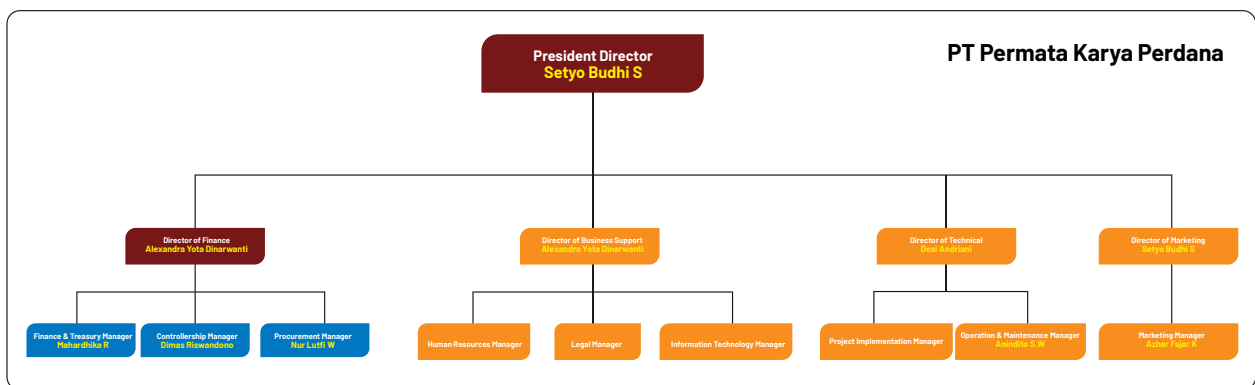
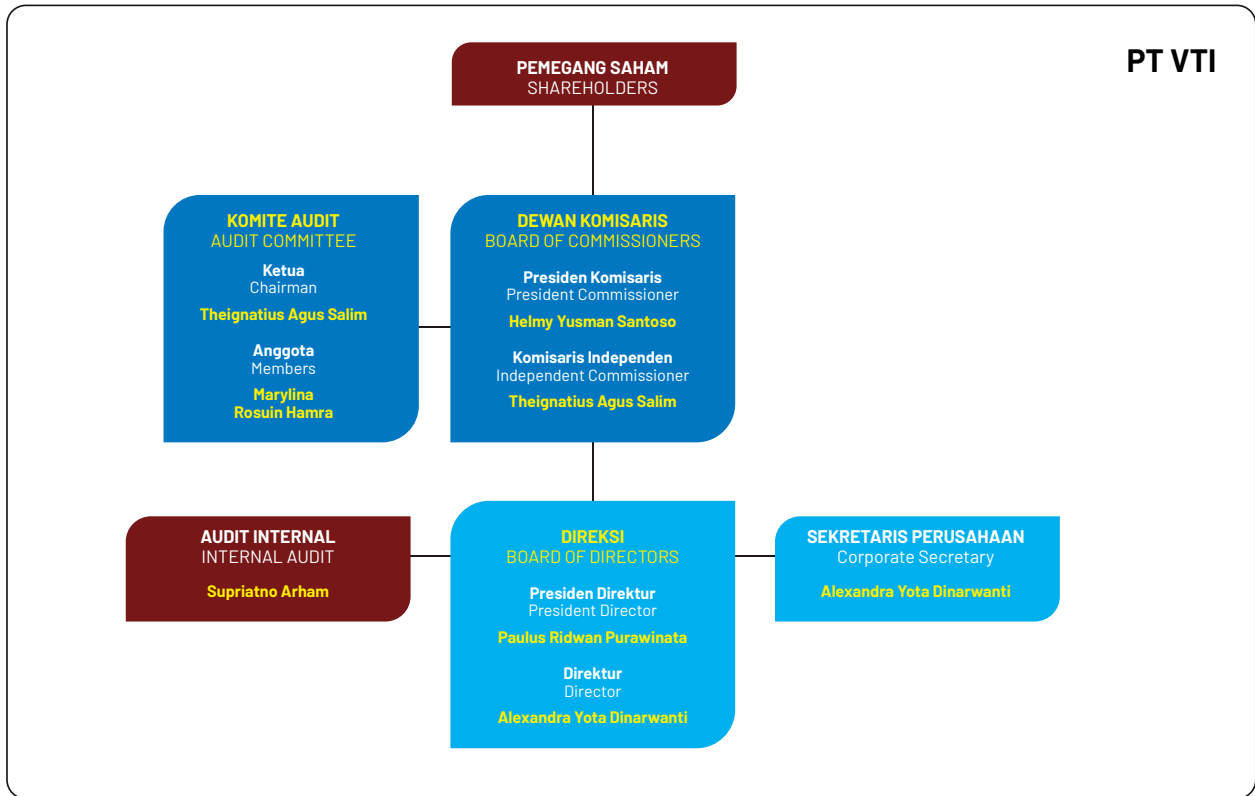






STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure





PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of the Board of Commissioners

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, dengan profil dari masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners. The profiles of each member of the Board of Commissioners are as follows:



HELMY YUSMAN SANTOSO

Presiden Komisaris
President Commissioner



Kewarganegaraan | Nationality
Indonesia | Indonesian



Usia (per 31 Desember 2025) | Age (as of December 31, 2025)
49 tahun | years old



Domisili | Domicile
Bogor



Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Keputusan RUPS No. 168 tanggal 30 April 2019, lalu diperpanjang berdasarkan Keputusan RUPS No. 128 tanggal 30 April 2024 | GMS Resolution No. 168 dated April 30, 2019, then extended based on the GMS Resolution No. 128 dated April 30, 2024

Riwayat Pendidikan
Educational Background



Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti (1998)
Bachelor's Degree in Economics, Universitas Trisakti (1998)

Pengalaman Kerja
Professional Experience



- Presiden Direktur PT Astra Auto Finance (2007 – 2008)
- *Head of Treasury & Finance Division* PT Astra Sedaya Finance (2002 – 2007)
- *Auditor Supervisor* KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) (1998 – 2002)
- President Director of PT Astra Auto Finance (2007 – 2008)
- Head of Treasury & Finance Division of PT Astra Sedaya Finance (2002 – 2007)
- Auditor Supervisor of KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) (1998 – 2002)

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions



Direktur & *Chief Financial Officer* PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (Maret 2010 – sekarang)
Director & Chief Financial Officer of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (March 2010 – present)

Hubungan Afiliasi
Affiliation



Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya. Namun, beliau terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
He is not affiliated with other members of the Board of Commissioners or Board of Directors. However, he is affiliated with the Majority/Controlling Shareholder.



THEIGNATIUS AGUS SALIM

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Kewarganegaraan | Nationality
Indonesia | Indonesian



Usia (per 31 Desember 2025) | Age (as of December 31, 2025)
67 tahun | years old



Domisili | Domicile
DKI Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Akta Notaris No. 191 tanggal 24 Mei 2018, lalu diangkat berdasarkan Keputusan RUPS No. 168 tanggal 30 April 2019, kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan RUPS No. 128 tanggal 30 April 2024 | Notarial Deed No. 191 dated May 24, 2018, then appointed based on GMS Resolution No. 168 dated April 30, 2019, then extended based on the GMS Resolution No. 128 dated April 30, 2024

Riwayat Pendidikan

Educational Background


Sarjana Ekonomi, Universitas Katolik Atmajaya (1985)
Bachelor's Degree in Economics, Universitas Katolik Atmajaya (1985)

Pengalaman Kerja

Professional Experience


- *Senior Accountant* di PT Centronix (1980 – 1981)
- *Manajer Penjualan dan Promosi* PT Bentoel Indonesia (1984 – 1991)
- *Field Operation Manager* PT Phillip Morris Indonesia (1992 – 1994)
- *General Manager* PT Persada Komindo (1994 – 1997)
- *Sales Director* PT Panamas/PT HM Sampoerna Tbk. (1997 – 2003)
- *Country Head* Sampoerna Taiwan Cooperation (2003 – 2004)
- *Komisaris* PT Global Bangun Sukses (2005 – 2009)
- *Anggota Komite Audit* PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (2009 – 2011)
- *Direktur Independen/Direktur Corporate Audit* PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (2011 – 2017)
- *Senior Accountant* of PT Centronix (1980 – 1981)
- *Sales and Promotion Manager* of PT Bentoel Indonesia (1984 – 1991)
- *Field Operations Manager* of PT Phillip Morris Indonesia (1992 – 1994)
- *General Manager* of PT Persada Komindo (1994 – 1997)
- *Sales Director* of PT Panamas/PT HM Sampoerna Tbk. (1997 – 2003)
- *Country Head* Sampoerna Taiwan Corporation (2003 – 2004)
- *Commissioner* of PT Global Bangun Sukses (2005 – 2009)
- *Member of the Audit Committee* of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (2009 – 2011)
- *Independent Director/Director of Corporate Audit* of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (2011 – 2017)

Rangkap Jabatan

Concurrent Positions


Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain
He does not hold concurrent positions in other companies

Hubungan Afiliasi

Affiliation


Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
He is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority/Controlling Shareholder.



PROFIL DIREKSI

Profile of the Board of Directors

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi, dengan profil dari masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Board of Directors. The following are the profiles of each member of the Board of Directors:



PAULUS RIDWAN PURAWINATA

Presiden Direktur
President Director



Kewarganegaraan | Nationality
Indonesia | Indonesian



Usia (per 31 Desember 2025) |
Age (as of December 31, 2025)
58 tahun | years old



Domisili | Domicile
DKI Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Keputusan RUPS No. 168 tanggal 30 April 2019, kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan RUPS No. 128 tanggal 30 April 2024 | GMS Resolution No. 168 dated April 30, 2019, then extended based to the GMS Resolution No. 128 dated April 30, 2024



Riwayat Pendidikan
Educational Background



Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jurusan Akuntansi (1986)
Faculty of Economics, Universitas Trisakti, Accounting Department (1986)

Pengalaman Kerja
Professional Experience



- Vice President PT Jardiner Fleming (1998 – 2001)
- Capital Market Division PT Semesta Indovert (2001 – 2011)
- Komisaris Utama PT Equator Securities (2011 – 2018)
- Komisaris Independen PT Multistrada Arah Sarana (2011 – 2019)
- Vice President of PT Jardiner Fleming (1998 – 2001)
- Capital Market Division of PT Semesta Indovert (2001 – 2011)
- President Commissioner of PT Equator Securities (2011 – 2018)
- Independent Commissioner of PT Multistrada Arah Sarana (2011 – 2019)

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions



- Komisaris Independen PT Semesta Indovert Sekuritas (2018 – sekarang)
- Komisaris Independen dan Komite Audit di PT Mahaka Radio Integra Tbk (2020 – April 2024)
- Komisaris Utama PT Mega Manunggal Property Tbk (Desember 2022 – Oktober 2025)
- Independent Commissioner of PT Semesta Indovert Sekuritas (2018 – present)
- Independent Commissioner and Audit Committee of PT Mahaka Radio Integra Tbk (2020 – April 2024)
- President Commissioner of PT Mega Manunggal Property Tbk (December 2022 – October 2025)

Hubungan Afiliasi
Affiliation



Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
He is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority/Controlling Shareholder.



ALEXANDRA YOTA DINARWANTI

Direktur
Director



Kewarganegaraan | Nationality
Indonesia | Indonesian



Usia (per 31 Desember 2025) |
Age (as of December 31, 2025)
52 tahun | years old



Domisili | Domicile
DKI Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Keputusan RUPS No. 168 tanggal 30 April 2019, kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan RUPS No. 128 tanggal 30 April 2024 | GMS Resolution No. 168 dated April 30, 2019, then extended based to the GMS Resolution No. 128 dated April 30, 2024



Riwayat Pendidikan

Educational Background



- Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti (1997)
- *Master Management* bidang *Strategic Management*, Prasetiya Mulia Business School (2014)
- Bachelor's Degree in Economics, Universitas Trisakti (1997)
- Master's Degree in Management in Strategic Management, Prasetiya Mulya Business School (2014)

Pengalaman Kerja

Professional Experience



- *Accounting & AP Supervisor* PT Ariawest International
- *Asisten Manajer* PT Gubah Bumi Selaras
- *Accounting & AP Supervisor* of PT Ariawest International
- *Assistant Manager* of PT Gubah Bumi Selaras

Rangkap Jabatan

Concurrent Positions



Finance and Treasury Division Head di Tower Bersama Group (2011 - sekarang)
Direktur PT Infrastruktur Digital Indonesia (2019 - sekarang)
Finance and Treasury Division Head of Tower Bersama Group (2011 - present)
Director of PT Infrastruktur Digital Indonesia (2019 - present)

Hubungan Afiliasi

Affiliation



Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
She is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority/Controlling Shareholder.



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Profile of Human Resources

Pada akhir tahun 2025, jumlah karyawan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3% dari tahun sebelumnya sebanyak 32 orang menjadi 33 orang. Peningkatan jumlah karyawan ini disebabkan oleh penambahan jumlah tenaga kerja.

As of the end of 2025, the number of the Company's employees increased by 3% compared to the previous year, from 32 employees to 33 employees. This increase in the number of employees was attributable to the increase in the number of employees.

Adapun komposisi karyawan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

The composition of the Company's employees is presented in the tables below:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	2025	2024	2023
Pria Male	22	19	19
Wanita Female	11	13	13
Jumlah Total	33	32	32

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia

Employee Composition by Age Group

Usia Age Group	2025	2024	2023
> 50 tahun years old	6	9	9
41 – 50 tahun years old	9	4	4
31 – 40 tahun years old	12	15	15
18 – 30 tahun years old	6	4	4
Jumlah Total	33	32	32

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition by Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2025	2024	2023
Pasca Sarjana Master's Degree	7	8	8
Sarjana Bachelor's Degree	24	22	22
Diploma	1	1	1
SMA atau sederajat High School	1	1	1
Jumlah Total	33	32	32



Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Employee Composition by Organizational Level

Level Organisasi Organizational Level	2025	2024	2023
Manajemen Atas Management	10	10	10
Manajer dan <i>Supervisor</i> Manager and Supervisor	10	9	5
Staf dan Non-staf Staff and Non-Staff	13	13	17
Jumlah Total	33	32	32

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2025	2024	2023
Karyawan Tetap Permanent Employees	31	28	29
Karyawan Kontrak Non-Permanent Employees	2	4	3
Jumlah Total	33	32	32

Komposisi Pemegang Saham

Per tanggal 31 Desember 2025, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Shareholder Composition

As of December 31, 2025, the composition of the Company's shareholders is as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares	Jumlah Modal Disetor (Rupiah) Total Authorized Capital (IDR)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
Pemegang Saham Lebih Dari 5% Shareholders with More Than 5% Share Ownership			
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	652.576.009	65.257.600.900	51,091%
PT Amanda Cipta Persada	280.101.700	28.010.170.000	21,930%
PT Mulia Sukses Mandiri	108.175.444	10.817.544.400	8,469%
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	102.659.927	10.265.992.700	8,037%
Sub-Total	1.143.513.080	114.351.308.000	89,527%
Pemegang Saham Kurang Dari 5% Shareholders with Less Than 5% Share Ownership			
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%) Public (each ownership of less than 5%)	133.762.920	13.376.292.000	10,473%
Sub-Total	133.762.920	13.376.292.000	10,473%
Jumlah Keseluruhan Total	1.277.276.000	127.727.600.000	100,000%



Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Kepemilikan Nasional dan Asing

Shareholder Composition based on Domestic and Foreign Ownership

Status Pemegang Saham Shareholder Status	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage	Nilai Nominal (Rp) [Nilai Nominal Saham Rp100/lembar saham] Nominal Value (IDR) [Ro100/Share]
Kepemilikan Nasional Domestic Ownership				
Individu Individual	1.468	14.182.884	1,11040%	1.418.288.400
Institusi Institution	7	1.195.402.091	93,58996%	119.540.209.100
Sub Total	1.475	1.209.584.975	94,70036%	120.958.497.500
Kepemilikan Asing Foreign Ownership				
Individu Individual	2	158.800	0,01243%	15.880.000
Institusi Institution	5	67.532.225	5,28721%	6.753.222.500
Sub Total	7	67.691.025	5,29964%	6.769.102.500
Jumlah Keseluruhan Total	1.482	1.277.276.000	100,00000%	127.727.600.000

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

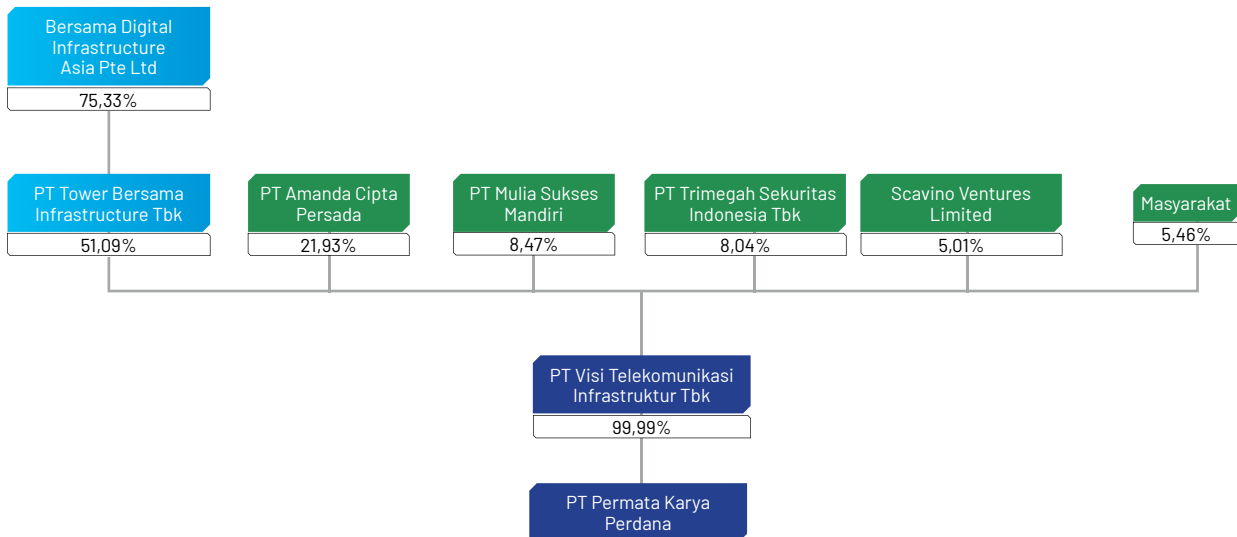
Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

Pemegang Saham dari Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jabatan Position	Jumlah Saham (lembar) Total Shares	Jumlah Modal Disetor (Rupiah) Total Authorized Capital	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Helmy Yusman Santoso	Presiden Komisaris President Commissioner	0	0	0,0000000%
Theignatius Agus Salim	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0,0000000%
Direksi Board of Directors				
Paulus Ridwan Purawinata	Presiden Direktur President Director	0	0	0,0000000%
Alexandra Yota Dinarwanti	Direktur Director	34.700	3.470.000	0,0027167%



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Company Group Structure



INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Information on Majority and/or Controlling Shareholder

Nama Name	: PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Alamat Address	: Gedung The Convergence Indonesia lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Persentase Kepemilikan Saham di Perseroan Ownership Percentage	: 652.576.009 lembar saham atau 51,09% 652.576.009 shares or 51,09%
Bidang Usaha Line of Business	: Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui anak perusahaan Provider of integrated telecommunications infrastructure services through subsidiaries
Total Aset per 31 Desember 2025 Total Assets as of December 31, 2025	: Rp46.247.268 juta Rp46,247,268 million
Status	: Beroperasi Operating

Berdasarkan struktur Grup Perseroan, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk memiliki komposisi saham terbesar di Perseroan, dengan jumlah saham sebesar 652.576.009 lembar saham atau 51,09% dari total keseluruhan saham Perseroan. Dengan demikian, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk merupakan Pemegang Saham Utama dan Pengendali serta Entitas Induk Perseroan.

Based on the Company's group structure, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk holds the largest share ownership in the Company, with a total of 652,576,009 shares, or 51.09% of the Company's total shares. Therefore, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk is the Majority and Controlling Shareholder, as well as the Parent Entity of the Company.



ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan hanya memiliki 1(satu) entitas anak, yaitu PT Permata Karya Perdana. Berikut ini adalah informasi mengenai entitas anak Perseroan:

As of December 31, 2025, the Company has only one (1) subsidiary, namely PT Permata Karya Perdana. The following is the information regarding the Company's subsidiary:

Nama Name	: PT Permata Karya Perdana
Alamat Address	: Menara Imperium Lt. 18 Suite C Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. 1, Guntur, Setiabudi Jakarta Selatan – 12980
Persentase Kepemilikan Saham Perseroan di Entitas Anak Share Ownership Percentage in Subsidiary	: 99,99%
Bidang Usaha Line of Business	: Penyewaan menara telekomunikasi Telecommunications tower leasing
Total Aset per 31 Desember 2025 Total Assets as of December 31, 2025	: Rp456,16 miliar Rp456.16 billion
Status	: Beroperasi Operating
Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	: 2013
Dewan Komisaris Board of Commissioners	: 1. Sani Imanudin Maksum 2. Glenardo Yopie
Direksi Board of Directors	: 1. Setyo Budhi S 2. Alexandra Yota Dinarwanti 3. Desi Andriani

Selain entitas anak, Perseroan tidak memiliki perusahaan asosiasi ataupun perusahaan ventura bersama.

In addition to its subsidiary, the Company does not have any associates or joint ventures.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Share Listing Chronology

Tanggal Date	Aksi Korporasi Corporate Action	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Nominal Nominal Value	Harga Penawaran Offering Price	Jumlah Saham Tercatat Setelah Aksi Korporasi Total Shares Listed After Corporate Action	Nama Bursa Saham Name of Stock Exchange
7 Juli 2010 July 7, 2010	Penawaran Umum Saham Perdana Initial Public Offering	86.000.000	Rp100	Rp350	286.000.000	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
23 Juni 2016 June 23, 2016	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Additional Capital Without Pre-emptive Rights (HMETD)	28.600.000	Rp535	Rp535	-	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
18 Juli 2019 July 18, 2016	Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Limited Public Offering (PUT) by issuing Pre-emptive Rights (HMETD)	962.676.000	Rp100	Rp221		Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange



KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

Hingga tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of December 31, 2025, the Company did not issue any other securities in any form. Therefore, there is no information available regarding the names of other securities, the year of issuance, the interest rate/return on other securities, and the maturity date of other securities; the offering value of other securities; the stock exchange where the other securities are listed; or the rating of the securities.

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Institutions and/or Professionals

Kantor Akuntan Publik | Public Accounting Firm

Nama Perusahaan Company Name	KAP Suharli, Sugiharto & Rekan
Alamat Address	UOB Plaza Lantai 34, Jalan M. H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta Pusat 10230
Jasa yang Diberikan Services	Audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 Audit of the Company's financial statements for the fiscal year 2025
Imbalan Fee	Rp115 juta Rp115 million
Surat Penunjukkan Appointment Letter	254/SSR-HO/VI-A25/RAF/IX-2025
Periode Penugasan Appointment Period	Tahunan Annual

Biro Administrasi Efek | Securities Administration Bureau

Nama Perusahaan Company Name	PT Datindo Entrycom
Alamat Address	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Gambir, Jakarta Pusat
Jasa yang Diberikan Services	Biro Administrasi Efek Securities Administration Bureau
Imbalan Fee	Rp40 juta Rp40 million
Surat Penunjukkan Appointment Letter	N/A
Periode Penugasan Appointment Period	Tahunan Annual



Kantor Jasa Penilai Publik | Public Appraisal Office

Nama Perusahaan Company Name	Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesomo, Pakpahan & Rekan
Alamat Address	Gedung Menara Sudirman lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta
Jasa yang Diberikan Services	Jasa Penilai Assessor
Imbalan Fee	Rp150 juta Rp150 million
Surat Penunjukkan Appointment Letter	EL-P/KJPP-MPR/2025/VIII/08/003
Periode Penugasan Appointment Period	Tahunan Annual

Notaris | Notary

Nama Perusahaan Company Name	Jose Dima Satria, SH., M.Kn.
Alamat Address	Jalan Madrasah Komplek Taman Gandaria Kav. 11A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12420
Jasa yang Diberikan Services	Notaris Notary
Surat Penunjukkan Appointment Letter	N/A
Periode Penugasan Appointment Period	Tahunan Annual

Jaminan Biaya Sewa Tahunan 2025 | Annual Lease Fee Security 2025

Nama Perusahaan Company Name	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange Building, Menara I Lt.5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5253 Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Services	Annual Lease
Imbalan Fee	Rp10 juta Rp10 million
Surat Penunjukkan Appointment Letter	N/A
Periode Penugasan Appointment Period	Januari – Desember 2025 January – December 2025

Jaminan Biaya Pencatatan Tahunan 2025 | Annual Listing Fee Security 2025

Nama Perusahaan Company Name	PT Bursa Efek Indonesia
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange Building, 1 st Tower 6 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Services	Annual Lease
Imbalan Fee	Rp211 juta Rp211 million
Surat Penunjukkan Appointment Letter	N/A
Periode Penugasan Appointment Period	Januari – Desember 2025 January – December 2025



INFORMASI SITUS WEB PERUSAHAAN

Company Website Information

Perseroan memiliki situs web resmi yang dapat digunakan oleh semua pihak, yaitu <http://www.ptvti.co.id> dalam upaya meningkatkan akses para pemegang saham publik serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi Perseroan yang aktual dan terkini sebagai wujud penerapan prinsip GCG. Seluruh informasi yang tersaji pada laman web ditampilkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Ke depannya, Perseroan akan terus berupaya mengoptimalkan penggunaan situs web Perseroan sebagai media yang paling efektif dan efisien untuk mempromosikan produk dan/atau layanan yang disediakan Perseroan, serta untuk mengomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan/berita/informasi penting lainnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk para investor.

Pemenuhan Informasi Pada Situs Web Perseroan

Informasi yang disajikan dalam situs web Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Berikut ini adalah pengungkapan pemenuhan informasi pada situs web Perseroan terhadap POJK No. 8/POJK.4/2015:

The Company maintains an official website accessible to the public at <http://www.ptvti.co.id> as part of its efforts to enhance access for public shareholders and other stakeholders to accurate and up-to-date Company information, in line with the implementation GCG principles. All information presented on the website is available in 2 (two) languages, namely Indonesian and English.

Going forward, the Company will continue to optimize the use of its website as the most effective and efficient medium to promote the products and/or services offered by the Company, as well as to communicate policies, news, and other material information to stakeholders, including investors.

Information Compliance on the Company's Website

The information presented on the Company's website complies with the provisions stipulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies. The following is a disclosure of the Company's compliance with the information requirements stipulated in POJK No. 8/POJK.04/2015.

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Remarks
Profil Perusahaan Company Profile	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website
Layanan Services	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website
Investor	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profiles of the Board of Directors and Board of Commissioners	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website
Corporate Social Responsibility (CSR)	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website
Kontak Perseroan Company Contact	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis





TINJAUAN MAKROEKONOMI

Macroeconomic Overview

Pada tahun 2025, perekonomian global menunjukkan tren pemulihan yang moderat dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berada pada kisaran 3,2%, didukung oleh stabilisasi inflasi di sejumlah negara maju, penyesuaian kebijakan moneter yang lebih terukur, serta pemulihan permintaan di sektor jasa dan konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, ketidakpastian global masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara berkembang.

Dari sisi kebijakan moneter, tren pengetatan suku bunga mulai melandai pada paruh kedua 2025 seiring inflasi global yang menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan belanja modal, termasuk pada sektor infrastruktur, namun tetap membuka ruang bagi investasi jangka menengah dan panjang yang berbasis kebutuhan struktural, seperti infrastruktur digital.

Dalam konteks ekonomi digital, laporan *International Telecommunication Union* (ITU) menunjukkan bahwa sekitar 75% populasi global telah terhubung ke internet pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan konektivitas global ini menjadi indikator berlanjutnya transformasi digital lintas sektor, yang secara tidak langsung mendorong kebutuhan terhadap infrastruktur jaringan dan konektivitas berkapasitas tinggi.

Di level domestik, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada pada kisaran 5,0%, didukung oleh konsumsi domestik, belanja pemerintah, serta pemulihan investasi. Stabilitas inflasi dan nilai tukar turut menjaga daya beli masyarakat serta keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Dari sisi digitalisasi, peningkatan aktivitas ekonomi berbasis teknologi terus berlanjut. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun 2025 mencapai 80,66%, dengan jumlah pengguna internet sekitar 229,4 juta jiwa. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan perluasan akses digital baik di wilayah perkotaan maupun non-perkotaan.

In 2025, the global economy demonstrated a trend of moderate recovery, with growth maintaining a relatively stable pace compared to the previous year. The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth at approximately 3.2%, supported by the stabilization of inflation across several advanced economies, more measured adjustments in monetary policy, and the recovery of demand in the services sector and household consumption. Nevertheless, global uncertainty persisted, driven by geopolitical developments, volatility in energy prices, and economic decelerations in several emerging markets.

In terms of monetary policy, the cycle of interest rate tightening began to ease in the second half of 2025, in line with a downward trend in global inflation. This environment led to increased prudence among business players in undertaking capital expenditures, including within the infrastructure sector. However, it continued to provide opportunities for medium- to long-term investments aligned with structural needs, such as digital infrastructure.

The International Telecommunication Union (ITU) noted that internet penetration reached approximately 75% of the global population in 2025, demonstrating sustained growth year-on-year. This development reflects the acceleration of digital transformation across sectors, thereby driving increased demand for robust, high-capacity network and connectivity infrastructure.

At the domestic level, Indonesia's economy in 2025 continued to record relatively stable growth. Statistics Indonesia (BPS) reported that Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) grew by approximately 5.0%, supported by domestic consumption, government spending, and a recovery in investment. Inflation and exchange rate stability further helped maintain purchasing power and support the sustainability of economic activities.

From a digitalization perspective, technology-based economic activities continued to expand. Data from the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) showed that internet penetration in Indonesia reached 80.66% in 2025, with approximately 229.4 million internet users. This figure increased compared to the previous year and reflects broader digital access across both urban and non-urban areas.



Pertumbuhan penetrasi internet tersebut berimplikasi langsung terhadap peningkatan kebutuhan layanan data, konektivitas jaringan, serta infrastruktur pendukung telekomunikasi. Kebutuhan tersebut mencakup perluasan jaringan *backbone*, pembangunan dan penguatan jaringan fiber optik, serta penyediaan infrastruktur fisik seperti tower telekomunikasi untuk mendukung trafik data yang terus meningkat.

The growth in internet penetration has had a direct impact on increasing demand for data services, network connectivity, and supporting telecommunications infrastructure. Such demand includes the expansion of backbone networks, the development and strengthening of fiber optic networks, as well as the provision of physical infrastructure such as telecommunications towers to support the continued growth in data traffic.

TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Telecommunications Industry Overview

Pada tahun 2025, industri telekomunikasi secara umum masih ditopang oleh pertumbuhan permintaan layanan data dan konektivitas digital. *International Telecommunication Union* (ITU) mencatat bahwa secara global, sekitar 33% dari total langganan *mobile broadband* telah menggunakan jaringan 5G, sementara cakupan populasi global jaringan 5G mencapai lebih dari 55%. Data ini mencerminkan percepatan adopsi teknologi jaringan generasi baru yang membutuhkan dukungan infrastruktur fisik yang memadai.

The telecommunications industry in 2025 continued to benefit from rising demand for data services and digital connectivity. Data from the International Telecommunication Union (ITU) showed that approximately 33% of global mobile broadband subscriptions were on 5G networks, with population coverage exceeding 55%. These conditions reflect ongoing adoption of next-generation technologies that require adequate infrastructure support.

Dalam konteks infrastruktur jaringan tetap (*fixed broadband*), data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan bahwa sekitar 47% koneksi *fixed broadband* di negara-negara anggota telah berbasis fiber optik pada tahun 2025. Meskipun Indonesia belum sepenuhnya mencapai proporsi tersebut, data ini menjadi indikator global atas meningkatnya kebutuhan jaringan fiber sebagai tulang punggung konektivitas berkecepatan tinggi.

In the context of fixed broadband infrastructure, data from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) indicated that approximately 47% of fixed broadband connections in member countries were fiber-based in 2025. Although Indonesia has not yet fully reached this proportion, the data serves as a global benchmark highlighting the increasing importance of fiber networks as the backbone of high-speed connectivity.

Di pasar domestik, peningkatan penetrasi internet dan konsumsi data mendorong kebutuhan perluasan jaringan telekomunikasi, termasuk pembangunan tower baru serta penguatan jaringan fiber optik. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak hanya berasal dari segmen konsumen, tetapi juga dari sektor korporasi, pusat data, layanan digital, serta pengembangan ekosistem ekonomi digital di berbagai wilayah.

Within the domestic market, sustained growth in internet adoption and data consumption has continued to drive the expansion of telecommunications infrastructure, including additional tower deployment and fiber optic network enhancement. This demand is supported by both consumer usage and increasing requirements from corporate customers, data centers, digital service platforms, and the evolving digital economy ecosystem across various regions.

Selain itu, laporan ITU juga menunjukkan tren penurunan relatif biaya layanan *broadband* secara global, yang meningkatkan aksesibilitas layanan telekomunikasi. Kondisi ini mendorong peningkatan volume penggunaan data, yang pada akhirnya meningkatkan beban trafik jaringan dan kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang andal dan berkapasitas besar.

Furthermore, ITU reports also indicated a relative decline in broadband service costs globally, which has enhanced the accessibility of telecommunications services. This trend has contributed to increased data usage volumes, which in turn have led to higher network traffic loads and greater demand for reliable, high-capacity network infrastructure.



TINJAUAN OPERASIONAL

Operational Overview

Perseroan menjalankan usaha utama di bidang pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi, dengan area pembangunan saat ini masih berada di wilayah Indonesia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan material, Perseroan melakukan pembelian material besi untuk menara dari *supplier* lokal. Perseroan juga melakukan aktivitas pendukung operasional konstruksi menara seperti transportasi, tenaga kerja, perizinan dan pembebasan lahan masyarakat, dan konstruksi *shelter*.

Perseroan membagi segmen operasinya berdasarkan wilayah/area yang menjadi posisi menara yang dikelola, yaitu wilayah Jawa dan Bali, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, dan wilayah Sulawesi dan Papua.

Jawa dan Bali

Pada tahun 2025, Perseroan telah membangun sebanyak 63 menara baru di wilayah Jawa dan Bali. Dengan demikian, total tower yang dikelola Perseroan di area Jawa dan Bali sampai dengan tahun 2025 sebanyak 303 menara.

Berikut ini merupakan performa keuangan dari Segmen Area Jawa dan Bali dalam 2 (dua) tahun terakhir:

The Company's principal operations involve the development of telecommunications tower infrastructure in Indonesia. Material requirements for tower construction are fulfilled through procurement from local steel suppliers. The Company also performs supporting operational activities, including transportation, labor, permitting, land acquisition and community clearance, and shelter construction.

The Company's operating segments are organized based on the geographical areas in which the managed towers are located, namely the Java and Bali region, the Sumatra region, the Kalimantan region, and the Sulawesi and Papua region.

Java and Bali

In 2025, the Company constructed a total of 63 new towers in the Java and Bali region. As a result, the total number of towers managed by the Company in the Java and Bali area as of 2025 amounted to 303 towers.

The following table presents the financial performance of the Java and Bali Area Segment over the last 2 (two) years:

(dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)
(in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan YoY 2024-2025 2024-2025 YoY Growth	
			Nilai Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Revenue	40.184.430	37.576.640	2.607.790	6,94%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	15.451.048	14.929.848	521.200	3,49%

Sumatera

Pada tahun 2025, Perseroan telah membangun sebanyak 3 menara baru di wilayah Sumatera. Dengan demikian, total tower yang dikelola Perseroan di area Sumatera sampai dengan tahun 2025 sebanyak 69 menara.

Berikut ini merupakan performa keuangan dari Segmen Area Sumatera dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Sumatra

In 2025, the Company constructed a total of 3 new towers in the Sumatra region. Accordingly, the total number of towers managed by the Company in the Sumatra area as of 2025 amounted to 69 towers.

The following table presents the financial performance of the Sumatra Area Segment over the last 2 (two) years:



(dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)
(in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan YoY 2024-2025 2024-2025 YoY Growth	
			Nilai Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Revenue	8.035.731	7.810.836	224.895	2,88%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	2.821.432	2.601.966	219.466	8,43%

Kalimantan

Pada tahun 2025, Perseroan tidak membangun menara baru di wilayah Kalimantan. Dengan demikian, total tower yang dikelola Perseroan di area Kalimantan sampai dengan tahun 2025 sebanyak 23 menara.

Berikut ini merupakan performa keuangan dari Segmen Area Kalimantan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Kalimantan

In 2025, the Company did not build any new towers in the Kalimantan region. As a result, the total number of towers managed by the Company in the Kalimantan area as of 2025 amounted to 23 towers.

The following table presents the financial performance of the Kalimantan Area Segment over the last 2 (two) years:

(dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)
(in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan YoY 2024-2025 2024-2025 YoY Growth	
			Nilai Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Revenue	2.260.980	1.227.402	1.033.578	84,21%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	781.500	815.104	(33.604)	(4,12%)

Sulawesi dan Papua

Pada tahun 2025, Perseroan tidak membangun menara baru di wilayah Sulawesi dan Papua. Dengan demikian, total tower yang dikelola Perseroan di area Sulawesi dan Papua sampai dengan tahun 2025 sebanyak 42 menara.

Berikut ini merupakan performa keuangan dari Segmen Area Sulawesi dan Papua dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Sulawesi and Papua

In 2025, the Company did not build any new towers in the Sulawesi and Papua region. Accordingly, the total number of towers managed by the Company in the Sulawesi and Papua area as of 2025 amounted to 42 towers.

The following table presents the financial performance of the Sulawesi and Papua Area Segment over the last 2 (two) years:

(dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)
(in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan YoY 2024-2025 2024-2025 YoY Growth	
			Nilai Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Revenue	5.005.683	5.426.780	(421.097)	(7,76%)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	1.617.991	1.637.489	(19.498)	(1,19%)



TINJAUAN KEUANGAN

Financial Overview

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan Laporan Tahunan Perseroan didasarkan pada informasi keuangan dalam Laporan Keuangan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk untuk periode pelaporan sampai dengan 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The analysis and discussion of the Company's financial performance presented in this Annual Report are based on the financial information contained in the Financial Statements of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk for the reporting period ended December 31, 2025, audited by the Public Accounting Firm Suharli, Sugiharto & Rekan. The presentation and disclosure of the Company's Financial Statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), comprising Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants' Financial Accounting Standards Board.

Laporan Posisi Keuangan

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan jumlah aset sebesar Rp473,54 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp44,21 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp429,33 miliar, dengan uraian sebagai berikut:

Statement of Financial Position

As of December 31, 2025, the Company recorded total assets of Rp473.54 billion, total liabilities of Rp44.21 billion, and total equity of Rp429.33 billion, with details as follows:

(dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan YoY 2024-2025 2024-2025 YoY Growth	
			Nilai Nominal	Persentase Percentage
Aset Lancar Current Assets	49.129.791	61.541.291	(12.411.500)	(20,17%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	424.409.391	375.854.537	48.554.854	12,92%
Jumlah Aset Total Assets	473.539.182	437.395.828	36.143.354	8,26%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	39.756.055	33.947.445	5.808.610	17,11%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	4.453.744	3.911.379	542.365	13,87%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	44.209.799	37.858.824	6.350.975	16,78%
Jumlah Ekuitas Total Equity	429.329.383	399.537.004	29.792.379	7,46%

Aset Lancar

Pada tahun 2025, aset lancar tercatat sebesar Rp49,13 miliar, mengalami penurunan sebesar 20,17% atau sebesar Rp12,41 miliar, dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp61,54 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas.

Current Assets

In 2025, current assets amounted to Rp49.13 billion, representing a decrease of 20.17% or Rp12.41 billion, compared to Rp61.54 billion in 2024. This decrease resulted from a decline in cash and cash equivalents.



Aset Tidak Lancar

Pada tahun 2025, aset tidak lancar tercatat sebesar Rp424,41 miliar, mengalami peningkatan sebesar 12,92% atau sebesar Rp48,55 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp375,85 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan aset tetap dan penambahan aset hak guna.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2025, liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp39,76 miliar, mengalami peningkatan sebesar 17,11% atau sebesar Rp5,81 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp33,95 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban masih harus dibayar, utang usaha ke pihak ketiga, utang lain-lain, dan utang pajak.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tahun 2025, liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp4,45 miliar mengalami peningkatan sebesar 13,87% atau sebesar Rp542,37 juta dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,91 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya cadangan imbalan pasca-kerja dan provisi jangka panjang.

Ekuitas

Pada tahun 2025, ekuitas tercatat sebesar Rp429,33 miliar, mengalami peningkatan sebesar 7,46% atau sebesar Rp29,80 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp399,54 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya saldo laba seiring dengan peningkatan laba bersih.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp55,50 miliar, laba kotor sebesar Rp34,83 miliar, laba usaha sebesar Rp22,84 miliar, dan laba bersih periode berjalan sebesar Rp19,04 miliar, dengan uraian sebagai berikut:

Non-Current Assets

In 2025, non-current assets were recorded at Rp424.41 billion, increasing by 12.92% or Rp48.55 billion from Rp375.85 billion in 2024. This increase was driven by the addition of fixed assets and right-of-use assets.

Current Liabilities

In 2025, current liabilities were recorded at Rp39.76 billion, representing an increase of 17.11% or Rp5.81 billion, compared to Rp33.95 billion in 2024. This increase was primarily attributable to an increase in accrued expenses, trade payables to third parties, other payables, and taxes payable.

Non-Current Liabilities

In 2025, non-current liabilities amounted to Rp4.45 billion increasing by 13.87% or Rp4.45 billion, from Rp3.91 billion in 2024. This increase was mainly due to an increase in post-employment benefit obligations and long-term provisions.

Equity

In 2025, total equity amounted to Rp429.33 billion, increasing 7.46% or Rp29.80 billion From Rp399.54 billion in 2024. This increase was primarily attributable to an increase in retained earnings in line with the increase in net profit.

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

For the year ended December 31, 2025, the Company recorded revenue of Rp55.50 billion, gross profit of Rp34.83 billion, operating profit of Rp34.83 billion, and net profit for the year of Rp19,04 billion, with details as follows:



(dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)
(in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan YoY 2024-2025 2024-2025 YoY Growth	
			Nilai Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Revenue	55.504.823	52.041.658	3.463.165	6,65%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	20.671.969	19.984.011	687.958	3,44%
Laba Kotor Gross Profit	34.832.854	32.057.647	2.775.207	8,66%
Beban Usaha Operating Expenses	11.993.308	10.758.247	1.235.061	11,48%
Laba Usaha Operating Income	22.839.546	21.299.400	1.540.146	7,23%
Penghasilan Lain-lain Other Income	1.915.957	291.880	1.624.077	556,42%
Laba (Rugi) sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Final Profit (Loss) before Income Tax Expenses and Final Tax	24.755.503	21.591.280	3.164.223	14,66%
Pajak Penghasilan Final Final Income Tax	4.987.095	4.144.035	843.060	20,34%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	725.474	582.973	142.501	24,44%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	19.042.934	16.864.272	2.178.662	12,92%
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income (Loss)	10.749.445	8.345.065	2.404.380	28,81%
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Profit (Loss)	29.792.379	25.209.337	4.583.042	18,18%

Pendapatan

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Pendapatan sebesar Rp55,50 miliar, meningkat 6,65% atau sekitar Rp3,46 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp52,04 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kinerja operasional.

Revenue

In 2025, the Company recorded revenue of Rp55.50 billion, an increase of 6.65% or approximately Rp3.46 billion compared to Rp52.04 billion in 2024. This increase was primarily attributable to the improvements in the operational performance.

Beban Pokok Pendapatan

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp20,67 miliar, meningkat 3,44% atau sekitar Rp687,96 juta dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp19,98 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya biaya penyusutan aset hak guna.

Cost of Revenue

In 2025, the Company recorded cost of revenue of Rp55.50 billion, an increase of 6.65% or approximately Rp687.96 million compared to Rp19.98 billion in 2024. This increase was primarily attributable to an increase in depreciation of right-of-use assets.

Laba Kotor

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Laba Kotor sebesar Rp34,83 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 8,66% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp32,06 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan beban pokok pendapatan.

Gross Profit

In 2025, the Company recorded gross profit of Rp34.83 billion, reflecting an increase of 8.66% compared to Rp32.06 billion in 2024. This increase was primarily driven by higher revenue growth compared to the increase in cost of revenue.



Beban Usaha

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Beban Usaha sebesar Rp11,99 miliar, meningkat 11,48% atau sekitar Rp1,24 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp10,76 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban manfaat karyawan.

Laba Usaha

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Laba Usaha sebesar Rp22,84 miliar, meningkat 7,23% atau sekitar Rp1,54 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp21,30 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban usaha.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan lain-lain sebesar Rp1,92 miliar, meningkat 556,42% atau sekitar Rp1,62 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp291,88 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya aset keuangan dan pendapatan lainnya- bersih.

Laba (Rugi) sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Laba sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan sebesar Rp24,76 miliar, meningkat 14,66% atau sekitar Rp3,16 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp21,59 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba operasi dan pendapatan lain-lain - bersih.

Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan sebesar Rp725,47 juta, meningkat 24,44% atau sekitar Rp142,50 juta dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp582,97 juta.

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Laba Neto Tahun Berjalan sebesar Rp19,04 miliar, meningkat 12,92% atau sekitar Rp2,18 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp16,86 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan.

Operating Expenses

In 2025, the Company recorded operating expenses of Rp11.99 billion, increasing by 11.48% or approximately Rp1.24 billion from Rp10.76 billion in 2024. This increase was primarily driven by an increase in employee benefit expenses.

Operating Income

In 2025, the Company recorded operating income of Rp22.84 billion, increasing by 7.23% or approximately Rp1.54 billion from Rp21.30 billion in 2024. This growth was primarily driven by higher gross profit growth compared to the increase in operating expenses.

Other Income (Expenses)

In 2025, the Company recorded other income of Rp1.92 billion, growing by 556.42% or approximately Rp1.62 billion compared to Rp291.88 million in 2024. This increase was driven by an increase in financial assets and other income - net.

Profit (Loss) Before Final Tax and Income Tax Expenses

In 2025, the Company recorded profit before final tax and income tax expenses of Rp24.76 billion, an increase of 14.66% or approximately Rp3.16 billion compared to Rp21.59 billion in 2024. This increase was driven by an increase in operating profit and other income - net.

Final Tax and Income Tax Expenses

In 2025, the Company recorded final tax and income tax expenses of Rp725.47 million, an increase of 24.44% or approximately Rp142.50 million compared to Rp582.97 million in 2024.

Net Profit (Loss) for the Year

In 2025, the Company's net profit for the year was recorded at Rp19.04 billion, increasing by 12.92% or approximately Rp2.18 billion compared to Rp16.86 billion in 2024. This increase was mainly driven by revenue growth



Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Total Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp10,75 miliar, meningkat 28,81% atau sekitar Rp2,40 miliar dibandingkan dengan Rugi Komprehensif tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp8,35 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya surplus revaluasi.

Laba (Rugi) Komprehensif

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan Laba Komprehensif sebesar Rp29,79 miliar, meningkat 18,18% atau sekitar Rp4,58 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp25,21 miliar. Peningkatan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan penghasilan komprehensif lain.

Laporan Arus Kas

Posisi kas dan bank Perseroan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp34,40 miliar, turun sebesar 29,40% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp48,73 miliar, dengan uraian sebagai berikut:

Total Other Comprehensive Income (Loss)

In 2025, the Company recorded total other comprehensive income of Rp10.75 billion, an increase of 28.81% or approximately Rp2.40 billion compared to other comprehensive loss of Rp8.35 billion in 2024. This increase was caused by a revaluation surplus.

Total Comprehensive Income (Loss)

In 2025, the Company recorded total comprehensive of Rp29.79 billion, representing an increase of 18.18% or approximately Rp4.58 billion compared to Rp25.21 billion in 2024. This increase occurred in line with an increase in other comprehensive income.

Statement of Cash Flows

The Company's cash and bank balances as of December 31, 2025 amounted to Rp34.40 billion, decreasing by 29.40% from Rp48.73 billion in 2024, with details as follows:

(dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)
(in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan YoY 2024-2025 2024-2025 YoY Growth	
			Nilai Nominal	Persentase Percentage
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flow from (for) Operating Activities	30.017.708	34.295.962	(4.278.254)	(12,47%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flow from (for) Investing Activities	(44.342.439)	(33.995.261)	(10.347.178)	30,44%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flow from (for) Financing Activities	-	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Net Bersih Kas dan Bank Increase (Decrease) in Cash and Banks	(14.324.731)	300.701	(14.625.432)	(4.863,78%)
Kas dan Bank Awal Tahun Cash and Banks at the Beginning of the Year	48.728.554	48.427.853	300.701	0,62%
Kas dan Bank Akhir Tahun Cash and Banks at the End of the Year	34.403.823	48.728.554	(14.324.731)	(29,40%)



Kas Bersih yang Diperoleh dari/ Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2025 mencapai Rp30,02 miliar, turun sebesar 12,47% dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2024 sebesar Rp34,30 miliar. Sumber utama dari arus kas masuk terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp52,23 miliar, sedangkan arus kas keluar terutama digunakan untuk pembayaran kas ke pemasok sebesar Rp8,24 miliar.

Kas Bersih yang Diperoleh dari/ Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2025 mencapai Rp44,34 miliar, turun sebesar 30,44% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 sebesar Rp34,00 miliar. Arus kas tersebut dialokasikan untuk membiayai penambahan aset tetap dan aset hak guna dengan nilai masing-masing sebesar Rp12,58 miliar dan Rp31,76 miliar.

Kas Bersih yang Diperoleh dari/ Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2025, Perseroan tidak memperoleh kas bersih dari aktivitas pendanaan maupun menggunakan kas bersih untuk aktivitas pendanaan. Kemampuan membayar utang Perseroan diukur dengan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities

Net cash provided by operating activities in 2025 was recorded at Rp30.02 billion, decreasing by 12.47% from net cash provided by operating activities of Rp34.30 billion in 2024. The primary sources of cash inflows were mainly derived from Cash receipts from customers amounting to Rp52.23 billion while cash outflows were primarily used for Cash payments to suppliers amounting to Rp8.24 billion

Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities

Net cash used in investing activities in 2025 amounted to Rp44.34 billion, decreasing by 30.44% compared to net cash used in investing activities of Rp34.00 billion in 2024. These cash flows were allocated to finance additions to fixed assets and right-of-use assets, with values of Rp12.58 billion and Rp31.76 billion, respectively.

Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities

In 2025, the Company did not obtain net cash from financing activities nor use net cash for financing activities. The Company's ability to meet its debt obligations is measured through liquidity ratios and solvency ratio.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Ability to Pay Debt

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas, rasio cepat, dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan bank dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Sedangkan rasio cepat dihitung dengan membagi aset perusahaan yang paling likuid seperti kas, setara kas, surat berharga, dan piutang dengan total kewajiban lancar.

Liquidity Ratio

Liquidity ratios reflect the Company's ability to settle its current liabilities. The liquidity ratios calculated by the Company include the cash ratio, quick ratio, and current ratio. The cash ratio is calculated by dividing cash and bank balances by total current liabilities. The current ratio is calculated by dividing total current assets by total current liabilities. Meanwhile, the quick ratio is calculated by dividing the Company's most liquid assets, such as cash, cash equivalents, marketable securities, and receivables, by total current liabilities.



Berikut ini merupakan rasio likuiditas dalam 2 (dua) tahun terakhir:

The following table presents the Company's liquidity ratios over the last 2 (two) years:

Uraian Description	2025	2024
Rasio Kas Cash Ratio	86,54%	143,54%
Rasio Cepat Quick Ratio	98,10%	158,31%
Rasio Lancar Current Ratio	123,58%	181,28%

Melalui tabel diatas terlihat bahwa likuiditas Perusahaan cukup terjaga dengan baik pada tahun 2025, meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi rasio kas, rasio cepat, dan rasio lancar pada tahun 2024.

Based on the table above, the Company's liquidity position in 2025 was relatively well maintained, although it was lower compared to the levels of the cash ratio, quick ratio, and current ratio recorded in 2024.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menganalisis ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan, mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus, dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan cash sweeping dan pooling of funds dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Liquidity risk management is conducted by analyzing the availability of cash flows and the funding structure in accordance with the Company's Internal Control Guidelines, continuously monitoring actual and projected cash flows, and monitoring the maturity profile of financial assets and liabilities. Management believes that the strategy of performing cash sweeping and pooling of funds from various bank accounts into a primary operational bank account ensures concentrated funding and better optimization of liquidity.

Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh utang jangka panjangnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah utang Perseroan dengan jumlah aset dan jumlah modal. Berikut ini merupakan rasio solvabilitas dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Solvency Ratio

Solvency serves as a measure of the Company's ability to meet its long-term obligations. Solvency is assessed by comparing the Company's total liabilities with its total assets and total equity. The following table presents the Company's solvency ratios over the last 2 (two) years:

Uraian Description	2025	2024
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Asset ratio	9,34%	8,66%
Rasio Utang terhadap Modal Debt to Capital Ratio	10,30%	9,48%

Perseroan memiliki tingkat solvabilitas yang baik, terlihat dari perolehan rasio utang terhadap aset Perseroan tahun 2025 sebesar 9,34%, lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar 8,66%, serta rasio utang terhadap modal tahun 2025 sebesar 10,30%, lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar 9,48%.

The Company has maintained a sound level of solvency, as reflected in the Company's debt-to-assets ratio of 9.34% in 2025, higher than 8.66% in 2024, as well as a debt-to-equity ratio of 10.30% in 2025, higher than 9.48% in 2024.



TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Receivables Collectibility Level

Perseroan menghitung tingkat kolektibilitas piutang melalui rasio perputaran piutang yang digunakan untuk mengukur beberapa lama penagihan piutang selama satu tahun dan rasio lama penagihan yang digunakan untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang usahanya (debitur) menjadi uang tunai. Rumus rasio perputaran piutang dengan membagi total penjualan kredit (neto) dengan rata-rata piutang selama tahun berjalan, sedangkan rasio lama penagihan dihitung dari pembagian 365 hari dengan rasio perputaran piutang.

Berikut ini merupakan tingkat kolektibilitas piutang dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Uraian Description	2025	2024
Rasio Perputaran Piutang Receivables Turnover Ratio	11,08x	9,60x
Rasio Lama Penagihan Collection Time Ratio	33 hari days	38 hari days

Berdasarkan tabel di atas, perolehan rasio perputaran piutang Perseroan tahun 2025 sebesar 11,08x, lebih rendah dari tahun 2024 sebesar 9,60x. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penagihan piutang tertagih yang dilakukan oleh Perseroan lebih efisien.

Sementara untuk rasio lama penagihan tahun 2025 rata-rata tercatat selama 33 hari, lebih cepat dari tahun 2024 selama 38 hari. Hal tersebut mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang pada rentang periode yang lebih cepat.

The Company measures the collectibility of its receivables through the receivables turnover ratio, which is used to assess the average collection period within a year, and the days sales outstanding (DSO) ratio, which measures the time required to convert trade receivables into cash. The receivables turnover ratio is calculated by dividing total net credit sales by the average receivables during the year, while the DSO is calculated by dividing 365 days by the receivables turnover ratio.

The following table presents the Company's receivables collectibility ratios over the last 2 (two) years:

Based on the table above, the Company's receivables turnover ratio in 2025 was recorded at 11.08x, lower than 9.60x in 2024. This condition indicates that the Company's receivables collection process was more efficient.

Meanwhile, the average days sales outstanding (DSO) in 2025 was recorded at 33 days, shorter than 38 days in 2024. This reflects the Company's ability to collect receivables over a faster collection period.



RASIO KEUANGAN LAINNYA

Other Financial Ratios

Selain menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, dan kolektibilitas piutang, analisis kinerja keuangan Perseroan juga dilakukan dengan melakukan kalkulasi rasio aktivitas dan rasio rentabilitas. Rasio aktivitas bertujuan untuk mengukur seberapa efektif kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, sedangkan rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba.

Berikut ini merupakan rasio aktivitas dan rasio rentabilitas dalam 2 (dua) tahun terakhir:

In addition to liquidity, solvency, and receivables collectibility ratios, the Company's financial performance analysis is also conducted through the calculation of activity ratios and profitability ratios. Activity ratios are intended to measure how effectively the Company utilizes its overall resources, while profitability ratios are used to assess the Company's ability to generate profits.

The following table presents the activity ratios and profitability ratios over the last 2 (two) years:

Uraian Description	2025	2024
Rasio Aktivitas Activity Ratio		
Perputaran Piutang Receivable Turnover	11,08x	9,60x
Periode Umur Piutang Receivable Age Period	32,94 hari days	38,03 hari days
Rasio Rentabilitas Profitability Ratio		
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	62,76%	61,60%
Margin EBITDA EBITDA Margin	70,80%	69,93%
BOPO/ <i>Operating Ratio</i>	21,61%	20,67%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	34,31%	32,41%
Tingkat Pengembalian Investasi Rate of Return on Investment	11,72%	11,90%
Tingkat Pengembalian Modal Rate of Return on Capital	4,44%	4,22%

STRUKTUR MODAL

Capital Structure

Struktur modal adalah perbandingan antara modal pinjaman atau utang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (ekuitas). Dalam 2 (dua) tahun terakhir, Perseroan tidak memiliki modal pinjaman, sehingga struktur modal Perseroan merupakan modal sendiri atau seluruh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Capital structure represents the proportion between borrowed capital or long-term liabilities and shareholders' equity. Over the last 2 (two) years, the Company has not utilized any interest-bearing long-term debt. Accordingly, the Company's capital structure consists entirely of equity, or total equity attributable to the owners of the parent entity.



Berikut adalah struktur modal Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

The following table presents the Company's capital structure over the last 2 (two) years:

(dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)
(in Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital	127.727.600	127.727.600
Tambahan Modal Disetor – Bersih Additional Paid-in Capital – Net	141.445.473	141.445.473
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	39.796.927	29.047.482
Saldo Laba: Balance		
Cadangan Wajib Reserves	5.933.800	5.833.800
Belum Ditetapkan Penggunaannya Unappropriated	114.423.926	95.481.169
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	429.327.726	399.535.524

Tujuan Perseroan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif.

The Company's goal in managing capital is to protect its ability and the ability of its subsidiaries to maintain business continuity, so that the Company can continue to provide returns to shareholders and benefits to other stakeholders, as well as to manage an optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively.

Dalam rangka mengelola struktur modal, Perseroan melakukan penyesuaian terhadap jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

In managing its capital structure, the Company adjusts the dividend amount, issues new shares, or increases/decreases the amount of debt.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitment for Capital Goods Investment

Selama tahun 2025, Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

Throughout 2025, the Company did not have any commitments for capital expenditures.



INVESTASI BARANG MODAL

Capital Goods Investment

Investasi barang modal (capital expenditure) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau untuk menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang.

Capital expenditure (CapEx) refers to the funds used by the company to purchase a fixed asset or to enhance the value of existing fixed assets, with the expectation that these investments will provide future benefits.

Selama tahun 2025, Perseroan melakukan investasi barang modal, dengan uraian sebagai berikut:

Throughout 2025, the Company made any capital investments, with the following details:

Jenis Investasi Type of Investment	Pembangunan menara telekomunikasi dan perolehan aset hak guna Telecommunication tower construction and acquisition of right-of-use assets
Nilai Investasi Investment Value	Rp44.342.439
Tujuan Investasi Investment Objective	Untuk menunjang kinerja operasional Perseroan. To support the Company's operational performance

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts After the Accountant's Report

Setelah tahun pelaporan keuangan 2025 berakhir, tidak terjadi hal-hal yang bersifat material yang mempengaruhi kinerja Perseroan di tahun depan, sehingga informasi dan fakta material setelah periode pelaporan tidak relevan untuk diungkapkan.

After the end of the 2025 financial reporting year, no material events occurred that would affect the Company's performance in the following year, therefore the information and material facts after the reporting period are not relevant to be disclosed.



PROSPEK USAHA

Business Outlook

Memasuki tahun 2026, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global dan nasional tetap berada pada jalur positif, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 5,1%. Stabilitas makroekonomi ini menjadi faktor pendukung bagi keberlanjutan investasi di sektor infrastruktur, termasuk telekomunikasi.

Dari sisi industri, tren peningkatan penetrasi internet dan konsumsi data diproyeksikan berlanjut seiring meningkatnya adopsi layanan digital, *cloud computing*, *Internet of Things* (IoT), serta pengembangan layanan berbasis data lainnya. Meskipun laju pertumbuhan dapat bersifat bertahap, kebutuhan terhadap jaringan *backbone* dan infrastruktur telekomunikasi berkapasitas tinggi diperkirakan tetap meningkat.

Benchmark global dari OECD dan ITU menunjukkan bahwa penguatan jaringan fiber optik dan perluasan infrastruktur pendukung jaringan seluler tetap menjadi agenda utama di banyak negara. Tren ini mencerminkan kebutuhan struktural jangka menengah dan panjang terhadap infrastruktur telekomunikasi, khususnya untuk mendukung kualitas layanan dan kapasitas jaringan.

Dalam beberapa tahun ke depan, peningkatan konektivitas nasional, pemerataan akses digital, serta kebutuhan layanan data yang semakin kompleks diperkirakan akan terus mendorong aktivitas pembangunan dan penguatan infrastruktur telekomunikasi. Kondisi tersebut menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika permintaan pada segmen pembangunan *tower* dan jaringan fiber optik.

Entering 2026, the International Monetary Fund (IMF) projects that both global and national economic growth will remain on a positive trajectory, with Indonesia's economic growth estimated to be around 5.1%. This macroeconomic stability is expected to serve as a supporting factor for the sustainability of investment in the infrastructure sector, including telecommunications.

From an industry perspective, the upward trend in internet penetration and data consumption is projected to continue, driven by increasing adoption of digital services, cloud computing, the Internet of Things (IoT), and the development of other data-driven services. Although growth may occur at a more gradual pace, demand for backbone networks and high-capacity telecommunications infrastructure is expected to continue to rise.

Global benchmarks from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the International Telecommunication Union (ITU) indicate that the strengthening of fiber optic networks and the expansion of supporting cellular network infrastructure remain key priorities in many countries. This trend reflects medium-to long-term structural demand for telecommunications infrastructure, particularly to support service quality and network capacity.

Over the coming years, improvements in national connectivity, broader digital access, and increasingly complex data service requirements are expected to continue driving the development and enhancement of telecommunications infrastructure. These conditions are key factors influencing demand dynamics in the tower construction and fiber optic network segments.



TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026

Achievement Targets for 2025 and Projections for 2026

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp55,50 miliar dan EBITDA sebesar Rp39,32 miliar. Realisasi tersebut sejalan dengan target Perseroan.

Seiring dengan operator telekomunikasi kami terus meningkatkan jangkauan jaringan mereka dan menambah kapasitas tambahan untuk mendukung permintaan yang terus meningkat pada jaringan mereka, Perseroan memiliki posisi yang baik dengan portofolio aset menara dan serat optik yang beragam secara geografis.

Perseroan mengharapkan untuk dapat menghasilkan pendapatan paling sedikit sebesar Rp100,01 miliar dan EBITDA paling sedikit sebesar Rp77,56 miliar pada tahun 2026. Target kami adalah menghasilkan laba bersih setidaknya sebesar Rp27,60 miliar pada tahun 2026.

In 2025, the Company recorded revenue of Rp55.50 billion and EBITDA of Rp39.32 billion. This performance was in line with the Company's targets.

As our telecommunication operators continue to expand their network coverage and increase capacity to support rising demand, the Company is well-positioned with a geographically diverse portfolio of tower and fiber optic assets.

Looking ahead to 2026, the Company anticipates generating a minimum revenue of Rp100.01 billion and a minimum EBITDA of Rp77.56 billion. We remain committed to achieving a net profit threshold of no less than Rp27.60 billion.

ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspect

Strategi Pemasaran

Dalam rangka mengoptimalkan keunggulan dan daya saing Perseroan, maka Manajemen Perseroan Menyusun strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kepada operator terhadap titik potensial yang sudah dilakukan analisis oleh Anak Perseroan, yaitu PT Permata Karya Perdana (PKP);
2. Mempersiapkan kandidat *site* pada area yang ditargetkan oleh operator; dan
3. Memberikan *special offering* pada setiap proyek yang ditawarkan oleh operator.

Pangsa Pasar

Pangsa Pasar dari PKP adalah seluruh operator selular di Indonesia.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dividend Policy

Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan aktivitas pembayaran dividen kepada para pemegang saham.

Marketing Strategy

To optimize the Company's strengths and competitiveness, the Management of the Company has developed the following marketing strategies:

1. Map operators to potential sites that have been analyzed by the Company's Subsidiary, PT Permata Karya Perdana (PKP);
2. Prepare site candidates in the areas targeted by the operators; and
3. Offer special deals for every project proposed by the operators.

Market Share

The market share of PKP includes all cellular operators in Indonesia.



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of Use of Public Offering Proceeds

Selama tahun 2025, Perseroan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada Bursa Efek Indonesia. Karenanya, informasi perihal Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tidak diungkapkan.

In 2025, the Company did not submit a Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering to the Indonesia Stock Exchange. Therefore, the information regarding the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering is not disclosed.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Material Information regarding Related Party Transactions

Dalam transaksi normal bisnis, Perseroan melakukan perdagangan dan transaksi keuangan dengan pihak hubungan istimewa. Perseroan mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak hubungan istimewa dalam bentuk piutang dan utang yang tercatat sebagai piutang lain-lain dan utang usaha dan utang lain-lain dalam laporan posisi keuangan.

In the ordinary course of business, the Company conducts trade and financial transactions with related parties. The Company has non-operating transactions with related parties in the form of receivables and payables recorded as other receivables, and trade payables and other payables in the statement of financial position.

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi keuangan yang dilakukan Perseroan dengan pihak berelasi.

In 2025, there were no financial transactions conducted by the Company with related parties.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Information related to Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Selama tahun 2025, Perseroan tidak melakukan transaksi material terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal. Dengan demikian, informasi material terkait hal-hal tersebut tidak relevan untuk diungkapkan.

During 2025, the Company did not enter into any material transactions related to investments, expansions, divestments, business combinations/mergers, acquisitions, or debt/capital restructuring. Accordingly, material information regarding such matters is not relevant for disclosure.



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN

Amendments to Laws and Regulations and Impact on the Company

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan dan pelaporan keuangan Perseroan.

During 2025, there were no changes in laws and regulations that had a significant impact on the Company's performance and the Company's financial reporting.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Changes to Accounting Policies

Standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen dan penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 117 (sebelumnya PSAK No. 74) tentang "Kontrak Asuransi".

The standards and interpretations of new financial accounting standards, as well as amendments and adjustments to financial accounting standards that have been issued and are effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2025, are as follows:

- PSAK No. 117 (formerly PSAK No. 74) on "Insurance Contracts".

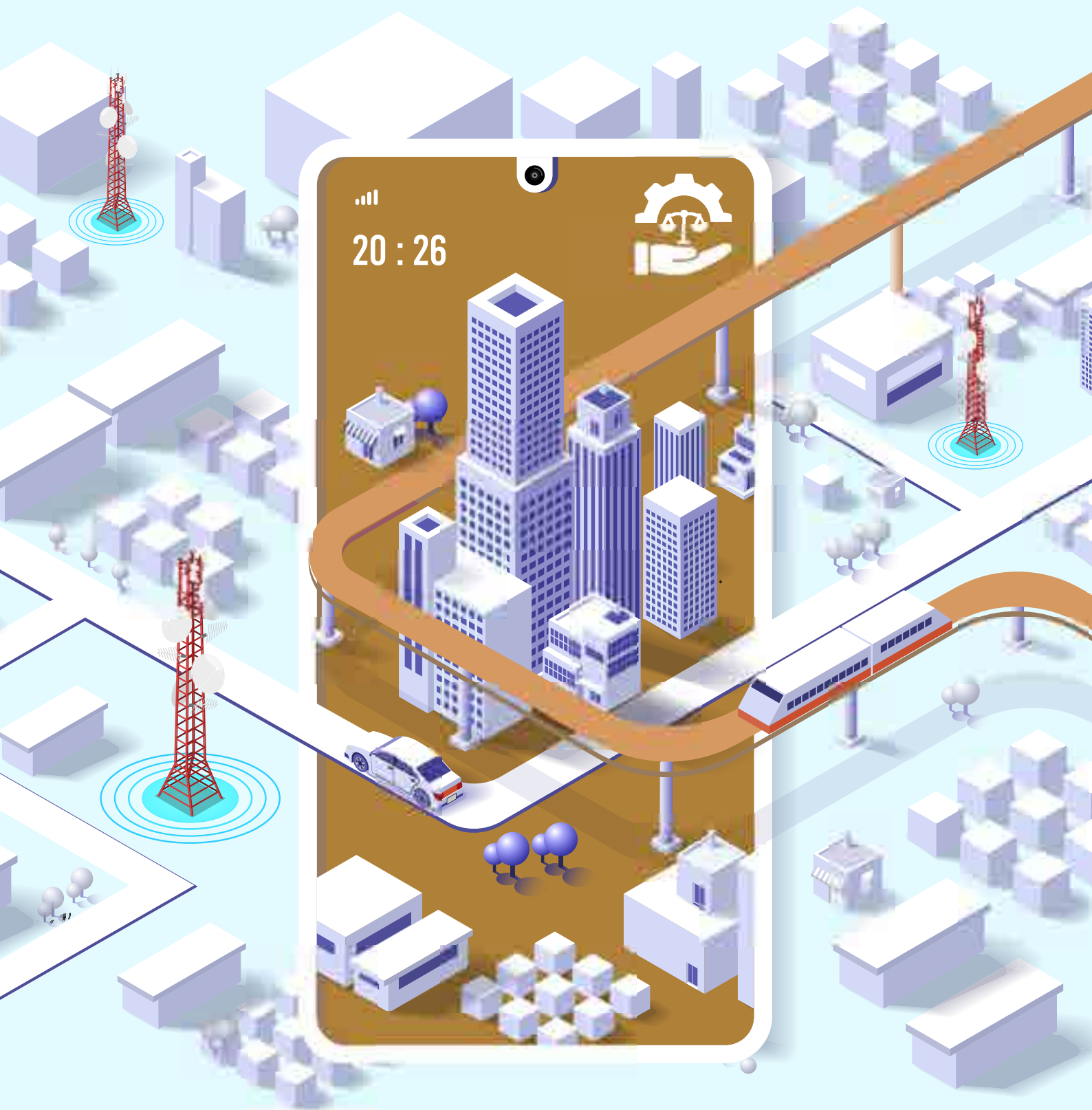


Visi Telekomunikasi
Infrastruktur

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

5





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan kerangka sistem, struktur, dan proses yang dirancang untuk mengarahkan serta mengendalikan pengelolaan entitas usaha secara bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan. Penerapan GCG bertujuan untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan Perseroan, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, melalui pemenuhan hak atas informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, serta pengungkapan yang andal atas kinerja, kepemilikan, dan pengambilan keputusan strategis Perseroan. Dalam konteks tersebut, GCG menjadi fondasi penting bagi terciptanya pengelolaan usaha yang akuntabel dan berintegritas.

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan kebijakan, sistem, dan praktik tata kelola yang senantiasa diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Perseroan, GCG bukan sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan elemen fundamental dalam pengelolaan bisnis yang berfungsi untuk melindungi kepentingan Perusahaan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan GCG di Perseroan secara berkelanjutan dalam rangka menjaga kepercayaan pemegang saham sekaligus menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tata kelola, Perseroan berpedoman pada lima prinsip GCG sebagaimana dirumuskan oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dengan uraian sebagai berikut:

Good Corporate Governance (GCG) is a framework of systems, structures, and processes established to guide and oversee the management of a business entity in a responsible, transparent, and sustainable manner. The implementation of GCG seeks to ensure a balanced alignment of interests among the Company, its shareholders, and other stakeholders by providing accurate, relevant, and timely information, as well as reliable disclosure regarding the Company's performance, ownership, and strategic decision-making. In this regard, GCG serves as a critical foundation for accountable and integrity-driven business management.

As a publicly listed company, the Company is committed to consistently implementing GCG in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. This commitment is manifested through the continual strengthening of policies, systems, and governance practices, ensuring alignment with prevailing laws and regulations.

For the Company, GCG is not merely a matter of regulatory compliance but a fundamental component of business management that safeguards the interests of the Company, its shareholders, and all stakeholders. The Company is dedicated to the ongoing enhancement of GCG implementation to maintain shareholder trust while generating sustainable long-term value.

In executing its governance responsibilities, the Company adheres to the five principles of GCG as established by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), which are detailed as follows:



Prinsip Principle	Deskripsi Description	Implementasi Implementation
<p>Transparansi Transparency</p>	<p>Memastikan bahwa pemangku kepentingan menaruh kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dan proses bisnis perusahaan.</p> <p>Ensure that stakeholders place trust in the company's decision-making and business processes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan menyajikan informasi-informasi umum yang bersifat material secara jelas dan terbuka melalui situs web resmi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk, yaitu: http://www.ptvti.co.id • Perseroan menyampaikan laporan keterbukaan informasi secara tepat waktu kepada regulator dan dipublikasikan pada web Bursa Efek Indonesia (BEI): https://www.idx.co.id/ dengan mengakses ticker code: "GOLD". • Perseroan mengungkapkan informasi penting terkait kinerja Perseroan, penerbitan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Berkala, siaran pers, dan Penyampaian Keterbukaan Informasi di media massa, maupun dalam penyelenggaraan paparan publik. • The Company presents material public information clearly and openly through the official website of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk, at http://www.ptvti.co.id • The Company submits timely disclosure reports to regulators and publishes them on the Indonesia Stock Exchange (IDX) website https://www.idx.co.id/ by accessing the ticker code "GOLD". • The Company discloses important information related to its performance, the issuance of the Annual Report, Periodic Financial Statements, press releases, and Information Disclosure in the media, as well as during public expose events.
<p>Akuntabilitas Accountability</p>	<p>Menetapkan kejelasan struktur, sistem, dan pertanggungjawaban antar-organ Perseroan secara jelas sehingga pengelolaan bisnis dapat berjalan efektif dan efisien demi tercapainya kepentingan Perseroan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p> <p>Establish clear structure, systems, and accountability between the Company's organs, so that business management can run effectively and efficiently in order to achieve the interests of the Company, while still considering the interests of Shareholders and other Stakeholders.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kejelasan pada batasan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan dan setiap karyawan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan aktivitas kerja. • Menetapkan kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang terukur dengan indikator-indikator yang jelas. • Menetapkan tolok ukur penilaian kinerja untuk semua divisi berdasarkan ukuran yang disepakati. • Menjaga komitmen Perseroan terhadap nilai-nilai budaya Perseroan. • Establish clarity on the boundaries of duties and responsibilities of each organ of the Company and every employee to enhance the effectiveness and efficiency of work activities. • Set clear and measurable performance evaluation criteria for the Board of Commissioners and the Board of Directors with well-defined indicators. • Establish performance assessment benchmarks for all divisions based on mutually agreed-upon criteria. • Maintain the Company's commitment to its corporate values and culture.



Prinsip Principle	Deskripsi Description	Implementasi Implementation
<p>Pertanggungjawaban Responsibility</p>	<p>Memastikan terlaksananya kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait prinsip ini, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan peduli dengan aspek masyarakat, lingkungan, dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya.</p> <p>Ensure that business activities are carried out in compliance with applicable laws and regulations. In line with this principle, the Company is committed to conducting its business responsibly and with consideration for social, environmental, and all other Stakeholders' aspects.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun budaya kesadaran karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. • Mengelola dampak operasi yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perseroan. • Pemenuhan kewajiban terhadap regulator, salah satunya dengan memastikan ketaatan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. • Menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>/"CSR"). • Establish a culture of employee awareness regarding occupational health and safety. • Manage the environmental and social impacts of the Company's operations in the surrounding areas. • Fulfill obligations to regulators, including ensuring timely tax payments and reporting. • Conduct Corporate Social Responsibility (CSR) activities.
<p>Independensi Independency</p>	<p>Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan atau pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p>The management of the Company is carried out professionally, without any conflict of interest or influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and healthy corporate principles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedepankan sikap saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing organ Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan. • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa berupaya menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. • Prioritize mutual respect for the rights, obligations, duties, authorities, and responsibilities of each organ of the Company in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. • Shareholders and the Board of Commissioners do not intervene in the management of the Company. • The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees consistently strive to avoid conflicts of interest in the decision-making process.



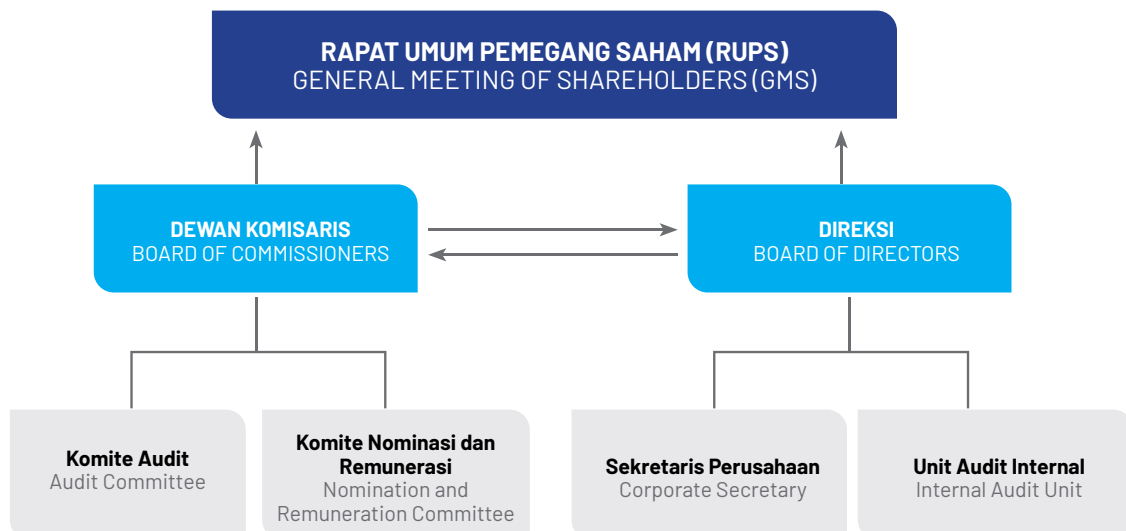
Prinsip Principle	Deskripsi Description	Implementasi Implementation
Kewajaran Fairness	<p>Menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ensure fair and equal treatment in fulfilling the rights of Stakeholders arising from agreements and applicable laws and regulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan hak yang sama dan setara kepada semua pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menghadirkan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi inklusivitas dengan membuka kesempatan bekerja yang sama kepada siapapun untuk bergabung di Perseroan dalam proses penerimaan karyawan. Mendukung pengembangan karier karyawan tanpa membedakan suku, agama, <i>gender</i>, dan kondisi fisik. <ul style="list-style-type: none"> Provide equal and fair rights to all shareholders to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with applicable regulations. Create a work environment that upholds inclusivity by offering equal employment opportunities to anyone who wishes to join the Company during the recruitment process. Support the career development of employees without discrimination based on ethnicity, religion, gender, or physical condition.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Structure

Struktur GCG Perseroan terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Selain itu, terdapat pula organ-organ penunjang seperti Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal yang berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Seluruh organ tersebut saling bekerja sama dalam memastikan penerapan praktik-praktik GCG.

The Company's GCG structure consists of three main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. In addition, there are supporting bodies, including the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee, which operate under the supervision of the Board of Commissioners, as well as the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit, which report directly to the President Director under the Board of Directors. All of these organs work collaboratively to ensure the effective implementation of GCG practices.





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Perseroan yang memegang kewenangan strategis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak dapat dilimpahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Melalui RUPS, pemegang saham menjalankan haknya untuk memperoleh pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan sekaligus memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan penting yang memengaruhi arah dan keberlanjutan usaha Perseroan.

RUPS juga menjadi forum formal bagi pemegang saham untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. Melalui penyelenggaraan RUPS yang transparan dan tertib, Perseroan memastikan terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan ada dua jenis, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Penyelenggaraan RUPS pada Tahun 2025

Selama tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan. Tidak terdapat RUPSLB yang diselenggarakan Perseroan pada tahun buku.

RUPS Tahunan (RUPST)

Perseroan menyelenggarakan RUPST Tahun Buku 2024 pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, bertempat di Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan. RUPST tersebut diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) dengan mengakses fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan yang diselenggarakan oleh KSEI.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest governing body within the Company's corporate governance structure, holding strategic authority as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. This authority cannot be delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners. Through the GMS, shareholders exercise their rights to obtain accountability for the Company's management and to approve key decisions that influence the Company's direction and business sustainability.

The GMS also serves as a formal forum for shareholders to directly participate in the Company's strategic decision-making process, in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law and the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of GMS for Public Companies. By conducting GMS in a transparent and orderly manner, the Company ensures the fulfillment of shareholders' rights while consistently upholding the principles of good corporate governance.

The Company organizes two types of GMS, namely the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which must be held no later than six (6) months after the end of the fiscal year, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), which may be convened as needed.

GMS Implementation in 2025

Throughout 2025, the Company held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). No Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) was convened during the fiscal year.

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

The Company held the AGMS for the Fiscal Year 2024 on Thursday, June 5, 2025, at Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, South Jakarta. The AGMS was conducted electronically (e-AGMS) through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI.



Rencana Penyelenggaraan RUPST

Sebelum menyelenggarakan RUPST, Perseroan telah melakukan beberapa tahapan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPST kepada para pemegang saham dilakukan pada tanggal 29 April 2025, melalui media situs web BEI, situs web Perseroan, dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemanggilan kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPST dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025 melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham dalam RUPST

RUPST Tahun Buku 2024 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sejumlah 1.035.344.724 (satu miliar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81,05% (delapan puluh satu koma nol lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kuorum tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020).

AGMS Planning and Preparation

Prior to holding the AGMS, the Company completed several preparatory stages in accordance with Article 10 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies. The details are as follows:

1. The announcement of the AGMS to shareholders was made on April 29, 2025 via the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, the Company's website, and the eASY.KSEI application.
2. The formal notice to shareholders to attend the AGMS was issued on May 14, 2025 through the same media channels.

Quorum of Shareholder Attendance at the AGMS

The AGMS for the Fiscal Year 2024 was attended by shareholders and/or their proxies, either through eASY.KSEI or physically, representing a total of 1,035,344,724 (one billion thirty-five million three hundred and forty-four thousand seven hundred and twenty-four) shares with valid voting rights, equivalent to 81.05% (eighty-one point zero five percent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company. This quorum complies with the requirements stipulated in Article 41 paragraph 1(a) of FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020).

Daftar Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir dalam RUPST

Board of Commissioners and Board of Directors Present at the AGMS

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Bapak Helmy Yusman Santoso | : Presiden Komisaris President Commissioner |
| 2. Bapak Theignatius Agus Salim | : Komisaris Independen Independent Commissioner |
| 3. Bapak Paulus Ridwan Purawinata | : Presiden Direktur President Director |
| 4. Ibu Alexandra Yota Dinarwanti | : Direktur Director |

Pelibatan Pihak Eksternal dalam RUPST

Terdapat peserta dari pihak eksternal independen yang menghadiri RUPST, yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. selaku pembuat Berita Acara atas RUPST Tahun Buku 2024 dalam Akta Nomor 28 tanggal 5 Juni 2025.

External Parties at the GMS

Independent external parties attended the AGMS, including PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., who prepared the Minutes of the AGMS for the Fiscal Year 2024 under Deed Number 28 dated June 5, 2025.



Kesempatan Tanya Jawab dalam RUPST

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RUPST dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur *chat* "Electronic Opinions".

Terdapat pertanyaan yang diajukan pada mata agenda kedua dalam RUPST Tahun Buku 2024. Pertanyaan tersebut telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Keputusan RUPST

Berikut ini adalah hasil Keputusan RUPST Tahun Buku 2024:

Question and Answer Session at the GMS

Shareholders and/or their proxies attending electronically via the eASY.KSEI application were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to the agenda items of the AGMS.

For shareholders and/or their proxies attending the AGMS physically, they were invited to raise their hands and submit question forms, while for those attending electronically, they could write their questions in the "Electronic Opinions" chat feature.

During the AGMS for the Fiscal Year 2024, questions were raised on the second agenda item. These questions were duly addressed in accordance with standard procedures.

Decision-Making Mechanism at the AGMS

Decisions at the AGMS are made through deliberation to reach a consensus. If consensus cannot be achieved, decisions are made by voting.

AGMS Resolution

The following are the resolutions of the AGMS for the Fiscal Year 2024:

AGENDA PERTAMA FIRST AGENDA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 dan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yg berakhir 31 Desember 2024. | Approval of the Company's 2024 Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2024.

Hasil Keputusan Resolution

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00089/2.1315/AU.1/06/1017-1/1/III/2025 diterbitkan pada tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima).
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
1. Approved the Company's 2024 Annual Report and the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024.
 2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, which had been audited by the Public Accounting Firm Suharli, Sugiharto & Partners, with an unmodified opinion as stated in Report No. 00089/2.1315/AU.1/06/1017-1/1/III/2025, issued on March 26, 2025.
 3. Granted full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the fiscal year ended December 31, 2024, insofar as such actions are reflected in the Company's and its Subsidiaries' Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024.



**Tindak Lanjut Keputusan
Follow-Up**

Telah direalisasikan.
It has been implemented.

**AGENDA KEDUA
SECOND AGENDA**

Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Approval of the plan for the use of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2024.

**Hasil Keputusan
Resolution**

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (sesudah pajak) adalah sebesar Rp16,86 miliar (enam belas koma delapan puluh enam miliar rupiah) dan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100.000.0000,00 (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earnings*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Approved Net Profit Allocation for the Fiscal Year 2023 (two thousand and twenty-three) (after tax) of Rp16.86 billion (sixteen point eight six billion Rupiah), with the following details:

To approve the use of the Company's net profit for the fiscal year 2023 after tax amounting to Rp16,198,080,433.00 (sixteen billion, one hundred and ninety-eight million eighty thousand four hundred and thirty-three Rupiah) as follows:

1. An amount of Rp100,000,000 (one hundred million Rupiah) to be allocated to increase the general reserve, in compliance with Article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, and to be used in accordance with Article 24 of the Company's Articles of Association.
2. The remaining balance to be allocated to retained earnings to support the Company's business development.

**Tindak Lanjut Keputusan
Follow-Up**

Telah direalisasikan.
It has been implemented.

**AGENDA KETIGA
THIRD AGENDA**

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. | Approval of the Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025.

**Hasil Keputusan
Resolution**

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

1. Delegated authority, with substitution rights, to the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, to appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority ("OJK") to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and to appoint a replacement Public Accountant should the initially appointed auditor be unable to perform their duties for any reason.

2. Granted full authority, with substitution rights, to the Company's Board of Commissioners to determine the fees and other terms and conditions related to the appointment of the Public Accountant.

**Tindak Lanjut Keputusan
Follow-Up**

Telah direalisasikan.
It has been implemented.



AGENDA KEEMPAT FOURTH AGENDA

Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025. | Determination of the salaries and benefits for members of the Board of Directors and the salaries or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2025.

Hasil Keputusan Resolution

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). | Delegated authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honoraria, and other allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2025.

Tindak Lanjut Keputusan Follow-Up

Telah direalisasikan.
It has been implemented.

Keputusan RUPS pada Satu Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPST Tahun Buku 2023 pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, bertempat di Ruang Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan RUPSLB pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 di tempat yang sama.

Berikut ini adalah hasil Keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2024:

Keputusan RUPST AGMS Resolution

Resolutions of the GMS in the Previous Year

In 2024, the Company held 2 (two) GMS, namely the AGMS for the Fiscal Year 2023 on Tuesday, April 30, 2024, at Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, South Jakarta, and the EGMS on Thursday, February 29, 2024, at the same location.

The following are the resolutions of the GMS held in 2024:

AGENDA PERTAMA FIRST AGENDA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 dan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yg berakhir 31 Desember 2023. | Approval of the Company's 2023 Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2023.

Hasil Keputusan Resolution

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00118/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 diterbitkan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

There were neither dissenting nor abstain votes, thus the Meeting decreed the following:

1. Approved the Company's 2023 Annual Report and the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023.
2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023, which had been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, with an unmodified opinion as stated in the report No. 00118/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024, issued on March 27, 2024.
3. Provided full discharge and release (*acquit et de charge*) to each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the fiscal year ending December 31, 2023, insofar as those actions are reflected in the Company's and its Subsidiary's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2023.



**Tindak Lanjut Keputusan
Follow-Up**

Telah direalisasikan.
It has been implemented.

**AGENDA KEDUA
SECOND AGENDA**

Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. | Approval of the plan for the use of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2023.

**Hasil Keputusan
Resolution**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesudah pajak sebesar Rp16.198.080.433,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100.000.0000,00 (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earnings) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

There were neither dissenting nor abstain votes, thus the Meeting decreed the following:

Approved the use of the Company's net profit for the fiscal year 2023 after tax amounting to Rp16,198,080,433.00 (sixteen billion one hundred and ninety-eight million eighty thousand four hundred and thirty-three Rupiah) as follows:

1. Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah) to be allocated to the general reserve in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 and to be used in accordance with Article 24 of the Company's Articles of Association; and
2. The remaining balance to be added to retained earnings to support the Company's business development.

**Tindak Lanjut Keputusan
Follow-Up**

Telah direalisasikan.
It has been implemented.

**AGENDA KETIGA
THIRD AGENDA**

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. | Approval of the Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2024.

**Hasil Keputusan
Resolution**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya; dan
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

There were neither dissenting nor abstain votes, thus the Meeting decreed the following:

1. Delegated the authority with substitution rights to the Board of Commissioners, with due consideration from the Audit Committee, to appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024, and to appoint a substitute Public Accountant in the event the appointed Public Accountant is unable to perform their duties for any reason; and
2. Granted full authority with substitution rights to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other terms and conditions related to the appointment of the Public Accountant.

**Tindak Lanjut Keputusan
Follow-Up**

Telah direalisasikan.
It has been implemented.



AGENDA KEEMPAT FOURTH AGENDA

Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. | Determination of the salaries and benefits for members of the Board of Directors and the salaries or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2024.

Hasil Keputusan Resolution

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

There were neither dissenting nor abstain votes, thus the Meeting decreed the following:

Delegated the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorariums, and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2024.

Tindak Lanjut Keputusan Follow-Up

Telah direalisasikan.

It has been implemented.

AGENDA KELIMA FIFTH AGENDA

Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Reappointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Hasil Keputusan Resolution

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-5, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 menjadi sebagai berikut:

Direktur Perseroan:

Presiden Direktur : Paulus Ridwan Purawinata

Direktur : Alexandra Yota Dinarwanti

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Helmy Yusman Santoso

Komisaris Independen : Theignatius Agus Salim

2. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi; dan

3. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

There were neither dissenting nor abstain votes, thus the Meeting decreed the following:

1. Approved the reappointment of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, with a term of office until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the term from the closing of this Meeting until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders is as follows:

Board of Directors

President Director : Paulus Ridwan Purawinata

Director : Alexandra Yota Dinarwanti

Board of Commissioners

President Commissioner : Helmy Yusman Santoso

Independent Commissioner : Theignatius Agus Salim

2. Granted authority to the Board of Directors to determine the distribution of duties among the members of the Board of Directors; and

3. Appointed and authorized, with substitution rights, the Company's Board of Directors, jointly or individually, to appear and/or act before the relevant authorities and/or a Notary to declare the decisions taken, to sign the necessary deeds, to provide statements, to prepare and sign all required documents, and to perform all actions deemed necessary, without exception.

Tindak Lanjut Keputusan Follow-Up

Telah direalisasikan.

It has been implemented.



Keputusan RUPSLB EGMS Resolution

AGENDA PERTAMA FIRST AGENDA

Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Permata Karya Perdana, yang merupakan Perusahaan terkendali dari Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha penyewaan infrastruktur telekomunikasi jaringan fiber optic untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. | Approval of the plan for the change in business activities to be carried out by PT Permata Karya Perdana, which is a subsidiary of the Company, with the addition of business activities related to the rental of telecommunication infrastructure for fiber optic networks, in order to comply with the provisions of Article 32 in conjunction with Article 22, paragraph (1), point (a) of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Hasil Keputusan Resolution

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Permata Karya Perdana, yang merupakan Perusahaan terkendali dari Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha penyewaan infrastruktur telekomunikasi jaringan fiber optic untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

There were neither dissenting nor abstain votes, thus the Meeting decreed the following:

1. Approved the plan for the change in business activities to be carried out by PT Permata Karya Perdana, a subsidiary of the Company, with the addition of business activities related to the rental of telecommunication infrastructure for fiber optic networks, in compliance with the provisions of Article 32 in conjunction with Article 22, paragraph (1), point (a) of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities; and
2. Authorized the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to take all necessary actions to implement this decision, in accordance with applicable laws and regulations, to appear before and/or meet with authorized officials and/or Notaries to sign the necessary deeds, provide information, prepare and sign all required documents, and take any other actions deemed necessary, without exception.

Tindak Lanjut Keputusan Follow-Up

Telah direalisasikan.
It has been implemented.



DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi secara umum dan/atau khusus dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

The Board of Commissioners is the Company's organ tasked with overseeing the management of the Company carried out by the Board of Directors, both generally and specifically, and providing advice to the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.

Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila masa jabatannya telah berakhir. Anggaran Dasar Perseroan mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Composition of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) for a term of 5 (five) years and may be reappointed upon the expiration of their term. The Company's Articles of Association govern the procedures for the appointment, replacement, and dismissal of members of the Board of Commissioners.

Selama tahun 2025, anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Presiden Komisaris dan Komisaris Independen. Tidak terdapat pergantian komposisi anggota Dewan Komisaris dari tahun sebelumnya.

Throughout 2025, the Board of Commissioners consisted of 2 (two) members, namely the President Commissioner and the Independent Commissioner. There were no changes in the composition of the Board of Commissioners compared to the previous year.

Berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2025:

The following is the composition of the Board of Commissioners serving in 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Helmy Yusman Santoso	Presiden Komisaris President Commissioner	Akta No. 168 tanggal 30 April 2019. Kembali diangkat pada tahun 2024 sesuai Akta No. 128 tanggal 30 April 2024. Deed No. 168 dated April 30, 2019. Reappointed in 2024 as per Deed No. 128 dated April 30, 2024.	30 April 2024 – 30 April 2029 April 30, 2024 – April 30, 2029
Theignatius Agus Salim	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta No. 191 tanggal 24 Mei 2018. Kembali diangkat pada tahun 2020 sesuai Akta No. 168 tanggal 30 April 2019, dan diangkat kembali pada tahun 2024 sesuai Akta No. 128 tanggal 30 April 2024. Deed No. 191 dated May 24, 2018. Reappointed in 2020 as per Deed No. 168 dated April 30, 2019, and reappointed again in 2024 as per Deed No. 128 dated April 30, 2024.	30 April 2024 – 30 April 2029 April 30, 2024 – April 30, 2029



Komisaris Independen

Dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun 2025 berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang di antaranya adalah Komisaris Independen. Komposisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi atau Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, yaitu Bapak Theignatius Agus Salim, telah menyatakan bahwa:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham utama Perseroan; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pernyataan tersebut telah memenuhi persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi atau Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris telah diuraikan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan. Secara umum tugas pokok Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, yaitu jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Independent Commissioner

From the total members of the Company's Board of Commissioners serving during 2025, which amounted to 2 (two) persons, 1 (one) of them is an Independent Commissioner. This composition complies with the provisions of Article 20 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors or Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

The member serving as the Company's Independent Commissioner, Mr. Theignatius Agus Salim, has declared that:

1. He is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or oversee the activities of the Company in the last 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioner for the following period;
2. He does not own shares, either directly or indirectly, in the Company;
3. He has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Company's majority shareholders; and
4. He has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.

This declaration fulfills the requirements or criteria for a Board of Commissioners member appointed as an Independent Commissioner, as stipulated in Article 21 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors or Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Duty and Authority of the Board of Commissioners

The duties and authorities of the Board of Commissioners are stipulated in Article 15 of the Company's Articles of Association. In general, the main duties of the Board of Commissioners are as follows:

1. Supervise the management policies, including the general management of the Company, and provide advice to the Board of Directors.
2. Conduct specific duties as assigned by the Articles of Association, applicable laws and regulations, and/or based on the General Meeting of Shareholders Resolutions.
3. Carry out duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the General Meeting of Shareholders Resolutions.



4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
5. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Dalam melakukan pengawasan atau pengurusan Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Membentuk komite selain Komite Audit, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan.
3. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Meminta penjelasan kepada setiap anggota Direksi atas segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
6. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Memberhentikan sementara Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris mengikuti program pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training
Helmy Yusman Santoso	Presiden Komisaris President Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Perpajakan Korporasi • Audit Forensik dan PSAK Terkini • From Data to Dialogue : Mastering the Art of Conversation in Finance • Mobile World Congress 2025 di Shanghai dan Barcelona • Corporate Taxation Aspects • Forensic Auditing and Latest PSAK (Financial Accounting Standards) • From Data to Dialogue: Mastering the Art of Conversation in Finance • Mobile World Congress 2025 in Shanghai and Barcelona

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu, dan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.

4. Review and examine the annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report.
5. Comply with the Articles of Association, applicable laws and regulations, and to implement principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.

In carrying out supervision or management of the Company, the Board of Commissioners has the following authorities:

1. Establish committees other than the Audit Committee, including but not limited to the Nomination and Remuneration Committee, with due regard to regulations in the capital market sector.
2. Enter the buildings, premises, or other places used or controlled by the Company.
3. Inspect all books, documents, and other evidence, check and verify the state of cash and other assets, and be informed of all actions taken by the Board of Directors.
4. Request assistance from experts and/or committees in carrying out its duties for a limited period at the Company's expense.
5. Request explanations from any member of the Board of Directors on any matters raised by the Board of Commissioners.
6. Take management actions in the event that the entire Board of Directors has a conflict of interest with the Company.
7. Suspend a member of the Board of Directors temporarily, stating the reasons for such suspension.

Training and/or Competency Development Programs of the Board of Commissioners

In 2025, the Board of Commissioners participated in training and/or competency development programs, as follows:

Meeting of the Board of Commissioners

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is required to hold meetings periodically at least once every 2 (two) months or at any time deemed necessary, and joint meetings with the Board of Directors periodically at least once every four months.



Selama tahun 2025, Dewan Komisaris menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat internal dan 4 (kali) kali rapat gabungan. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi:

During 2025, the Board of Commissioners held 4 (four) internal meetings and 4 (four) joint meetings. The table below shows the attendance of each member of the Board of Commissioners in internal meetings and joint meetings with the Board of Directors:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting			Rapat Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Helmy Yusman Santoso	Presiden Komisaris President Commissioner	4	4	100%	4	4	100%
Theignatius Agus Salim	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100%	4	4	100%

Terkait tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam RUPS, dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini.

The attendance rate of the members of the Board of Commissioners at the GMS has been presented in the Corporate Governance section, specifically in the General Meeting of Shareholders chapter, in this Annual Report.

Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan yang Disampaikan oleh Dewan Komisaris

Evaluation/Direction/Response/Approval Conveyed by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi usulan dari Direksi dan memberikan tanggapan dan persetujuan sesuai dengan batas kewenangannya. Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan perusahaan baik dalam forum rapat maupun melalui surat. Adapun evaluasi/arahan/tanggapan/persetujuan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2025 berkaitan dengan penyusunan strategi Perseroan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Direksi.

The Board of Commissioners has conducted evaluations of proposals submitted by the Board of Directors and provided responses and approvals within its scope of authority. The Board of Commissioners also provided guidance and advice to the Board of Directors in managing the Company, both during meetings and through written correspondence. The evaluations, guidance, responses, and approvals delivered by the Company's Board of Commissioners in 2025 were related to the establishment of the Company's strategies and business development initiatives undertaken by the Board of Directors.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self-assessment* setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolektif. Hasil penilaian *self-assessment* masing-masing anggota Dewan Komisaris dikonsolidasi untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.

The performance of the Board of Commissioners is assessed through a self-assessment annually to evaluate the Board's collective performance. The self-assessment results for each member of the Board of Commissioners are consolidated for evaluation by the Shareholders in the GMS. The performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties and responsibilities outlined in applicable laws and regulations, the Articles of Association, and the mandates of the Shareholders.

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen atas kinerja Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri atas sebagai berikut:

The criteria used in the assessment of the Board of Commissioners' performance include at least the following:



1. Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Komite.
2. Kontribusi dalam melakukan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perseroan.
3. Pencapaian program kerja komite-komite Dewan Komisaris.
4. Pengetahuan bisnis dan risiko bisnis.
5. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
6. Penerapan GCG.
7. Ketaatan terhadap perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.

1. Attendance at meetings of the Board of Commissioners, joint meetings with the Board of Directors, and meetings with committees.
2. Contribution in performing supervisory duties and providing advice to the Board of Directors on the management of the Company.
3. Achievement of the work programs of the Board of Commissioners' committees.
4. Business knowledge and understanding of business risks.
5. Commitment to advancing the interests of the Company.
6. GCG implementation.
7. Compliance with applicable laws, the Articles of Association, General Meeting of Shareholders provisions, and the Company's policies.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja komite-komite Dewan Komisaris berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing komite secara berkala.

Kriteria yang digunakan antara lain tingkat kehadiran dalam rapat dan kontribusi yang diberikan dari masing-masing anggota komite kepada Dewan Komisaris.

Assessment of the Board of Commissioners on the Performance of Committees that Support the Duty Implementation of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Commissioners' committees based on the reports of tasks and responsibilities submitted by each committee on a regular basis.

The criteria used include, among others, the attendance rate at meetings and the contributions made by each committee member to the Board of Commissioners.

DIREKSI

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pengurusan Perseroan, sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Direksi berkewajiban memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memerhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

The Board of Directors is the corporate organ that is authorized and fully responsible for managing the affairs of the Company, in line with the Company's vision and mission. The Board of Directors is obligated to lead and manage the Company for the benefit of the Company, in accordance with the Company's objectives, the Articles of Association, applicable laws and regulations, and by adhering to the principles of *Good Corporate Governance*.

Komposisi Direksi

Selama tahun 2025, anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Presiden Direktur dan Direktur. Tidak terdapat pergantian komposisi anggota Direksi dari tahun sebelumnya.

Composition of the Board of Directors

In 2025, the Board of Directors consisted of 2 (two) members, namely the President Director and a Director. There were no changes in the composition of the Board of Directors compared to the previous year.



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Paulus Ridwan Purawinata	Presiden Direktur President Director	Akta No. 168 tanggal 30 April 2019. Kembali diangkat pada tahun 2024 sesuai Akta No. 128 tanggal 30 April 2024. Deed No. 168 dated April 30, 2019. Reappointed in 2024 according to Deed No. 128 dated April 30, 2024.	30 April 2024 – 30 April 2029 April 30, 2024 – April 30, 2029
Alexandra Yota Dinarwanti	Direktur Director	Akta No. 168 tanggal 30 April 2019. Kembali diangkat pada tahun 2024 sesuai Akta No. 128 tanggal 30 April 2024. Deed No. 168 dated April 30, 2019. Reappointed in 2024 according to Deed No. 128 dated April 30, 2024.	30 April 2024 – 30 April 2029 April 30, 2024 – April 30, 2029

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi telah diuraikan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. Tugas pokok Direksi meliputi, antara lain:

1. Mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Memelihara dan mengurus harta kekayaan Perseroan;
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat Anggaran Tahunan Perseroan dan wajib disampaikan pada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Direksi berwenang dalam:

1. Menjalankan segala tindakan kepengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan;
2. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
3. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan;
4. Menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan batasan-batasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan pada bank); dan
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan yang lain di dalam maupun di luar negeri.

Harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Duty and Authority of the Board of Directors

The duties and authorities of the Board of Directors are stipulated in Article 12 of the Company's Articles of Association. The main duties of the Board of Directors are as follows:

1. Manage and control the Company in accordance with its objectives and consistently strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company;
2. Maintain and manage the assets of the Company;
3. Prepare an annual work plan, including the Company's Annual Budget, which must be submitted to the Board of Commissioners for approval before the beginning of the upcoming fiscal year.

The Board of Directors is authorized to:

1. Carry out all management actions for the Company in accordance with the Articles of Association and Company policies;
2. Represent the Company both in and out of court on all matters and in any situation;
3. Bind the Company to third parties and vice versa;
4. Take any actions related to management or ownership, with the following limitations:
 - a. Borrowing or lending money in the name of the Company (excluding withdrawing Company funds from a bank); and
 - b. Establishing a new business or participating in other companies, both domestically and internationally.

Such actions must receive approval from the Board of Commissioners, in compliance with applicable laws and regulations, as well as regulations in the Capital Market sector.



Pembagian Tugas Direksi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengurusan Perseroan, Direksi melakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing Direktur. Berikut ini adalah pembedangan tanggung jawab setiap Direktur Perseroan:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility
Paulus Ridwan Purawinata	Presiden Direktur President Director	Bertanggung jawab untuk memimpin pengurusan seluruh aspek bisnis dan operasional Perseroan, termasuk di dalamnya perumusan kebijakan dan strategi. Responsible for leading the management of all business and operational aspects of the Company, including the formulation of policies and strategies.
Alexandra Yota Dinarwanti	Direktur Director	Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan administrasi Perseroan. Responsible for managing the financial and administrative affairs of the Company.

Duty Separation of the Board of Directors

In order to optimize the management of the Company, the Board of Directors allocates duties and authorities among its members, taking into account their educational background, work experience, and expertise. The following are the areas of responsibility assigned to each Director of the Company:

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2025, Direksi mengikuti program pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training
Alexandra Yota Dinarwanti	Direktur Director	Audit Forensik dan PSAK terkini Forensic Auditing and Latest PSAK (Financial Accounting Standards)

Training and/or Competency Development of the Board of Directors

In 2025, the Board of Directors participated in training and/or competency development programs, as follows:

Rapat Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu jika diperlukan oleh seorang atau lebih anggota Direksi, dengan memperhatikan bahwa Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi juga dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan yang ditempatkan oleh Perseroan hak suara yang sah.

Selama tahun 2025, Direksi menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat internal dan 4 (empat) kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris.

Meeting of the Board of Directors

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Directors may hold meetings at any time if required by one or more members of the Board of Directors, with the understanding that the Board of Directors is required to hold meetings regularly, at least once (1) every month. Board of Directors meetings can also be held at the written request of the Board of Commissioners or at the written request of one (1) or more shareholders who collectively represent at least one-tenth (1/10) of the total shares with voting rights issued by the Company.

In 2025, the Board of Directors held 10 (ten) internal meetings and 4 (four) joint meetings with the Board of Commissioners.



Terkait tingkat kehadiran anggota Direksi dalam RUPS dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham.

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian atas kinerja Direksi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi, Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris maupun Rapat Direksi dengan Komite.
2. Pencapaian Program Kerja Direksi.
3. Pengetahuan bisnis dan risiko bisnis.
4. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
5. Penerapan GCG.
6. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.

The attendance rate of the members of the Board of Directors at the GMS has been presented in the Corporate Governance chapter, under the General Meeting of Shareholders section, in this Annual Report.

Performance Assessment of the Board of Directors

The performance of the Board of Directors is assessed by the Board of Commissioners and presented to the Shareholders in the GMS as part of the performance evaluation of the Board of Directors. In general, the performance of the Board of Directors is determined based on the duties and responsibilities outlined in applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the mandates of the Shareholders.

The criteria used in the performance evaluation of the Board of Directors include at least the following:

1. Attendance at meetings of the Board of Directors, joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and meetings between the Board of Directors and committees.
2. Achievement of the Board of Directors' work program.
3. Business knowledge and understanding of business risks.
4. Commitment to advancing the interests of the Company.
5. GCG Implementation.
6. Compliance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, General Meeting of Shareholders provisions, and the Company's policies.



NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nomination and Remuneration of the Board of
Commissioners and Board of Directors

Kebijakan dan Proses Nominasi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPST. Setiap usulan penggantian dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi.

Persyaratan anggota Dewan Komisaris dan Direksi di antaranya wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi juga secara berkala mengevaluasi kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi. Sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan RUPS selanjutnya dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025, para pemegang saham menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi. Remunerasi Anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPST dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Policy and Process for the Nomination of Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Any proposal for the replacement and/or dismissal of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the GMS takes into account the recommendations of the Nomination & Remuneration Committee.

The requirements for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors include compliance with the provisions of the Company Law (UUPT), regulations in the capital market sector, and other laws and regulations related to the Company's business activities. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors may be reappointed after their term ends, in accordance with the GMS resolutions.

Procedure for the Proposal and Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners

The Company, through the Nomination and Remuneration Committee, also regularly evaluates the policies, amounts, and structure of remuneration. In accordance with the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the GMS, and the GMS may subsequently delegate the authority to the Board of Commissioners to set the remuneration for the Board of Directors.

Based on the Shareholders' Resolution at the AGMS for the Fiscal Year 2024 held on June 5, 2025, the Shareholders approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and other allowances of each member of the Board of Directors. The remuneration of the Board of Directors is determined by the Board of Commissioners based on the authority granted by the AGMS, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terdiri atas 2 jenis, yaitu:

1. Remunerasi bersifat tetap seperti gaji pokok dan fasilitas atau tunjangan; serta
2. Remunerasi bersifat variabel seperti bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2025, rincian besaran remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp646.487.700 dan Rp2.510.828.908.

Komponen remunerasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji pokok dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration structure provided to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company consists of 2 types, as follows:

1. Fixed remuneration, such as basic salary and facilities or benefits; and
2. Variable remuneration, such as bonuses and holiday allowances (THR).

Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee, the formulation of the structure, policy, and amount of remuneration for the Board of Commissioners must take into account the following:

1. The remuneration practices in the industry, in line with the business activities of the issuer or similar public company, and the scale of business of the issuer or public company within its industry;
2. The duties, responsibilities, and authorities of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, in relation to the achievement of the issuer's or public company's goals and performance;
3. The performance targets or achievements of each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and the balance between fixed and variable allowances.

Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Throughout 2025, the total remuneration received by the Board of Commissioners and the Board of Directors amounted to Rp646,487,700 and Rp2,510,828,908.

The remuneration components provided to the Board of Commissioners and Board of Directors consist of basic salary and religious holiday allowances (THR).



KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah disesuaikan dengan kompleksitas Perseroan dengan tetap memperhatikan aktivitas dalam pengambilan keputusan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki persyaratan dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi atau Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang juga telah dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Aspek keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Hal tersebut dapat dilihat secara rinci pada Bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been adjusted to the complexity of the Company, while still considering the activities involved in decision-making processes.

All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors meet the qualifications, experience, and expertise required to perform their respective functions and duties in accordance with the requirements set forth in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors or Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which is also stipulated in the Company's Articles of Association.

The diversity aspect of the Board of Commissioners and the Board of Directors is reflected in gender, age, educational background, and work experience. These details have been presented in the Company Profile chapter, under the Profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors sections, in this Annual Report.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Uraian lebih lanjut terkait kedua komite tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Komite Audit

Dalam rangka mendorong diterapkannya GCG dan terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, maka dibentuklah Komite Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Keberadaan Komite Audit diyakini dapat meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas auditor eksternal.

In conducting their supervisory duties, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Further descriptions regarding the two committees are as follows.

Audit Committee

In order to encourage the implementation of GCG and the establishment of an adequate internal control structure, an Audit Committee has been formed which is directly responsible to the Board of Commissioners. The presence of an Audit Committee is expected to improve the quality of financial disclosure and reporting as well as reviewing the scope, accuracy, independence and objectivity of external auditors.



Komposisi Komite Audit

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, salah seorang di antaranya berasal dari Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit, sedangkan 2 (dua) orang lainnya merupakan pihak dari luar Perseroan.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Adapun masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Berikut adalah komposisi Komite Audit hingga 31 Desember 2025:

Composition of the Audit Committee

The Audit Committee consists of at least 3 (three) members, one of whom is an Independent Commissioner who serves as Chair of the Audit Committee, while the other 2 (two) people are external parties of the Company.

Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The term of office of members of the Audit Committee cannot be longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Articles of Association and can only be re-elected for 1 (one) subsequent period.

The following is the composition of the Audit Committee as of December 31, 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perusahaan Position in the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Theignatius Agus Salim	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0052/VTI/25/06-2021 tanggal 25 Juni 2021 Decree of the Board of Commissioners No. 0052/VTI/25/06-2021 dated June 25, 2021	Sesuai dengan jabatan sebagai Dewan Komisaris Perseroan In accordance with the term of office as a member of the Board of Commissioners of the Company.
Marylina	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Non-Komisaris (Pihak Eksternal) Non-Commissioner (External Party)		2021 – 2026
Rosuin Hamra	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Non-Komisaris (Pihak Eksternal) Non-Commissioner (External Party)		



Profil Komite Audit Profile of Audit Committee

Theignatius Agus Salim

Ketua Komite Audit | Chairman of Audit Committee

Profil Bapak Theignatius Agus Salim telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan ini. | The profile of Mr. Theignatius Agus Salim has been presented in the Company Profile section under the Board of Commissioners Profile in this report.

Marylina

Anggota Komite Audit | Member of Audit Committee

Usia (per 31 Desember 2025) Age (as of December 31, 2025) 39 tahun years old	
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan (2009) Bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting, from the Universitas Katolik Parahyangan (2009).
Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan Professional Experience and Concurrent Positions	<ol style="list-style-type: none"> Konsultan/Auditor Ernst & Young Indonesia (KAP Purwanto, Suherman & Surja) (2009 – 2014) Tax Accounting and Finance Manager PT Sigmantara Alfindo (2014 – sekarang) <ol style="list-style-type: none"> Consultant/Auditor at Ernst & Young Indonesia (KAP Purwanto, Suherman & Surja) (2009 – 2014) Tax Accounting and Finance Manager at PT Sigmantara Alfindo (2014 – present)

Rosuin Hamra

Anggota Komite Audit | Member of Audit Committee

Usia (per 31 Desember 2025) Age (as of December 31, 2025) 57 tahun years old	
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana jurusan Hukum Universitas Indonesia (1991) Bachelor's degree in Law from the University of Indonesia (1991).
Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan Professional Experience and Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Legal PT United Yohary Aviation (1989 – 1992) Legal PT Bank Central Asia (1992 – 1994) Legal PT Bank UOB Indonesia (1994 – 1997) Legal PT Credit Agricole Indosuez (1997 – 1999) Head of Legal PT Bank Rabobank International Indonesia (1999 – 2007) Head of Legal PT Bank UOB Indonesia (2008) Head of Legal PT Bank BNP Paribas Indonesia (2008 – 2013) General Manager of Legal & Compliance PT Provident Agro Tbk (2013 – 2019) Head of Legal PT Provident Capital Indonesia (2019 – sekarang) <ul style="list-style-type: none"> Legal at PT United Yohary Aviation (1989 – 1992) Legal at PT Bank Central Asia (1992 – 1994) Legal at PT Bank UOB Indonesia (1994 – 1997) Legal at PT Credit Agricole Indosuez (1997 – 1999) Head of Legal at PT Bank Rabobank International Indonesia (1999 – 2007) Head of Legal at PT Bank UOB Indonesia (2008) Head of Legal at PT Bank BNP Paribas Indonesia (2008 – 2013) General Manager of Legal & Compliance at PT Provident Agro Tbk (2013 – 2019) Head of Legal at PT Provident Capital Indonesia (2019 – present)



Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka mempertahankan independensi dan objektivitas terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Komite Audit Perseroan merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan anggota lainnya berasal dari pihak luar Perseroan yang independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama/pengendali, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan, Komite Audit mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sementara itu, wewenang yang dimiliki Komite Audit meliputi:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Independence of the Audit Committee Members

All members of the Company's Audit Committee have met the criteria for independence, expertise, experience and integrity in accordance with applicable regulations. In order to maintain independence and objectivity regarding the implementation of his duties and responsibilities, the Chairman of the Company's Audit Committee is an Independent Commissioner of the Company, while the other members are external parties of the Company who are independent and have no affiliation with the majority/controlling shareholders, Board of Commissioners or Directors of the Company.

Duty, Responsibility and Authority of the Audit Committee

In accordance with the Company's Audit Committee Charter, the Audit Committee conducts the following duties and responsibilities:

1. Review the financial information that the Company will release to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information.
2. Review compliance with laws and regulations relating to the Company's activities.
3. Provide independent opinions in the event of differences of opinion between management and accountants regarding the services provided.
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of accountants based on independence, scope of assignment and costs.
5. Review the implementation of audits by internal auditors and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors regarding the internal auditor's findings.
6. Review the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors.
7. Review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
8. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company.
9. Maintain the confidentiality of Company documents, data and information.

Meanwhile, the authorities of the Audit Committee includes:

1. Access required documents, data and information about employees, funds, assets and Company resources.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out internal audit, risk management and accountant functions regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.



- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit memuat:

- Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
- Persyaratan, Komposisi, dan Struktur keanggotaan;
- Masa Tugas Komite Audit;
- Kode Etik;
- Kebijakan penyelenggaraan rapat;
- Tata cara dan prosedur kerja;
- Sistem pelaporan kegiatan; dan
- Penanganan Pengaduan.

Informasi selengkapnya mengenai Piagam Komite Audit tersedia di situs web Perseroan.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Selama tahun 2025, Komite Audit tidak mengikuti program pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi.

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Theignatius Agus Salim	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	4	4	100%
Marylina	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	4	4	100%
Rosuin Hamra	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	4	4	100%

- Involve independent parties outside the Audit Committee members to assist in executing their duties (if necessary).
- Conduct other authorities granted by the Board of Commissioners.

Audit Committee Charter

In carrying out their duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter which is established and approved by the Board of Commissioners. The Audit Committee Charter contains:

- Duties, responsibilities and authorities;
- Requirements, Composition and Structure;
- Term of Office;
- Code of Conduct;
- Meeting policy;
- Work methods and procedures;
- Activity reporting system; and
- Complaint Handling.

Complete information regarding the Audit Committee Charter is available on the Company's website.

Training and/or Competency Development Programs for the Audit Committee

In 2025, the Audit Committee did not participate in any training / competency development programs.

Meeting of the Audit Committee

In accordance with the provisions stated in the Committee Charter. In accordance with POJK No. 55/2015, Audit Committee meetings are held periodically at least once in 3 (three) months and attended by more than 50% (fifty percent) of the total members.

Throughout 2025, the Audit Committee held 4 (four) meetings, with the attendance levels as follows:



Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2025

Berikut ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh Komite Audit Perseroan selama tahun 2025:

1. Melakukan pengawasan terhadap audit keuangan yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal.
2. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan periodik Perseroan.
3. Membantu melakukan pengawasan pengurusan Perseroan, khususnya di bidang keuangan dan akuntansi, manajemen risiko dan pengendalian internal, serta kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan dan merekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan kinerja keuangan Perseroan.

Berdasarkan hasil penelaahan Komite Audit yang dilakukan selama tahun buku 2025, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan kekeliruan/kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Hingga tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Menurut Dewan Komisaris, saat ini kedua fungsi tersebut masih bisa dijalankan secara efektif dan efisien oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Terbuka.

Alasan belum dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi adalah adanya kepentingan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan demikian, pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi masih dijalankan oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Helmy Yusman Santoso dan Bapak Theignatius Agus Salim. Pengukuhan Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 00051/VTI/20/10-2021 perihal Penunjukkan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Implementation of the Audit Committee Duties in 2025

The following are the activities carried out by the Company's Audit Committee in 2025:

1. Supervise financial audits carried out by internal and external auditors.
2. Review the Company's periodic financial statements.
3. Assist in supervising the management of the Company, particularly in the areas of finance and accounting, risk management and internal control, as well as the Company's compliance with applicable laws and regulations.
4. Provide recommendations to the Company's Board of Commissioners regarding the Company's financial performance.

Based on the Audit Committee's review conducted in the fiscal year 2025, there were no violations of applicable laws or errors/misstatements in the presentation of the financial statements identified.

Nomination and Remuneration Function

As of 2025, the Company's Board of Commissioners had not established a Nomination and Remuneration Committee to support the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities related to the Nomination and Remuneration functions for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

According to the Board of Commissioners, currently these two functions can still be carried out effectively and efficiently by all members of the Company's Board of Commissioners. This does not conflict with the provisions in Financial Services Authority Regulation no. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.

The Nomination and Remuneration Committee has not been established due to an interest in the effectiveness and efficiency of implementing the Nomination and Remuneration function for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Thus, the implementation of the Nomination and Remuneration Function for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is still carried out by members of the Company's Board of Commissioners, namely Mr. Helmy Yusman Santoso and Mr. Theignatius Agus Salim. The inauguration of the Company's Board of Commissioners as executor of the Nomination and Remuneration Function for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is stated in the Decree of the Board of Commissioners No. 00051/VTI/20/10-2021 regarding Appointment of the Nomination and Remuneration Committee.



Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Terkait Fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Terkait Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 20 November 2021. Pedoman tersebut memuat:

1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang;
2. Tata Cara dan Prosedur Kerja;
3. Penyelenggaraan Rapat;
4. Pelaporan Kegiatan;
5. Masa Berlaku;
6. Kepatuhan.

Duty and Responsibility of the Nomination and Remuneration Function

Nomination Function

1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
 - b. Nomination process policies and criteria; and
 - c. Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material.
3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
4. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS).

Remuneration Function

1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration structure;
 - b. Remuneration policies; and
 - c. Amount of remuneration.
2. Assist the Board of Commissioners in conducting performance assessments in accordance with the Remuneration received by each member of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

Guidelines for the Implementation of Nomination and Remuneration Function

The implementation of the Nomination and Remuneration Function refers to the Guidelines for the Implementation of the Nomination and Remuneration Function which were established and approved by the Board of Commissioners on November 20, 2021. These guidelines include:

1. Duties, Responsibilities and Authorities;
2. Work Procedures;
3. Meeting Implementation;
4. Activity Reporting;
5. Validity Period;
6. Compliance.



Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Mengingat bahwa seluruh pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka daftar pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Fungsi Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Dewan Komisaris.

Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Mengingat bahwa seluruh pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka realisasi pelaksanaan Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Selama tahun 2025, Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah melakukan tinjauan ulang (*review*) terhadap struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan organ penunjang Direksi yang berfungsi sebagai fasilitator komunikasi antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Posisi Sekretaris Perusahaan saat ini dipegang oleh Ibu Alexandra Yota Dinarwanti yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2020.

Profil Sekretaris Perusahaan Profile of the Corporate Secretary

Alexandra Yota Dinarwanti

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

Profil Ibu Alexandra Yota Dinarwanti telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi dalam Laporan ini. The profile of Mrs. Alexandra Yota Dinarwanti has been presented in the Company Profile section under the Board of Directors Profile in this report.

Training and/or Competency Development Programs of the Nomination and Remuneration Function

Given that all members responsible for the Nomination and Remuneration Function are members of the Company's Board of Commissioners, the list of training and/or competency development for the Nomination and Remuneration Function has been presented in the Corporate Governance section under the Board of Commissioners.

Meeting of Nomination and Remuneration Function

Considering that all those responsible for the Nomination and Remuneration Function are members of the Company's Board of Commissioners, the implementation of the Nomination and Remuneration Function meetings has been presented in the Corporate Governance section under the Board of Commissioners.

Implementation of Nomination and Remuneration Function Activities in 2025

In 2025, the Company's Nomination and Remuneration Function conducted a review of the remuneration structure of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary is a supporting organ for the Board of Directors which functions as a bridge for communication between the Company and its stakeholders and ensures the Company's compliance with applicable laws and regulations.

The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed by the Board of Directors. The position of Corporate Secretary is currently held by Mrs. Alexandra Yota Dinarwanti who was appointed based on the Company Decree issued on October 26, 2020.



Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Mengingat bahwa Sekretaris Perusahaan adalah Direktur Perseroan, maka daftar pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Direksi.

Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melakukan aktivitas kerja sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan Paparan Publik.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi.
4. Menyampaikan beberapa laporan keterbukaan informasi dan laporan berkala kepada regulator pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia).
5. Menghadiri *workshop*, seminar terkait peraturan pasar modal, free float yang diselenggarakan oleh Bursa.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan salah satu organ internal Perseroan yang melakukan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

Kedudukan Unit Audit Internal dalam struktur Perseroan berada di bawah Presiden Direktur. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.

Saat ini, posisi Kepala Unit Auditor Internal Perseroan dijabat oleh Bapak Supriatno Arham yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0061/VTI/21/0122023.

Training and/or Competency Development Programs of Corporate Secretary

Considering that the Corporate Secretary is also a Director of the Company, the list of training and/or competency development for the Corporate Secretary has been presented in the Corporate Governance chapter, under the Board of Directors section.

Implementation of Corporate Secretary Activities in 2025

In 2025, the Corporate Secretary carried out the following activities:

1. Facilitated the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024.
2. Facilitated the implementation of the Public Expose.
3. Facilitated the implementation of the meetings of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Directors.
4. Submitted various information disclosure reports and periodic reports to capital market regulators (Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange).
5. Attended workshops and seminars related to capital market regulations and free float organized by the Exchange.

Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit is one of the Company's internal organs that carries out independent and objective assurance and consultation activities, with the aim of increasing value and improving company operations, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, controls and processes. corporate governance.

Structure and Position of the Internal Audit Unit

The position of the Internal Audit Unit in the Company structure is under the President Director. The Internal Audit Unit is led by a Head of the Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Currently, the position of Head of the Company's Internal Auditor Unit is held by Mr. Supriatno Arham who was appointed based on the Decree of the Company's Board of Directors No. 0061/VTI/21/0122023.



Profil Kepala Unit Audit Internal Profile of the Head of Internal Audit Unit

Supriatno Arham

Kepala Unit Audit Internal | Head of Internal Audit Unit

Usia (per 31 Desember 2025) | Age (as of December 31, 2025) 52 tahun | years old

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya (1996) Bachelor's degree in Accounting from the Faculty of Economics, Accounting Department, at the Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya (1996).
Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan Professional Experience and Concurrent Positions	Memulai karir sebagai Internal Auditor di Industri Perbankan pada tahun 1996, dan selama 10 tahun menekuni bidang Bisnis Proses di perusahaan Multi Finance. He began a career as an Internal Auditor in the banking industry in 1996, and spent 10 years specializing in Business Processes at a multi-finance company.
Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal Qualifications/ Certifications of Internal Audit Professionals	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Sertifikasi "Certified Audit Committee Professional" diselenggarakan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). 2. Program Sertifikasi "Fundamental ERM ISO 31000 Standard International Risk Management" diselenggarakan oleh CRMS. <ol style="list-style-type: none"> 1. "Certified Audit Committee Professional" Certification Program organized by the Indonesian Audit Committee Association (IKAI). 2. "Fundamental ERM ISO 31000 Standard International Risk Management" Certification Program organized by CRMS.

Persyaratan Unit Audit Internal

1. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknik audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas yang dijalankan;
4. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal Perseroan;
5. Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengendalian internal dan manajemen risiko;
6. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesinya secara terus-menerus termasuk pengetahuan terkait Teknologi Informasi.

Independensi Unit Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Unit Audit Internal memiliki independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan atas usaha Perseroan juga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota Unit Audit Internal Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas.

Criteria for Internal Audit Unit

1. Have integrity and professional, independent, honest and objective behavior in carrying out their duties;
2. Have knowledge and experience of audit techniques and scientific disciplines relevant to their field of work;
3. Have knowledge of laws and regulations relevant to the tasks being carried out;
4. Have the skills to interact and communicate both verbally and in writing effectively, both with internal and external parties of the Company;
5. Understand the principles of Good Corporate Governance, internal control and risk management;
6. Willing to continuously improve their professional knowledge, skills and abilities, including knowledge related to Information Technology.

Independency of the Internal Audit Unit

In conducting their duties and responsibilities, all members of the Internal Audit Unit have independence and have no conflict of interest in the Company's business or in carrying out their duties and responsibilities. All members of the Company's Internal Audit Unit have met the criteria for independence, expertise, experience and integrity.



Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Piagam Unit Audit Internal

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal berpedoman pada Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Piagam Unit Audit Internal memuat:

1. Struktur dan Kedudukan;
2. Fungsi;
3. Persyaratan Auditor Internal;
4. Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Wewenang;
6. Kode Etik Auditor Internal;
7. Pertanggungjawaban Auditor Internal;
8. Larangan Perangkapan Jabatan.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Unit Audit Internal

Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan unit Audit Internal, Perseroan menciptakan program pengembangan yang ditargetkan melalui kursus audit, seminar maupun workshop. Pada tahun 2025, anggota Unit Audit Internal mengikuti beberapa pelatihan antara lain:

1. Training & Awareness ISO 31000 tentang Risk Management,
2. Training "Risk Based Audit & Strategies" diselenggarakan oleh CRSM Indonesia
3. Webinar "Audit Talk: Menghadapi Lanskap baru Regulasi Keberlanjutan: Apa yang harus dilakukan Perusahaan" diselenggarakan oleh BDO

Duty and Responsibility of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit has the following duties and responsibilities:

1. Prepare and implement an annual Internal Audit plan;
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policy;
3. Conduct inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
4. Provide suggestions for improvement and objective information about activities examined at all levels of management;
5. Prepare an audit report and submit the report to the President Director and Board of Commissioners;
6. Monitor, analyze and report on the implementation of recommended follow-up improvements;
7. Cooperate with the Audit Committee;
8. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities carried out; and
9. Conduct special inspections if necessary.

Internal Audit Unit Charter

In carrying out their duties and responsibilities, the Internal Audit Unit refers to the Internal Audit Unit Charter established and approved by the Board of Commissioners. The Internal Audit Unit Charter contains:

1. Structure and Position;
2. Function;
3. Internal Auditor Criteria;
4. Duties and Responsibilities;
5. Authorities;
6. Internal Auditor Code of Conduct;
7. Internal Auditor Accountability;
8. Prohibition of Concurrent Positions.

Training and/or Competency Development Programs of Internal Audit Unit

To enhance the competency and capabilities of the Internal Audit unit, the Company established targeted development programs through auditing courses, seminars, and workshops. In 2025, members of the Internal Audit Unit participated in several training sessions, as follows:

1. ISO 31000 Training & Awareness on Risk Management
2. "Risk-Based Audit & Strategies" Training, organized by CRSM Indonesia
3. "Audit Talk: Facing the New Landscape of Sustainability Regulations: What Companies Must Do" Webinar, organized by BDO



4. Training “Spesialis Investigasi Insiden” diselenggarakan oleh PT Davai Karya Pratama
5. Training, Fraud Auditing 1 & 2, diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Audit (LPFA)

Rapat Unit Audit Internal

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat bersama Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Selama tahun 2025, Unit Audit Internal telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat yang dihadiri Direksi dan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal Tahun 2025

Selama tahun 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan audit terjadwal sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan 2025 dengan berbasis risiko dan telah menerbitkan Laporan Hasil Audit. Berikut ini merupakan uraian kegiatan yang dijalankan oleh Unit Audit Internal pada tahun 2025:

1. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Perseroan dan Standard Operating Procedure (“SOP”) yang berlaku.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan

Akuntan Publik

Berdasarkan Keputusan RUPST Tahun Buku 2024 tanggal 5 Juni 2025, para Pemegang Saham sepakat untuk melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

Independensi Akuntan Publik

Tim Auditor Eksternal yang bertugas untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto, dan Rekan dan Akuntan Publik Riki Afrianof, CPA adalah pihak independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Pasar Modal sehubungan dengan audit Perusahaan. Tidak terdapat hubungan personal, pemberian jasa profesional lain atau hubungan bisnis antara KAP dengan

4. “Incident Investigation Specialist” Training, organized by PT Davai Karya Pratama;
5. Fraud Auditing 1 & 2 Training, organized by the Fraud Audit Development Institute (Lembaga Pengembangan Fraud Audit - LPFA)

Meeting of Internal Audit Unit

In order to carry out its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit organizes and/or attends meetings with the Board of Commissioners and/or the Board of Directors. Throughout 2025, the Internal Audit Unit held 3 (three) times meetings attended by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Duty Implementation of Internal Audit Unit in 2025

In 2025, the Internal Audit Unit conducted scheduled audits in accordance with the 2025 Annual Audit Work Program, which was risk-based, and issued Audit Reports. The following are activities carried out by the Internal Audit Unit in 2025:

1. Supervised operational activities.
2. Evaluated the Company policies and applicable Standard Operating Procedures (“SOP”).
3. Monitored, evaluated audit findings and provided recommendations for improvement.

Public Accountant

Based on the resolution of the AGMS for the Fiscal Year 2024 held on June 5, 2025, the Shareholders agreed to delegate authority with the right of substitution to the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (“OJK”) to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and to appoint a replacement Public Accountant if the appointed Public Accountant, for any reason, is unable to perform their duties.

Independency of the Public Accountant

The external audit team responsible for auditing the Company’s Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, namely the Public Accounting Firm Suharli, Sugiharto, dan Rekan and Public Accountant Riki Afrianof, CPA are independent in accordance with the Indonesian Standards on Auditing and Capital Market regulations regarding the Company’s audit. There are no personal relationships, provision of other professional services, or business relationships between the Public



Perusahaan yang dapat mempengaruhi independensi KAP maupun Akuntan Publik yang bertugas sebagai auditor eksternal Perseroan.

Jasa Atestasi Lain yang Diberikan oleh Akuntan Publik

Selain jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat jasa attestasi lain yang disediakan oleh KAP Suharli, Sugiharto, dan Rekan dan Akuntan Publik Riki Afrianof, CPA kepada Perseroan.

Biaya Akuntan Publik

Total biaya audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp115 juta.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Hal tersebut diperkuat bahwa memadainya penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Perseroan menjadi salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

Perseroan mengembangkan sistem pengendalian internal dalam bentuk peraturan, kebijakan dan standar operasional prosedur, yang secara garis besar mencakup:

1. Pemisahan tugas dan wewenang;
2. Otoritas;
3. Pendokumentasian dan pencatatan yang memadai; dan
4. Pengawasan dan evaluasi.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Perseroan telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, melalui penyampaian laporan ke regulator terkait dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Perseroan.

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Selama tahun 2025, Perseroan senantiasa menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan mengimplementasikan pada setiap kegiatan bisnis dan operasional Perseroan.

Accounting Firm and the Company that could compromise the independence of the Public Accounting Firm or the Public Accountant acting as the Company's external auditor.

Other Attestation Services Provided by Public Accountant

In addition to auditing the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, the Public Accounting Firm Suharli, Sugiharto, dan Rekan and Public Accountant Riki Afrianof, CPA did not provide any other attestation services to the Company.

Public Accountant Fee

The total fee for auditing the Company's financial statements for the year ending December 31, 2025 amounted to Rp115 million.

Internal Control System

The Internal Control System (ICS) is an integral part of implementing accountability principles in corporate governance. Adequate implementation of the ICS within the Company serves as one of the key indicators of the successful implementation of good corporate governance. Internal controls are implemented through clear policies, regulations, and procedures, enabling effective oversight and minimizing potential risks.

The Company develops its internal control system in the form of regulations, policies, and standard operating procedures, which broadly cover:

1. Separation of duties and authorities;
2. Delegation of authorities;
3. Adequate documentation and book-keeping; and
4. Supervision and evaluation.

Financial and Operational Control

The Company has fulfilled its transparency and publication obligations regarding financial and non-financial conditions in accordance with applicable regulations, by submitting reports to the relevant regulators and publishing information through both print media and the Company's website.

Compliance with Laws and Resgulations

In 2025, the Company consistently maintained compliance with applicable laws, and implemented them in every business operation of the Company.



Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Internal Control Framework (COSO)

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada penerapan sistem pengendalian internal, Perseroan senantiasa berupaya untuk mempraktikkan SPI terbaik dengan merujuk pada *best practices*. Secara bertahap, Perseroan mengadopsi penerapan SPI dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - *Internal Control Framework*).

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2025

Berjalannya Sistem Pengendalian Internal secara andal dan efektif menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan bisnis dan operasional Perseroan, mulai dari jajaran Direksi, Unit Audit Internal, para pimpinan departemen/unit kerja dan karyawan Perseroan. Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam mengawasi dan memantau keefektifan dan keandalan Sistem Pengendalian Internal juga diperlukan untuk menjaga pelaksanaan sistem berjalan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku dan COSO *Framework*.

Implementasi sistem pengendalian internal pada tingkat Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terkait kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan risiko dengan dibantu oleh komite-komite yang dimiliki Dewan Komisaris. Sedangkan implementasi sistem pengendalian internal pada tingkat Direksi adalah dengan menerapkan kebijakan dan prosedur Perseroan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan tersebut antara lain terkait dengan kegiatan operasional, manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan penilaian Dewan Komisaris Perseroan dan evaluasi dari Unit Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal telah dijalankan secara efektif pada tahun 2025. Direksi dan seluruh jajaran manajemen Perseroan senantiasa memperhatikan masukan dan rekomendasi perbaikan terkait efektivitas pengendalian internal yang disampaikan oleh Dewan Komisaris (dan Komite Audit) serta Unit Audit Internal. Tidak ditemukan kendala maupun permasalahan yang berarti, sehingga sistem pengendalian internal mampu mendukung aspek operasional Perseroan dengan optimal.

Conformity of the Internal Control System with them Internal Control Framework (COSO)

To enhance effectiveness and efficiency in implementing the internal control system, the Company always strives to practice the best Internal Control System by referring to best practices. Gradually, the Company has adopted the implementation of Internal Control System with an internationally recognized framework (COSO - *Internal Control Framework*).

Evaluation of the Internal Control System Effectiveness in 2025

The reliability and effectiveness of the Internal Control System is the responsibility of all parties involved in managing the Company's business and operations, including the Board of Directors, Internal Audit Unit, department/unit heads, and employees. The Board of Commissioners and the Audit Committee play a key role in overseeing and monitoring the effectiveness and reliability of the ICS to ensure its proper implementation in accordance with applicable regulations and the COSO *Framework*.

At the Board of Commissioners level, the internal control system is implemented through supervision and advice regarding the adequacy and fairness in the preparation of financial statements and risk management, supported by the Board's committees. At the Board of Directors level, the internal control system is implemented by consistently applying the Company's policies and procedures while ensuring compliance with relevant regulations. This includes operational activities, risk management, strategic planning, separation of duties, delegation of authorities, and appropriate accounting policies.

Statement of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners regarding the Adequacy of the Internal Control System

Based on the assessment of the Board of Commissioners and the evaluation conducted by the Internal Audit Unit, the Internal Control System was effectively implemented in 2025. The Board of Directors and the entire management team continuously consider feedback and recommendations for improvements related to the effectiveness of internal controls provided by the Board of Commissioners (and Audit Committee) as well as the Internal Audit Unit. There were significant obstacles or issues identified, indicating that the internal control system has effectively supported the Company's operations.



Perseroan juga selalu melakukan perbaikan sistem, prosedur dan kebijakan internal secara berkelanjutan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di masa depan.

The Company also continuously improves its internal systems, procedures, and policies to achieve even better outcomes in the future.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang melekat dalam setiap aktivitas bisnis dan operasional, yang apabila tidak dikelola secara memadai berpotensi memengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan usaha. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk membangun dan menerapkan sistem manajemen risiko yang terstruktur dan terintegrasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, guna memastikan pengelolaan usaha berjalan selaras dengan visi dan misi Perseroan. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, Perseroan berupaya memperkuat ketahanan bisnis serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Company recognizes that risk is an inherent part of every business and operational activity, which, if not managed properly, can potentially impact performance and the achievement of business objectives. Therefore, the Company is committed to developing and implementing a structured and integrated risk management system as part of corporate governance, to ensure that business operations are aligned with the Company's vision and mission. Through effective risk management, supported by adequate resources, the Company seeks to strengthen business resilience and create sustainable value for all stakeholders.

Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi Risiko

Risk Type and Mitigation

Selama tahun 2025, Perseroan telah mengidentifikasi sejumlah risiko utama yang secara umum berikut upaya mitigasinya sebagai berikut:

In 2025, the Company identified several key risks along with the corresponding mitigation efforts, as follows:

Profil Risiko Risk Profile	Upaya Mitigasi Risiko Risk Mitigation
<p>Risiko Kredit Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas di bank, piutang usaha – pihak ketiga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih harus diterima.</p> <p>Entitas anak menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan pelanggan untuk membayar sewa dari menara ataupun pemancar milik entitas anak.</p> <p>Credit Risk The Company has credit risk which is mainly generated from cash at the bank, trade receivables - third parties, other receivables and income that has yet to be received.</p> <p>Subsidiary faces credit risk, namely the inability of customers to pay rent from towers or transmitters owned by subsidiaries.</p>	<p>Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.</p> <p>Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan dan entitas anak menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan seluler dan pelanggan lainnya, seperti <i>dealer</i>, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi, dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.</p> <p>Penyewaan jasa menara telekomunikasi kepada operator seluler dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.</p> <p>Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal.</p> <p>The Company and subsidiary manage credit risks associated with bank deposits by monitoring reputation, credit ratings, and limiting the aggregate risk of each party to the contract.</p> <p>In relation to credit provided to customers, the Company and subsidiary determine the terms and conditions of credit facilities to cellular customers and other customers, such as dealers, distributors, other operators related to interconnection and international roaming. Additional warranties are also required under certain conditions. Generally, the collateral used is a bank guarantee.</p> <p>Lease of telecommunications tower services to cellular operators is carried out in cash. Credit worthiness and collection procedures are reviewed properly and in a timely manner. There is no significant concentration of credit risk related to trade receivables due to customer diversity.</p> <p>Management is confident in its ability to control and maintain credit risk exposure at a minimal level.</p>



Profil Risiko
Risk Profile

Upaya Mitigasi Risiko
Risk Mitigation

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo. Perusahaan dan entitas anak melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan.

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas.

Liquidity Risk

Liquidity risk arises if the Company and subsidiary experience difficulties in obtaining funding sources to finance working capital and capital expenditures. Liquidity risk can also arise due to a mismatch between the sources of funds owned and the payment of liabilities that are due. The Company and subsidiary mitigate liquidity risk by analyzing cash flow availability and funding structure in accordance with the Company's Internal Control Guidelines.

Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiary experience difficulties in obtaining funding sources. Liquidity risk management means maintaining adequate cash and cash equivalent balances.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Estimated Fair Value

The fair value of financial assets and liabilities is estimated for recognition and measurement purposes or for disclosure purposes.

PSAK 68 "Fair Value Measurement" requires disclosure of fair value measurements with the following fair value hierarchy levels:

1. Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
2. Inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (e.g. price) or indirectly (e.g. derivation from price) (level 2); and
3. Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perusahaan dan entitas anak memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perusahaan dan entitas anak memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perusahaan dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

The Company and subsidiary manage liquidity risk by continuously monitoring actual and projected cash flows and monitoring the maturity date profile of financial assets and liabilities. The Company and its subsidiary monitor projected liquidity requirements to ensure that the Company and its subsidiary have sufficient cash balances to meet operational needs and maintain sufficient undrawn loan facilities at all times so that the Company and its subsidiary meet all loan facility limits or requirements.

These projections consider the Company's debt financing plans and compliance with loan requirements. Management believes that the strategy of conducting cash sweeping and pooling of funds from a number of bank accounts into the main operational bank account can ensure concentrated funding and better liquidity optimization.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrument keuangan lainnya.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using certain valuation techniques. This technique uses observable market data as long as it is available, and refers to estimates as little as possible. If all significant inputs to fair value can be observed, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument falls into level 3.

Specific valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- Use of prices obtained from stock exchanges or securities traders for similar instruments; And
- Other techniques such as discounted cash flow analysis are used to determine the value of other financial instruments.



Profil Risiko Risk Profile	Upaya Mitigasi Risiko Risk Mitigation
<p>Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan layanan Perusahaan dan entitas anak.</p> <p>Operational Risk Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failure of internal processes, human factors and systems or from external events. This risk is inherent in all business processes, operational activities, systems and services of the Company and its subsidiary.</p>	<p>Perseroan menerapkan Standar Operasional Prosedur dan prinsip kehati-hatian di setiap lini bisnisnya, agar meminimalisasi risiko kerugian usaha Perseroan.</p> <p>The Company applies Standard Operating Procedures and precautionary principles in each line of business to minimize the risk of loss to the Company's business.</p>
<p>Risiko Permodalan Risiko permodalan adalah risiko yang muncul karena penjualan tidak kunjung meningkat sehingga menimbulkan kerugian.</p> <p>Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola risiko permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Capital Risk Capital risk is the risk that arises because sales do not increase, resulting in losses.</p> <p>The aim of the Company and its subsidiary in managing capital risk is to protect the ability of the Company and its subsidiary to maintain business continuity, so that the entity can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders.</p>	<p>Untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perusahaan dan entitas anak mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.</p> <p>To manage optimal capital structure to minimize effective capital costs. In order to manage the capital structure, the Company and subsidiary may adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/reduce the amount of debt.</p>

Evaluasi terhadap Efektivitas Manajemen Risiko Tahun 2025

Secara berkala, Perseroan melaksanakan evaluasi dan efektivitas sistem manajemen risiko Perseroan dengan melaksanakan audit berbasis risiko yang dilakukan oleh audit internal dan *assessment* yang dilaksanakan oleh tim internal Perseroan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko Perseroan telah dilaksanakan secara efektif dan komprehensif di seluruh lini bisnis.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan peninjauan atas kecukupan sistem manajemen risiko yang dijalankan, dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria kunci. Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen risiko Perseroan telah berlangsung secara efektif sepanjang tahun 2025 dalam memitigasi berbagai faktor risiko sebagaimana telah disebutkan di atas.

Evaluation of Risk Management Effectiveness in 2025

The Company periodically evaluates the effectiveness of its risk management system through risk-based audits conducted by the internal audit team and assessments carried out by the Company's internal team. The results of this evaluation show that the Company's risk management system has been implemented effectively and comprehensively in all business lines.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of Risk Management System

The Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed the adequacy of the risk management system, taking into account several key criteria. Based on this evaluation, it can be concluded that the Company's risk management practices were effectively implemented throughout 2025 in mitigating the various risk factors described above.



Dewan Komisaris dan Direksi juga menilai bahwa proses review bisnis dan operasional yang dilakukan secara berkala juga mampu meningkatkan kewaspadaan dan praktik prinsip kehati-hatian terhadap faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha.

Praktik manajemen risiko Perseroan ke depannya akan terus disempurnakan, baik melalui peninjauan kebijakan dan prosedur, peningkatan kapabilitas pelaksana fungsi manajemen risiko, hingga optimalisasi kinerja manajemen risiko di seluruh lini bisnis.

The Board of Commissioners and Board of Directors also consider that the business and operational review process which is carried out regularly is also able to increase awareness and practice the precautionary principle towards factors that have the potential to influence business continuity.

In the future, the Company's risk management practices will continue to be refined, namely by reviewing policies and procedures, increasing the capabilities of implementing risk management functions, and optimizing risk management performance across all business lines.

PERKARA PENTING

Legal Case

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris baik yang sifatnya perdata maupun pidana.

Throughout 2025, the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners did not face any significant legal matters, whether civil or criminal in nature.

SANKSI ADMINISTRATIF

Administrative Sanction

Selama tahun 2025, Perseroan tidak memperoleh sanksi administratif apapun yang dikenakan oleh pemerintah, regulator dan badan berwenang lainnya.

In 2025, the Company did not receive any administrative sanctions imposed by the government, regulators, or other authorized bodies.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN PERUSAHAAN

Share Ownership Program by Company Management and/or Employees

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham baik oleh Manajemen (MSOP) maupun Karyawan (ESOP).

As of the end of 2025, the Company does not have any stock ownership program policies for Management (MSOP) or Employees (ESOP).



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan berupaya untuk menyediakan akses informasi dan data Perseroan bagi pemegang saham publik, investor, maupun para pemangku kepentingan lainnya, sebagai berikut:

As a Public Company, the Company strives to provide access to Company information and data for public shareholders, investors and other stakeholders, as follows:

Situs Web

Perseroan memiliki situs web resmi yang dapat diakses pada www.ptvti.co.id. Melalui situs web tersebut, Perseroan menyediakan akses informasi terkait Perseroan yang dapat diakses oleh para investor dan publik, di antaranya informasi mengenai kinerja keuangan Perseroan selama lima tahun terakhir, informasi terkait RUPS, siaran pers, program tanggung jawab sosial perusahaan, laporan tahunan, laporan keuangan, layanan produk yang disediakan oleh Perseroan, dan aksi korporasi. Informasi pada situs web tersebut disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Website

The Company has an official website which can be accessed at www.ptvti.co.id. Through this website, the Company provides access to information related to the Company that can be accessed by investors and the public, including information regarding the Company's financial performance over the last five years, information related to the GMS, press releases, corporate social responsibility programs, annual reports, financial statements, product services provided by the Company, and corporate actions. Information on the website is presented in both Indonesian and English.

Pelaporan Berkala ke Regulator

Perseroan senantiasa menyampaikan pelaporan informasi terbaru dan/atau informasi yang bersifat material terkait Perseroan melalui e-reporting kepada regulator pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu.

Regular Reporting to Regulators

The Company always reports the latest information and/or material information related to the Company via e-reporting to capital market regulators, namely the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange. This reporting is carried out regularly and on time.

Pelaporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaporan kepemilikan saham oleh anggota dewan komisaris dan direksi ke OJK dilakukan paling lambat 10 hari setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham. Sementara itu, pelaporan kepemilikan saham ke perusahaan dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham.

Reporting of Share Ownership by Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

Shareholding reports by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the OJK are submitted no later than 10 days following the acquisition or change in share ownership. Reporting to the Company is submitted no later than 3 working days after the acquisition or change in share ownership.

Pada tahun 2025, Perseroan telah menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek, yang di dalamnya termasuk laporan kepemilikan saham seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi ke OJK sebanyak 12 (dua) belas kali atau setiap tanggal 10 setiap bulannya.

In 2025, the Company submitted the Monthly Securities Holder Registration Report, which includes the shareholding of all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, to the OJK 12 (twelve) times, on the 10th of each month.



Media Cetak

Perseroan selalu memuat Informasi penting yang perlu diketahui oleh publik sebagai bentuk transparansi bagi para pemangku kepentingan dalam surat kabar dengan siklus peredaran nasional.

Print Media

The Company always contains important information that the public needs to know as a form of transparency for stakeholders in newspapers with a national circulation cycle.

Paparan Publik

Paparan publik adalah pemaparan informasi rutin yang harus dilakukan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kepada publik. Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan menyelenggarakan Paparan Publik untuk memaparkan pencapaian kinerja Perseroan selama tahun berjalan. Selama tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali Paparan Publik pada tanggal 5 Juni 2025 bertempat di Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Public Expose

A Public Expose is a routine disclosure of information that must be carried out by listed issuers on the Indonesia Stock Exchange to the public. As a publicly listed company, the Company conducts a Public Expose to present its performance achievements during the current year. In 2025, the Company conducted 1 (one) Public Expose on June 5, 2025 at Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, South Jakarta.





Kontak Perseroan

Company Contact

Informasi lebih lengkap mengenai Perseroan juga dapat diperoleh secara lengkap dengan menghubungi kontak sebagai berikut:

More complete information regarding the Company can also be obtained by contacting the following:

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk
Menara Imperium Lt. 18 Suite C
Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav 1,
Guntur, Setiabudi
Jakarta Selatan - 12980
Telp: +62 21 83707370
Fax: +62 21 83707370
E-mail: corporatesecretary@ptvti.co.id



KODE ETIK

Code of Conduct

Kode Etik Perseroan adalah dokumentasi tertulis atas sistem nilai dan penjabarannya/implementasinya ke dalam standar dan sikap perilaku yang diharapkan dari setiap Insan Perseroan di dalam maupun di luar Perseroan. Setiap Insan Perseroan wajib menjadikan Kode Etik sebagai pedoman dan tolak ukur dalam sikap dan perilakunya pada saat menjalankan aktivitas kerja di Perseroan. Dengan demikian, setiap Insan Perseroan merupakan cermin citra Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.

Pada hakikatnya, Kode Etik Perseroan berisikan keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran. Kewajiban dalam berperilaku tersebut berlaku pada seluruh jajaran Perseroan tanpa terkecuali, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dan harus diterapkan dalam setiap aktivitas operasional sehari-hari.

The Company's Code of Conduct is a written documentation of the value system and its elaboration/implementation into the standards and behavioral attitudes expected of every Company employee inside and outside the Company. Every Company Employee is obliged to use the Code of Conduct as a guideline and benchmark in their attitudes and behavior. Thus, every Company Employee is a reflection of the Company's image for internal and external parties.

Essentially, the Company's Code of Conduct contains obligations that must be implemented and prohibitions that must be avoided as an explanation of the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. This obligation to behave applies to all levels of the Company without exception, including members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and must be implemented in every daily operational activity.



Pokok-Pokok Pedoman Etika dan Perilaku

Secara umum, pokok-pokok Kode Etik mengatur tentang:

1. Perilaku terhadap Karyawan;
2. Perilaku terhadap Pemasok atau Penyedia Barang dan Jasa;
3. Perilaku terhadap Konsumen atau Pelanggan;
4. Perilaku terhadap Masyarakat dan Lingkungan Sekitar;
5. Perilaku terhadap Mitra Usaha;
6. Perilaku terhadap Pemerintah atau Otoritas;
7. Perilaku terhadap Pesaing Bisnis atau Kompetitor;
8. Perilaku terhadap Media Massa;
9. Perilaku terhadap Kreditur atau Investor;
10. Perilaku terhadap Pemegang Saham; dan
11. Perilaku terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Sosialisasi dan Upaya Penegakan Kode Etik

Kode Etik senantiasa disosialisasikan kepada seluruh karyawan sejak pertama kali bergabung dengan Perseroan. Langkah tersebut bertujuan agar seluruh karyawan dapat melaksanakan setiap aturan dengan sebaik-baiknya dan penuh kesadaran.

Seluruh insan Perseroan memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan melaporkan setiap tindakan karyawan lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dengan disertai fakta pendukung. Evaluasi pelaksanaan Kode Etik ini menjadi tanggung jawab seluruh organ Perseroan. Namun demikian, peran supervisor atau atasan menjadi sangat penting dalam penegakan Kode Etik ini.

Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Setiap dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan insan Perseroan dapat disampaikan langsung kepada atasan karyawan yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Jika dugaan tersebut terbukti benar, atasan tersebut harus menyampaikannya dan berkonsultasi dengan Human Resources Division (HRD) untuk dicatat dan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran dan peraturan atau kebijakan yang berlaku. Namun, apabila atasan karyawan tersebut tidak memberikan respons yang positif, maka laporan dapat disampaikan melalui surat elektronik yang ditujukan kepada HRD, Unit Audit Internal, atau Sekretaris Perusahaan untuk ditindaklanjuti.

Selama tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan Perseroan.

Principles of Ethics and Behavior Guidelines

In general, the main points of the Code of Conduct regulate the following matters:

1. Behavior towards Employees;
2. Behavior towards Suppliers or Providers of Goods and Services;
3. Behavior towards Consumers or Customers;
4. Behavior towards the Community and Surrounding Environment;
5. Behavior towards Business Partners;
6. Behavior towards the Government or Authority;
7. Behavior towards Business Competitors;
8. Behavior towards Mass Media;
9. Behavior towards Creditors or Investors;
10. Behavior towards Shareholders; and
11. Behavior towards the Company and/or Subsidiary.

Code of Conduct Socialization and Enforcement

The Code of Conduct has always been socialized to all employees since they first joined the Company. This aims to ensure that all employees can implement each rule as well as possible and with full awareness.

All Company personnel have the responsibility to monitor and report any actions of other employees who are suspected of violating the Company regulations along with supporting facts. Evaluation of the implementation of this Code of Conduct is the responsibility of all Company organs. However, the role of supervisors is very important in enforcing this Code of Conduct.

Code of Conduct Violation

Any alleged violation of the Code of Conduct by Company personnel can be submitted directly to the employee's superior for clarification. If the allegation is proven to be true, the superior must convey it and consult with the Human Resources Division (HRD) to have it recorded and given sanctions according to the type of violation and applicable regulations or policies. However, if the employee's superior does not provide a positive response, then the report can be submitted via electronic mail addressed to HRD, Internal Audit Unit, or Corporate Secretary for follow-up.

In 2025, there were no violations of the Code of Conduct committed by any members of the Company.



KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

Anti-Corruption Policy

Dalam upaya memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perseroan, maka Perseroan menetapkan Kebijakan Antikorupsi dalam upaya memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan korupsi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu terkait dengan kegiatan:

1. Merugikan Keuangan Negara;
2. Suap-Menyuap;
3. Penggelapan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;
6. Benturan Kepentingan; dan
7. Gratifikasi.

Sebagai bagian dari upaya menghindari terjadinya tindakan korupsi di lingkungan Perseroan, seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal diinformasikan tentang Kode Etik yang berlaku di Perseroan. Begitu juga dengan setiap ada pemutakhirannya selalu disosialisasikan, sehingga diharapkan mampu mencegah kemungkinan terjadinya praktik yang mengarah pada kegiatan korupsi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran karyawan tentang apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan untuk mematuhi kebijakan, Perseroan menyelenggarakan sosialisasi Antikorupsi secara berkala kepada seluruh pihak internal Perseroan dan pihak eksternal yang menjadi mitra usaha Perseroan.

In an effort to ensure that the Company's activities and business are protected from actions that could be detrimental to the Company, the Company has established an Anti-Corruption Policy to ensure that the Company's activities and business are protected from acts of corruption as defined in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, which is related to following activities:

1. State Losses;
2. Bribery;
3. Embezzlement;
4. Blackmail;
5. Fraudulent Acts;
6. Conflict of Interest; and
7. Gratification.

As part of efforts to prevent corruption within the Company, all stakeholders, both internal and external, are informed about the applicable Code of Conduct. Any updates to the Code of Conduct are also socialized, aiming to prevent practices that may lead to corruption.

To raise employees' awareness of what they must and must not do in order to comply with the policy, the Company conducts regular anti-corruption socialization sessions for all internal parties and external partners of the Company.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

Dalam upaya meningkatkan praktik GCG, Perseroan memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang merupakan mekanisme pelaporan bagi saksi pelapor untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi setiap pelanggaran yang terjadi sehingga dapat membawa Perseroan ke arah budaya kejujuran dan keterbukaan, dan pada jangka panjang diyakini dapat mendorong peningkatan mutu pelaksanaan GCG di Perseroan.

In an effort to improve GCG practices, the Company has a Whistleblowing System (WBS), which is a reporting mechanism for reporting witnesses to detect, prevent and overcome every violation that occurs so that it can move the Company towards a culture of honesty and openness, and in the long term is believed to be able to encourage improvements in the quality of GCG implementation in the Company.



Agar fungsi WBS dapat berjalan optimal, Perseroan mengevaluasi mekanisme pelaporan hingga sosialisasi media pelaporan mengenai WBS kepada seluruh karyawan dan para mitra agar mereka tidak memiliki keraguan untuk segera melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh insan Perseroan. Sistem pelaporan pelanggaran ini melibatkan seluruh karyawan, manajemen Perseroan, dan seluruh pemangku kepentingan eksternal, di mana pelapor mendapatkan jaminan perlindungan atas setiap pelaporan yang disampaikan sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perseroan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Para pemangku kepentingan Perseroan dapat menyampaikan laporannya jika diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan melalui e-mail corporatesecretary@ptvti.co.id yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan. Setelah laporan pelanggaran diterima, Sekretaris Perusahaan akan meneruskan ke Unit Audit Internal untuk dilakukan investigasi, termasuk pengumpulan alat bukti, informasi tambahan, serta wawancara saksi jika diperlukan. Hasil Investigasi akan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing beserta dengan rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan aturan Perseroan yang berlaku.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengaduan atas adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perseroan berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan balas dendam, pemecatan.

To ensure the optimal functioning of the Whistleblowing System (WBS), the Company evaluates the reporting mechanisms and conducts socialization efforts regarding the WBS to all employees and partners, ensuring they have no hesitation in reporting any violations committed by individuals within the Company. This reporting system involves all employees, the Company's management, and external stakeholders, with the whistleblower receiving protection guarantees for any reports made, thus providing a sense of security to all parties interacting with the Company.

Whistleblowing Mechanism

The Company's stakeholders can submit their reports if they suspect that there has been a violation committed by a Company employee via e-mail corporatesecretary@ptvti.co.id addressed to the Corporate Secretary. After a violation report is received, the Corporate Secretary will forward it to the Internal Audit Unit for investigation, including collecting evidence, additional information, and interviewing witnesses if necessary. The results of the investigation will be reported to the Board of Directors and Board of Commissioners for follow-up in accordance with their respective authorities along with recommendations for follow-up in accordance with applicable Company regulations.

Party Managing Complaints

Complaints regarding violations that occur within the Company are managed by the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit.

Protection for Whistleblowers

The Company is committed to providing legal protection to whistleblowers who have good intentions in accordance with applicable laws and regulations. This protection includes:

1. Guarantee of confidentiality of the identity of the whistleblower and the contents of the report submitted;
2. Guarantee of protection from treatment that is detrimental to whistleblowers;
3. Guarantee of protection from possible acts of revenge, dismissal.



Jenis Pelanggaran

Berbagai jenis penyimpangan dan pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi pelanggaran peraturan perundang-undangan, Kode Etik Perusahaan, Prinsip Akuntansi yang berlaku umum, kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, dan tindak kecurangan lainnya.

Jumlah Penanganan Pengaduan yang Masuk dan Diproses Pada Tahun 2025

Selama tahun 2025, Perseroan tidak menerima adanya laporan pelanggaran yang diterima maupun perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Type of Violation

Various types of irregularities and violations that can be reported include violations of laws and regulations, the Company's Code of Conduct, generally accepted Accounting Principles, the Company's operational policies and procedures, and other acts of fraud.

Number of Complaints Handled and Processed in 2025

In 2025, the Company did not receive any reports of violations that required investigation or follow-up.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Seluruh Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk menerapkan GCG dengan mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 21/2015. Pedoman tersebut selanjutnya diuraikan secara dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 31/2015, dengan memuat 5 aspek tata kelola perusahaan terbuka, 8 prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, serta 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Berikut ini merupakan hasil self-assessment penerapan GCG berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK:

All publicly-listed companies are required to implement GCG by referring to the Guidelines for Corporate Governance of Public Companies as regulated under Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 21/2015. These guidelines are further elaborated in OJK Circular Letter No. 31/2015, which covers 5 aspects of corporate governance applicable to public companies, 8 principles of good corporate governance, and 25 recommendations for implementing the aspects and principles of good corporate governance. The following presents the results of the Company's self-assessment on the implementation of GCG in accordance with the provisions set by the OJK:

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Description
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham Aspect 1: Public Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights			
1.	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1 Increasing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Companies have technical methods or procedures for collecting votes, both openly and privately, that prioritize independence and the interests of shareholders.	Diterapkan Mekanisme pengambilan keputusan dan hasil pemungutan suara pada saat RUPS diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Tata Tertib Penyelenggaraan RUPS. Complied The decision-making mechanism and voting results at the GMS are stipulated in the Corporate Governance Guidelines and GCG Implementation Guidelines.



No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Description
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Diterapkan Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.
		All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of Public Companies are present at the Annual GMS.	Complied All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Public Company attended the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the fiscal year 2024, as disclosed in this Annual Report.
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Diterapkan Seluruh ringkasan risalah RUPS dapat diakses melalui situs web Perseroan www.ptvti.co.id .
		A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.	Complied The complete summary of the minutes of the GMS can be accessed through the Company's website at www.ptvti.co.id .
2.	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Diterapkan Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor termuat dalam Pedoman Perilaku GOLD.
	Principle 2 Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors	Public Companies have a communication policy with shareholders or investors.	Complied The communication policy with Shareholders or investors is stipulated in the GOLD Code of Conduct.
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Diterapkan Kebijakan komunikasi diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan juga dalam situs web Perseroan.
		Public Companies disclose the Public Company communication policy with shareholders or investors on the Website.	Complied The communication policy is disclosed in the Annual Report and on the Company's website.
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners			
3.	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Diterapkan Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan.
	Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.	Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the conditions of the Public Companies.	Complied The determination of the number of members of the Board of Commissioners has taken the Company's condition into account.



No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Description
		<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Determination of the composition of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.</p>	<p>Diterapkan Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Aspek keberagaman Dewan Komisaris juga telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>Complied The determination of the composition of the Board of Commissioners has considered the diversity of expertise, knowledge, and experience required. The aspect of diversity within the Board of Commissioners has also been disclosed in this Annual Report.</p>
4.	<p>Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Principle 4 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</p>	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Reports of Public Companies.</p> <p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.</p> <p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors.</p>	<p>Diterapkan Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Complied The Board of Commissioners has its own self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.</p> <p>Diterapkan Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>Complied The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in this Annual Report.</p> <p>Diterapkan Mekanisme pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Complied The mechanism for the dismissal of members of the Board of Commissioners is governed by the Company's Articles of Association.</p> <p>Diterapkan Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dalam proses nominasi dan remunerasi anggota Direksi.</p> <p>Complied The Board of Commissioners has a policy in place for the nomination and remuneration process of the members of the Board of Directors.</p>



No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Description
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors			
5.	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Diterapkan Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan.
	Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of the Public Companies and effectiveness in decision making.	Complied The determination of the number of members of the Board of Directors has taken into account the Company's condition.
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Diterapkan Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Aspek keberagaman Direksi juga telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.
		Determination of the composition of the Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.	Complied The determination of the composition of the Board of Directors has considered the diversity of expertise, knowledge, and experience required. The aspect of diversity within the Board of Directors has also been disclosed in this Annual Report.
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Diterapkan Direktur Perseroan yang membawahi bidang keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan.
		Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Complied The Director of the Company responsible for the finance division has expertise and/or knowledge in accounting and financial management.
6.	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Diterapkan Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.
	Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Complied The Board of Directors has a self-assessment policy in place to evaluate the performance of the Board of Directors.



No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Description
		<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the Annual Reports of Public Companies.</p>	<p>Diterapkan Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>Complied The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors has been disclosed in this Annual Report.</p>
		<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.</p>	<p>Diterapkan Mekanisme pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Complied The mechanism for the dismissal of members of the Board of Directors is governed by the Company's Articles of Association.</p>
7.	<p>Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Principle 7 Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.</p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Public Companies have policies to prevent insider trading.</p>	<p>Diterapkan Perseroan telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading, dengan mengacu pada Peraturan OJK.</p> <p>Complied The Company has a policy in place to prevent insider trading, in accordance with OJK regulations.</p>
		<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.</p>	<p>Diterapkan Perseroan telah memiliki kebijakan, program, dan prosedur yang dilakukan dalam rangka mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap, dan/atau gratifikasi dalam Perseroan.</p> <p>Complied The Company has policies, programs, and procedures implemented to address practices of corruption, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratuities within the Company.</p>
		<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Public Companies have policies regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.</p>	<p>Diterapkan Kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor diatur dalam standar prosedur operasional terkait.</p> <p>Complied The policy for the selection and capacity building of suppliers or vendors is governed by the relevant standard operating procedures.</p>



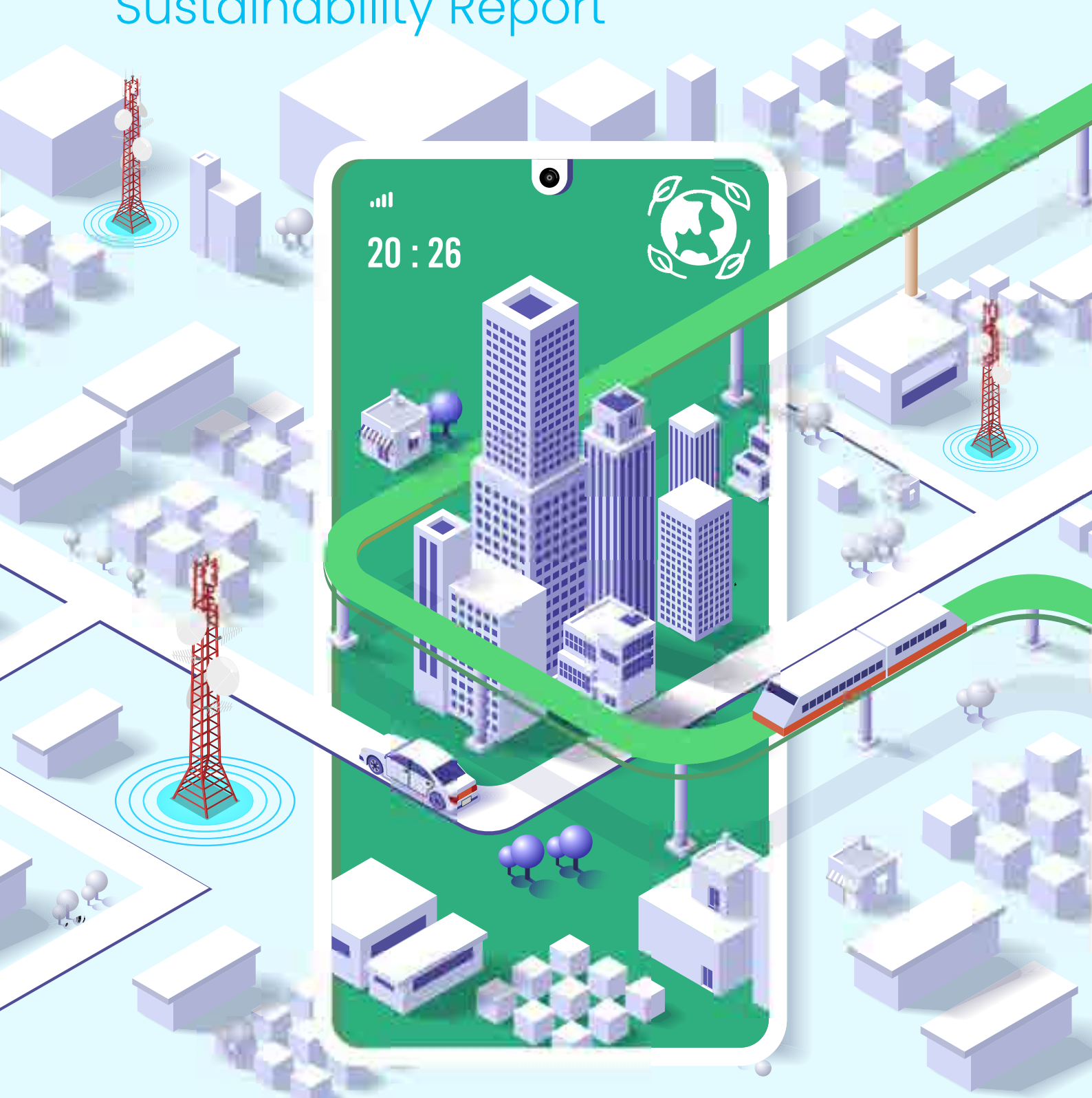
No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Description
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Diterapkan Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
		Public Companies have policies regarding fulfilling creditor rights.	Complied The Company has a policy regarding the fulfillment of creditor rights.
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Diterapkan Perseroan telah memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran (WBS).
		Public Companies have whistleblowing system policies.	Complied The Company has a policy in place for the Whistleblowing System (WBS).
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	Diterapkan Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
		Public Companies have a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and Employees.	Complied The Company has a policy for providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.

Aspek 5: Keterbukaan Informasi
Aspect 5: Information Disclosure

8.	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Diterapkan Perseroan telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.
		Public Companies make wider use of information technology apart from Websites as a medium for information disclosure.	Complied The Company has expanded its use of information technology beyond the website as a medium for information disclosure.
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Diterapkan Perseroan telah mengungkapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.
		Annual Reports of Public Companies disclose the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership of at least 5% (five percent) in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership through the majority and controlling shareholders.	Complied The Company has disclosed its Controlling Shareholder in this Annual Report.

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Report





TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About the Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk tahun 2025 merupakan laporan yang diterbitkan oleh Perseroan. Melalui laporan ini, Perseroan menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan strategi keberlanjutan yang berfokus pada penanganan dampak operasional Perseroan terhadap aspek Ekonomi, Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola yang dinilai berpengaruh signifikan terhadap para pemangku kepentingan maupun kinerja Perseroan serta menjadi perhatian penting bagi pihak Manajemen Perseroan dalam proses pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kepada para pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai komitmen Perseroan dalam menjalankan praktik usaha yang selaras dengan nilai dan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Penyusunan substansi laporan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

The 2025 Sustainability Report of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk is the Company's published sustainability report. Through this report, the Company presents data and information regarding the implementation of its sustainability strategy, which focuses on managing the impacts of the Company's operations on the Economic, Environmental, Social, and Governance aspects that are considered to have a significant influence on stakeholders as well as on the Company's performance. These aspects constitute key areas of concern for the Company's Management in the decision-making process.

This report has been prepared with the aim of informing shareholders, investors, and other stakeholders about the Company's commitment to conducting business practices that align with the values and principles of Sustainable Development. The preparation of the report's content refers to Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, and Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of the Annual Report for Issuers or Public Companies.

STRATEGI KINERJA KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN [A.1]

Corporate Sustainability Strategy [A.1]

Perseroan menyadari bahwa keberlanjutan adalah kunci utama dalam menjaga eksistensi dan ketangguhan bisnis di tengah dinamika industri telekomunikasi yang terus berkembang. Kami berkomitmen untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan, yang keseluruhannya dipandu oleh prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Sebagai bagian dari rantai pasok infrastruktur digital nasional, kami senantiasa memastikan bahwa setiap aktivitas operasional, mulai dari perencanaan hingga pembangunan infrastruktur di lapangan, dijalankan dengan etika bisnis yang tinggi dan standar keselamatan yang ketat. Strategi keberlanjutan ini dirancang dengan tujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Company recognizes that sustainability is a fundamental pillar in maintaining business continuity and resilience amid the dynamic and rapidly evolving telecommunications industry. We are committed to aligning economic growth with social responsibility and environmental stewardship, all of which are guided by the principles of Good Corporate Governance (GCG).

As an integral part of the national digital infrastructure supply chain, the Company consistently ensures that all operational activities, from planning to on-site infrastructure development, are conducted in accordance with high standards of business ethics and stringent safety requirements. This sustainability strategy is designed to generate long-term value for all stakeholders.



Upaya ini kami manifestasikan melalui penguatan empat pilar utama: Ekonomi, Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Strategi ini juga diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam upaya memastikan kontribusi nyata Perseroan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

These efforts are manifested through the strengthening of four core pillars, namely Economic, Environmental, Social, and Governance. The strategy is also aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) to ensure the Company's tangible contribution to advancing sustainable development agendas at both the national and global levels.

Pilar Keberlanjutan Sustainability Pillar	Fokus Utama Main Focus	TPB Terkait SDG
EKONOMI ECONOMIC ASPECT	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin kualitas bangunan menara yang aman dan tahan lama. Meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan. Menggunakan vendor dan tenaga kerja lokal untuk menggerakkan perekonomian lokal. Ensuring the construction quality of tower infrastructure that is safe, reliable, and durable. Continuously enhancing the quality of products and customer services. Utilizing local vendors and workforce to support and stimulate local economic development. 	
LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL ASPECT	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan sisa material pembangunan. Mengelola dampak operasional pembangunan terhadap lingkungan sekitar. Menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Managing residual construction materials in a responsible manner. Mitigating and managing the environmental impacts generated from construction and operational activities in surrounding areas. Ensuring full compliance with applicable environmental laws and regulations. 	
SOSIAL SOCIAL ASPECT	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan implementasi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan dan subkontraktor. Menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Membangun hubungan konstruktif dengan masyarakat sekitar. Menjaga aspek keamanan infrastruktur serta area site dan sekitarnya. Strengthening the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) practices for employees and subcontractors. Ensuring compliance with applicable labor laws and regulations. Fostering constructive and sustainable relationships with surrounding communities. Safeguarding the security of infrastructure assets, including site areas and their surroundings. 	
TATA KELOLA GOVERNANCE ASPECT	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen risiko & pengendalian internal. Menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menegakkan perilaku dan etika bisnis dalam pelaksanaan operasional. Strengthening risk management and internal control systems. Ensuring compliance with all applicable laws and regulations. Upholding business conduct and ethical standards across all operational activities. 	

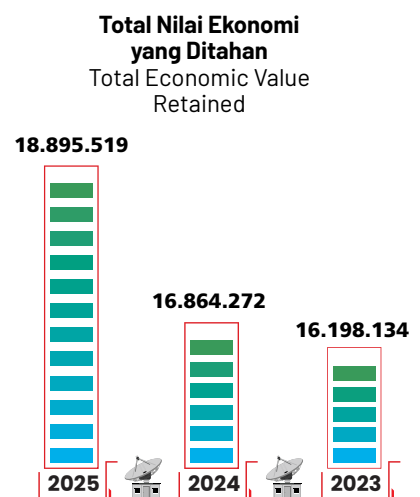
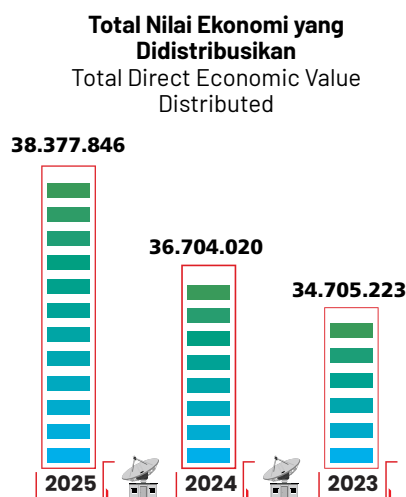
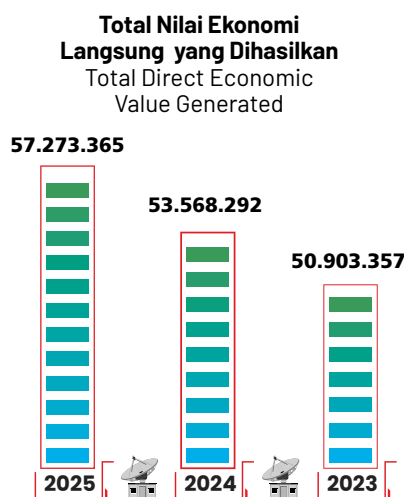


IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN [B.1., B.2., B.3]

Sustainability Performance Highlight [B.1., B.2., B.3]

Aspek Ekonomi Economic Aspect

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Direct Economic Value Generated				
Pendapatan Income	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	55.504.823	52.041.658	47.726.683
Pendapatan Bunga Interest Income	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	1.366.738	1.483.686	1.713.780
Pendapatan Lainnya – Bersih Other Income – Net	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	401.804	42.948	1.462.894
Total Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Total Direct Economic Value Generated	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	57.273.365	53.568.292	50.903.357
Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan Direct Economic Value Distributed				
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	20.671.969	19.984.011	18.680.652
Beban Usaha Operating Expenses	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	11.993.308	10.758.247	9.878.647
Beban Keuangan Financial Expenses	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	-	1.234.754	1.098.811
Pembayaran Pajak Penghasilan Final, Pajak Kini, dan Pajak Tangguhan Payment of Final Income Tax, Current Tax and Deferred Tax	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	5.712.569	4.727.008	5.047.113
Total Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Total Direct Economic Value Distributed	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	38.377.846	36.704.020	34.705.223
Nilai Ekonomi Langsung yang Ditahan Direct Economic Value Retained				
Total Nilai Ekonomi yang Ditahan Total Direct Economic Value Retained	Ribuan Rupiah Thousands of Rupiah	18.895.519	16.864.272	16.198.134





Pelibatan Pihak Lokal

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Perseroan senantiasa mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal (WNI), tercermin dari nihilnya tenaga kerja asing yang bekerja di Perseroan (**100% tenaga kerja adalah WNI**).

Pelibatan Pemasok/Vendor Lokal

Perseroan senantiasa mengutamakan pelibatan pemasok/vendor lokal atau yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan operasional, tercermin dari nihilnya pemasok/vendor asing yang menjadi mitra kerja Perseroan (**100% menggunakan pemasok/vendor lokal**).

Local Party Engagement

Local Labor Utilization

The Company always prioritizes local workers (WNI – Indonesian Citizens), reflected in the zero foreign workers working in the Company (**100% of the workforce are Indonesian citizens**).

Local Supplier/Vendor Engagement

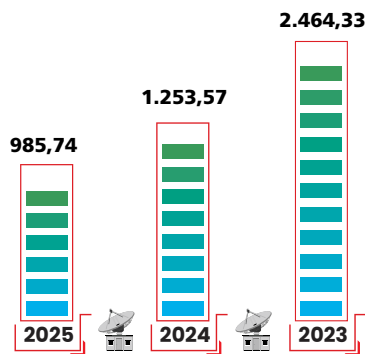
The Company always prioritizes local suppliers/vendors or those operating in Indonesian territory to meet operational needs, as reflected in the zero foreign suppliers/vendors who are the Company’s working partners (**100% local suppliers/vendors**).

Aspek Lingkungan Environmental Aspect

Listrik | Electricity



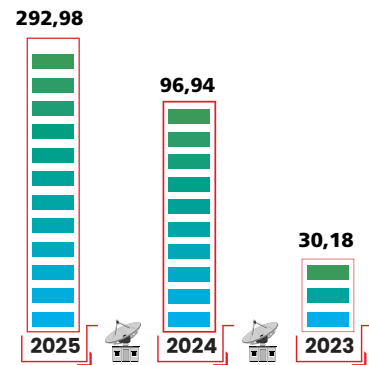
Giga Joule



BBM | Fuel Oil



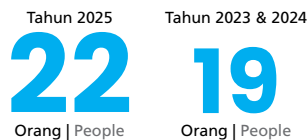
Giga Joule



Aspek Sosial Social Aspect

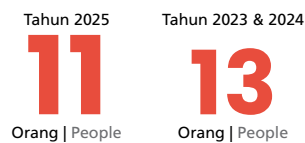
Karyawan Laki-laki

Male Employee



Karyawan Perempuan

Female Employee



Kegiatan CSR

CSR Activity

Investasi untuk Masyarakat

Investment for Community

Juta Rupiah | million





TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sustainability Governance

Penanggung Jawab Pelaksanaan Kinerja Keberlanjutan [E.1., E.2]

Bagi Perseroan, keberlanjutan bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan pilar strategis untuk mencapai pertumbuhan yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Prinsip ini diwujudkan melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten dan holistik di seluruh jenjang organisasi. Kami meyakini bahwa tata kelola yang kuat adalah fondasi utama dalam memitigasi risiko serta memastikan setiap keputusan bisnis selaras dengan etika dan standar keberlanjutan.

Implementasi GCG di lingkungan Perseroan senantiasa mengacu pada regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Struktur tata kelola di Perseroan, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, menjalankan fungsi pengawasan dan eksekutif secara independen dan akuntabel. Penjelasan mendalam mengenai profil, kompetensi, serta tanggung jawab masing-masing organ tata kelola telah disajikan secara komprehensif pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam laporan ini.

Guna memastikan strategi keberlanjutan terimplementasi dengan baik dalam operasional harian, Direksi telah memberikan mandat kepada unit-unit kerja terkait. Unit-unit ini bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengeksekusi inisiatif keberlanjutan sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga setiap dampak operasional dapat terukur dan terkelola dengan prinsip tanggung jawab yang tinggi. Berikut ini merupakan unit penanggung jawab kinerja keberlanjutan di Perseroan berikut bidang tugas dan tanggung jawabnya:

Party Responsible for Sustainability Implementation [E.1., E.2]

For the Company, sustainability is not merely a moral obligation, but a strategic pillar to achieve healthy, competitive, and sustainable long-term growth. This principle is realized through the consistent and holistic implementation of **Good Corporate Governance (GCG)** across all levels of the organization. We believe that strong governance serves as the primary foundation for effective risk mitigation and ensures that every business decision is aligned with ethical standards and sustainability principles.

The implementation of GCG within the Company is consistently aligned with prevailing regulations, in particular Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The Company's governance structure, comprising the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, performs supervisory and executive functions in an independent and accountable manner. A detailed explanation of the profiles, competencies, and responsibilities of each governance organ is comprehensively presented in the Corporate Governance chapter of this report.

To ensure that the sustainability strategy is effectively embedded in daily operations, the Board of Directors has mandated the relevant working units. These units bear full responsibility for managing and executing sustainability initiatives in accordance with their respective functions, thereby ensuring that operational impacts are measurable and managed with a high level of accountability. The following section outlines the units responsible for the Company's sustainability performance, along with their respective roles and responsibilities.

Penanggung Jawab Responsible Party	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Areas of Duties and Responsibilities
Corporate Secretary	Mengoordinir pelaksanaan program-program CSR terkait pengembangan sosial dan masyarakat. Coordinate the implementation of CSR programs related to social and community development.
HRD & GA	Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sistem pengupahan dan pelatihan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manage Human Resources, as well as the employee compensation system and training, in accordance with applicable regulations.
Procurement	Melakukan seleksi pemasok dan memfasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional. Conduct supplier selection and facilitate the procurement of goods and services to support operations.
Marketing	Memastikan jaminan kualitas layanan kepuasan pelanggan. Ensure quality assurance of customer satisfaction services



Penanggung Jawab
Responsible Party

Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Areas of Duties and Responsibilities

- General Affairs (Kantor Pusat)
- Project Department berkoordinasi dengan Divisi HSE PT Tower Bersama Infrastructure Tbk selaku Induk Perseroan (Operasional Proyek)
- General Affairs (Head Office)
- Project Department, in coordination with the HSE Division of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, the Company's parent entity (Project Operations)

Memastikan aspek keselamatan dan keamanan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan operasional. | Ensure safety and security aspects, as well as Occupational Health and Safety (OHS), in operational activities.

General Affairs

Melakukan pengelolaan lingkungan (penggunaan energi dan air).
Manage environmental aspects (energy and water usage).

Program Pengembangan Kompetensi Organ Tata Kelola Keberlanjutan [E.2]

Perseroan memandang pentingnya penguatan kapasitas organ tata kelola dalam merespons dinamika isu keberlanjutan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi organ tata kelola keberlanjutan terhadap perkembangan terkini dalam pengelolaan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, guna memastikan pengambilan keputusan strategis yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagi kepentingan tersebut, maka Perseroan memberikan program-program pengembangan kompetensi bagi organ tata kelola berkelanjutan. Berikut ini merupakan program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh organ tata kelola keberlanjutan Perseroan selama tahun 2025 adalah *Training* Fiber Optic dan Fiber to the Home.

Penilaian Risiko Keberlanjutan [E.3]

Perseroan memahami bahwa setiap aktivitas bisnis dan operasional tidak lepas dari faktor ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian target strategis. Ketidakpastian tersebut merupakan sumber risiko yang berpotensi menghambat keberlangsungan usaha sekaligus memengaruhi kemampuan Perseroan dalam mengoptimalkan peluang pertumbuhan. Mengingat sumber risiko dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, pengelolaan risiko kini telah menjadi prioritas utama dalam kerangka strategi jangka panjang Perseroan.

Sebagai bentuk perwujudan prinsip kehati-hatian (*prudence*), Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh lini bisnis. Sistem ini berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko-risiko kritis guna memastikan setiap langkah operasional berjalan sesuai dengan koridor tata kelola yang baik.

Competency Development Program for Sustainability Governance Bodies [E.2]

The Company recognizes the importance of strengthening the capacity of its governance bodies in responding to the evolving dynamics of sustainability issues. Accordingly, the Company is committed to continuously enhancing the competencies of its sustainability governance organs in line with the latest developments in the management of economic, environmental, and social aspects, to ensure that strategic decision-making remains aligned with the principles of sustainable development.

To support this objective, the Company provides competency development programs for its sustainability governance bodies. The competency development programs attended by the Company's sustainability governance organs in 2025 were Fiber Optic Training and Fiber to Home Training.

Sustainability Risk Assessment [E.3]

The Company acknowledges that all business and operational activities are inherently subject to uncertainty, which may affect the achievement of strategic objectives. Such uncertainties constitute sources of risk that may impede business continuity and impact the Company's ability to optimize growth opportunities. As risk drivers may originate from both internal and external environments, risk management has become a key priority within the Company's long-term strategic framework.

As an embodiment of the prudence principle, the Company has implemented an integrated risk management system across all lines of business. This system is designed to identify, assess, and control critical risks, thereby ensuring that operational activities are conducted in accordance with sound governance practices.



Dalam implementasinya, Perseroan telah menyusun serangkaian langkah mitigasi yang komprehensif, yang disesuaikan dengan klasifikasi dan tingkat kerawanan risiko. Strategi mitigasi ini dilakukan melalui optimalisasi sumber daya internal serta pengembangan rencana aksi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang sistematis ini, Perseroan berupaya meminimalkan dampak negatif, mencegah terjadinya insiden fatal, serta menjaga stabilitas kinerja usaha demi memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Uraian selengkapnya terkait sistem Manajemen Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Pelibatan Pemangku Kepentingan [E.4]

Perseroan meyakini bahwa hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pertumbuhan jangka panjang. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perseroan senantiasa berinteraksi dengan berbagai kelompok maupun individu yang memiliki pengaruh serta keterkaitan langsung dengan operasional. Atas dasar tersebut, Perseroan berkomitmen untuk membangun komunikasi yang efektif dan inklusif guna menjalin sinergi yang berkelanjutan.

Pelibatan pemangku kepentingan dilakukan secara terukur untuk mengakomodasi berbagai harapan serta aspirasi mereka. Masukan yang diperoleh melalui proses dialog ini menjadi referensi penting bagi Perseroan dalam memetakan isu-isu material serta menyusun strategi keberlanjutan yang relevan.

Melalui pendekatan ini, Manajemen Perseroan dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai isu-isu strategis dari perspektif pemangku kepentingan. Hasil dari proses keterlibatan tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan perusahaan, guna memastikan terciptanya nilai bersama (*shared value*) bagi Perseroan maupun para pemangku kepentingan.

Berikut ini adalah topik yang kami anggap penting untuk disampaikan dalam laporan ini sebagai wujud komunikasi guna memberi nilai tambah kepada masing-masing pemangku kepentingan:

In its implementation, the Company has established a comprehensive set of mitigation measures tailored to the classification and severity of identified risks. These mitigation strategies are executed by optimizing internal resources and developing sustainable action plans. Through this systematic approach, the Company seeks to minimize potential adverse impacts, prevent critical incidents, and maintain business performance stability in order to deliver added value to all stakeholders.

A more detailed explanation of the Company's Risk Management system is presented in the Corporate Governance chapter of this report.

Stakeholder Engagement [E.4]

The Company believes that harmonious relationships with all stakeholders are essential to achieving long-term sustainable growth. In conducting its business activities, the Company continuously engages with various groups and individuals who have direct influence on and relevance to its operations. Accordingly, the Company is committed to fostering effective and inclusive communication to build sustainable synergies.

Stakeholder engagement is carried out in a structured and measurable manner to accommodate diverse expectations and aspirations. Input obtained through these dialogue processes serves as an important reference for the Company in identifying material issues and formulating relevant sustainability strategies.

Through this approach, the Company's Management gains a comprehensive understanding of strategic issues from the stakeholders' perspectives. The outcomes of stakeholder engagement are subsequently integrated into the Company's decision-making processes and management policies, ensuring the creation of shared value for both the Company and its stakeholders.

The following are the key topics that the Company considers important to be disclosed in this report as part of its engagement efforts to deliver added value to each stakeholder group:



Pemangku Kepentingan Stakeholders	Dasar Pemilihan Basis of Selection	Pendekatan Keterlibatan Approach	Topik Utama Main Topic	Respons dan Tindak Lanjut Perseroan Company Response and Follow-up
Pelanggan Customers	Pemangku kepentingan yang menggunakan dan merasakan manfaat langsung dari jasa yang disediakan oleh Perseroan Stakeholders who use and experience direct benefits from the services provided by the Company	Komunikasi sehari-hari baik secara <i>online</i> atau <i>offline</i> Daily communication, both online and offline	Kualitas layanan yang Diberikan Quality of service provided	Layanan <i>Customer Service</i> Customer Service Sarana informasi via <i>Website</i> Information via website
Tenaga Kerja Employees	Pemangku kepentingan yang berperan penting dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional untuk mencapai keberlangsungan bisnis Perseroan Stakeholders who play an important role in carrying out all operational activities to achieve the Company's business sustainability	Kegiatan kerja setiap hari/ pertemuan berkala. Daily work activities/periodic meetings.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Fulfillment of labor rights Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety (OHS)	Pemberian upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), Jaminan Asuransi Kesehatan & Keselamatan BPJS, fasilitas, dan tunjangan lainnya Provision of wages according to the Regional Minimum Wage (UMR), Guarantee of Health & Safety Insurance, facilities and other benefits Sarana dan Prasarana Kerja yang sesuai dengan standar dan regulasi K3 Work Facilities and Infrastructure that comply with OHS standards and regulations
Masyarakat Community	Pemangku kepentingan yang berpotensi terkena maupun memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis Perseroan Stakeholders who have the potential to be affected or have a significant impact on the continuity of the Company's business	Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan pertemuan dengan perwakilan masyarakat setempat Corporate Social Responsibility (CSR) activities and meetings with local community representatives	Pemberian dampak nyata yang positif Provision of a real positive impact	Kegiatan CSR di bidang sosial kemasyarakatan CSR activities in the social sector Pemberian pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan kompetensi lainnya bagi para tenaga kerja Provision of training, certification and other competency development programs for employees
Pemerintah Government	Pemangku kepentingan yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan peraturan perundangan-perundangan yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia Stakeholders who have the authority to create and enforce laws and regulations that must be complied with by all companies operating in the territory of the Republic of Indonesia	Pertemuan dan komunikasi saat pemenuhan dan sosialisasi peraturan seperti perizinan dan pelaporan Meetings and communication during compliance and socialization of regulations such as licensing and reporting	Hubungan yang Konstruktif dengan regulator Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Constructive Relationship with regulators, Compliance with applicable laws and regulations	Pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah/Pemda dan regulator usaha yang terkait lainnya seperti BEI, OJK, dll Fulfillment of obligations towards the Government/Regional Government and other related business regulators such as BEI, OJK, etc
Pemegang Saham dan Investor Shareholders and Investors	Pemangku kepentingan yang berperan sebagai penyedia modal untuk menjalankan aktivitas bisnis dan operasional Perseroan Stakeholders who are the providers of capital to carry out the Company's business and operational activities	RUPS, <i>investor gathering</i> GMS, investor gathering	Keterbukaan informasi, Tingkat Pengembalian Investasi Information disclosure, Rate of Return on Investment	Penyampaian informasi yang transparan dan peningkatan kinerja usaha Transparent delivery of information and improvement of business performance
Pemasok dan Mitra Usaha Suppliers and Business Partners	Pemangku kepentingan yang berperan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dapat menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional Perseroan Stakeholders whose role is to fulfill the need for goods and services that can support the implementation of the Company's business and operational activities	Komunikasi saat proses tender Communication during the tender process	Kemudahan kerja sama dan perlakuan yang Setara Ease of cooperation and equal treatment	Transparansi prosedur kerja sama, memberi kesempatan yang sama atas dasar kemampuan dan kualitas Transparency of cooperation procedures, equal opportunities based on ability and quality

Permasalahan terkait Pelaksanaan Kinerja Keberlanjutan [E.5]

Perseroan menyadari bahwa industri infrastruktur telekomunikasi menghadapi tantangan unik, terutama terkait aspek kesehatan dan keselamatan kerja di ketinggian serta dinamika sosial di sekitar lokasi pembangunan. Menghadapi hal tersebut, kami tidak hanya mengandalkan kepatuhan

Challenges in the Sustainability Implementation [E.5]

The Company recognizes that the telecommunications infrastructure industry is subject to unique challenges, particularly with respect to occupational health and safety in working at heights, as well as social dynamics within communities surrounding construction sites. In addressing these challenges, the Company does



regulasi, tetapi secara aktif memperkuat standar operasional melalui sertifikasi teknis, pengawasan ketat terhadap rantai pasok, dan komunikasi terbuka dengan masyarakat lokal. Bagi Perseroan, menangani tantangan ini secara proaktif adalah kunci untuk memastikan setiap infrastruktur yang dibangun memberikan nilai tambah yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kelestarian lingkungan.

not rely solely on regulatory compliance, but actively strengthens its operational standards through technical certifications, stringent oversight of the supply chain, and open communication with local communities. For the Company, proactively managing these challenges is essential to ensuring that every infrastructure project delivers sustainable value without compromising safety and environmental stewardship.

Berikut ini adalah uraian terkait tantangan/permasalahan yang dihadapi selama tahun 2025 berikut upaya penanganannya:

The following is an overview of the challenges/issues encountered in 2025, along with the corresponding mitigation measures undertaken by the Company:

Tantangan/Permasalahan Challenges/Problems	Upaya Penanganannya Mitigation
<p>Penyesuaian terhadap regulasi-regulasi daerah yang berlaku di area tempat menara Perseroan berada. Adaptation to local regulations applicable in areas where the Company's towers are located.</p>	<p>Koordinasikan pengawasan subkontraktor guna memastikan kepatuhan dengan regulasi lokal yang memerlukan konsistensi Coordinating and strengthening oversight of subcontractors to ensure consistent compliance with applicable local regulations.</p>
<p>Aktivitas operasional berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan hidup dan penolakan Masyarakat terhadap proyek menara yang dibangun dan dikelola oleh Perseroan. Operational activities with potential environmental degradation risks and community resistance to tower projects developed and managed by the Company.</p>	<p>Dalam upaya menangani permasalahan pencemaran lingkungan hidup, Perseroan menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebelum memulai pembangunan proyek menara. Dalam hal menangani penolakan masyarakat, Perseroan menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat sekitar dan melakukan hubungan dan komunikasi secara intens kepada masyarakat di sekitar proyek menara Perseroan. To address potential environmental impacts, the Company prepares an Environmental Impact Assessment (AMDAL) prior to the commencement of tower construction projects. To mitigate community resistance, the Company carries out Corporate Social Responsibility (CSR) programs for surrounding communities and maintains intensive engagement and open communication with communities located near the Company's tower projects.</p>





KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance

Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan [F.1]

Perseroan meyakini bahwa keberlanjutan tidak hanya dicapai melalui kebijakan tertulis, tetapi melalui internalisasi nilai-nilai yang menjadi budaya kerja di seluruh lini organisasi. Kami menanamkan kesadaran kepada setiap insan Perseroan, mulai dari staf manajerial hingga teknisi/operator di lapangan, bahwa setiap aktivitas pembangunan infrastruktur memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui kampanye internal yang berkelanjutan, kami mendorong perubahan pola pikir dari sekadar penyelesaian proyek menuju praktik kerja yang bertanggung jawab, efisien, dan mengutamakan keselamatan sebagai prioritas yang tidak dapat ditawar.

Internalisasi budaya ini diwujudkan melalui serangkaian program peningkatan kapasitas dan penguatan etika. Di tingkat operasional, Perseroan secara rutin menyelenggarakan pelatihan keselamatan kerja (*safety briefing*) dan *workshop* pengelolaan limbah konstruksi untuk memastikan setiap tim lapangan memiliki kompetensi dalam memitigasi risiko lingkungan dan sosial. Selain itu, kami juga memperkuat aspek tata kelola melalui sosialisasi kode etik secara berkala, guna memastikan bahwa proses perizinan lahan dan interaksi dengan mitra bisnis selalu mengedepankan integritas dan transparansi.

KINERJA EKONOMI

Economic Performance

Selaras dengan upaya untuk menjalankan praktik usaha yang berkelanjutan, Perseroan senantiasa berupaya untuk memberikan manfaat positif bagi para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu manfaat yang diberikan berupa pemberian manfaat ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para pemangku kepentingan yang terdampak ataupun memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan bisnis Perseroan.

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Penjualan, Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi [F.2]

Terkait dengan perbandingan target dan realisasi atas kinerja keuangan (pendapatan dan laba rugi), telah diuraikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen.

Establishment of a Sustainability Culture [F.1]

The Company believes that sustainability is achieved not merely through written policies, but through the internalization of values that are embedded as a work culture across all levels of the organization. We instill awareness among all Company personnel, from management staff to on-site technicians and operators, that every infrastructure development activity has a tangible impact on society and the environment. Through continuous internal campaigns, the Company encourages a shift in mindset from a sole focus on project completion toward responsible and efficient work practices, with safety positioned as a non-negotiable priority.

This cultural internalization is realized through a series of capacity-building programs and ethical reinforcement initiatives. At the operational level, the Company regularly conducts occupational safety training (*safety briefings*) and construction waste management workshops to ensure that field teams possess the necessary competencies to mitigate environmental and social risks. In addition, the Company strengthens governance practices through periodic dissemination of its Code of Conduct, ensuring that land permitting processes and interactions with business partners consistently uphold the principles of integrity and transparency.

In line with its commitment to sustainable business practices, the Company continuously strives to deliver positive value to stakeholders in order to achieve business growth that is aligned with sustainability principles. One such contribution is the provision of economic benefits aimed at improving the living standards and welfare of stakeholders who are impacted by, or have a significant influence on, the continuity of the Company's business.

Comparison of Target and Realization of Production, Sales, Investment, Income and Profit and Loss [F.2]

The comparison between financial performance targets and actual results, including revenue and profit or loss, is presented in the Management Discussion and Analysis chapter of this report.



Perbandingan Target dan Kinerja Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan [F.3]

Selama tahun 2025, Perseroan tidak melakukan investasi dan memiliki proyek yang sejalan dengan prinsip keuangan keberlanjutan.

Comparison of Investment Targets and Performance in Financial Instruments or Projects Aligned with Sustainable Finance [F.3]

In 2025, the Company did not make any investments or undertake projects aligned with sustainable finance principles

PRAKTIK PENGADAAN Procurement Practices

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan operasional, Perseroan melakukan praktik pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan aspek efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran. Hal tersebut merupakan wujud komitmen pelaksanaan tata kelola keberlanjutan dalam rangka meminimalisasi risiko penyimpangan yang mencakup praktik korupsi, penerimaan gratifikasi, serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Seluruh pembelian barang-barang atau pengadaan servis harus didasari oleh harga, kualitas, ketersediaan, syarat dan kondisi. Dalam melakukan perjanjian dengan para pemasok, maka transaksi dan harga tersebut harus didasari oleh praktik-praktik pasar yang bijaksana, dengan melalui sedikitnya 3 (tiga) pemasok. Pada tahun 2025, Perseroan menjalin kemitraan dengan 134 pemasok, 75% di antaranya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seluruh pemasok dan mitra usaha Perseroan beroperasi di Indonesia. Melalui kemitraan ini, Perseroan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan perekonomian nasional.

To support its operations, the Company practices the procurement of goods and services focusing on efficiency, transparency, accountability, and fairness. This reflects the Company's commitment to implementing sustainable governance practices aimed at minimizing the risk of deviations, including corruption, receipt of gratuities, and unhealthy business competition.

All purchases of goods and procurement of services are based on considerations of price, quality, availability, terms, and conditions. In entering into agreements with suppliers, transactions and pricing are determined in accordance with prudent market practices, involving at least 3 (three) suppliers. In 2025, the Company established partnerships with 134 suppliers, 75% of which were Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). All of the Company's suppliers and business partners operate within Indonesia. Through these partnerships, the Company contributes to the growth of domestic industries, which is a key driver in strengthening the national economy

KINERJA LINGKUNGAN HIDUP Environmental Performance

Alokasi Biaya Lingkungan Hidup [F.4]

Pada tahun 2025, Perseroan mengeluarkan biaya lingkungan hidup sebesar Rp448,02 untuk keperluan pembelian energi (listrik dan BBM) untuk mendukung operasional Perseroan.

Environmental Cost Allocation [F.4]

In 2025, the Company incurred environmental expenditures amounting to Rp448.02 for the purchase of energy (electricity and fuel) to support the Company's operations.



Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan [F.5]

Dalam upaya mengurangi dampak negatif operasional terhadap lingkungan hidup, Perseroan berinisiatif untuk melakukan:

1. Penghematan Kertas
Perseroan telah memberlakukan kebijakan terkait pemakaian kertas dalam menjalankan aktivitas operasional. Kebijakan tersebut merupakan upaya Perseroan dalam hal kampanye *go green* yang di antaranya meliputi optimalisasi penggunaan kertas bekas untuk mencetak dokumen yang bersifat internal serta memanfaatkan email blast dalam menyampaikan pengumuman atau sosialisasi berbagai kebijakan.
2. Pengurangan Sampah Plastik
Melalui kebijakan ini, Perseroan mengimbau karyawan untuk membawa wadah air minum masing-masing (*tumbler* maupun gelas) yang dapat digunakan pada jam kerja sehari-hari dan menyediakan tempat pengisian air minum bagi karyawan.

Dari sisi operasional di bidang pengerjaan pembangunan menara telekomunikasi, Perseroan senantiasa memastikan material konstruksi menara yang digunakan tidak mengandung material yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

Penggunaan Energi [F.6., F.7]

Perseroan menggunakan sumber energi listrik untuk operasional perkantoran dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan pengoperasian genset dan transportasi. Dalam melakukan pencatatan penggunaan energi, Perseroan menghitung daya Listrik dan besaran BBM yang digunakan dari tagihan-tagihan yang dibayarkan selama tahun buku. Hasil dari perhitungan tersebut selanjutnya dikonversi dalam satuan energi dalam Standar International "Giga Joule", dengan angka konversi sebagai berikut:

- 1 kWh Listrik = 0,0036 Giga Joule.
- 1 liter BBM Solar = 0,038 Giga Joule.

Berikut merupakan jumlah dan intensitas pemakaian energi dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Jenis Energi Type of Energy	Satuan Unit	2025	2024	2023
Listrik Electricity	Giga Joule	985,74	1.253,57	2.464.33
BBM Fuel Oil		292,98	96,94	30,18

Use of Environmentally Friendly Materials [F.5]

To mitigate the negative environmental impact of its operations, the Company has implemented the following initiatives:

1. Paper Conservation
The Company has implemented a policy regarding paper usage in its operational activities. This policy is part of the Company's "go green" campaign, which includes optimizing the use of recycled paper for printing internal documents and utilizing email blasts to communicate announcements or socializations of various policies.
2. Plastic Waste Reduction
Through this policy, the Company encourages employees to bring their own drinking containers (tumblers or glasses) for daily use during work hours and provides water refill stations for employees.

In terms of the operations in telecommunications tower construction activities, the Company consistently ensures that the construction materials used do not contain substances that may harm environmental sustainability or pose health risks to surrounding communities.

Energy Consumption [F.6., F.7]

The Company utilizes electrical energy for office operations and fuel oil for the operation of generators and transportation. In recording energy consumption, the Company calculates electricity usage and fuel consumption based on utility and fuel invoices paid during the fiscal year. The calculated figures are subsequently converted into energy units using the international standard of Gigajoules (GJ), with the following conversion factors:

- 1 kWh of electricity = 0.0036 Gigajoules.
- 1 liter of diesel fuel = 0.038 Gigajoules.

The following table presents the total energy consumption and energy intensity over the past 3 (three) years:



Guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, Perseroan berinisiatif untuk melakukan efisiensi energi dengan beberapa upaya, di antaranya:

1. Peremajaan dan servis rutin kendaraan.
2. Mematikan perangkat kerja elektronik pada saat tidak digunakan.
3. Mengurangi penggunaan lampu yang berlebihan.
4. Mematikan lampu pada saat waktu istirahat siang.

Hingga akhir periode pelaporan, Perseroan belum menyusun strategi penggunaan energi terbarukan sebagai substitusi penggunaan bahan bakar energi fosil. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, Perseroan akan mulai beralih menggunakan energi terbarukan sebagai upaya untuk mewujudkan program pemerintah *Net Zero Emissions* di tahun 2060 mendatang.

Penggunaan Air [F.8]

Perseroan menggunakan air dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Dikarenakan Perseroan menyewa gedung perkantoran untuk Kantor Pusat, maka jumlah dan nilai pembelian air sudah termasuk dalam biaya jasa sewa gedung yang dibayarkan secara rutin.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati [F.9, F.10]

Seluruh wilayah operasional Perseroan tidak berada di atau dekat dengan daerah konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga aspek konservasi keanekaragaman hayati tidak relevan untuk diungkapkan. Meski demikian, Perseroan senantiasa mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan hidup.

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca [F.11, F.12]

Salah satu faktor pemicu terjadinya pemanasan global yang menjadi penyebab perubahan iklim secara ekstrim adalah meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Perseroan menyadari bahwa pengelolaan operasional yang dijalankan menghasilkan emisi GRK sebagai akibat dari penggunaan energi. Oleh sebab itu, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengendalikan jumlah emisi GRK yang dilepaskan ke udara.

To reduce the negative environmental impact, the Company has initiated energy efficiency measures as follows:

1. Vehicle regular maintenance and servicing.
2. Turning off electronic devices when not in use.
3. Reducing excessive lighting usage.
4. Turn off lights during lunch breaks

As of the end of the reporting period, the Company has not yet developed a strategy for using renewable energy as a substitute for fossil fuel-based energy. However, it is possible that in the future, the Company will begin transitioning to renewable energy as part of its commitment to supporting the government's *Net Zero Emissions* program by 2060.

Water Usage [F.8]

The Company utilizes water supplied by the regional water utility (PDAM) to meet its daily operational needs. As the Company leases its head office premises, the volume and cost of water consumption are included in the building lease service fees paid on a regular basis.

Biodiversity Management [F.9, F.10]

All of the Company's operational areas are not located in or near conservation areas with high biodiversity value as regulated under applicable laws and regulations. Accordingly, biodiversity conservation is not considered a material aspect for disclosure. Nevertheless, the Company remains supportive of biodiversity conservation initiatives undertaken by the Government and other parties in support of environmental preservation.

Greenhouse Gas Emissions Control [F.11, F.12]

One of the key drivers of global warming and extreme climate change is the increasing level of Greenhouse Gas (GHG) emissions. The Company recognizes that its operational activities generate GHG emissions as a result of energy consumption. Accordingly, the Company is committed to continuously managing and controlling the level of GHG emissions released into the atmosphere.



Dalam upaya pengendalian emisi GRK, Perseroan melakukan inventarisasi emisi yang dihasilkan melalui perhitungan emisi GRK langsung (Cakupan 1) yang berasal dari penggunaan solar dan emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) yang berasal dari penggunaan energi listrik di kantor. Dalam melakukan perhitungan emisi GRK, Perseroan menggunakan rumus perhitungan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006, yaitu dengan cara mengalikan nilai konsumsi energi dengan default faktor emisi default IPCC. Default faktor emisi untuk solar dan listrik sebagai berikut:

- Solar: 2,68 kg CO₂/liter
- Listrik: 0,87 kg CO₂/kWh

Berikut ini adalah perhitungan emisi GRK Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Jenis Emisi Type of Emissions	Satuan Unit	2025	2024	2023
Emisi Cakupan 1 dari: Scope 1 Emissions from:				
Solar (BBM) Diesel Fuel	kg CO ₂ e	20.662,80	6.836,68	2.128,72
Total Emisi Cakupan 1 Total Scope 1 Emissions	kg CO ₂ e	20.662,80	6.836,68	2.128,72
Emisi Cakupan 2 dari: Scope 2 Emissions from:				
Listrik Electricity	kg CO ₂ e	238.221,01	302.946,34	595.545,37
Total Emisi Cakupan 2 Total Scope 2 Emissions	kg CO ₂ e	238.221,01	302.946,34	595.545,37
Total Emisi Keseluruhan Total Overall Emissions	kg CO ₂ e	258.883,81	309.783,02	597.674,09

Dalam upaya mengurangi pelepasan emisi GRK, Perseroan telah menerapkan kebijakan hemat energi di kantor pusat.

Pengelolaan Limbah [F.14., F.15]

Selama tahun 2025, Perseroan telah melakukan pengelolaan limbah yang berasal dari material sisa pada proses pembangunan menara telekomunikasi. Dalam mengelola limbah, Perseroan menggunakan dengan 2 (dua) metode, pertama adalah dengan menyerahkan pengelolaan limbah kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin resmi untuk mengelola limbah, sedangkan kedua adalah dengan melakukan daur ulang terhadap material sisa yang masih dapat digunakan kembali.

Pada periode yang sama, tidak terjadi tumpahan atau kebocoran limbah di seluruh wilayah operasional Perseroan. Hal ini disebabkan Perseroan tidak menghasilkan limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga potensi tumpahan limbah tidak dapat terjadi.

As part of its GHG emissions management efforts, the Company conducts an inventory of emissions through the calculation of direct GHG emissions (Scope 1) arising from diesel fuel consumption and indirect GHG emissions (Scope 2) generated from electricity usage at its offices. In calculating GHG emissions, the Company applies the methodology set out by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006, by multiplying energy consumption data by the applicable IPCC default emission factors. The default emission factors used are as follows:

- Diesel fuel: 2.68 kg CO₂ per liter
- Electricity: 0.87 kg CO₂ per kWh

The following table discloses the Company's GHG emissions calculations over the past 3 (three) years:

To reduce GHG emissions, the Company has implemented energy efficiency policies at its head office.

Waste Management [F.14., F.15]

Throughout 2025, the Company managed waste generated from residual materials arising from telecommunications tower construction activities. In managing such waste, the Company applied 2 (two) approaches; namely first, by assigning waste management to licensed third parties authorized to handle waste; and second, by recycling residual materials that remain suitable for reuse.

During the same reporting period, there were no incidents of waste spills or leakages across the Company's operational areas. This was due to the fact that the Company does not generate hazardous and toxic waste (B3), thereby eliminating the potential for such incidents.



Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup [F.16]

Selama tahun 2025, Perseroan tidak menerima adanya pengaduan lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya aktivitas bisnis di Perseroan.

Number and Material of Environmental Complaints [F.16]

Throughout 2025, the Company did not receive any environmental complaints arising from its business activities.

KINERJA SOSIAL Social Performance

Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Jasa yang Setara kepada Konsumen [F.17]

Perseroan meyakini bahwa kepuasan dan loyalitas konsumen memiliki signifikansi terhadap pertumbuhan bisnis dan kelangsungan usaha. Karenanya, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik kepada seluruh konsumen tanpa terkecuali dalam rangka meminimalkan peluang munculnya kekecewaan sekaligus meningkatkan kepuasan konsumen dalam menggunakan layanan Perseroan.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perseroan tidak pernah membedakan pelanggan dalam memberikan pelayanan/service. Perseroan juga tidak akan membedakan pemastian mutu layanan yang akan diberikan kepada pelanggan.

Commitment to Providing Equal Services to Consumers [F.17]

The Company believes that customer satisfaction and loyalty are essential to business growth and long-term sustainability. Therefore, the Company is committed to consistently providing the best service to all customers in order to minimize the possibility of dissatisfaction and enhance customer satisfaction with the Company's services.

Referring to the Republic of Indonesia Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the Company ensures that it does not discriminate between customers when providing services. The Company is also committed to maintaining consistent quality assurance for all services provided to customers.

Aspek Ketenagakerjaan

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [F.18]

Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di seluruh area operasional. Perseroan juga membuka kesempatan bagi siapa pun yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras. Bagi Perseroan, keberagaman bukanlah suatu hambatan, namun dapat menjadi modal kuat untuk mempertahankan eksistensi dan kemajuan Perseroan di tengah persaingan industri yang semakin masif. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keberagaman, maka Perseroan akan mendapatkan berbagai sudut pandang terhadap suatu topik atau masalah, sekaligus memperkaya alternatif solusi dalam memecahkan suatu kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional.

Praktik kesetaraan dan non-diskriminasi diterapkan dalam praktik pengelolaan Perseroan secara menyeluruh, tak terkecuali pengelolaan Sumber Daya Manusia. Selain

Employment Aspect

Equal Employment Opportunities [F.18]

The Company always prioritizes the principles of equality and non-discrimination across all areas of its operations. It also offers opportunities to anyone with the necessary competencies, regardless of gender, ethnicity, religion, or race. For the Company, diversity is not a barrier, but rather a valuable asset that strengthens its ability to maintain its existence and progress in the increasingly competitive industry. By adopting the principles of equality and diversity, the Company gains various perspectives on a topic or issue, enriching the range of solutions available to overcome challenges or problems in business and operational activities.

The principles of equality and non-discrimination are applied comprehensively across the Company's management practices, including human resource management. In



merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kebijakan non-diskriminasi tersebut juga selaras dengan Konvensi ILO No: 111/1958 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan (*Discrimination in Respect of Employment and Occupation*). Dengan komitmen seperti itu, maka selama tahun pelaporan tidak ada insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang perlu diambil oleh Perseroan.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [F.19]

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Perseroan senantiasa dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu bentuk kepatuhan yang telah dilakukan adalah pemberlakuan batasan usia dalam merekrut karyawan baru maupun tenaga *outsourcing* adalah minimal 18 tahun.

Di samping itu, Perseroan telah memberlakukan jam kerja operasional selama 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, maka selama tahun pelaporan, tidak tercatat temuan kasus pekerja anak dan kerja paksa di Perseroan.

Komitmen Perseroan untuk tidak mempekerjakan anak juga sejalan dengan Konvensi ILO No. 138/1973 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*), dan Konvensi ILO No. 182/1999 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Elimination of the Worst Forms of Child Labour*). Sedangkan komitmen untuk tidak melakukan kerja paksa selaras dengan Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*), dan Konvensi ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of forced Labour*).

Pemenuhan Kewajiban Pengupahan [F.20]

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha Perseroan tidak terlepas dari kontribusi ide dan inovasi, dedikasi, dan kerja keras para karyawan. Oleh sebab itu, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak karyawan sebagai timbal balik atas kewajiban para karyawan kepada Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan agar tetap produktif adalah dengan memberikan remunerasi berupa imbalan atas jasa karyawan atau gaji pokok.

in addition to complying with Law No. 13 of 2003 on Manpower, the Company's non-discrimination policy is aligned with ILO Convention No. 111/1958 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation. In line with this commitment, there were no incidents of discrimination recorded during the reporting period, nor were any corrective actions required.

Child Labor and Forced Labor [F.19]

Human Resource Management at the Company is consistently conducted in compliance with Law No. 13 of 2003 on Manpower. One form of compliance is the enforcement of a minimum age requirement of 18 years for the recruitment of new employees and outsourced personnel.

In addition, the Company applies standard working hours of 8 (eight) hours per day and 40 (forty) hours per week over 5 (five) working days per week, in accordance with Article 77 of Law No. 13 of 2003 on Manpower. With these policies in place, no cases of child labor or forced labor were identified during the reporting period.

The Company's commitment not to employ child labor is also aligned with ILO Convention No. 138/1973 on Minimum Age for Admission to Employment and ILO Convention No. 182/1999 on Elimination of the Worst Forms of Child Labour. Meanwhile, the Company's commitment to preventing forced labor is consistent with ILO Convention No. 29/1930 on Forced or Compulsory Labour and ILO Convention No. 105/1957 on Abolition of Forced Labour.

Compliance with Wage Obligations [F.20]

The Company recognizes that its business sustainability is inseparable from the ideas, innovation, dedication, and hard work of its employees. Accordingly, the Company is committed to fulfilling employees' rights as fair compensation for their obligations to the Company, in compliance with applicable laws and regulations. One of the key measures to enhance employee welfare and productivity is the provision of remuneration in the form of salaries or wages.



Dalam memberikan imbalan kerja, Perseroan merujuk pada Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di wilayah operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian remunerasi berdasarkan pada pencapaian kinerja dan tanggung jawab jabatan yang diemban. Perseroan menerapkan pola penghargaan yang adil dan perlakuan yang sama tanpa adanya tindakan diskriminasi seperti membedakan jenis kelamin, suku, agama, dan ras dalam memberikan remunerasi.

Selain memberikan gaji pokok, Perseroan juga memberikan tunjangan karyawan bagi karyawan yang mendukung level jabatan tertentu sebagai komponen tambahan dalam upaya meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan. Pemberian tunjangan karyawan berlaku sama untuk semua karyawan tanpa membedakan jenis kelamin atau yang lainnya. Perbedaan jenis dan besaran tunjangan bagi setiap karyawan disesuaikan dengan golongan masing-masing. Adapun rincian tunjangan yang diberikan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Hari Raya (THR);
2. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Perseroan juga memberikan fasilitas cuti melahirkan atau bersalin (*maternity leave*) kepada karyawan perempuan dengan masa cuti selama 3 (tiga) bulan. Setelah masa cuti melahirkan selesai, karyawan perempuan tersebut dapat bekerja kembali dan menempati posisi yang sama atau setara dengan posisi sebelum cuti.

Selain itu, karyawan laki-laki juga mendapatkan hak cuti saat istrinya melahirkan yakni selama 2 hari kerja. Cuti ini ditujukan untuk memberikan dukungan kepada istri atau menemani istrinya setelah melahirkan.

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman [F.21]

Perseroan meyakini bahwa lingkungan kerja yang sehat dan aman sesuai kaidah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berkontribusi besar terhadap performa dan kinerja karyawan. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan Perseroan. Dengan lingkungan kerja seperti itu, maka semua karyawan bisa bekerja dengan tenang tanpa diliputi kekhawatiran bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bercermin pada pentingnya penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan aman, maka Perseroan menempatkan K3 sebagai prioritas, yang tujuan akhirnya adalah tercapainya angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*), serta tidak

In determining remuneration, the Company refers to the applicable Regional Minimum Wage (UMR) in its operational areas, in accordance with prevailing regulations. Remuneration is determined based on performance achievement and job responsibilities. The Company applies a fair reward system and equal treatment without discrimination on the basis of gender, ethnicity, religion, or race.

In addition to basic salaries, the Company provides employee benefits for certain job levels as supplementary compensation to enhance motivation and productivity. These benefits are provided equally to all employees without discrimination. Variations in the type and amount of benefits are determined based on employee grade. The benefits provided by the Company include:

1. Holiday Allowance (THR);
2. BPJS Employment and Health Insurance.

The Company also offers maternity leave to female employees, with a leave duration of 3 (three) months. After the maternity leave period ends, female employees are entitled to return to their positions or a similar position to the one held before the leave.

In addition, male employees are entitled to paternity leave of 2 (two) working days upon the birth of their child. This leave is intended to enable employees to support and accompany their spouses following childbirth.

Decent and Safe Work Environment [F.21]

The Company believes that a healthy and safe work environment, in accordance with Occupational Health and Safety (OHS) principles, significantly contributes to employee performance and productivity. The work environment encompasses all factors surrounding employees that may affect their ability to perform the tasks assigned by the Company. Such an environment enables the employees to work with peace of mind, free from concerns about potential accidents or other undesirable incidents.

Recognizing the importance of creating a healthy and safe work environment, the Company prioritizes OHS, with the ultimate goal of achieving a zero-accident rate and the absence of work-related illnesses. The Company



adanya penyakit akibat kerja. Perseroan juga memberikan fasilitas keselamatan kerja, kesehatan, dan keamanan kepada karyawan dan mitra bisnis Perseroan selama menjalankan aktivitas kerja di tempat kerja.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Karyawan [F.22]

Perkembangan usaha Perseroan hingga saat ini salah satunya didukung oleh keberadaan SDM yang unggul dan kompeten di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, pelaksanaan program pengembangan kompetensi, baik berupa pendidikan ataupun pelatihan, merupakan hal yang penting bagi Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, total karyawan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Perseroan sebanyak 1(satu)orang dengan biaya sebesar Rp2,5 juta. Training tersebut berkaitan dengan Fiber To The Home (FTTH) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasional kami di bidang jaringan serat optik.

Aspek Masyarakat

Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar [F.23]

Hingga tahun 2025, tidak terdapat dampak operasi signifikan yang mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar dan mencemari lingkungan di sekitar area operasi Perseroan.

Pengaduan Masyarakat [F.24]

Perseroan menyadari bahwa aktivitas operasional yang dijalankan berpotensi memberikan dampak signifikan bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitar operasional. Atas dasar hal tersebut, Perseroan berupaya untuk memastikan bahwa keputusan operasional dan bisnis yang diambil dapat menangani/mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan seminimal mungkin kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Perseroan juga membuka saluran komunikasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat setempat untuk menyampaikan keluhan atau tanggapan mereka terhadap dampak operasi Perseroan. Terhadap semua keluhan yang masuk, Perseroan berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam waktu sesingkat-singkatnya.

also provides safety, health, and security facilities to its employees and business partners while they are engaged in work activities at the workplace.

Employee Training and Competency Development [F.22]

The Company's business growth to date has been supported by the presence of competent and highly qualified human resources in their respective fields. Accordingly, the implementation of competency development programs, in the form of education and training, is a key priority for the Company.

Throughout 2025, a total of one employee participated in a competency development program organized by the Company, with a total expenditure of Rp2.5 million. This training focused on Fiber To The Home (FTTH), aimed at optimizing our operational execution within the fiber optic network sector.

Community Aspect

Impact of Operations on Surrounding Communities [F.23]

As of 2025, there were no significant operational impacts that disrupted the daily activities of surrounding communities or caused environmental pollution in areas adjacent to the Company's operational sites.

Public Complaint [F.24]

The Company understands that its operations may potentially have a significant impact on the livelihoods of communities surrounding its operations. Accordingly, the Company endeavors to ensure that operational and business decisions minimize any potential adverse impacts on local communities and the surrounding environment.

The Company has also established communication channels that may be utilized by stakeholders and local communities to submit complaints or feedback regarding the impacts of the Company's operations. For all complaints received, the Company is committed to providing timely and appropriate solutions, prioritizing deliberation and consensus wherever possible.



Selama tahun 2025, tidak terdapat laporan pengaduan dari masyarakat sekitar yang ditujukan atau diterima oleh Perseroan.

Throughout 2025, the Company did not receive any complaints from surrounding communities.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) [F.25]

Corporate Social Responsibility (CSR) [F.25]

Pada tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan program CSR berupa program dukungan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah pengembangan jaringan, pemberian bantuan ke

In 2025, the Company implemented CSR programs consisting of basic needs support for communities within the network expansion areas, aid for elderly care homes, mangrove tree



Panti Lansia, penanaman Pohon Mangrove, dan pemberian Bantuan Bencana Alam Banjir. Alokasi dana CSR tahun 2025 sebesar Rp36,82 juta.

planting, and flood disaster relief. The CSR fund allocation for 2025 amounted to Rp36.82 million.

Tanggung Jawab Pengembangan Jasa Berkelanjutan

Responsibility for Sustainable Service Development

Inovasi dan Pengembangan Produk/ Jasa Berkelanjutan [F.26]

Innovation and Sustainable Product/ Service Development [F.26]

Pengembangan inovasi merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan dan dinamika industri yang semakin dinamis. Keberadaan inovasi juga mampu meningkatkan keunggulan operasional dan daya saing Perseroan. Inovasi yang telah dilakukan oleh Perseroan berfokus pada peningkatan kualitas dan nilai tambah pada layanan yang

Innovation is a key element in addressing the challenges and dynamics of an increasingly competitive industry. Innovation also enhances the Company’s operational excellence and competitiveness. The Company’s innovation initiatives are focused on improving the quality and added value of the services it provides. In addition, the Company continuously



disediakan oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan juga senantiasa melakukan review dan perbaikan dalam sistem kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis dan operasional.

Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan [F.27]

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menawarkan layanan yang aman dan berkualitas kepada para pelanggannya. Dalam rangka menjaga kualitas dan keamanan layanan, Perseroan senantiasa memperhatikan kualitas dari material yang digunakan dalam proyek pembangunan menara telekomunikasi telah sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga senantiasa memperhatikan pemenuhan legalitas, perizinan, dan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan operasional proyek guna memastikan bahwa proyek yang dijalankan telah memenuhi ketentuan dalam regulasi yang berlaku.

Dampak Produk/Jasa yang Dihasilkan [F.28]

Layanan yang disediakan oleh Perseroan tidak memiliki dampak negatif bagi para pelanggan, pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek, maupun masyarakat di sekitar proyek.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali [F.29]

Pada tahun 2025, tidak terdapat pengaduan dari pelanggan yang diterima oleh Perseroan akibat komponen/material konstruksi yang bermasalah atau pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan perjanjian/kesepakatan antara Perseroan dengan pelanggan. Perseroan senantiasa melakukan antisipasi dan tindakan yang memadai untuk memastikan minimnya kerugian yang diterima pelanggan pada saat menggunakan layanan Perseroan.

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa [F.30]

Pada tahun 2025, Perseroan mengukur efektivitas layanan melalui survei *Customer Satisfaction Index* (CSI) pada aspek pemasaran, pembangunan, hingga operasional. Hasil survei menunjukkan bahwa keandalan infrastruktur dalam mendukung teknologi 5G dan kecepatan respons tim *Project Management* (SACME) di lokasi dengan kendala perizinan yang tinggi menjadi kekuatan utama Perseroan. Bagi pelanggan, kemampuan Perseroan menyediakan solusi *all-in-one* yang stabil merupakan kontribusi nyata dalam menjaga kualitas konektivitas nasional.

reviews and refines its work systems to improve effectiveness and efficiency in business and operational processes.

Products/Services that Have Been Evaluated for Safety for Customers [F.27]

The Company remains committed to offering safe and high-quality services to its customers. In order to maintain the quality and safety of its services, the Company consistently ensures that the materials used in telecommunications tower construction projects comply with applicable standards and regulations. Furthermore, the Company pays careful attention to legal compliance, permits, and adherence to regulatory requirements in the execution of its projects, ensuring that all operations meet the relevant legal and regulatory provisions.

Impact of Products/Services [F.28]

The services provided by the Company have no negative impact on customers, parties involved in project execution, or the communities surrounding the projects.

Product Recalls [F.29]

In 2025, the Company did not receive any customer complaints related to defective construction components/materials or project execution that failed to comply with contractual agreements. The Company consistently implements preventive measures and appropriate actions to minimize any potential losses experienced by customers in utilizing the Company's services.

Customer Satisfaction Survey regarding Products and/or Services [F.30]

In 2025, the Company measured service effectiveness through a *Customer Satisfaction Index* (CSI) survey covering marketing, development, and operational aspects. The survey results indicated that the reliability of the Company's infrastructure in supporting 5G technology, as well as the responsiveness of the *Project Management* team (SACME) in locations with high permitting challenges, were among the Company's key strengths. For customers, the Company's ability to provide stable all-in-one solutions represents a tangible contribution to maintaining the quality of national connectivity.



Dalam upaya perbaikan berkelanjutan, Perseroan berfokus pada integrasi sistem pemantauan proyek secara *digital* untuk mempercepat pertukaran dokumen teknis (BAUK/BAUF) dengan mitra. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi data dan efisiensi waktu kerja di lapangan. Perseroan juga mencatat bahwa ketersediaan *database* informasi *Point of Interest* (PoI) yang akurat sangat membantu mitra dalam melakukan perencanaan jaringan yang lebih presisi dan efektif.

Sejalan dengan pilar tata kelola (*Governance*) dalam Strategi Keberlanjutan, Perseroan terus memperkuat budaya kerja yang bersih melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan standar K3L yang ketat. Integritas dalam setiap interaksi bisnis dan jaminan keselamatan kerja di lokasi proyek menjadi standar baku yang tidak dapat ditawar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis Perseroan senantiasa selaras dengan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip bisnis yang beretika.

As part of its continuous improvement efforts, the Company has focused on integrating digital project monitoring systems to accelerate the exchange of technical documents (BAUK/BAUF) with partners. This initiative is intended to ensure data transparency and improve time efficiency in field operations. The Company also noted that the availability of an accurate Point of Interest (PoI) information database greatly assists partners in conducting more precise and effective network planning.

In line with the Governance pillar of its Sustainability Strategy, the Company continues to strengthen a clean working culture through the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) and stringent Occupational Health, Safety, and Environmental (HSE) standards. Integrity in every business interaction and the assurance of workplace safety at project sites are non-negotiable standards. These measures are undertaken to ensure that the Company's business growth remains aligned with regulatory compliance and ethical business principles.

EXTERNAL ASSURANCE [G.1]

External Assurance [G.1]

Pada tahun 2025, Perseroan belum melaksanakan proses assurance untuk *sustainability performance indicators* dalam laporan ini. Namun, Perseroan telah melakukan assurance internal untuk memastikan kredibilitas laporan dan validitas data serta informasi dalam laporan ini.

In 2025, the Company did not engage an external assurance for the sustainability performance indicators presented in this report. Nevertheless, the Company conducted internal assurance procedures to ensure the credibility of the report and the validity of the data and information disclosed herein.

HASIL UMPAN BALIK PEMANGKU KEPENTINGAN PADA TAHUN SEBELUMNYA

Results of Stakeholder Feedback in the Previous Year

Selama tahun 2025, belum ada jawaban balik atas lembar umpan balik dari para pemangku kepentingan yang dilampirkan pada Laporan Keberlanjutan Perseroan yang diterbitkan pada tahun sebelumnya.

Throughout 2025, the Company did not receive any feedback responses from stakeholders in relation to the feedback form attached to the Company's Sustainability Report published in the previous year.



Kriteria Pelaporan Keberlanjutan Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 POJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainability Reporting Criteria		Pengungkapan Informasi atau Posisi Disclosure of Information or Location
4. Direksi Board of Directors	1. Kebijakan untuk menghadapi tantangan dalam upaya memenuhi strategi keberlanjutan Policies to address challenges in meeting sustainability strategies: a. penjelasan tentang nilai keberlanjutan organisasi description of the organisation's sustainability value; b. penjelasan tentang isu terkait penerapan keuangan berkelanjutan description of any issues related to implementing sustainable finance; c. penjelasan tentang komitmen pimpinan untuk mencapai penerapan keuangan berkelanjutan description of the commitment by leaders to achieving sustainable finance; d. pencapaian kinerja terkait penerapan keuangan berkelanjutan; dan performance achievements in relation to sustainable finance; and e. tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan. challenges in implementing sustainable finance.	17-25
	2. Penerapan keuangan berkelanjutan Implementation of sustainable finance: a. pencapaian kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dibandingkan dengan target; dan performance against targets in relation to the economy, society and the environment; and b. penjelasan prestasi dan tantangan, termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (untuk LJK yang diwajibkan mempersiapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan). description of the accomplishments and challenges, including significant events during the reporting period (for LJK obliged to prepare a Sustainable Finance Action Plan).	
	3. Strategi pencapaian target Target achievement strategies: a. pengelolaan risiko terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan; risk management related to economic, social and environmental aspects; b. memanfaatkan peluang dan prospek usaha; dan taking advantage of opportunities and business prospects; and c. penjelasan faktor eksternal ekonomi, sosial dan lingkungan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. description of external economic, social and environmental factors that have the potential to affect the company's sustainability.	
5. Tata kelola keberlanjutan Sustainability governance	1. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan. Description of the duties of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees, officers and/or work units that are in charge of implementing sustainable finance.	83-90, 128-129
	2. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan. Description of competency development conducted for the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees, officers and/or work units that are in charge of implementing sustainable finance.	129
	3. Penjelasan mengenai prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, meninjau dan memantau efektivitas proses manajemen risiko. Description of the procedures in identifying, measuring, monitoring and controlling risks associated with implementing sustainable finance in relation to economic, social and environmental aspects, including the roles of the Board of Directors and Board of Commissioners in managing, reviewing and monitoring the effectiveness of risk management processes.	129-130



Kriteria Pelaporan Keberlanjutan Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 POJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainability Reporting Criteria		Pengungkapan Informasi atau Posisi Disclosure of Information or Location
	4. Tinjauan mengenai pemangku kepentingan, meliputi Overview of stakeholders, including: <ul style="list-style-type: none"> a. keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (<i>assessment</i>) manajemen; dan stakeholder involvement based on management assessment results; and b. pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan keuangan berkelanjutan. approach used by the Company in engaging stakeholders in the implementation of sustainable finance. 	130-131
	5. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Obstacles faced in implementing sustainable finance.	131-132
6. Kinerja keberlanjutan Sustainability performance	1. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan. Description of activities toward building a culture of sustainability.	133
	2. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir Description of economic performance in the last three years: <ul style="list-style-type: none"> a. perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi; dan comparison of target and production performance, portfolio, financing target, or investment, income and profit and loss; and b. perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek Keuangan Berkelanjutan yang sejalan dengan penerapan. comparison of target and portfolio performance, financing targets, or investments in financial instruments or projects that are in line with the implementation of sustainable Finance. 	133-134
	3. Kinerja sosial dalam tiga tahun terakhir Social performance in the last three years: <ul style="list-style-type: none"> a. komitmen perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/ atau jasa yang setara kepada konsumen. the company's commitment to provide services for equivalent products and/or services to consumers. b. Ketenagakerjaan Employment: <ul style="list-style-type: none"> • pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; equality of employment opportunities and the presence or absence of forced labor and child labor; • rasio remunerasi karyawan tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional; remuneration ratio of permanent employees in the lowest grade compared to the regional minimum wage; • lingkungan kerja yang layak dan aman; dan a decent and safe work environment; and • pelatihan dan pengembangan karyawan. training and development for employees. c. Komunitas Community: <ul style="list-style-type: none"> • informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan; information on the activities or operational areas that result in positive and negative impacts on the surrounding community including financial literacy and inclusion; • mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan public complaints mechanism and number of public complaints received and acted upon; and • tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, meliputi jenis dan capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat. social and environmental responsibility initiatives which can be linked to support for the Sustainable Development Goals including the types of community empowerment activities and corresponding achievements. 	138-142



Kriteria Pelaporan Keberlanjutan Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017
POJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainability Reporting Criteria

Pengungkapan
Informasi atau Posisi
Disclosure of
Information or Location

<p>4. Kinerja Lingkungan Environmental Performance:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. biaya yang dikeluarkan terkait lingkungan; environmental costs incurred; b. penjelasan mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan material yang dapat didaur ulang; dan description of the use of environmentally-friendly materials, such as the use of recyclable materials; and c. penjelasan mengenai penggunaan energi, termasuk description of energy use, including: d. jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan amount and intensity of energy used; and e. upaya untuk dan pencapaian efisiensi energi, termasuk penggunaan sumber energi terbarukan. efforts toward and achievement of energy efficiency, including through the use of renewable energy. 	134-136
<p>5. Kinerja Lingkungan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan, paling sedikit memuat Environmental performance for companies whose business processes are directly related to the environment:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d; / b. performance as referred to in point d; c. informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitar, terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem; information on activities or operational areas that result in positive and negative impacts on the surrounding environment, especially efforts to increase the carrying capacity of ecosystems; d. keanekaragaman hayati, termasuk biodiversity, including: <ul style="list-style-type: none"> • dampak kegiatan operasional di area yang dekat dengan atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi; dan the impact of operations that are adjacent to or within conservation sites and/or sites with high biodiversity; and • usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna; biodiversity conservation efforts conducted, including the protection of flora and fauna species; e. emisi, termasuk emission, including: <ul style="list-style-type: none"> • jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan the amount and intensity of emissions produced by type; and • upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan; efforts and achievements toward the reduction of emissions; f. limbah dan efluen, termasuk waste and effluents, including: <ul style="list-style-type: none"> • jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; the amount of waste and effluents produced by type; • mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan waste and effluents management mechanism; and • tumpahan yang terjadi (jika ada); dan spills that occurred (if any). g. jumlah dan isi pengaduan mengenai lingkungan yang diterima dan diselesaikan. number and materiality of environmental complaints received and resolved. 	136-138



Kriteria Pelaporan Keberlanjutan Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 POJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainability Reporting Criteria	Pengungkapan Informasi atau Posisi Disclosure of Information or Location
6. Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, termasuk Responsibility for the development of sustainable finance products and/or services, including: <ul style="list-style-type: none"> a. inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan; innovation and development of sustainable finance products and/or services; b. jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan; total and percentage of products and services that have been evaluated for security for customers; c. dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif; finance products and/or services and distribution processes, as well as mitigation measures implemented to address negative impacts; d. jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau number of products recalled and the reasons; or e. survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan. customer satisfaction surveys for sustainable finance products and/or services. 	142-144
7. Verifikasi tertulis dari pihak yang independen, jika tersedia. Written verification from an independent party, if any.	145



Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NO. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Financial Services Authority Circular Letter (SOEJK) NO. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NO. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Financial Services Authority Circular Letter (SOEJK) NO. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
III.	Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
1.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat: An Annual Report at least contains:	
a.	ikhtisar data keuangan penting; overview of key financial data	✓
b.	informasi saham (jika ada); share information (if any)	✓
c.	laporan Direksi; report of the Board of Directors	✓
d.	laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners	✓
e.	profil Emiten atau Perusahaan Publik; Issuer or Public Company profile	✓
f.	analisis dan pembahasan manajemen; management discussion and analysis	✓
g.	tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; Issuer or Public Company Governance	✓
h.	tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company	✓
i.	laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial statements; and	✓
2.	Uraian Isi Laporan Tahunan Annual Report Content Descriptions	
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting Overview of Key Financial Data	
1)	pendapatan/penjualan; revenue/sales	
2)	laba bruto; gross profit	
3)	laba (rugi); profit (loss)	
4)	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total profit (loss) attributable to the owners of the parent entity and non-controlling interests	
5)	total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss).	
6)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to the owners of the parent entity and non-controlling interests	5-6, 62
7)	laba (rugi) per saham; profit (loss) per share	
8)	jumlah aset; total assets	
9)	jumlah liabilitas; total liabilities	
10)	jumlah ekuitas; total equity	
11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; the ratio of profit (loss) to total assets	
12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; the ratio of profit (loss) to equity	
13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; the ratio of profit (loss) to revenue/sales	
14)	rasio lancar; current assets	
15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas; debt to equity ratio	



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan debt to asset ratio; and	
17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. information and other financial ratios that are relevant to the Issuer or Public Company and the types of industry.	
b.	Informasi Saham Share Information	
1)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: quarterly-issued shares presented in a comparative form for the last 2 (two) fiscal years, contain at least:	
a)	jumlah saham yang beredar; outstanding shares;	
b)	kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	
c)	harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan highest, lowest and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	
d)	volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	
2)	dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock mergers, share dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, as well as additions and reductions in capital, stock information as referred to in number 1) is added with at least the following:	7-8
a)	tanggal pelaksanaan aksi korporasi; date of corporate actions;	
b)	rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, and changes in nominal value of shares;	
c)	jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; number of outstanding shares before and after the corporate actions;	
d)	jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of conversion securities implemented (if any); and	
e)	harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; stock prices before and after corporate actions;	
3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of suspension and/or delisting in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting are explained; and	
4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. In the event that the suspension as referred to in number 3) and/or delisting is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the suspension and/or delisting are explained.	
c)	Laporan Direksi Report of the Board of Directors	17-25
d)	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	11-16
e)	Profil Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Profile	



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
1)	nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; the name of the Issuer or Public Company including if there is a name change, the reason for the change, and the effective date of the name change in the financial year;	27, 29
2)	akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information regarding Issuers or Public Companies, including:	27
a)	alamat; address;	
b)	nomor telepon; telephone number;	
c)	alamat surat elektronik; dan e-mail; and	
d)	alamat situs web; website address;	
3)	riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	28-29
4)	visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; the vision and mission of the Issuer or Public Company as well as corporate culture;	32
5)	kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as the types of goods and/or services produced;	33
6)	wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; operational area of the Issuer or Public Company; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. Operational areaa are the areas where operational activities are carried out or the scope of the company's operational activities.	34-35
7)	struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; the organizational structure of the Issuer or Public Company in chart form, at least up to a structure 1 (one) level below the Board of Directors, including committees below the Board of Directors (if any) and committees below the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	36
8)	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; association membership, both on a national and international scale, related to the implementation of sustainable finance;	9
9)	profil Direksi, paling sedikit memuat: profile of the Board of Directors, at least contains:	39-40
a)	nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with duties and responsibilities	
b)	foto terbaru; latest photos	
c)	usia; age	
d)	kewarganegaraan; nationality	
e)	riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; educational background and/or certifications;	
f)	riwayat jabatan, meliputi informasi: professional history, including information on: 1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the appointment as member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
	<p>2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of a committee as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not hold concurrent positions, this matter shall be disclosed; and</p>	
	<p>3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; professional experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company;</p>	
	<p>g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan Affiliated relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority shareholders and controllers, both directly and indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors is not affiliated, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and</p>	
	<p>h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;</p>	
10)	<p>profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least contains:</p> <p>a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with duties and responsibilities</p> <p>b) foto terbaru; latest photos</p> <p>c) usia; age</p> <p>d) kewarganegaraan; nationality</p> <p>e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; educational background and/or certifications;</p> <p>f) riwayat jabatan, meliputi informasi: professional history, including information on:</p> <p>1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company concerned;</p> <p>2) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;</p> <p>3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of a committee as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions, this matter shall be disclosed; and</p> <p>4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; professional experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company;</p>	37-38



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
	<p>g) hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, majority shareholders and controllers, both directly and indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners is not affiliated, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;</p>	
	<p>h) pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and</p>	
	<p>i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, such matter shall be disclosed;</p>	
11)	<p>dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there are changes in the composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners after the fiscal year ends up to the deadline for submission of the Annual Report, the composition stated in the Annual Report is the latest and previous composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;</p>	N/A
12)	<p>jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level and employment status (permanent/contract) in the fiscal year; Information disclosure can be presented in tabular form.</p>	41-42
13)	<p>nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: name of shareholder and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, consist of information regarding:</p>	
	<p>a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of an Issuer or Public Company;</p>	
	<p>b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, this shall be disclosed; and</p>	42
	<p>c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. community shareholder groups, namely groups of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of an Issuer or Public Company; The above information can be presented in tabular form.</p>	



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
14)	<p>persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; percentage of indirect ownership of shares of an Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information regarding shareholders registered in the register of shareholders for the purposes of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;</p> <p>Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, then this shall be disclosed.</p>	43
15)	<p>jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership as of the end of the fiscal year based on classification:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kepemilikan institusi lokal; local institutional ownership; b) kepemilikan institusi asing; foreign institutional ownership; c) kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; And d) kepemilikan individu asing; foreign individual ownership; 	43
16)	<p>informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, both directly and indirectly, to individual owners, presented in the chart form;</p>	44
17)	<p>nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; the name of the subsidiary, associated company, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company;</p> <p>Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. For subsidiaries, information regarding the address of the subsidiary is added.</p>	45
18)	<p>kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value and offering price from the beginning of the listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock mergers, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and reductions (if any);</p>	45
19)	<p>informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); information on recording securities other than securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year at least includes the name of the security, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and security rating (if any) ;</p>	46



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
20)	<p>informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of public accounting (AP) and public accounting firms (KAP) services and their networks/associations/alliances includes:</p> <p>a) nama dan alamat; name and address;</p> <p>b) periode penugasan; assignment period;</p> <p>c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;</p> <p>d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit service fees for each assignment provided during the fiscal year; and</p> <p>e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that the appointed AP and KAP and their networks/associations/alliances do not provide non-audit services, then this information shall be disclosed; And</p> <p>Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances shall be presented in tabular form.</p>	46-47, 104-105
21)	<p>nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.</p>	
f)	Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	
1)	<p>tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: review of operations per business segment by the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:</p> <p>a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes processes, capacity and development;</p> <p>b) pendapatan/penjualan; dan sales/revenue; and</p> <p>c) profitabilitas; profitability</p>	52-53
2)	<p>kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of changes and the impact of these changes, at least regarding:</p> <p>a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;</p> <p>b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities;</p> <p>c) ekuitas; equity</p> <p>d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive income; and</p> <p>e) arus kas; cash flows</p>	54-59
3)	kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; solvency by presenting relevant ratio calculations;	59-60



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
4)	tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; level of collectibility of the Issuer or Public Company by presenting relevant ratio calculations;	61
5)	struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policy on the capital structure along with the basis for determining the policy;	62-63
6)	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion regarding material commitments for investment in capital goods with an explanation at least containing :	63
a)	tujuan dari ikatan tersebut; objectives of the bond;	
b)	sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; source of funds expected to fulfill the bond;	
c)	mata uang yang menjadi denominasi; dan currency in which it is denominated; And	
d)	langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; Initiatives of the Issuer or Public Company to hedge the risks of the related foreign currency position;	
7)	bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion regarding investment in capital goods realized in the last fiscal year, at least containing:	64
a)	jenis investasi barang modal; type of investment in capital goods;	
b)	tujuan investasi barang modal; dan capital goods investment objectives; and	
c)	nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; investment value of capital goods issued;	
8)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); material information and facts that occurred after the date of the accountant's report (if any);	64
9)	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; business prospects of the Issuer or Public Company are linked to industrial conditions, general economy and international markets along with quantitative supporting data from reliable data sources;	65
10)	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between targets/projections at the beginning of the fiscal year and the realization, regarding:	66
a)	pendapatan/penjualan; revenue/sales	
b)	laba (rugi); profit (loss)	
c)	struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	
d)	hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	
11)	target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections of the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	66
a)	pendapatan/penjualan; revenue/sales	
b)	laba (rugi); profit (loss)	
c)	struktur modal (capital structure); capital structure	
d)	kebijakan dividen; atau dividend policy; or	
e)	hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	
12)	aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the Issuer's or Public Company's goods and/or services, at least regarding marketing strategy and market share;	66



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
13)	<p>uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:</p> <p>a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, including information on the percentage of dividends distributed to net profit;</p> <p>b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of cash dividend payment and/or non-cash dividend distribution;</p> <p>c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan amount of dividends per share (cash and/or non-cash); And</p> <p>d) jumlah dividen per tahun yang dibayar; amount of dividends paid per year;</p> <p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Information disclosure may be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company has not distributed dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.</p>	66
14)	<p>realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: realization of the use of proceeds from the public offering, with the following conditions:</p> <p>a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has the obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the use of funds resulting from the public offering shall be disclosed cumulatively up to the end of the fiscal year; and</p> <p>b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of funds resulting from a public offering, the Issuer shall disclose the changes;</p>	67
15)	<p>informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: Material information (if any), including regarding investment, expansion, divestment, business mergers/consolidations, acquisitions, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, contains at least:</p> <p>a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; transaction date, value and object;</p> <p>b) nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party carrying out the transaction;</p> <p>c) sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliated relationship (if any);</p> <p>d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation regarding the fairness of the transaction;</p> <p>e) pemenuhan ketentuan terkait; dan fulfillment of related provisions; And</p> <p>f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event of an affiliated relationship, apart from disclosing the information as intended in letters a) to e), the Issuer or Public Company also discloses information regarding:</p> <p>1) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arm's length principle); dan statement by the Board of Directors that affiliated transactions have gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, including by complying with the arm's length principle; and</p>	67



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
	<p>2) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arm's length principle); the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, including by complying with the arm's length principle;</p>	
	<p>g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out routinely, repeatedly, and/or continuously to generate business income, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out routinely, repeatedly, and/or continuously to generate business income;</p> <p>Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transaction or material transaction in question has been disclosed in the annual financial statements, information regarding the reference to the disclosure is added to the annual financial statements.</p>	
	<p>h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; to disclose affiliated transactions and/or conflict of interest transactions which are the result of the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions which have been approved by independent shareholders, information regarding the date of the GMS which has approved the affiliated transaction and/or conflict of interest transaction is added;</p>	
	<p>i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there are no affiliated transactions and/or conflict of interest transactions, this matter shall be disclosed;</p>	
16)	<p>perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes to statutory provisions with a significant impact on the Issuer or Public Company and their impact on financial statements (if any); And</p>	68
17)	<p>perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).</p>	68
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	
1)	RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	
a)	<p>Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding GMS resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year, including:</p>	
	<p>1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan GMS resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year which are realized in the fiscal year; And</p>	75-82
	<p>2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; GMS resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year which have not been realized along with the reasons for not being realized;</p>	



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
b)	<p>dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the implementation of the GMS to calculate the votes, this shall be disclosed;</p>	
2)	<p>Direksi, paling sedikit memuat: Board of Directors, at least includes:</p>	
a)	<p>tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;</p> <p>Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and may be presented in tabular form.</p>	
b)	<p>pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; a statement that the Board of Directors has guidelines or a Board of Directors charter;</p>	
c)	<p>kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors at these meetings, including attendance at the GMS;</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at meetings of the Board of Directors, meetings between the Board of Directors and the Board Commissioners, or GMS may be presented in tabular form.</p>	
d)	<p>pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development programs members of the Board of Directors:</p> <p>1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies on training and/or competency development programs of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); And</p> <p>2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency development programs attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);</p>	87-90
e)	<p>penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: The Board of Directors' assessment of the performance of committees that support the implementation of the Board of Directors' duties in the fiscal year, includes at least:</p> <p>1) prosedur penilaian kinerja; dan performance assessment procedures; and</p> <p>2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used include performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and</p>	
f)	<p>dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.</p>	
3)	<p>Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Board of Commissioners, at least includes:</p>	
a)	<p>tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;</p>	83-87



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
	<p>b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or the Board of Commissioners charter;</p> <p>c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners at these meetings including attendance at the GMS;</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at meetings of the Board of Commissioners, meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, or the GMS may be presented in tabular form.</p>	
	<p>d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency development programs of members of the Board of Commissioners:</p> <p>1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policies on training and/or competency development programs of members of the Board of Commissioners, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and</p> <p>2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency development programs attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);</p>	86-87, 90
	<p>e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, includes at least:</p> <p>1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; performance assessment procedures;</p> <p>2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used include performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and</p> <p>3) pihak yang melakukan penilaian; dan assessor; and</p>	
	<p>f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the Board of Commissioners' duties in the fiscal year includes:</p> <p>1) prosedur penilaian kinerja; dan performance assessment procedures; and</p> <p>2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used include performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings;</p>	87
	<p>4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Nomination and remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, at least includes:</p> <p>a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedures, including a brief description of the policies and process for nominating members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and</p>	91-92
	<p>b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, including:</p> <p>1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners;</p>	



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
	<p>2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan remuneration structure of the Board of Directors and Board of Commissioners such as salaries, allowances, bonuses and others; and</p> <p>3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;</p> <p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information disclosure may be presented in tabular form.</p>	
5)	<p>Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies, that carries out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, must at least include:</p> <p>a) nama; name</p> <p>b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for appointment of the sharia supervisory board;</p> <p>c) periode penugasan dewan pengawas syariah; sharia supervisory board assignment period;</p> <p>d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and</p> <p>e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as monitoring compliance with sharia principles in the capital market for Issuers or Public Companies;</p>	N/A
6)	<p>Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least includes:</p> <p>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;</p> <p>b) usia; age</p> <p>c) kewarganegaraan; nationality</p> <p>d) riwayat pendidikan; educational background</p> <p>e) riwayat jabatan, meliputi informasi: professional history, including information on:</p> <p>1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as a committee member</p> <p>2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees as well as other positions (if any); And</p> <p>3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; professional experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company;</p> <p>f) periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of audit committee members;</p> <p>g) pernyataan independensi komite audit; independency statement of audit committee;</p> <p>h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency development programs attended in the fiscal year (if any);</p> <p>i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at these meetings; And</p>	93-98



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
	<p>j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; implementation of audit committee activities in the fiscal year in accordance with those stated in the audit committee guidelines or charter;</p>	
7)	<p>komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least includes:</p> <p>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;</p> <p>b) usia; age</p> <p>c) kewarganegaraan; nationality</p> <p>d) riwayat pendidikan; educational background</p> <p>e) riwayat jabatan, meliputi informasi: professional history, including information on : 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as a committee member; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees as well as other positions (if any); And 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; professional experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company;</p> <p>f) periode dan masa jabatan anggota komite; term and term of office of committee members;</p> <p>g) pernyataan independensi komite; independency statement of committees;</p> <p>h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency development programs attended in the fiscal year (if any);</p> <p>i) uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;</p> <p>j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that the committee has guidelines or a charter;</p> <p>k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of meetings and level of member attendance at the meeting;</p> <p>l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan a brief description of the implementation of activities in the fiscal year; And</p> <p>m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: In the event that a nomination and remuneration committee is not formed, the Issuer or Public Company simply discloses the information as intended in letters i) to letter l) and discloses: 1) alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming a committee; And 2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; who carries out nomination and remuneration functions;</p>	98-100
8)	<p>komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least include:</p> <p>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in the committee membership</p> <p>b) usia; age</p>	N/A



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
	c) kewarganegaraan; nationality	
	d) riwayat pendidikan; educational background	
	e) riwayat jabatan, meliputi informasi: professional experience, including information on: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as a committee member; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees as well as other positions (if any); And 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; professional experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	f) periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of committee members;	
	g) pernyataan independensi komite; independency statement of committee training and/or competency development programs attended in the fiscal year (if any); And	
	h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency development programs attended in the financial year (if any); And	
	i) uraian tugas dan tanggung jawab; duties and responsibilities	
	j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has guidelines or charter;	
	k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policy and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at these meetings; and	
	l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the implementation of committee activities in the fiscal year;	
9)	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: corporate secretary at least contains: a) nama; name b) domisili; domicile c) riwayat jabatan, meliputi: professional experience 1) dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as corporate secretary; And 2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; professional experience and term of office both inside and outside the Issuer or Public Company;	100-101
	d) riwayat pendidikan; educational background	
	e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency development programs attended in the fiscal year; And	
	f) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the corporate secretary's duties in the financial year;	
10)	Unit audit internal, paling sedikit memuat: The internal audit unit, at least contains: a) nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit; b) riwayat jabatan, meliputi: professional history, including: 1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for appointment as head of the internal audit unit; And	101-104



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
	<p>2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period both inside and outside the Issuer or Public Company;</p> <p>c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any); training and/or competency development followed in the fiscal year;</p> <p>d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement programs in the financial year;</p> <p>e) struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;</p> <p>f) uraian tugas dan tanggung jawab; duties and responsibilities;</p> <p>g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that it has internal audit unit guidelines or charter; And</p> <p>h) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the duties of the internal audit unit in the fiscal year including policies and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or audit committee;</p>	
11)	<p>uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, containing at least:</p> <p>a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;</p> <p>b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and</p> <p>c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the adequacy of the internal control system;</p>	105-107
12)	<p>sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The risk management system implemented by the Issuer or Public Company must contain at least:</p> <p>a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the Issuer's or Public Company's risk management system;</p> <p>b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; risk tyoess and mitigation</p> <p>c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; And</p> <p>d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners or audit committee regarding the adequacy of the risk management system;</p>	107-110
13)	<p>perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least include:</p> <p>a) pokok perkara/gugatan; legal cases</p> <p>b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan legal case settlements</p> <p>c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; impact on the condition of the Issuer or Public Company;</p>	110



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
14)	informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information about administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the fiscal year (if any);	110
15)	informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: Information regarding the code of conduct of Issuers or Public Companies includes: a) pokok-pokok kode etik; code of conduct principles b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan socialization of the code of conduct and efforts to enforce it; And c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of conduct applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company;	113-114
16)	uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); a brief description of the policy of providing long-term, performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or share ownership program by employees (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In the event of providing management stock ownership program/MSOP and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least include: a) jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options; b) jangka waktu pelaksanaan; implementation period; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements of eligible employees and/or management; and d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; implementation price or determination of implementation price;	110
17)	uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding: a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan ownership of shares of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after ownership occurs or any change in ownership of Public Company shares; and b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; policy implementation;	111-113
18)	uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the whistleblowing system in the Issuer or Public Company, contains at least: a) cara penyampaian laporan pelanggaran; whistleblowing mechanism b) perlindungan bagi pelapor; whistleblower protection c) penanganan pengaduan; complaint handling d) pihak yang mengelola pengaduan; dan party who manages complaints; and	115-117



No. Indeks Index Number	Uraian Description	Halaman Page
	<p>e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: the results of handling complaints, at least contain:</p> <p>1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; And</p> <p>2) tindak lanjut pengaduan; complaint follow up</p>	
19)	<p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter shall be disclosed.</p> <p>uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the Issuer's or Public Company's anti-corruption policy, at least containing:</p> <p>a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures carried out to overcome corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and</p> <p>b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization for employees of Issuers or Public Companies</p> <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that an Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having such a policy will be explained</p>	115
20)	<p>penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of Public Company governance guidelines for Issuers that issue equity securities or Public Companies, including:</p> <p>a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau statement regarding recommendations that have been implemented; and/or</p> <p>b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternatives for implementation (if any).</p> <p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information disclosure may be presented in tabular form.</p>	117-122



LEMBAR UMPAN BALIK

Feedback Sheet [G.2]

Kami meminta partisipasi kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik melalui email atau mengirim formulir ini melalui fax/pos, setelah membaca Laporan Tahunan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ini.

After reading the Annual Report of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk, we humbly ask for participation from stakeholders to provide feedback via email or send this form via fax/post.

Pertanyaan Statement	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree
Laporan Tahunan ini memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi. This Annual Report provides useful information regarding economic performance.		
Data dan informasi yang disampaikan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. The data and information submitted is easy to understand, complete, transparent and balanced.		
Data dan informasi yang disampaikan berguna dalam pengambilan keputusan. The data and information submitted is useful for decision-making process.		
Laporan ini mudah dibaca dan dipahami. This report is easy to read and understand.		

*)Ceklis salah satu. | Select One.

Mohon berikan nilai mengenai komponen yang terdapat dalam laporan ini (nilai 1: paling penting, 2: penting, 3: tidak penting, 4: sangat tidak penting).

Please kindly rate the components contained in this report (1: most important, 2: important, 3: unimportant, 4: very unimportant).

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kinerja Ekonomi Economic Performance | <input type="checkbox"/> Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety |
| <input type="checkbox"/> Produk dan Layanan Product and Service | <input type="checkbox"/> Pengembangan Sosial dan Masyarakat Social and Community Development |
| <input type="checkbox"/> Kode Etik Code of Conduct | <input type="checkbox"/> Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction |
| <input type="checkbox"/> Ketenagakerjaan Employment | <input type="checkbox"/> Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Management |

*)Diisi pada kolom sebelah kiri. | Rate in the left columns.

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi Laporan ini.
Please kindly provide comments/suggestions/input for this report.

.....

.....

.....

Profil | Profile

Nama | Name

Pekerjaan | Occupation

Institusi/Perusahaan | Institution/Company

Kontak (Telepon/E-mail) | Contact (Phone Number/Email)



Kategori Pemangku Kepentingan | Stakeholder Category

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pelanggan Customer | <input type="checkbox"/> Pemerintah/Regulator Government/Regulator |
| <input type="checkbox"/> Karyawan Employee | <input type="checkbox"/> Masyarakat Community |
| <input type="checkbox"/> Mitra Kerja Business Partner | <input type="checkbox"/> Lainnya Others..... |

*) Ceklis salah satu. | Select One.

Mohon dapat mengirimkan lembar umpan balik ini kepada:
Please kindly send this feedback sheet to:

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk
Menara Imperium Lt. 18 Suite C Jl. H. R. Rasuna Said
No. Kav 1, Guntur, Setiabudi Jakarta Selatan – 12980

Telp. : +62 21 83707370
 Fax. : +62 21 83707370
 Email : corporatesecretary@ptvti.co.id
 Website : www.ptvti.co.id

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025 PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK.

Statement of Members of Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility
for the 2025 Annual Report of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. for 2025 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the annual report and financial report of the company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness

Jakarta, April 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



HELMY YUSMAN SANTOSO
Presiden Komisaris
President Commissioner



THEIGNATIUS AGUS SALIM
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors



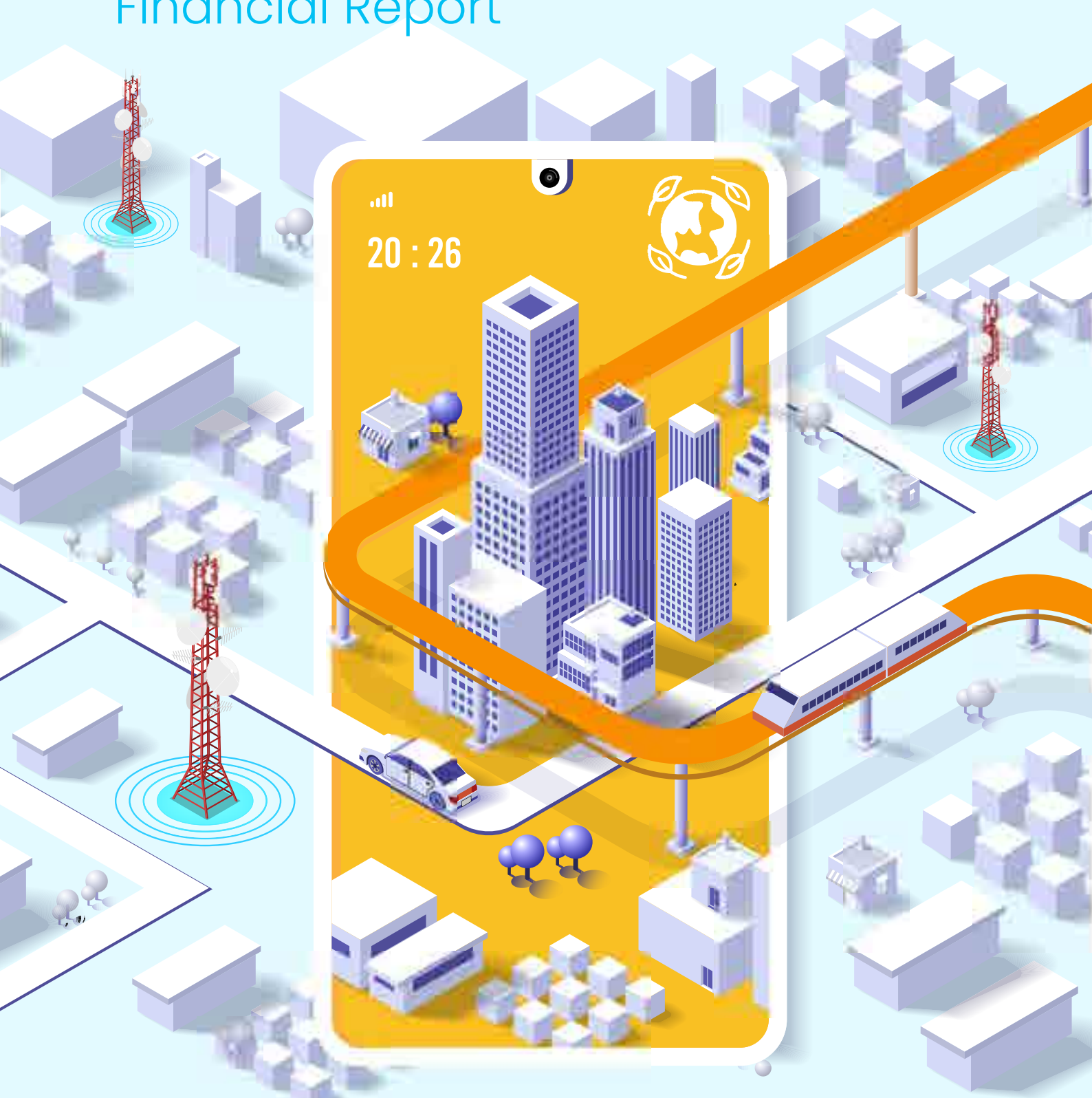
PAULUS RIDWAN PURAWINATA
Presiden Direktur
President Director



ALEXANDRA YOTA DINARWANTI
Direktur
Director

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report



**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR
Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025/
*FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025***

DAN/*AND*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025**

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
	Halaman/ Pages	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3 - 4	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 - 64	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

This report is originally issued in Indonesian language.

No. : 00077/2.1315/AU.1/06/1017-2/1/18/2026

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam menumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk and its subsidiary ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025 and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (Lanjutan)**Revaluasi Aset Tetap**

Seperti diungkapkan dalam Catatan 21 dan 8 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup telah memilih model revaluasi atas aset tetap tertentu berupa menara telekomunikasi. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan.

Kami memfokuskan area ini sebagai hal audit utama karena nilainya sangat material di mana pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap Grup yang mencakup menara telekomunikasi sebesar Rp 348 miliar atau 73,58% dari jumlah aset konsolidasian. Selain itu, proses penilaian manajemen memerlukan pertimbangan yang signifikan dan kompleks, serta didasarkan pada asumsi, khususnya tingkat diskonto, tingkat inflasi, dan umur manfaat aset tetap.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Menilai kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas penilai eksternal independen yang ditunjuk oleh manajemen;
- Melakukan prosedur observasi fisik atas aset tower yang direvaluasi;
- Menelaah laporan penilaian, termasuk data yang digunakan, metodologi yang digunakan, serta kewajaran asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam proses revaluasi; dan
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan yang disajikan Grup dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Key Audit Matters (Continued)**Revaluation of Fixed Assets**

As disclosed in Notes 21 and 8 to the consolidated financial statements, the Group has chosen the revaluation model for certain fixed assets which is telecommunication towers. In accordance with Indonesian Financial Accounting Standard, the frequency of revaluations depends upon the changes in fair values of the fixed assets being revalued. When the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required.

We focus on this area as a key audit matter due to significant amount involved where the carrying value of these fixed assets as at December 31, 2025 amounted to Rp 348 billion or 73.58% from the consolidated total assets. Furthermore, management's assessment involves significant judgment and complex, and is based on assumptions, specifically discount rate, inflation rate, and useful lives of the fixed assets.

How our audit addressed the Key Audit Matters:

- Assessed the competence, capabilities, and objectivity of the independent external valuers appointed by management;
- Performed physical inspection procedures on the revalued fixed assets;
- Reviewed the valuation reports, including the data applied, the methodologies applied, and the reasonableness of key assumptions used; and
- Evaluated the adequacy of the disclosures made in the consolidated financial statements in accordance with applicable accounting standards.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Informasi Lain (Lanjutan)

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Other Information (Continued)

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (Continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe those matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Suharli, Sugiharto & Rekan



Riki Afriano, CPA

Registrasi Akuntan Publik/Public Accountant Registration No. AP. 1017

30 Maret 2026/March 30, 2026



**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama	Paulus Ridwan Purawinata	Name	1
Alamat kantor	Menara Imperium Lt. 18, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 1, Jakarta, 12980	Office address	
Alamat domisili sesuai KTP	Jl. Lawu No. 2B RT 003/RW 002, Setiabudi, Jakarta Selatan	Domicile as stated in ID Card	
Nomor telepon jabatan	+62 21 83707370 Direktur Utama/President Director	Phone Number Position	
2. Nama	Alexandra Yota Dinarwati	Name	2
Alamat kantor	Menara Imperium Lt. 18, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 1, Jakarta, 12980	Office address	
Alamat domisili sesuai KTP	Gang Demara No. 42 RT 010/RW 005, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Domicile as stated in ID Card	
Nomor telepon jabatan	+62 21 83707370 Direktur/Director	Phone Number Position	

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|---|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak; | 1. Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk and Subsidiaries; |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The consolidated financial statements of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the consolidated financial statements of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk and Subsidiaries has been disclosed in a complete and properly disclosed; |
| b. Laporan keuangan konsolidasian PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The consolidated financial statements of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk and Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak. | 4. Responsible for the internal control system of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk and Subsidiaries. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

30 Maret 2026/March 30, 2026

Atas nama dan mewakili Direksi/
For and on behalf of the Board of Directors



Paulus Ridwan Purawinata
Direktur Utama/President Director

Alexandra Yota Dinarwati
Direktur/Director

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan bank	34.403.823	4	48.728.554	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	4.596.605	3,5	5.422.968	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	42.383		627.816	Other receivables
Pendapatan masih harus diterima	3.860.256	6	895.466	Accrued revenue
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2.634.063	7	3.631.343	Advance payments and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	3.592.661	11a	2.235.144	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar	49.129.791		61.541.291	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-current Assets
Aset tetap - nilai buku	371.601.880	3,8	326.605.226	Fixed assets - book value
Aset hak-guna - nilai buku	52.754.826	9	49.200.795	Right-of-use assets - book value
Aset takberwujud	7.114		8.045	Intangible assets
Uang jaminan	45.571		40.471	Refundable deposits
Jumlah Aset Tidak Lancar	424.409.391		375.854.537	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET	473.539.182		437.395.828	TOTAL ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

	2025	Catatan/ Notes	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang usaha	1.789.752	10	932.400	Trade payables
Utang lain-lain - pihak ketiga	40.117		10.921	Other payables - third parties
Utang pajak	230.136	3,11b	521.411	Taxes payables
Pendapatan diterima di muka - pihak ketiga	14.292.008	13	16.161.260	Unearned revenue - third parties
Biaya masih harus dibayar	23.404.042	14	16.321.453	Accrued expenses
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	39.756.055		33.947.445	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-current Liabilities
Provisi jangka panjang	885.413	3,15	726.303	Long-term provision
Liabilitas imbalan pascakerja	3.568.331	3,16	3.185.076	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.453.744		3.911.379	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	44.209.799		37.858.824	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value Rp 100 (full amount) per share
Modal dasar - 1.500.000.000 saham				Authorized - 1,500,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.277.276.000 saham	127.727.600	17	127.727.600	Issued and fully paid - 1,277,276,000 shares
Tambahan modal disetor	141.445.473	20	141.445.473	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	39.796.927	21	29.047.482	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	5.933.800		5.833.800	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	114.423.926		95.481.169	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	429.327.726		399.535.524	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	1.657		1.480	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS	429.329.383		399.537.004	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	473.539.182		437.395.828	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

	2025	Catatan/ Notes	2024	
Pendapatan	55.504.823	22	52.041.658	Revenue
Beban pokok pendapatan	(20.671.969)	23	(19.984.011)	Cost of revenue
LABA BRUTO	34.832.854		32.057.647	GROSS PROFIT
Beban usaha	(11.993.308)	24	(10.758.247)	Operating expense
LABA USAHA	22.839.546		21.299.400	PROFIT FROM OPERATIONS
Penghasilan (beban) lain-lain				Other income (expense)
Penghasilan bunga	1.366.738		1.483.686	Interest income
Penyisihan kerugian ekspektasian - aset keuangan	147.415	5,6	(108.560)	Provision for expected credit loss - financial assets
Lain-lain - neto	401.804		(1.083.246)	Others - net
Penghasilan lain-lain - neto	1.915.957		291.880	Other income - net
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	24.755.503		21.591.280	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Pajak penghasilan final	(4.987.095)	3,11c	(4.144.035)	Final tax income
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	19.768.408		17.447.245	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan				Income tax expense
Pajak kini	(725.474)	3,11c	(582.973)	Current tax
LABA TAHUN BERJALAN	19.042.934		16.864.272	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Surplus revaluasi	11.068.058	3,8	7.902.955	Revaluation surplus
(Kerugian) keuntungan aktuarial	(318.613)	3,16	442.110	(Loss) gain on actuarial
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	10.749.445		8.345.065	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	29.792.379		25.209.337	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

	2025	Catatan/ Notes	2024	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	19.042.757		16.864.119	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	177		153	Non-controlling interest
JUMLAH	19.042.934		16.864.272	TOTAL
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	29.792.202		25.209.184	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	177		153	Non-controlling interest
JUMLAH	29.792.379		25.209.337	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR	14,91	19	13,20	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

These Consolidated Financial Statements are originally
issued in Indonesian language

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid-In Capital	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Laba/ Retained Earnings		Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
					Cadangan Wajib/ Statutory Reserves	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo per										
1 Januari 2024		127.727.600	141.445.473	20.702.417	5.733.800	78.717.050	374.326.340	1.327	374.327.667	Balance as of
Surplus revaluasi	21	-	-	7.902.955	-	-	7.902.955	-	7.902.955	Revaluation surplus
Cadangan wajib	18	-	-	-	100.000 (100.000)	-	-	-	Statutory reserves
Keuntungan aktuaria	21	-	-	442.110	-	-	442.110	-	442.110	Actuarial gain
Labanya tahun berjalan		-	-	-	-	16.864.119	16.864.119	153	16.864.272	Profit for the year
Saldo per										Balance as of
31 Desember 2024		127.727.600	141.445.473	29.047.482	5.833.800	95.481.169	399.536.524	1.480	399.537.004	December 31, 2024
Surplus revaluasi	21	-	-	11.068.058	-	-	11.068.058	-	11.068.058	Revaluation surplus
Cadangan wajib	18	-	-	-	100.000 (100.000)	-	-	-	Statutory reserves
Kerugian aktuaria	21	-	-	(318.613)	-	-	(318.613)	-	(318.613)	Actuarial loss
Labanya tahun berjalan		-	-	-	-	19.042.757	19.042.757	177	19.042.934	Profit for the year
Saldo per										Balance as of
31 Desember 2025		127.727.600	141.445.473	39.796.927	5.933.800	114.423.926	429.327.726	1.657	429.329.383	December 31, 2025

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian
secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an
integral part of the Consolidated Financial Statements
taken as a whole.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	52.229.992	55.329.442	Cash receipts from customers
Penerimaan bunga jasa giro	1.366.738	1.483.685	Interest received from current accounts
Pembayaran pajak penghasilan	(6.058.907)	(4.671.422)	Payments of income tax
Pembayaran kas kepada karyawan	(9.277.246)	(7.141.234)	Cash paid to employees
Pembayaran kepada pemasok	(8.242.869)	(10.704.509)	Cash paid to suppliers
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	30.017.708	34.295.962	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset hak-guna	(12.579.000)	(6.999.151)	Acquisition of right-of-use assets
Perolehan aset tetap	(31.763.439)	(26.996.110)	Acquisition of fixed assets
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(44.342.439)	(33.995.261)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(14.324.731)	300.701	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	48.728.554	48.427.853	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	34.403.823	48.728.554	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF THE YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Kegiatan Usaha Perusahaan

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (“Perusahaan”), dahulu didirikan dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka berdasarkan Akta Notaris No. 136 tanggal 8 November 1995 dari Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-17.467.HT.01.01.TH.1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 4144 tanggal 3 Mei 1996. Berdasarkan Akta Notaris No. 120 tanggal 26 Mei 2016 dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, nama Perusahaan diubah menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. Akta Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011039.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12851 tanggal 26 Juli 2016.

Anggaran Dasar Entitas Induk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Juni 2022, dari Jose Dima Satria, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0045363.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan melakukan kegiatan usaha terkait jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1995. Perusahaan berdomisili di Menara Imperium Lt. 18, Suite C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan dimiliki oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 51,09%.

1. GENERAL

a. Establishment and Business Activity of the Company

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (“the Company”) was established as PT Bima Nuansa Cempaka, based on Notarial Deed No. 136 dated November 8, 1995 from Afdal Gazali, S.H., Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-17.467.HT.01.01.TH.1995 dated December 29, 1995 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 36, Supplement No. 4144 dated May 3, 1996. Based on Notarial Deed No. 120 dated May 26, 2016 from Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the name of the Company was changed to PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. The Deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0011039.AH.01.02.Tahun 2016 dated June 10, 2016 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 59, Supplement No. 12851 dated July 26, 2016.

The Company’s Articles of Association has been amended several times, most recently based on Deed No. 1 dated June 3, 2022 from Jose Dima Satria, S.H., S.E., Notary in Jakarta, the amendment to Article 3 of the purposes and objectives and business activities. The amendments to the articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0045363.AH.01.02.Tahun 2022 dated July 1, 2022.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company carried out business activities related to telecommunication infrastructure provider services, including making investments or participation in other companies engaged in telecommunication support activities and conducting business in the services sector, especially telecommunications support services.

The Company started its commercial operations since 1995. The Company is domiciled at Menara Imperium 18th Floor, Suite C, Jl. H.R. Rasuna Said Lot. 1, South Jakarta 12980.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company is owned by PT Tower Bersama Infrastructure Tbk as the majority shareholder with ownership of 51.09%.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Helmy Yusman Santoso
Theignatius Agus Salim

Board of Commissioners
President Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur utama
Direktur

Paulus Ridwan Purawinata
Alexandra Yota Dinarwanti

Board of Directors
President Director
Director

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Ketua
Anggota
Anggota

Theignatius Agus Salim
Rosuin Hamra
Marylina

Chairman
Member
Member

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas utama Perusahaan.

Jumlah gaji dan kompensasi lainnya kepada manajemen kunci pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 3.157.317 dan Rp 3.248.930.

Jumlah seluruh karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 31 karyawan (tidak diaudit).

c. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, informasi mengenai entitas anak yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
			2025	2024	2025	2024
PT Permata Karya Perdana	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	456.156.854	421.273.831

PT Permata Karya Perdana ("PKP")

PT Permata Karya Perdana ("PKP") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 149 tanggal 28 Juni 2013, dari Jimmy Tanal, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-41882.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, and Employees

Composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors
President Director
Director

Composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Chairman
Member
Member

The Company's key management personnel include the Board of Commissioners and Directors. Key management has the authority and responsibility to plan, lead, and control the Company's principal activities.

The total salaries and other compensation paid to key management in 2025 and 2024 amounted to Rp 3,157,317 and Rp 3,248,930, respectively.

The total number of permanent employees of the Company and its subsidiary ("the Group") as of December 31, 2025 and 2024 are 31 employees (unaudited), respectively.

c. Subsidiary

As of December 31, 2025 and 2024, information of subsidiary which consolidated into the Company's financial statements are as follows:

PT Permata Karya Perdana ("PKP")

PT Permata Karya Perdana ("PKP") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the Deed of Establishment No. 149 dated June 28, 2013, from Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-41882.AH.01.01. Tahun 2013 dated August 1, 2013.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Permata Karya Perdana ("PKP") (Lanjutan)

Anggaran Dasar PKP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 21 tanggal 11 Desember 2023 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor. Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0081579.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, PKP melakukan kegiatan usaha terkait jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

d. Penawaran Umum Saham

Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. S-5756/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum sebanyak 86.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham (nilai penuh) kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 350 per saham (nilai penuh). Pada tanggal 7 Juli 2010, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di BEI.

Pada tanggal 23 Juni 2016, Entitas Induk telah melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMEETD) dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 28.600.000 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 535 per saham (nilai penuh). Pada tanggal 13 Juni 2016, Penambahan Modal Tanpa HMETD telah dicatatkan di BEI.

Perusahaan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham, melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sebanyak 962.676.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 221 (nilai penuh) per saham. HMETD ini telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-82/D.04/2019 tanggal 21 Juni 2019. Perusahaan telah menerima seluruh dana dari HMETD ini pada tanggal 17 Juli 2019.

e. Otorisasi Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Maret 2026.

1. GENERAL (Continued)

c. Subsidiary (Continued)

PT Permata Karya Perdana ("PKP") (Continued)

The Articles of Association of PKP have been amended several times, most recently based on the Deed No. 21 dated December 11, 2023 from Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, in connection with the increase in issued and paid-up capital. The Deed of Amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0081579.AH.01.02.Tahun 2023 dated December 27, 2023.

In accordance with the Article 3 of the Articles of Association, PKP carried out business activities related to telecommunication infrastructure provider services, including making investments or participation in other companies engaged in telecommunication support activities and conducting business in the services sector, especially telecommunication support services.

d. Share Public Offering

On June 25, 2010, the Company received an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) with Letter No. S-5756/BL/2010 to conduct a public offering of 86,000,000 shares with par value of Rp 100 per share (full amount) to the public through the Indonesia Stock Exchange (IDX) with an initial offering price of Rp 350 per share (full amount). On July 7, 2010, those shares were listed on the IDX.

On June 23, 2016 the Parent Entity implemented an additional paid-in capital without Pre-emptive Rights (HMEETD) by issuing 28,600,000 new shares with an exercise price of Rp 535 per share (full amount). On June 13, 2016, the additional paid-in capital without HMEETD was listed on the IDX.

The Company increased its share capital through a limited public offering with a Pre-emptive Rights issuance to its former shareholders of 962,676,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) per share at an offering price of Rp 221 (full amount) per share. This Pre-emptive Rights has obtained an effective statement from OJK based on Letter No. S-82/D.04/2019 dated June 21, 2019. The Company has received all funds from this Pre-emptive Rights on July 17, 2019.

e. Authorization of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issue by the Board of Directors of the Company, who are responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements on March 30, 2026.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah (Rp), yang juga sekaligus merupakan mata uang fungsional Grup.

c. Perubahan terhadap SAK

Standar baru, serta amendemen dan penyesuaian terhadap SAK yang mulai berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, telah dievaluasi. Manajemen menyimpulkan bahwa tidak terdapat dampak material dari perubahan tersebut terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan Grup.

Di samping itu, pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, terdapat pula beberapa SAK yang baru serta amendemen ataupun penyesuaian terhadap SAK lainnya yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK comprising the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and regulation from capital market regulator for entity under supervision, i.e. Regulation Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") currently Indonesian Financial Service Authority ("OJK") No. VIII.G.7 on "Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosures by Issuers and Public Companies", which have been consistently applied to prior periods.

b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The measurement basis used in the consolidated financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis as described in the related accounting policies.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, are prepared under the accrual basis. The consolidated statement of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Presentation currency used in the preparation of consolidated financial statements is Rupiah (Rp), which also the functional currency of the Group.

c. Changes on SAK

New standards, as well as amendments and improvements towards SAK that effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025, have been assessed. Management determines that there are no material impact arise from such changes on the reporting of performance or financial position of the Group.

Moreover, as of the authorization date of the issuance of these consolidated financial statements, there are also several new SAK, and amendments or improvements on other SAK which have been issued but not yet effective. Those standards, interpretations, amendments or improvements shall be effective for the annual reporting period beginning on or after:

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

c. Perubahan terhadap SAK (Lanjutan)

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109 tentang “Instrumen Keuangan” dan PSAK No. 107 tentang “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang “Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”; dan
- PSAK No. 338 (Revisi 2025) tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

1 Januari 2027

- PSAK No. 118 tentang “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”;
- PSAK No. 119 tentang “Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan”; dan
- Amendemen PSAK No. 119 tentang “Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan”.

Penerapan dini untuk standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian terhadap SAK di atas diperkenankan.

Manajemen masih mengevaluasi penerapan dari standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap pelaporan keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Induk Perusahaan dan seluruh entitas anak seperti yang dijelaskan di Catatan 1c. Pengendalian didapat ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Dengan demikian, Grup mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, Grup memiliki:

- Kekuasaan atas *investee* (contoh hak saat ini yang memberikan kemampuan ini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasilnya.

Ketika Grup mempunyai hak suara kurang dari mayoritas atau hak serupa terhadap *investee*, Grup mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah terdapat kekuasaan atas sebuah *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain *investee*;
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- Hak suara Grup dan hak suara potensial.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Changes on SAK (Continued)

January 1, 2026

- Amendments to PSAK No. 109 on “Financial Instruments” and PSAK No. 107 on “Financial Instruments: Disclosure” on “Classification and Measurement of Financial Instruments”; and
- PSAK No. 338 (Revised 2025) on “Business Combinations of Entities Under Common Control”.

January 1, 2027

- PSAK No. 118 on “Presentation and Disclosure in Financial Statements”;
- PSAK No. 119 on “Subsidiaries without Public Accountability: Disclosure”; and
- Amendment to PSAK No. 119 on “Subsidiaries without Public Accountability: Disclosure”.

Early adoption of the above new standards, interpretations, and amendments or improvements to SAK are permitted.

Management is still evaluating the adoption of the above standards, interpretations, and amendments or improvements and unable to determine the impact that might arise toward the financial reporting of the Company as a whole.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Parent Company and all the subsidiary mentioned in Note 1c. Control is achieved when Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through power over the *investee*.

Specifically, Group controls an *investee* if, and only if, Group has:

- Power over the *investee* (i.e. existing rights that give the current ability to direct the relevant activities of the *investee*);
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*; and
- The ability to use its power over the *investee* to affect its returns.

When Group has less than majority of the voting rights or similar rights to an *investee*, Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

- The contractual arrangement with the other vote holders of the *investee*;
- Rights arising from other contractual arrangements; and
- Voting rights of Group and potential voting rights.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Grup menilai kembali apakah terdapat atau tidak pengendalian terhadap *investee* jika fakta dan keadaan yang menunjukkan bahwa ada perubahan satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan ke Grup dan dihentikan untuk dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian ditransfer keluar dari Grup.

Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari entitas anak, yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan, termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup mendapatkan pengendalian sampai dengan tanggal Grup berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan ke pemilik entitas induk dari Grup dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya seragam dengan kebijakan akuntansi Grup. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas dalam intra Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi seluruhnya dalam konsolidasi.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap Kepentingan Nonpengendali (KNP);
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Principles of Consolidation (Continued)

The Group re-assesses whether or not it controls an *investee* if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Subsidiary are fully consolidated from the date control is transferred to the Group and cease to be consolidated from the date control is transferred out of the Group.

Assets, liabilities, income, and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income expenses, and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

In case of loss of control over a subsidiary, the Group:

- Derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary;
- Derecognizes the carrying amount of any Non-controlling interest (NCI);
- Derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- Recognizes the fair value of the consideration received;
- Recognizes the fair value of any investment retained;
- Recognizes any resulting difference as a gain or loss in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- Reclassifies the parent's share of components previously recognized in comprehensive income to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss is recognised in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

e. Kombinasi Bisnis

Ketika Grup melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi (*acquisition method*). Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi.

Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, Perusahaan menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam pengkajian kembali tersebut.

Perusahaan selanjutnya mengkaji kembali prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal-hal berikut ini:

- 1) Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih;
- 2) Kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, jika ada;
- 3) Untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi; dan
- 4) Imbalan yang dialihkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Principles of Consolidation (Continued)

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which is presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

e. Business Combination

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree.

For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the consideration is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized as a gain from a bargain purchase in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Prior to recognizing the gain from the bargain purchase, the Company reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and liabilities taken over and recognizes any additional assets or liabilities that may be identified in the reassessment.

The Company further reviews the procedures used to measure the amount required to be recognized at the acquisition date for all of the following:

- 1) *Identifiable assets acquired and liabilities taken over;*
- 2) *Non-controlling interests of the acquired party, if any;*
- 3) *For business combinations achieved in stages, the acquirer's previously held equity interests in the acquired party; and*
- 4) *Consideration transferred.*

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

e. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Tujuan dari kajian kembali ini untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mencerminkan dengan tepat semua informasi yang tersedia pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau penghasilan komprehensif lain. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui laba rugi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada biaya perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
- Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - Memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - Personel manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Business Combination (Continued)

The purpose of the review is to ensure that the remeasurement accurately reflects all the information available at the acquisition date. Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized either in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

In a business combination achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated from the acquisition date, to each Cash Generating Units (CGU) of the Group that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquirer are assigned to those CGU.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group:

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:*
- *Has control or joint control over the Group;*
 - *Has significant influence over the Group; or*
 - *Is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.*

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:

- Entitas dan Grup adalah anggota dari Grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
- Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup;
- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a);
- Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
- Entitas atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional entitas induk. Setiap entitas anak menentukan mata uang fungsional dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada setiap entitas diukur dengan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing yang pada awal pengakuan dicatat oleh Grup dengan mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode ini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Transactions with Related Parties (Continued)

b. An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:

- The entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
- One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- Both entities are joint ventures of the same third party;
- One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group;
- The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a);
- A person identified in a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); and
- The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Group or to the parent of the Group.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Foreign Currency Transactions and Balances

The Company's consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is also the Parent Company's functional currency. Each subsidiary determined its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

Transaction in foreign currencies are initially recorded by the Group at their respective functional currency rates prevailing at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia and any resulting gains or losses are credited or changed to operations of the current period.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**g. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
(Lanjutan)**

Nilai tukar kurs Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 16.782 dan Rp 16.162.

h. Aset dan Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen keuangan tersebut.

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a) Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan; dan
- b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awalnya, sepanjang diperbolehkan, mengevaluasi penentuan klasifikasi aset keuangan pada setiap akhir tahun.

Kategori ini meliputi aset keuangan "yang dimiliki untuk diperdagangkan" dan aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awal penentuan.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Suatu aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual apabila secara prinsip diperoleh untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat penetapan awal adalah aset keuangan yang dikelola, dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan suatu strategi investasi yang terdokumentasi. Derivatif juga dikategorikan sebagai investasi yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai efektif. Aset keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajar, dan segala perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**g. Foreign Currency Transactions and Balances
(Continued)**

United States Dollar exchange rates against Rupiah as of December 31, 2025 and 2024, were Rp 16,782 and Rp 16,162.

h. Financial Assets and Liabilities and Equity Instruments

Group recognized financial assets or financial liabilities in consolidated statement of financial position, when and only when, Group become party to contractual provision of the financial instruments.

Financial Assets

Financial assets are classified as financial assets measures at amortized cost fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, using two basis, are:

- a) The entity's business model in managing financial assets; and
- b) Characteristics of contractual cash flows from financial assets.

Group determine the classification of its financial assets at initial recognition, and when allowed, reevaluates the classification of such financial assets at each year-end.

This category includes financial assets "held for trading" and those designated at fair value through profit or loss at inception.

Financial Assets Measured at Fair Value through Profit or Loss

A financial asset is classified as held for trading if acquired principally for the purpose of selling in the short term. Financial assets designated at fair value through profit or loss at inception are those that are managed, and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented investment strategy. Derivatives are also categorized as held for trading, unless they are designated as effective hedges. Financial assets, at fair value through profit or loss are measured at fair value, and any fair value changes are recognized in profit or loss.

Group has no financial assets measured at fair value through profit or loss.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**h. Aset dan Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(Lanjutan)**

Aset Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan
Diamortisasi

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate method*), di mana metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau Grup aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan alokasi penghasilan bunga atau biaya bunga melebihi tahun yang bersangkutan. Keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Perusahaan memiliki aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi berupa kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain, pendapatan masih harus diterima, dan uang jaminan.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui
Penghasilan Komprehensif Lain

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lainnya. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup akan dicatat sebesar jumlah yang diperoleh, setelah dikurangi dengan biaya emisi langsung.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**h. Financial Assets and Liabilities and Equity Instruments
(Continued)**

Financial Assets (Continued)

Financial Assets are Measured at Amortized Costs

After initial recognition, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, which is the method used for calculating the amortized cost of a financial asset or financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and for allocating interest income or expense interest in future years. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Financial assets are measured at amortized costs of the Company include cash on hand and cash in banks, trade receivables - third parties, other receivables, accrued revenue, and refundable deposits.

Financial Assets Measured at Fair Value through Other
Comprehensive Income

The Group has no financial assets measured at fair value through other comprehensive income as of December 31, 2025 and 2024.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Debt and equity instruments are classified as financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss and other financial liabilities. Group determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that gives the right to the residual assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by Group will be recorded at the amounts received, after deducting direct issuance costs.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**h. Aset dan Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(Lanjutan)**

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (Lanjutan)

Instrumen Ekuitas (Lanjutan)

Sebuah instrumen merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi (i) dan (ii) di bawah ini terpenuhi:

- i. Instrumen tersebut tidak memiliki liabilitas kontraktual:
 - a. Untuk memberikan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain; atau
 - b. Untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi penerbit.
- ii. Jika instrumen akan atau dapat diselesaikan oleh penerbit yang memiliki instrumen ekuitas, apabila instrumen itu:
 - a. Nonderivatif yang tidak memiliki liabilitas kontraktual terhadap penerbit untuk memberikan sejumlah variabel terhadap instrumen ekuitas pemilik; atau
 - b. Derivatif yang akan diselesaikan oleh penerbit hanya dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau aset keuangan lainnya untuk sejumlah instrumen ekuitas pemilik. Untuk kepentingan ini, instrumen ekuitas milik penerbit tidak meliputi instrumen yang terikat kontrak untuk penerimaan di masa mendatang atau pengiriman instrumen ekuitas milik penerbit.

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen konversi sejenis yang diubah menjadi sejumlah saham biasa oleh pemegangnya, diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan materi dalam perjanjian kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi menggunakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen nonkonversi yang sejenis.

Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas atas dasar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan pelaksanaan konversi atau pada tanggal jatuh tempo instrumen.

Komponen ekuitas ditentukan dengan mengurangi jumlah komponen liabilitas dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan. Jumlah ini diakui dan dimasukkan ke dalam ekuitas, setelah dikurangi dengan efek pajak penghasilan, dan tidak diperhitungkan kembali.

Instrumen ekuitas Grup meliputi modal saham.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**h. Financial Assets and Liabilities and Equity Instruments
(Continued)**

Financial Liabilities and Equity Instruments (Continued)

Equity Instruments (Continued)

An instrument is an equity instrument if, and only if, both conditions (i) and (ii) below are met:

- i. The instrument does not have a contractual liabilities:
 - a. To deliver cash or another financial assets to another entity; or
 - b. To exchange financial assets or financial liability with another entity under conditions that are not profitable for issuers.
- ii. If the instrument will or may be settled by the issuer which has an equity instrument, an instrument that:
 - a. Non-derivatives that have no contractual liabilities to the issuer to deliver a variable number of owner's equity instruments; or
 - b. Derivatives that will be completed by the issuer only in exchange for some cash or another financial asset for a number of owner's equity instruments. For this purpose, the instrument does not include the issuer's equity instruments that are under contract for the future receipt or delivery of issuer's equity instruments.

Compound financial instruments, such as convertible bonds or similar instruments convertible into a number of common shares by the holder, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual agreement. On the date of issuance of a compound financial instrument, the fair value of the liability component is estimated using market interest rates applicable to similar non-convertible instruments.

This amount is recorded as a liability on the basis of amortized cost using the effective interest rate method until the conversion or execution on the maturity date of the instrument.

The equity component is determined by deducting the liability component from the fair value of the compound financial instrument taken as a whole. This amount is recognized and included in equity, net of income tax effects, and not recomputed.

Equity instruments of Group include share capital.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**h. Aset dan Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(Lanjutan)**

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya ke dalam satu atau dua kategori, tergantung pada tujuan saat pengakuisisian liabilitas tersebut. Selain daripada liabilitas keuangan untuk tujuan hubungan lindung nilai (lihat penjelasan di bawah ini), kebijakan akuntansi milik Perusahaan untuk setiap kategori dijelaskan sebagai berikut:

i. Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan pengakuan keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

ii. Liabilitas keuangan lainnya

Kategori ini berhubungan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian pada saat pengakuan liabilitas awal.

Termasuk dalam liabilitas yang berasal dari operasi atau pinjaman dan utang.

Liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, beban bunga masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Untuk tujuan setiap liabilitas keuangan, beban bunga yang termasuk dalam liabilitas keuangan mencakup biaya transaksi awal, premi, bunga atau kupon yang harus dibayar pada saat penebusan atau pada saat kewajiban tersebut belum diselesaikan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**h. Financial Assets and Liabilities and Equity Instruments
(Continued)**

Financial Liabilities and Equity Instruments (Continued)

Financial Liabilities

The Company classifies its financial liabilities into one of two categories, depending on the purpose for which the liability was acquired. Other than financial liabilities in a qualifying hedging relationship (see below), the Company's accounting policy or each category is as follows:

i. Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include the financial liabilities held for trading and liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of resale in the near future. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless the derivatives are designated as effective hedging instruments. Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss as of December 31, 2025 and 2024.

ii. Other financial liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or designated as fair value through profit or loss upon the inception of the liability.

This includes liabilities arising from operations or loans and borrowings.

Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. On the consolidated statement of financial position date, accrued interest is recorded separately from the principal involved in the current liabilities. For the purposes of each financial liability, interest expense includes initial transaction costs and any premium payable on redemption, as well as any interest or coupon payable while the liability is outstanding.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**h. Aset dan Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(Lanjutan)**

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan lainnya (Lanjutan)

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Grup memiliki liabilitas keuangan lainnya berupa utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, biaya masih harus dibayar, dan pinjaman jangka panjang.

Pengakuan

Pada pengakuan awal, aset atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, kecuali untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang secara langsung dapat dibagikan untuk perolehan dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran dari aset dan liabilitas keuangan tersebut bergantung pada klasifikasi dari aset dan liabilitas keuangan.

Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset dan liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**h. Financial Assets and Liabilities and Equity Instruments
(Continued)**

Financial Liabilities and Equity Instruments (Continued)

Financial Liabilities (Continued)

ii. Other financial liabilities (Continued)

Gains and losses are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liability is derecognized, as well as through the amortization using the effective interest rate method.

Group has other financial liabilities consisting of trade payables - third parties, other payables - third parties, accrued expenses, and long-term loans.

Recognition

At initial recognition, financial assets or liabilities are measured at fair value, except for financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss, plus or minus the transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liabilities. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on the classification of financial assets and liabilities.

Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability; or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible by Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate useful economic by using its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**h. Aset dan Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(Lanjutan)**

Nilai Wajar (Lanjutan)

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PSAK No. 113 tentang "Pengukuran Nilai Wajar", mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hierarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

Tingkat 1 : Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.

Tingkat 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga).

Tingkat 3 : Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan secara berulang, Grup menentukan apakah transfer telah terjadi antara tingkat dalam hierarki dengan menilai kembali kategorisasi (berdasarkan masukan tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada akhir setiap tahun pelaporan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada tanggal laporan didasarkan pada harga kuotasi atau kuotasi harga pedagang efek yang mengikat (harga penawaran untuk jangka panjang dan harga permintaan untuk jangka pendek), tanpa adanya pengurangan untuk biaya transaksi. Sekuritas didefinisikan dalam pencatatan ini sebagai "terdaftar" diperjualbelikan dalam pasar aktif. Di mana Grup memiliki aset dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak ketiga, telah memilih untuk menggunakan pengukuran pengecualian untuk mengukur nilai wajar atas eksposur risiko bersihnya dengan menerapkan harga penawaran atau permintaan ke posisi pembukaan bersih yang sesuai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**h. Financial Assets and Liabilities and Equity Instruments
(Continued)**

Fair Value (Continued)

Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PSAK No. 113 on "Fair Value Measurement" requires certain disclosures which require the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in measuring fair value. Fair value hierarchy has the following levels:

Level 1 : Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : Inputs other than market quotations included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (e.g., prices) or indirectly (for example, derivatives prices).

Level 3 : Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

The fair value for financial instruments traded in active markets at the reporting date is based on their quoted price or binding dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs. Securities defined in these accounts as "listed" are traded in an active market. Where Group has financial assets and financial liabilities with offsetting positions in market risks or counterparty credit risk, it has elected to use the measurement exception to measure the fair value of its net risk exposure by applying the bid or ask price to the net open position as appropriate.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**h. Aset dan Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(Lanjutan)**

Nilai Wajar (Lanjutan)

Untuk seluruh instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi yang dianggap tepat dan sesuai kondisi. Teknik penilaian termasuk pendekatan pasar (misalnya menggunakan transaksi *arm's length* yang disesuaikan seperlunya dan mengacu pada nilai pasar instrumen lain yang sama secara substansial) dan pendekatan pendapatan (misalnya analisis arus kas diskonto dan opsi model penentuan harga membuat penggunaan data pasar yang tersedia dan mendukung yang memungkinkan).

Seluruh aset dan liabilitas yang nilai wajarnya dinilai dan diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan dasar sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas dan level hierarki nilai wajar seperti yang dijelaskan di atas.

Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Dalam PSAK No. 109 tentang "Instrumen Keuangan", provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Grup akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**h. Financial Assets and Liabilities and Equity Instruments
(Continued)**

Fair Value (Continued)

For all other financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined by using valuation techniques deemed to be appropriate in the circumstances. Valuation techniques include the market approach (i.e., using recent arm's length market transactions adjusted as necessary and reference to the current market value of another instrument that is substantially the same) and the income approach (i.e., discounted cash flow analysis and option pricing models making as much use of available and supportable market data as possible).

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy.

For the purpose of the fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Amortized Cost Measurement

The amortized cost of a financial assets or liabilities is the amount at which the financial assets or liabilities is measured at initial recognition, minus principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method, calculated from the difference between initial amount and maturity amount, minus any reduction for impairment.

Impairment of Financial Assets

In PSAK No. 109 on "Financial Instruments", impairment loss provision of financial assets measured at expected credit losses model ("ECLs") and applied for financial assets which measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

There are 2 (two) basis of the measurement of expected credit losses, 12 months expected credit losses or lifetime expected credit losses. The Group will analyse the initial recognition using the 12 months expected credit losses and will move to lifetime expected credit losses if there is significant increase in credit risk after initial recognition.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**h. Aset dan Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(Lanjutan)**

Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa atau Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

Dalam transaksi di mana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Grup menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan liabilitas yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas.

Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Grup dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan Grup berintensi untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hal ini tidak umum terjadi dengan perjanjian induk untuk menyelesaikan secara bersih, dan aset dan kewajiban terkait disajikan sebesar nilai bruto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

i. Kas dan Bank

Kas dan bank merupakan bagian aset keuangan yang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan tidak dibatasi penggunaannya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**h. Financial Assets and Liabilities and Equity Instruments
(Continued)**

Derecognition

The Group derecognizes financial assets when the contractual rights of the cash flows arising from the financial assets expire or the Group transfers all rights to receive contractual cash flows of financial assets in a transaction where the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets. Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the Group are recognized as assets or liabilities separately.

The Group derecognizes financial liabilities when the obligation specified in the contract is released, canceled or expired.

In transactions in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Group derecognizes the assets if they do not retain control over the assets. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate.

In transfers in which control over the asset is retained, the Group continues to recognize the assets to the extent of their continuing involvement, determined by the extent to which they are exposed to changes in the value of the transferred assets.

Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently legal right to offset the recognized amounts and the Group intends to either settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. This is not generally the case with master netting agreements, and the related assets and liabilities are presented at gross amounts in the consolidated statement of financial position.

i. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks are financial assets, which are not being as collateral of loan nor restricted for use.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

j. Piutang

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi cadangan atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun cadangan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Grup tidak dapat menagih seluruh jumlah piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan disajikan dalam "Beban penyisihan kerugian kredit ekspektasian".

k. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka merupakan pembayaran untuk suatu transaksi kepada pemasok atau penyedia jasa atau karyawan Grup sebelum transaksi barang/jasa diterima atau diselesaikan.

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali menara telekomunikasi, dicatat dengan menggunakan model biaya yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.

Efektif sejak 1 Januari 2018, menara telekomunikasi dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi, jika ada.

Revaluasi pada nilai wajar dilakukan pada setiap periode pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

j. Receivables

Trade and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any allowance for impairment.

Collectibility of trade and other receivable is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivable.

The amount of the impairment loss is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income within "Provision for expected credit loss expense".

k. Advance Payments and Prepaid Expenses

Advance are a payment for transactions to suppliers or service providers or employee of the Group before the goods/services received or settled.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

l. Fixed Assets

Fixed assets, except for telecommunication tower are stated at cost net of accumulated depreciation and accumulated of asset impairment value, if any.

Effective January 1, 2018, telecommunication towers are accounted for using the revaluation model, which is the fair value on the revaluation date less accumulated depreciation and accumulated impairment losses after the revaluation date, if any.

A revaluation at fair value is made at each reporting period. If the carrying amount of the asset increases as a result of the revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulates in equity in the revaluation surplus section. However, the increase is recognized in profit and loss up to the same amount of impairment loss due to revaluation previously recognized in profit or loss.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

I. Aset Tetap (Lanjutan)

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk mengurangi jumlah akumulasi dari surplus revaluasi, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi dari aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap dapat dialihkan ke saldo laba ketika terjadi penghentian atau pelepasan aset tersebut. Sebagian surplus revaluasi juga dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset. Dalam hal tersebut, maka surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan tersebut tidak dilakukan melalui laba rugi.

Pada tanggal 1 Oktober 2022, berdasarkan suatu kajian teknis maka Manajemen melakukan penyesuaian estimasi masa manfaat menara telekomunikasi dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Manajemen berpendapat bahwa masa manfaat ini merupakan masa manfaat yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomik dan nilai sisa aset tersebut, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin akan disesuaikan kembali.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran manfaat ekonomik aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun/Years	
Menara telekomunikasi	40	Telecommunication towers
Serat optik	25	Fiber optic
Peralatan kantor	4	Office equipment

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama tahun buku di mana beban tersebut terjadi. Akumulasi penyusutan untuk aset yang direvaluasi, dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Grup, dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Nilai residu, masa manfaat, dan metode penyusutan, dikaji pada tiap akhir tahun pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

I. Fixed Assets (Continued)

If the carrying amount of the asset decreases as a result of the revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. The impairment is recognized in other comprehensive income, to reduce the accumulated amount of the revaluation surplus, as long as it does not exceed the revaluation surplus balance of the asset.

The revaluation surplus of fixed assets may be transferred to the retained earnings when there is a termination or disposal of the asset. Some revaluation surpluses may also be transferred in line with asset use. In that case, the revaluation surplus transferred to retained earnings is the difference between the amount of depreciation based on the revaluation amount and the amount of depreciation based on the initial cost. The transfer is not made through profit or loss.

On October 1, 2022, based on a technical review, Management have adjusted the estimated useful lives of telecommunication towers from 30 years to 40 years. Management believes that this useful life is generally expected in the industry in which the Company operate their business. Changes in the level of usage and technological developments could affect the economic useful lives and residual values of the asset, and therefore future depreciation charges maybe readjusted.

Depreciation of fixed assets has been computed on a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:

Depreciation expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The accumulated depreciation for the revalued asset is eliminated against the gross carrying amount and the net carrying amount after elimination is restated for the amount of revaluation.

Repair and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

The residual value, useful life, and depreciation method are reviewed at the end of each reporting year, and adjusted prospectively, if appropriate.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

i. Aset Tetap (Lanjutan)

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Nilai menara termasuk estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan menara, dan untuk restorasi lokasi menara. Liabilitas tersebut dicatat sebagai provisi biaya pembongkaran aset dalam akun provisi jangka panjang.

m. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset nonkeuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada).

Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

n. Sewa

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan untuk imbalan.

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

i. Fixed Assets (Continued)

Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

Gains or losses on disposal are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.

Construction in progress is stated at cost and presented as part of fixed assets. The accumulated acquisition costs will be transferred to the respective fixed asset accounts when the asset is completed and ready for use.

The value of the tower includes the initial estimated cost for dismantling and relocating the tower and for restoration of the tower location. This obligation is recorded as assets retirement obligation under long-term provision.

m. Impairment of Non-financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any).

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

n. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

n. Sewa (Lanjutan)

Aset Hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan).

Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul di awal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Liabilitas Sewa

Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai residu.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Grup, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Grup melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

n. Leases (Continued)

Right-of-use Assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available-for-use).

Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

Lease Liabilities

The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate.

Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

o. Pajak Penghasilan

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi. Beban pajak sehubungan dengan penghasilan yang menjadi subjek pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode/tahun berjalan dan dicatat sebagai bagian beban operasi.

Selisih antara jumlah pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak final diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Pajak Kini

Grup menerapkan PSAK No. 212 tentang "Pajak Penghasilan", dalam mencatat pajak penghasilan.

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pajak kini diakui atas penghasilan kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan, beban, dan aset diakui bersih dari jumlah PPN, kecuali apabila PPN timbul pada saat pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dipulihkan dari otoritas perpajakan, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari pos biaya, sebagaimana yang berlaku.

p. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Program Manfaat Pasti

Grup mendanai program imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Liabilitas atau aset imbalan kerja bersih adalah agregat dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program (jika ada), disesuaikan dengan dampak yang membatasi aset imbalan pasti bersih terhadap batas atas aset. Batas atas aset adalah nilai sekarang dari manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa mendatang tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

o. Income Tax

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions. Tax expense related to income subject to final tax is recognized in proportion to total income recognized during the current period/year for accounting purposes and recorded as part of operating expenses.

The differences between the final tax paid and the amount charged as final tax expense is recognized as prepaid tax or tax payables.

Current Tax

The Group adopted PSAK No. 212 on "Income Tax", in recording income tax.

Current tax asset (liability), which is determined by the amount of the expected refund from (or payable to) the tax authorities, is calculated using tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date. Current income tax is recognized upon taxable income in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year.

Except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).

Value Added Tax (VAT)

Revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of VAT, except where the VAT incurred on a purchase of assets or services are not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.

p. Post-employment Benefits Liabilities

Defined Benefit Plan

The Group set up fund for post-employment benefits program in accordance with Labor Law No. 6/2023.

The net pension liability or asset is the aggregate of the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year reduced by the fair value of plan assets (if any), adjusted for any effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling. The asset ceiling is the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

p. Liabilitas Imbalan Pascakerja (Lanjutan)

Program Manfaat Pasti (Lanjutan)

Beban tersebut berdasarkan perhitungan aktuarial independen dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Biaya imbalan pasti terdiri dari:

- Biaya jasa;
- Bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto; dan
- Pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto.

Biaya jasa meliputi biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian dari dan pembayaran yang tidak rutin diakui sebagai beban dalam laba rugi. Biaya jasa lalu diakui pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau biaya pesangon. Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti adalah perubahan selama tahun berjalan pada bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti yang muncul dari waktu ke waktu yang ditentukan dengan mengalikan tingkat diskonto berdasarkan obligasi pemerintah dengan liabilitas atau aset imbalan pasti bersih. Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi.

Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang di masukan dalam bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya.

Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Grup juga memberikan manfaat penghargaan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti panjang dan tunjangan cuti panjang.

Beban tersebut berdasarkan perhitungan aktuarial independen dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Beban jasa masa kini termasuk beban jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuarial dibebankan langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

p. Post-employment Benefits Liabilities (Continued)

Defined Benefits Plan (Continued)

The provision is estimated based on actuarial calculations prepared by an independent firm of actuaries using the "Projected Unit of Credit" method.

Net pension cost comprises the following:

- Service cost;
- Net interest on the net defined benefits liability or asset; and
- Remeasurements of net defined benefits liability or asset.

Service costs which include current service costs, past service costs, and gains or losses on nonroutine settlements are recognized as expense in profit or loss. Past service costs are recognized at the earlier of the date when the plan amendment or curtailment occurs and when the Group recognizes related restructuring cost or termination benefits. These assets are measured at fair value at the end of the reporting period.

Net interest on the net defined benefit liability or asset is the change during the year in the net defined benefit liability or asset that arises from the passage of time which is determined by applying the discount rate based on government bonds to the net defined benefit liability or asset. Net interest on the net defined benefit liability or asset is recognized as expense or income in profit or loss.

Remeasurements comprising actuarial gains and losses, return on plan assets and any change in the effect of the asset ceiling excluding net interest on defined benefit liability are recognized in other comprehensive income in the year in which they arise. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent years.

Other Long-term Benefits

The Group also provide other long-term rewards in the form of long leave and long leave allowances.

The provision is estimated based on actuarial calculations prepared by an independent firm of actuaries using the "Projected Unit Credit" method. Current service costs including past service cost and actuarial gain or loss are charged directly to statement of profit or loss and other comprehensive income of the current year.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

q. Tambahan Modal Disetor - Neto

Tambahan modal disetor - neto merupakan selisih antara harga penawaran dari hasil penawaran umum perdana saham Perusahaan dengan nilai nominal saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham tersebut.

r. Dividen

Dividen diakui pada saat dividen secara legal menjadi terutang. Dalam dividen terhadap pemegang saham ekuitas, dividen menjadi terutang pada saat diumumkan oleh Direksi. Dalam dividen final, dividen menjadi terutang pada saat dividen diumumkan oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Perusahaan bergerak dalam bisnis bidang telekomunikasi termasuk penyediaan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi dan penyediaan jasa telekomunikasi.

PSAK No. 115 tentang "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (*5-steps model*) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan;
- Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak;
- Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin; dan
- Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

q. Additional Paid-in Capital - Net

Additional paid-in capital - net represents the difference between the offering price of the shares of the Company at the initial public offering with the par value of such shares, net of shares issuance costs.

r. Dividends

Dividends are recognized when they become legally payable. In the case of dividends to equity shareholders, this is when declared by the directors. In the case of final dividends, this is when approved by the shareholders at the General Meeting of Shareholders.

s. Revenue and Expense Recognition

Revenue from Contract with Customers

The Company is engaged in the telecommunications business including the provision of telecommunications network infrastructure and the provision of telecommunications services.

PSAK No. 115 on "Revenue from Contracts with Customers" provides a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

- *Identify contract(s) with a customer;*
- *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
- *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin; and*
- *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Lanjutan)

Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

Penghasilan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan oleh Perusahaan untuk ditukar dengan barang atau layanan tersebut. Perusahaan pada umumnya menyimpulkan bahwa Perusahaan merupakan prinsipal dalam pengaturan pendapatannya, kecuali untuk layanan pengadaan di bawah ini, karena Perusahaan mengendalikan barang atau jasa sebelum mengalihkannya ke pelanggan.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomik akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Pendapatan sewa menara diakui selama masa sewa. Pendapatan sewa menara diterima di muka disajikan sebagai akun "Pendapatan diterima di muka - pihak ketiga". Pendapatan sewa menara yang belum ditagih disajikan sebagai akun "Pendapatan masih harus diterima" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

t. Laba (Rugi) per Saham Dasar yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dalam tahun berjalan dan telah dikurangi dengan saham treasury.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, maka penghitungan laba per saham dasar dan dilusi untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan secara restrospektif.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

s. Revenue and Expense Recognition (Continued)

Revenue from Contract with Customers (Continued)

This standard also provides specific guidance requiring certain types of fees for obtain and/or fulfill contracts to be capitalized and amortized systematically consistent with the transfer to customers of goods or services related to the costs being capitalized.

Income from contracts with customers is recognized when control of the goods or services is transferred to the customer in an amount that reflects the consideration that the Company expects to exchange for the goods or services. The Company generally concludes that the Company is the principal in regulating its revenue, except for the procurement services below, because the Company controls the goods or services before transferring them to the customer.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Income is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Company and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

Tower rental revenue is recognized over the lease year. Tower rental revenue received in advance is presented as "Unearned revenue - third parties". Tower rental revenue that has not been billed yet is presented as "Accrued revenue" in the consolidated statement of financial position.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

t. Basic Earnings (Loss) per Share Attributable to the Common Equity Holders of the Parent Company

Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing net profit (loss) for the current year attributable to the common equity holders of the Company by the weighted average number of outstanding shares during the current year and has been reduced by treasury stock.

If the number of ordinary shares or potential ordinary shares outstanding increases as a result of capitalization, issuance of bonus shares or stock splits, or decreases as a result of a merger of shares, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented is adjusted retrospectively.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

u. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban (legal maupun konstruktif) sebagai hasil peristiwa lalu; yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan. Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam Laporan keuangan konsolidasian. Kewajiban tersebut telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi sangat kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian ketika arus masuk manfaat ekonomik cukup besar.

v. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (*adjusting events*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila jumlahnya material.

w. Information Segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional ("PKO") Grup, misalnya Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

u. Provision and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event; it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate, that reflects current market assessment of the time value of money and where appropriate, the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increased due to the passage of time is recognized as interest expense.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. They are disclosed in the notes to consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

v. Events After the Reporting Period

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

w. Segment Information

Segment information of the group is presented based on the identified operating segments. An operating segment is a component of the entity:

- *Is involved in business activities which generate income and incur expenses (including income and expenses related to transactions with other components of the same entity);*
- *Its operating results are regularly reviewed by the Group's Operational Decision Maker ("PKO"), for example the Board of Directors to make decisions about the resources allocated to the segment and assess its performance;*
- *Discrete financial information is available.*

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset, dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan sebagai berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Asumsi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Asumsi kunci mengenai masa depan dan sumber kunci lainnya untuk estimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijabarkan sebagai berikut:

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya.

Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima memengaruhi jumlah cadangan untuk piutang usaha.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts of income, expenses, assets, and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the end of reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying values of the assets and liabilities affected in future periods. Judgments and estimates used in preparing the consolidated financial statements are reviewed periodically based on historical experience and various factors, including expectations and events in the future that may occur. However, actual results may differ from these estimates. The uncertainty about these assumptions and estimates could result in an outcome that required a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities affected in the future period.

Judgments Made in Applying Accounting Policies

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Assumptions and Key Sources of Estimation Uncertainty

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions set forth in PSAK No. 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group accounting policies.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Allowance for Expected Credit Losses

The Group evaluate specific accounts where they have information that certain customers are unable to meet their financial obligations.

In these cases, the Group use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce the receivable amounts that the Group expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Asumsi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian (Lanjutan)

Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (Lanjutan)

Nilai tercatat dari piutang usaha Grup sebelum cadangan kerugian atas penurunan nilai masing-masing sejumlah Rp 4.708.671 dan Rp 5.755.454 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 5).

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomiknya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomik aset tetap masing-masing antara 4 - 40 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomik dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 371.601.880 dan Rp 326.605.226 (Catatan 8).

Cadangan Imbalan Pascakerja

Biaya, aset, dan liabilitas skema imbalan pasti yang dilakukan oleh Grup ditentukan dengan menggunakan metode yang bergantung pada estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian dari asumsi utama terdapat dalam Catatan 16. Grup menjalankan masukan dari aktuaris independen terkait dengan kesesuaian asumsi. Perubahan pada asumsi yang digunakan mungkin memiliki efek yang signifikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah tercatat cadangan imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 3.568.331 dan Rp 3.185.076 (Catatan 16).

Pengukuran Nilai Wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 216 tentang "Aset Tetap", Grup telah memilih model revaluasi untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi.

Hierarki nilai wajar aset tetap pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Untuk menentukan nilai wajar, penilai independen menggunakan kombinasi dua pendekatan sebagai metode penilaian: pendekatan pendapatan, yang mendiskontokan arus kas masa depan, dan pendekatan biaya, yang didasarkan pada biaya penggantian saat ini. Untuk penjelasan lebih detail lihat Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Assumptions and Key Sources of Estimation Uncertainty (Continued)

Allowance for Expected Credit Losses (Continued)

The carrying amount of the Group's trade receivables before provision for impairment losses amounted to Rp 4,708,671 and Rp 5,755,454 as of December 31, 2025 and 2024, respectively (Note 5).

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property and equipment to be within 4 - 40 years, respectively. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amount of fixed assets as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 371,601,880 and Rp 326,605,226 respectively (Note 8).

Provision of Post-employment Benefits

The costs, assets, and liabilities of the defined benefit schemes operating by the Group are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions. Details of the key assumptions are set out in Note 16. The Group take advice from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions. Changes in the assumptions used may have a significant effect on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the consolidated statement of financial position. The carrying amount of fixed assets as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 3,568,331 and Rp 3,185,076 respectively (Note 16).

Fair Value Measurement

Regarding the implementation of PSAK No. 216 on "Fixed Assets", the Group has chosen the revaluation model for the measurement after initial recognition of telecommunication towers.

The fair value hierarchy of fixed assets at the end of reporting year is categorized as a level 3 recurring fair value measurement. To determine the fair value, the independent appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost. For more details, see Note 8 to the consolidated financial statements.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Asumsi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian (Lanjutan)

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara

Grup melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara pada akhir periode laporan. Dalam menentukan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat faktor faktor yang memengaruhi nilai liabilitas tersebut. Faktor faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto.

Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir periode pelaporan merupakan perkiraan terbaik dari manajemen atas nilai kini dari biaya pembongkaran yang diperlukan pada masa mendatang.

Kontrak Sewa

Grup memiliki beberapa kontrak sewa atas aset tertentu di mana Grup bertindak sebagai penyewa. Manajemen menilai apakah perjanjian tersebut merupakan, atau mengandung, sewa yang memberikan hak kepada Grup untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu.

Penilaian tersebut didasarkan pada keberadaan 1) hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset (antara lain dalam bentuk penggunaan eksklusif aset selama periode sewa serta atas arus kas ataupun potensi arus kasnya); dan 2) hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa penggunaan aset (termasuk ketika sebelumnya telah ditentukan bahwa Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan, tanpa pesewa memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut dan dalam mendesain aset).

Masa sewa merupakan seluruh periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan berikut periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa ketika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi opsi tersebut. Pada tanggal permulaan perjanjian sewa, manajemen menilai apakah Grup akan cukup pasti untuk mengeksekusi seluruh opsi tersebut (memperpanjang dan menghentikan sewa ataupun membeli aset hak-guna). Sewa yang pada tanggal permulaan memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan tidak mengandung opsi beli merupakan sewa jangka pendek yang dapat dikecualikan dari penerapan pengakuan dalam PSAK No. 116 tentang "Sewa".

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Assumptions and Key Sources of Estimation Uncertainty (Continued)

Estimated Cost of Dismantling of Towers

The Group assess their estimated cost of dismantling of towers at end of reporting period. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost as there are some factors that will affect the amount of liability. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases due to inflation rates, and changes in discount rates.

Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The estimated cost at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of required dismantling costs in the future.

Lease Contract

The Group has several lease agreements for certain assets under which the Group acts as the lessee. Management assesses whether the agreements constitute, or contain, leases that give the Group the right to control the use of the asset for a specified period.

The assessment is based on the existence of 1) the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset (such as exclusive use of the asset throughout the period and for cash flows and its potential cash flows); and 2) the right to direct on how and for what purpose of the asset is used (includes when the right to operate the asset in a manner, without the lessor having the right to change those operating instructions, and for design of the asset is predetermined).

Lease term represents all the non-cancellable period of as well as periods covered by an option to extend or terminate the lease when the Group reasonably certain to exercise or not to exercise that option. At the commencement date, management assesses whether the Group is reasonably certain to exercise all available options (to extend or terminate the lease or to purchase the right-of-used asset). A lease that, at the commencement date, has a lease term of 12 months or less and not contains a purchase option is a short-term lease which may exempted from the recognition in PSAK No. 116 on "Leases".

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Asumsi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian (Lanjutan)

Perpajakan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self-assessment* berdasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa kedaluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024	
Kas	22.000	22.000	Cash on hand
Bank			Cash in banks
PT Bank UOB Indonesia	34.290.445	48.651.161	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46.799	16.044	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	39.220	38.752	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.520	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	839	597	PT Bank QNB Indonesia Tbk
Subjumlah	34.381.823	48.706.554	Sub-total
Jumlah	34.403.823	48.728.554	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Assumptions and Key Sources of Estimation Uncertainty (Continued)

Taxation

The Group as a taxpayers calculate its tax obligation by *self-assessment* based on the current tax regulation. The calculation is considered correct to the extent there is no tax assessment letter from the Directorate General of Taxes for the tax reported amount or within five years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

	2025	2024	
Kas	22.000	22.000	Cash on hand
Bank			Cash in banks
PT Bank UOB Indonesia	34.290.445	48.651.161	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46.799	16.044	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	39.220	38.752	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.520	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	839	597	PT Bank QNB Indonesia Tbk
Subjumlah	34.381.823	48.706.554	Sub-total
Jumlah	34.403.823	48.728.554	Total

As of December 31, 2025 and 2024, all cash in banks are placed in third party banks and neither use as collateral nor restricted for use.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
PT Indosat Tbk	2.500.855	2.301.706	PT Indosat Tbk
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	1.886.138	-	PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
PT Telekomunikasi Seluler	321.678	321.678	PT Telekomunikasi Seluler
PT XL Axiata Tbk	-	1.995.336	PT XL Axiata Tbk
PT Smart Telecom	-	1.136.734	PT Smart Telecom
Jumlah	4.708.671	5.755.454	Total
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(112.066)	(332.486)	Allowance for expected credit losses
Neto	4.596.605	5.422.968	Net

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

The details of trade receivables per customer are as follows:

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pada tanggal 16 April 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom secara hukum telah menyelesaikan penggabungan usaha (Catatan 26).

Seluruh piutang usaha Grup adalah dalam mata uang Rupiah.

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Belum jatuh tempo	4.550.012	5.164.934	Not yet due
Telah jatuh tempo			Overdue
Kurang dari 30 hari	-	-	Less than 30 days
31 - 60 hari	50.618	590.520	31 - 60 days
61 - 90 hari	108.041	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	-	-	More than 90 days
Jumlah	4.708.671	5.755.454	Total
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(112.066)	(332.486)	Allowance for expected credit losses
Neto	4.596.605	5.422.968	Net

Piutang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penagihan.

Trade receivables are unsecured, non-interest bearing, and are generally collectible within 30 days from the invoice date.

Mutasi saldo cadangan atas kerugian kredit ekspektasian selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for expected credit losses during the reporting period are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	332.486	191.812	Beginning balance
(Pemulihan) penambahan penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(220.420)	140.674	(Recovery) additional provision for expected credit losses
Saldo akhir	112.066	332.486	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

6. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

6. ACCRUED REVENUE

This account consists of:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related party (Note 25)
PT Infrastruktur Digital Indonesia	1.173.626	-	PT Infrastruktur Digital Indonesia

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)

	2025
Pihak ketiga	
PT Indosat Tbk	1.272.233
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	998.808
PT Telekomunikasi Seluler	509.703
PT XL Axiata Tbk	-
PT Smartfren Telecom Tbk	-
Subjumlah	2.780.744
Jumlah	3.954.370
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(94.114)
Neto	3.860.256

Pada tanggal 16 April 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom secara hukum telah menyelesaikan penggabungan usaha (Catatan 26).

Akun ini merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi dan serat optik yang belum ditagih, karena proses pengujian fisik menara dan verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, namun telah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan.

Pendapatan masih harus diterima adalah hak imbalan entitas dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan entitas kepada pelanggan yang terdiri dari: sewa menara dan serat optik.

Mutasi saldo cadangan atas kerugian kredit ekspektasian selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	2025
Saldo awal	21.109
Penambahan (pemulihan) penyisihan kerugian kredit ekspektasian	73.005
Saldo akhir	94.114

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian pendapatan masih harus diterima di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai tersebut.

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2025
Uang muka	
Uang muka operasional	48.925

6. ACCRUED REVENUE (Continued)

	2024	
		Third parties
	686.962	PT Indosat Tbk
	-	PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
	187.740	PT Telekomunikasi Seluler
	24.940	PT XL Axiata Tbk
	16.933	PT Smartfren Telecom Tbk
Subjumlah	916.575	Sub-total
Jumlah	916.575	Total
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(21.109)	Allowance for expected credit losses
Neto	895.466	Net

On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, and PT Smart Telecom legally completed a business merger (Note 26).

This account consists of unbilled revenue from telecommunications tower leases and fiber optic, as the physical inspection of the towers and document verification had not been completed as of the date of the consolidated financial statements, however, it has met the criteria for revenue recognition.

Accrued revenue are the Company's right in exchange for goods or services transferred by the entity to customers, which consist of: lease of telecommunications towers and fiber optic.

Movements in the balance of allowance for expected credit losses during the reporting period are as follows:

	2024	
Saldo awal	53.223	Beginning balance
Penambahan (pemulihan) penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(32.114)	Additional (recovery) for provision expected credit losses
Saldo akhir	21.109	Ending balance

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for expected credit losses of accrued revenue is sufficient to cover losses from impairment.

7. ADVANCE PAYMENTS AND PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	2024	
Uang muka		Advance payments
Uang muka operasional	17.583	Advance operational

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi dan serat optik, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2025</u>
Presentase penyelesaian lebih dari 50%	
Menara telekomunikasi	4.511.557
Presentase penyelesaian kurang dari 50%	-
Menara telekomunikasi	3.104.928
Serat optik	6.752.525
Jumlah	<u>14.369.010</u>

Estimasi penyelesaian aset tetap dalam penyelesaian adalah sekitar 1 bulan sampai 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat hambatan untuk menyelesaikan aset tetap dalam penyelesaian.

Tidak terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset karena tidak memenuhi kriteria aset kualifikasian.

Pada tahun 2025 dan 2024, beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	<u>2025</u>
Beban pokok pendapatan (Catatan 23)	7.188.256
Beban usaha (Catatan 24)	264.671
Jumlah	<u>7.452.927</u>

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh menara telekomunikasi telah diasuransikan terhadap kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya kepada pihak ketiga berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 144.875.000 dan Rp 140.355.000. Manajemen berpendapat bahwa pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

Grup tidak memiliki aset yang sementara tidak digunakan atau dihentikan dari penggunaannya dan diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pengukuran Nilai Wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 216 tentang "Aset Tetap", Grup telah memilih model revaluasi untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi.

8. FIXED ASSETS (Continued)

Fixed assets in progress represent the telecommunications tower infrastructures and fiber optic development, with detail as follows:

	<u>2024</u>	
Presentase penyelesaian lebih dari 50%		Percentage of completion more than 50%
Menara telekomunikasi	6.073.371	Telecommunication tower
Presentase penyelesaian kurang dari 50%	-	Percentage of completion less than 50%
Menara telekomunikasi	5.941.211	Telecommunication tower
Serat optik	-	Fiber optic
Jumlah	<u>12.014.582</u>	Total

Estimated completion date of fixed assets in progress is approximately 1 month to 1 year from the reporting date. There are no obstacles in completing the fixed assets in progress.

There is no capitalization of borrowing costs for assets because it does not meet the criteria for qualifying assets.

In 2025 and 2024, depreciation expenses were allocated as follows:

	<u>2024</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 23)	7.282.117	Cost of revenues (Note 23)
Beban usaha (Catatan 24)	247.417	Operating expenses (Note 24)
Jumlah	<u>7.529.534</u>	Total

As of December 31, 2025 and 2024, all telecommunication towers have been insured against fire, theft and other losses to third parties under a blanket policy with sum insured of Rp 144,875,000 and Rp 140,355,000, respectively. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses from such risks.

There are no fixed assets that are temporarily out of use or retired from use and classified as available-for-sale within the Group.

Based on evaluation of management, there were no events or changes in circumstances to indicate any impairment of fixed assets as of December 31, 2025 and 2024.

Fair Value Measurement

Regarding the implementation of PSAK No. 216 on "Fixed Assets", the Group has chosen the revaluation model for the measurement after initial recognition of telecommunication towers.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (Lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan dalam laporannya masing-masing pada tanggal 24 Maret 2026 dan 25 Maret 2025. Penilaian tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Hierarki nilai wajar aset tetap pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama tahun berjalan.

Dalam menentukan nilai wajar, penilai independen menggunakan metode penilaian dengan mengombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas di masa depan, dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

	2025
Tingkat inflasi	2,90% per tahun/per year
Tingkat diskonto	11,05% per tahun/per year

Hubungan antara input tidak dapat diobservasi untuk nilai wajar aset tetap adalah lebih tinggi tingkat diskonto digunakan, semakin rendah nilai wajar dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sewa aset tetap digunakan, semakin tinggi nilai wajar.

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian pengukuran nilai wajar level 3 pada tahun ini. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada item di atas yang tertinggi dan penggunaan terbaik, yang tidak berbeda dari penggunaan yang sebenarnya.

9. ASET HAK-GUNA

Aset hak-guna merupakan sewa lahan untuk menara telekomunikasi, dengan rincian sebagai berikut:

	2025				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan	95.223.585	12.579.000	-	107.802.585	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	46.022.790	9.024.969	-	55.047.759	Accumulated depreciation
Nilai Buku	49.200.795			52.754.826	Book Value

8. FIXED ASSETS (Continued)

Fair Value Measurement (Continued)

The fair value as of December 31, 2025 and 2024 is determined based on the appraisal of KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan in their report dated March 24, 2026 and March 25, 2025, respectively. The valuation was performed in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 28/POJK.04/2021 regarding the Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market.

The fair value hierarchy of fixed assets at the end of reporting year is categorized as a level 3 recurring fair value measurement. There are no transfers between levels during the year.

To determine the fair value, the independent appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost.

The key assumptions used in calculations are as follows:

	2024	
Tingkat inflasi	2,83% per tahun/per year	Inflation rate
Tingkat diskonto	11,75% per tahun/per year	Discount rate

Relationship between unobservable inputs to fair value of fixed assets is the higher the discount rate used, the lower the fair value and the higher the rental income of fixed assets growth rate used, the higher the fair value.

There were no changes to the valuation techniques of level 3 fair value measurements in the year. The fair value measurement is based on the above items highest and best use, which does not differ from their actual use.

9. RIGHT-OF-USE ASSETS

Right-of-use assets represents land leases for telecommunication tower, with details as follows:

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

9. ASET HAK-GUNA (Lanjutan)

9. RIGHT-OF-USE ASSETS (Continued)

2024

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyesuaian atas Perubahan Estimasi Akutansi/ <i>Adjustment from Changes in Accounting Estimate</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya perolehan	90.186.984	6.999.151	-	(1.962.550)	95.223.585	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	38.132.176	7.890.614	-	-	46.022.790	Accumulated depreciation
Nilai Buku	52.054.808				49.200.795	Book Value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 9.024.969 dan Rp 7.890.614, seluruhnya dialokasikan pada beban pokok pendapatan (Catatan 23).

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted Rp 9,024,969 and Rp 7,890,614, respectively, entirely allocated to cost of revenue (Note 23).

10. UTANG USAHA

10. TRADE PAYABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related party (Note 25)
PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	61.988	28.106	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi
Pihak ketiga			Third parties
PT Duta Hita Jaya	637.948	137.727	PT Duta Hita Jaya
PT Teleconsult Nusantara	372.960	-	PT Teleconsult Nusantara
PT Cahaya Semesta Elektrik Indonesia	197.580	-	PT Cahaya Semesta Elektrik Indonesia
PT Karya Lintas Sejahtera	122.210	122.210	PT Karya Lintas Sejahtera
CV Irsan	103.191	-	CV Irsan
PT Daya Guna Karsa	50.677	-	PT Daya Guna Karsa
PT Berkat Bersama Teknik	-	234.850	PT Berkat Bersama Teknik
PT Metro Digital City	-	165.712	PT Metro Digital City
PT Dwipanca Catur Karya	-	63.987	PT Dwipanca Catur Karya
Lain-lain	243.198	179.808	Others
Subjumlah	1.727.764	904.294	Sub-total
Jumlah	1.789.752	932.400	Total

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2025	2024	
<u>Entitas anak</u>			<u>The subsidiary</u>
Pajak Penghasilan			Income Taxes
Pasal 4(2)	703.008	-	Article 4(2)
Pasal 21	46.452	26.448	Article 21
Pasal 28			Article 28
2023	762.903	762.903	2023
2024	953.725	953.725	2024
2025	247.703	-	2025
Pajak Pertambahan Nilai	878.870	492.068	Value Added Tax
Jumlah	3.592.661	2.235.144	Total

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang Pajak

	2025
<u>Perusahaan</u>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	917
Pasal 29	1.544
Pajak Pertambahan Nilai	-
<u>Entitas anak</u>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	217.270
Pasal 21	5.644
Pasal 23	4.761
Jumlah	230.136

c. Perhitungan Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	49.870.946	48.575.450
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat nonfinal	5.633.877	3.466.208
Pendapatan konsolidasian	55.504.823	52.041.658
<u>Pajak penghasilan</u>		
Pajak penghasilan final	4.987.095	4.144.035
Pajak penghasilan nonfinal	725.474	582.973
Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian - taksiran	5.712.569	4.727.008
<u>Pajak nonfinal</u>		
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	19.768.408	17.447.245
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(18.207.363)	(15.972.070)
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	1.561.045	1.475.175

11. TAXATION (Continued)

b. Taxes Payables

	2024	
<u>The Company</u>		
		<i>Income Taxes</i>
		<i>Article 21</i>
		<i>Article 29</i>
		<i>Value Added Tax</i>
<u>The subsidiary</u>		
		<i>Income Taxes</i>
		<i>Article 4(2)</i>
		<i>Article 21</i>
		<i>Article 23</i>
Jumlah	521.411	Total

c. Income Tax Calculation

Reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable profit for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Revenue subject to final income tax
Revenue subject to non-final income tax
Consolidated income
<u>Income tax</u>
Final income tax
Non-final income tax
Income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income - estimated
<u>Non-final tax</u>
Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Profit before income tax - subsidiary
Profit before income tax - the Company

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

	<u>2025</u>
Koreksi fiskal	
<u>Beda tetap</u>	
Penghasilan bunga	(838.592)
Lain-lain	851.210
Jumlah koreksi fiskal	<u>12.618</u>
Taksiran laba kena pajak - Perusahaan	<u>1.573.663</u>
Taksiran beban pajak penghasilan	<u>173.103</u>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka	171.559
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29 - Perusahaan	<u>1.544</u>
Entitas Anak	
Beban pajak penghasilan kini	552.371
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka	(800.074)
Taksiran (lebih) kurang bayar pajak penghasilan - Entitas Anak	<u>(247.703)</u>

d. Aset Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup tidak mengakui aset pajak tangguhan, karena tidak terdapat keyakinan bahwa akan tersedia laba kena pajak yang dapat dimanfaatkan untuk memulihkan atau memanfaatkan aset pajak tangguhan tersebut.

12. PINJAMAN BANK

PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 9 November 2020, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perubahan Kredit No. 18 dari Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., PT Bank UOB Indonesia telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Revolving Credit Facility* ("RCF") bersifat *uncommitted* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 200.000.000 kepada PT Permata Karya Perdana, entitas anak. Pada tanggal 23 Desember 2021, fasilitas tersebut telah mengalami perubahan dan penurunan menjadi Rp 100.000.000 dengan jangka waktu tempo hingga 30 April 2024.

Fasilitas ini telah mengalami perubahan, terakhir dengan perubahan kelima atas Perubahan Perjanjian No. 628/04/2025 yang dibuat pada tanggal 29 April 2025 ("Perubahan V terhadap Perjanjian Kredit") dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 April 2026.

11. TAXATION (Continued)

c. Income Tax Calculation (Continued)

	<u>2024</u>	
		Fiscal correction
		<u>Permanent differences</u>
		Interest income
		Others
		Total fiscal correction
		Estimated taxable income - The Company
		Estimated income tax expenses
		Less prepayment of income tax
		Estimated income tax payable Article 29 - The Company
		The Subsidiary
		Current income tax expenses of subsidiary
		Less prepayment of income tax
		Estimated (over) under payment for corporate income tax - The Subsidiary

d. Deferred Tax Assets

As of December 31, 2025 and 2024, the Group did not recognize any deferred tax assets as there is no assurance that taxable income will be available against which to recover or utilize the deferred tax assets.

12. BANK LOAN

PT Bank UOB Indonesia

On November 9, 2020, based on Banking Facility Agreement as stated in Credit Amendment Deed No. 18 by Notary Darmawan Tjoa, S.H., S.E., PT Bank UOB Indonesia has agreed to provide a credit facility in the form of a *Revolving Credit Facility* ("RCF"), which is *uncommitted*, with a maximum amount of Rp 200,000,000 to PT Permata Karya Perdana, a subsidiary. On December 23, 2021, the facility was amended and reduced to Rp 100,000,000, with maturing until April 30, 2024.

This facility has undergone changes, most recently with the fifth amendment to the Agreement No. 628/04/2025 made on April 29, 2025 ("Amendment V to the Credit Agreement") with a facility term until April 30, 2026.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

12. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia (Lanjutan)

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi PT Permata Karya Perdana, entitas anak harus menyerahkan perjanjian pengikatan saham yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pemegang saham lainnya dan laporan keuangan Perusahaan.

Dalam fasilitas pinjaman ini, PT Permata Karya Perdana, entitas anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, di antaranya:

- Debt to EBITDA yang disesuaikan dan diannualisasi maksimum sebesar 3,75 kali; dan
- Top tier revenue minimum 50,00%.

Fasilitas ini bersifat *uncommitted* dan dikenakan suku bunga acuan ditambah marjin bunga sebesar 1,20% per tahun. Perhitungan bunga (termasuk bunga tambahan apabila ada) dari jumlah terutang dihitung dari hari-hari yang nyata berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak melakukan penarikan atas fasilitas tersebut sehingga saldo utang bank masing-masing sebesar nihil.

12. BANK LOAN (Continued)

PT Bank UOB Indonesia (Continued)

This loan is unsecured but PT Permata Karya Perdana, the subsidiary had to submit shareholders' agreements signed by the Company and other shareholders and financial statements of the Company.

Under the credit facility agreement, PT Permata Karya Perdana, the subsidiary, are required to adhere to the following conditions, among others as follows:

- Debt to EBITDA adjusted and annualized a maximum of 3.75 times; and
- Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.

This facility is uncommitted and subject to the benchmark interest rate plus a margin of 1.20% per annum. Interest (including additional interest, if any) on the outstanding amount is calculated from the actual days in use.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has not withdrawn the facility therefore the outstanding amount of bank loan is nil, respectively.

13. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

	2025
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	8.170.873
PT Indosat Tbk	3.293.004
PT Telekomunikasi Seluler	2.828.131
PT XL Axiata Tbk	-
Jumlah	14.292.008

Sesuai perjanjian sewa, entitas anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun.

Pada tanggal 16 April 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom secara hukum telah menyelesaikan penggabungan usaha (Catatan 26).

13. UNEARNED REVENUE - THIRD PARTIES

This account consists of:

	2024	
	-	PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
	4.547.679	PT Indosat Tbk
	2.341.855	PT Telekomunikasi Seluler
	9.271.726	PT XL Axiata Tbk
Jumlah	16.161.260	Total

Based on the lease agreement, the subsidiary has received advance payments from customers for a period of 1 month, 3 months, and 1 year.

On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, and PT Smart Telecom legally completed a business merger (Note 26).

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2025
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	14.775.296
Perbaikan dan pemeliharaan menara	5.921.756
Karyawan	1.722.958
Jasa konsultan	533.631
Listrik	450.401
Jumlah	23.404.042

14. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	2024	
	8.284.031	Estimated construction cost of telecommunication towers
	5.484.699	Towers repair and maintenance
	1.621.370	Employees
	449.665	Consultant fee
	481.688	Electricity
Jumlah	16.321.453	Total

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR (Lanjutan)

14.

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban yang masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang belum ditagihkan oleh kontraktor.

ACCRUED EXPENSES (Continued)

The estimated construction cost of a telecommunications tower refers to the estimated expenses that have yet to be incurred for the tower and have not yet been billed by the contractor.

15. PROVISI JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi atas menara pada saat menara tersebut tidak dioperasikan lagi karena faktor-faktor tertentu seperti sewa lahan yang tidak diperpanjang, penyesuaian peraturan, atau keadaan memaksa lainnya.

15. LONG-TERM PROVISION

This account represents the cost of dismantling, moving, and restoring the location of the tower when the tower is no longer in operation due to certain factors such as non-renewal of land lease, regulatory adjustments, or other force majeure circumstances.

Rincian dan mutasi atas provisi jangka panjang adalah sebagai berikut:

The details and movements of long-term provision are as follows:

		2025					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Provisi Tambah/ <i>Additional Provision</i>	Jumlah yang Direalisasi dan Dibebankan/ <i>Amount Realized and Expenses</i>	Penambahan Bunga/ <i>Accretion of Interest</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Estimasi biaya pembongkaran menara	726.303	-	159.110	-	-	885.413	Estimated cost of dismantling of towers
		2024					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Provisi Tambah/ <i>Additional Provision</i>	Jumlah yang Direalisasi dan Dibebankan/ <i>Amount Realized and Expenses</i>	Penambahan Bunga/ <i>Accretion of Interest</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Estimasi biaya pembongkaran menara	583.987	-	142.316	-	-	726.303	Estimated cost of dismantling of towers

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

The significant assumptions as of December 31, 2025 and 2024 are consists of:

	2025	2024	
Tingkat diskonto	7,42% - 7,44%	6,70% - 7,15%	Discount rate
Sisa periode sebelum pembongkaran	18 - 40 tahun/years	17 - 40 tahun/years	Remaining period before demolition
Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara dilakukan.			The long-term provision will be realized when the tower demolition is carried out.

16. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup mengakui liabilitas imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan ketentuan minimum di dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang "Cipta Kerja" yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang".

16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The Group recognizes post-employment benefits liabilities to its employees in accordance with the minimum requirement in the Government Regulation No. 35 Year 2021 which regulates the implementation of Law No. 11 Year 2020 on "Job Creation" which has been replaced by Law No. 6 Year 2023 on "Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 Year 2022 on Job Creation into Law".

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KKA Riana & Rekan, aktuaris independen, sesuai laporannya yang masing-masing bertanggal 10 Februari 2026 dan 17 Maret 2025. di mana disusun menggunakan metode aktuarial "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Group recorded post-employment benefit liabilities based on calculations prepared by KKA Riana & Rekan, independent actuary, in accordance with their reports dated February 10, 2026 and March 17, 2025, respectively, which were prepared using the "Projected Unit Credit" actuarial method with the following key assumptions:

	2025	2024	
Tingkat diskonto	6,00%	6,75%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	Salary incremental rate
Tingkat kematian	100% TMI IV	100% TMI IV	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI IV	5% TMI IV	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun sampai dengan usia 35 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia pensiun normal/ 5% per annum until age of 35, then decrease linearly into 0% at normal retirement age	8% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia pensiun normal/ 8% per annum until age of 30, then decrease linearly into 0% at normal retirement age	Resignation rate
Usia pensiun normal	55 - 60 tahun/years	55 - 60 tahun/years	Normal retirement age

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The movements of post-employment benefits liabilities as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	3.185.076	2.797.427	Beginning balance
Biaya jasa masa kini	568.306	596.494	Current service cost
Biaya bunga	204.411	213.067	Interest cost
Biaya jasa masa lalu	423.255	(437.412)	Past service cost
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi	85.237	15.657	Adjustment due to change in attribution method
Termasuk dalam laba rugi (Catatan 24)	1.281.209	387.806	Included in profit or loss (Note 24)
Pengukuran kembali atas imbal hasil aset program			Remeasurement on return on plan assets
Kerugian (keuntungan) aktuarial	318.613	(442.110)	Loss (gain) on actuarial
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain (Catatan 21)	318.613	(442.110)	Included in other comprehensive income (Note 21)
Pembayaran manfaat	(40.228)	(59.186)	Benefits paid
Iuran perusahaan ke aset program	(1.176.339)	(125.000)	Employer contribution to plan asset
Penyesuaian karena pemindahan karyawan	-	626.139	Adjustment due to transfer of employee
Saldo akhir	3.568.331	3.185.076	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2025, analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the sensitivity analysis on significant actuarial assumptions are as follows:

	Perubahan/ Change	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Tingkat diskonto	1%	(4.290.593)	4.975.154	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	4.941.513	(4.315.104)	Salary incremental rate

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Grup memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 22 hari kerja dan tunjangan cuti besar sejumlah satu bulan gaji pokok kepada karyawan staf permanen yang mempunyai masa kerja 5 tahun dan kelipatannya.

17. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham (Nilai Penuh)/ Number of Shares (Full Amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	652.576.009	51,09%	65.257.601	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Amanda Cipta Persada	280.101.700	21,93%	28.010.170	PT Amanda Cipta Persada
PT Mulia Sukses Mandiri	108.175.444	8,47%	10.817.544	PT Mulia Sukses Mandiri
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	102.659.927	8,04%	10.265.993	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Masyarakat (kurang dari 5%)	133.762.920	10,47%	13.376.292	Public (below 5%)
Jumlah	1.277.276.000	100%	127.727.600	Total

18. DISTRIBUSI SALDO LABA

Tahun Buku 2024

Pada tanggal 5 Juni 2025, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku 2024 dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk sebesar Rp 16.864.272 dan pembentukan cadangan wajib sebesar Rp 100.000.

Tahun Buku 2023

Pada tanggal 30 April 2024, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku 2023 dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar Rp 16.198.119 dan pembentukan cadangan wajib sebesar Rp 100.000.

19. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan rugi per saham:

	2025	2024
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	19.042.757	16.864.119
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa - dasar	1.277.276	1.277.276
Laba per saham dasar	14,91	13,20

16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Other Long-term Employee Benefit Program

The Group provide other long-term employee benefit in form of long leave amounting to 22 working days and long leaves allowance amounting to 1 month basic salary for permanent staff employee with 5 years of service and its multiplication.

17. SHARE CAPITAL

As of December 31, 2025 and 2024, the composition of shareholders are as follows:

18. DISTRIBUTION OF RETAINED EARNINGS

For The Year 2024

On June 5, 2025, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2024 with net income attributable to common shareholders of the company amounting to Rp 16,864,272 and establishment of statutory reserves amounted to Rp 100,000.

For The Year 2023

On April 30, 2024, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2023 with net income attributable to common shareholders of the Parent Company amounting to Rp 16,198,119 and establishment of statutory reserves amounted to Rp 100,000.

19. BASIC EARNINGS PER SHARE

The computation of earning per share is based on the following data:

Profit for the year attributable to owner of the parent entity
Weighted average number of common shares
Basic earnings per share

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Agio saham		
Penawaran umum perdana saham	21.500.000	21.500.000
Penawaran umum tanpa HMETD	12.441.000	12.441.000
Penawaran umum HMETD	116.483.796	116.483.796
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(6.310.360)	(6.310.360)
Selisih aset pengampunan pajak	26.360	26.360
Biaya emisi efek ekuitas		
Penawaran umum perdana saham	(723.562)	(723.562)
Penawaran umum HMETD	(1.971.761)	(1.971.761)
Neto	141.445.473	141.445.473

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pada tanggal 26 Mei 2016, Perusahaan membeli 132.321 saham PT Permata Karya Perdana (PKP) dari PT Mulia Sukses Mandiri, PT Amanda Cipta Persada, PT Karya Generasi Gemilang, PT Lancar Distrindo, PT Sukses Prima Sakti, dan Jonathan Chang, pihak berelasi, dengan harga beli Rp 140.000.000. Selisih antara harga beli dan nilai buku sebesar Rp 133.689.640 yaitu Rp 6.310.360 merupakan selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dan dicatat sebagai bagian dari "Tambahan modal disetor" pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Penyertaan tersebut setara dengan 99% kepemilikan di PKP.

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account consists of:

	2025	2024	
			Premium of paid-in capital
			Initial public offering
			Public offering without pre-emptive rights
			Pre-emptive rights public offering
			Difference in restructuring transaction of
			entities under common control
			Difference of tax amnesty assets
			Share issuance costs
			Initial public offering
			Pre-emptive rights public offering
Net	141.445.473	141.445.473	Net

Difference in Arising from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control

On May 26, 2016, the Company bought 132,321 shares of PT Permata Karya Perdana (PKP) from PT Mulia Sukses Mandiri, PT Amanda Cipta Persada, PT Karya Generasi Gemilang, PT Lancar Distrindo, PT Sukses Prima Sakti, and Jonathan Chang, related parties, with a purchase price of Rp 140,000,000. The difference between the purchase price and book value of Rp 133,689,640 which is Rp 6,310,360 is a portion of the combined business transactions of entities under common control and is recorded as part of "Additional paid-in capital" in the consolidated statement of changes in equity. This investment is equivalent to 99% ownership in PKP.

21. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak dan penghasilan komprehensif lain dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Surplus revaluasi	37.783.518	26.715.460
Keuntungan aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	2.013.409	2.332.022
Jumlah	39.796.927	29.047.482

	2025	2024
Revaluasi		
Saldo awal	26.715.460	18.812.505
Penambahan nilai wajar revaluasi	11.068.058	7.902.955
Saldo akhir	37.783.518	26.715.460

	2025	2024
Aktuarial		
Saldo awal	2.332.022	1.889.912
(Kerugian) keuntungan aktuarial	(318.613)	442.110
Saldo akhir	2.013.409	2.332.022

21. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account represents differences arising from change in subsidiary equity and other comprehensive income with details as follows:

Revaluation surplus
Actuarial gain recognized in other comprehensive income

Total

Revaluation
Beginning balance
Revaluation fair value additions

Ending balance

Actuarial
Beginning balance
Actuarial (loss) gain

Ending balance

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

22. PENDAPATAN

Rincian pelanggan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Pendapatan/ Revenue		Persentase dari Jumlah Pendapatan/ Percentage of Total Revenue	
	2025	2024	2025	2024
Menara telekomunikasi:				
PT Indosat Tbk	23.767.996	22.035.167	42,83%	42,35%
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	24.445.740	-	44,04%	0,00%
PT Telekomunikasi Seluler	6.117.461	4.826.040	11,02%	9,27%
PT XL Axiata Tbk	-	18.924.511	0,00%	36,36%
PT Smart Telecom	-	6.255.940	0,00%	12,02%
	54.331.197	52.041.658	97,89%	100,00%
Fiber to the home				
PT Infrastruktur Digital Indonesia	1.173.626	-	2,11%	0,00%
Jumlah	55.504.823	52.041.658	100,00%	100,00%

Telecommunication towers:
PT Indosat Tbk
PT XLSMART Telecom
Sejahtera Tbk
PT Telekomunikasi
Seluler
PT XL Axiata Tbk
PT Smart Telecom

Fiber to the home
PT Infrastruktur Digital
Indonesia

Total

Seluruh penghasilan merupakan penghasilan sewa dari menara telekomunikasi dan kerjasama penyediaan layanan infrastruktur fiber to the home (FTTH) berbasis serat optik.

The revenue are earned from rental of telecommunication towers and partnerships for the provision of fiber-to-the-home (FTTH) based on fiber optic infrastructure services.

Pada tanggal 16 April 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom secara hukum telah menyelesaikan penggabungan usaha menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (Catatan 26).

On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, and PT Smart Telecom legally completed their business merger to form PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (Note 26).

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 9)	9.024.969	7.890.614
Penyusutan menara (Catatan 8)	7.188.256	7.282.117
Perbaikan dan pemeliharaan	2.930.624	3.512.506
Listrik	400.613	462.324
Asuransi	386.569	333.957
Perizinan	97.000	65.303
Lain-lain	643.938	437.190
Jumlah	20.671.969	19.984.011

Depreciation of right-of-use assets (Note 9)
Depreciation of towers (Note 8)
Repairment and maintenance
Electricity
Insurance
Licences
Others

Total

Tidak terdapat pihak penjual/pemasok yang memiliki nilai transaksi yang melebihi 10% dari pembelian.

There is no subcontractor/supplier that has a transaction value exceeds 10% of the purchase.

Pos lainnya terutama merupakan biaya perjalanan dinas, pajak bumi dan bangunan, serta iuran dan donasi.

Other items mainly represent travelling expense, taxes of land and building, dues and donations.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

24. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Gaji dan tunjangan	7.534.468	6.798.285	Salaries and allowance
Beban imbalan kerja (Catatan 16)	1.281.209	387.806	Employee benefits expense (Note 16)
Sewa kantor	902.188	892.312	Office rent
Jasa profesional	577.800	589.044	Professional fees
Asuransi	499.979	668.695	Insurance
Iuran dan langganan	379.240	378.921	Dues and subscriptions
Transportasi	270.557	210.583	Transportation
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	264.671	247.417	Depreciation of fixed assets (Note 8)
Perjalanan dinas	52.303	31.471	Travelling expense
Sponsor dan representasi	36.818	30.238	Sponsorship and representation
Lain-lain	194.075	523.475	Others
Jumlah	11.993.308	10.758.247	Total

Pos lainnya terutama merupakan biaya kegiatan kantor serta biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.

Other items mainly represent costs for office activities and education and training costs for employees.

Donasi dan tanggung jawab sosial merupakan kontribusi Perusahaan untuk membantu masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional Grup.

Donations and social responsibility are the Company's contributions to support the community and the Government in dealing with the conditions of the disaster management, and increasing social and economic activities for the community in Group operational areas.

25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam keadaan normal, entitas anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berikut ini:

25. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

In the normal course of operation, the subsidiary entered into transactions with the following related parties:

Pihak-Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan/ <i>Nature of Relationships</i>	Sifat dari Transaksi/ <i>Nature of Transaction</i>
PT Infrastruktur Digital Indonesia	Entitas Sepengendali/ <i>Under Common Control Entity</i>	Pendapatan masih harus diterima, Pendapatan/ <i>Accrued revenue, Revenue</i>
PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	Entitas Sepengendali/ <i>Under Common Control Entity</i>	Utang usaha/ <i>Trade payables</i>

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of balances with related parties are as follows:

	2025	2024	
<u>Pendapatan masih harus diterima</u> (Catatan 6)			
PT Infrastruktur Digital Indonesia	1.173.626	-	<u>Accrued revenue</u> (Note 6) PT Infrastruktur Digital Indonesia
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
<u>Utang usaha</u> (Catatan 10)			
PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	61.988	28.106	<u>Trade payables</u> (Note 10) PT Ciptajaya Sejahtera Abadi

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>
Pendapatan (Catatan 22)	
PT Infrastruktur Digital Indonesia	<u>1.173.626</u>

**25. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

The details of transaction with related parties are as follows:

	<u>2024</u>	
		<i>Revenue (Note 22)</i>
	-	PT Infrastruktur Digital Indonesia

26. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Kerjasama Layanan *Fiber To The Home* (FTTH)

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan *Fiber To The Home* (FTTH) No. 0074/MKT-PKP/13/03-2025 tanggal 15 September 2024, entitas anak dan PT Infrastruktur Digital Indonesia menandatangani Perjanjian Kerjasama penyediaan layanan *Fiber To The Home* (FTTH) berbasis infrastruktur jaringan kabel serat optik. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun atau jangka waktu minimum komitmen disuatu lokasi kerjasama masih berlaku (berlaku mana yang lebih lama).

Perjanjian Sewa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan Sistem Telekomunikasi dalam Gedung

Entitas anak, PT Permata Karya Perdana memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut:

1. PT Hutchison 3 Indonesia (Hutchison)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2025, entitas anak dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2025, entitas anak dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amendemen mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan cara menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Agreement Cooperation Service *Fiber To The Home* (FTTH)

Based on the *Fiber To The Home* (FTTH) Service Cooperation Agreement No. 0074/MKT-PKP/13/03-2025 dated September 15, 2024, the subsidiary and PT Infrastruktur Digital Indonesia signed a Cooperation Agreement for the provision of *Fiber To The Home* (FTTH) services based on fiber optic cable network infrastructure. The term of this agreement is 10 years or the minimum commitment period at a cooperation location is still valid (whichever is longer).

Rental Agreement Tower *Base Transceiver Station* (BTS) and Telecommunications Systems in Buildings

The subsidiary, PT Permata Karya Perdana have lease agreements with operators as follows:

1. PT Hutchison 3 Indonesia (Hutchison)

On a number of dates in and between 2007 and December 31, 2025, the subsidiary and Hutchison signed Master Lease Agreements ("MLA") to lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The agreements are for lease years of 12 years and can be extended for 6 years.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

On a number of dates in and between 2007 and December 31, 2025, the subsidiary and XL signed the Master Lease Agreement ("MLA"), as amended several times regarding lease utilization of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease year is for 10 years and can be extended by agreement. The lease years start from the date of installation ("RFI") on each location.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

26. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

2. PT XL Axiata Tbk (XL) (Lanjutan)

Pada tanggal 16 April 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom secara hukum telah menyelesaikan penggabungan usaha dengan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Entitas hasil penggabungan bernama PT XLSmart Tbk ("XLSmart"), yang menjadi penerus seluruh hak, kewajiban, aset, dan liabilitas dari entitas-entitas sebelumnya. Sejak tanggal efektif tersebut, semua kegiatan operasional, pengakuan pendapatan, tagihan pelanggan, dan transaksi bisnis lainnya dilakukan oleh XLSmart.

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2025, entitas anak dan Indosat telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA") mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah memberikan persetujuan atas merger dan akuisisi penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia. Persetujuan tersebut dimuat dalam Keputusan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2022 (Kepmenkominfo No. 7) tanggal 4 Januari 2022 tentang Persetujuan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2022, seluruh hak dan kewajiban PT Hutchison 3 Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi dialihkan kepada PT Indosat Tbk.

Pengalihan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan penyediaan jasa telekomunikasi, kewajiban untuk menjamin keberlangsungan layanan kepada pelanggan, kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, serta kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dan kontribusi kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO). Selain itu, izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data atas nama PT Hutchison 3 Indonesia juga dialihkan menjadi izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data atas nama PT Indosat Tbk.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

2. PT XL Axiata Tbk (XL) (Continued)

On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, and PT Smart Telecom legally completed a business merger with the approval of the Ministry of Communication and Digital Affairs of the Republic of Indonesia. The merged entity, named PT XLSmart Tbk ("XLSmart"), assumed all rights, obligations, assets, and liabilities of the predecessor entities. As of the effective date, all operational activities, revenue recognition, customer billing, and other business transactions are conducted by XLSmart.

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

On a number of dates in and between 2008 and December 31, 2025, the subsidiary and Indosat signed a number of Master Lease Agreements ("MLA") regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease year is for 10 years, and can be extended for another 10 years, unless Indosat does not intend to extend by informing the subsidiary in writing. The lease year starts from the date of installation ("RFI") on each location.

The Minister of Communication and informatics of Republic of Indonesia has given approval for the merger and acquisition of telecommunications operations between PT Indosat Tbk and PT Hutchison 3 Indonesia. The approval was legally formalized by the Decree of the Minister of Communication and Informatics No. 7 Year 2022 (Kepmenkominfo No. 7) dated January 4, 2022 regarding the Approval for the Merger of PT Indosat Tbk and PT Hutchison 3 Indonesia.

Pursuant to the Decree of the Minister of Communication and Informatics No. 7 Year 2022, all rights and obligations of PT Hutchison 3 Indonesia related to telecommunication operations were transferred to PT Indosat Tbk.

The transfer includes, but is not limited to, the right to use telecommunication numbering, obligations to develop networks and provide telecommunication services, obligations to ensure service continuity to customers, cooperation with other telecommunication providers, and obligations to pay Non-Tax State Revenues in the form of telecommunication operation rights fees, radio frequency spectrum usage fees, and contributions to the Universal Service Obligation (USO). In addition, the data communication system service license held by PT Hutchison 3 Indonesia was also transferred to PT Indosat Tbk.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

26. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

4. PT Telekomunikasi Selular

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2025, entitas anak telah menandatangani sejumlah Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

5. PT Smartfren Telecom Tbk

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2025, entitas anak dan Smartfren telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amendemen mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Terhitung efektif sejak 16 April 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom telah bergabung, sejak tanggal efektif tersebut, semua kegiatan operasional, pengakuan pendapatan, tagihan pelanggan, dan transaksi bisnis lainnya dilakukan oleh XLSmart.

6. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2025, entitas anak dan XLSMART (sebelumnya masing-masing dengan XL, Smartfren dan Smart Telecom) menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amendemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko-risiko keuangan: risiko kredit, risiko likuiditas, estimasi nilai wajar, risiko operasional dan risiko manajemen permodalan. Secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Grup terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Grup.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

4. PT Telekomunikasi Selular

On a number of dates in and between 2004 and December 31, 2025, the subsidiary and Telkomsel signed a number of Master Lease Agreement ("MLA") regarding lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease year is for 10 years starting from when the Minutes of Site Utilisation (BAPS) has been signed.

5. PT Smartfren Telecom Tbk

On a number of dates in and between 2005 and December 31, 2025, the subsidiary and Smartfren signed a number of Master Lease Agreements ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease year is for 10 years and can be extended by agreement.

Effective on April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, and PT Smart Telecom have merged, as of that effective date, all operational activities, revenue recognition, customer billing, and other business transactions are carried out by XLSmart.

6. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom)

On a number of dates between 2005 to December 31, 2025, the subsidiaries and XLSMART (formerly with XL, Smartfren and Smart Telecom respectively) signed a number of Master Lease Agreements ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease term is for 10 years, and can be extended by agreement. The lease year starts from the date of the Ready for Installation ("RFI") certificate on each location.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group activities are exposed to few financial risks: credit risk, liquidity risk, fair value estimation, operational risk, and capital risk management. The Group overall risk management program focuses to mitigate the volatility of financial markets and to minimize potential adverse effects on the Group financial performance.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain, pendapatan masih harus diterima, dan uang jaminan.

Entitas anak menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan pelanggan untuk membayar sewa dari menara ataupun pemancar milik entitas anak.

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Grup menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti *dealer*, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

Penyewaan jasa menara telekomunikasi kepada operator selular dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Kas dan bank	34.403.823	48.728.554	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	4.596.605	5.422.968	Trade receivables - third parties
Pendapatan masih harus diterima	3.860.256	895.466	Accrued revenue
Uang jaminan	45.571	40.471	Refundable deposits
Jumlah	42.906.255	55.087.459	Total

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Grup melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Internal Perusahaan.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit Risk

The Company is exposed to credit risk primarily from cash on hand and in banks, trade receivables - third parties, other receivables, accrued revenue, and refundable deposits.

The subsidiary is exposed to credit risk from the customer's inability to pay the tower or in building system rental fees owed to the subsidiary's.

Credit Quality of Financial Assets

The Group manage credit risk exposed from its deposits with banks by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.

In relation to credit granted to customers, the Group establishes terms and conditions for credit facilities for cellular customers and other customers, such as *dealers*, distributors, and other operators related to inter-connection and international roaming. Additional collateral is also required under certain circumstances. Generally, the collateral used is a bank guarantee.

Rental of telecommunication tower to the operators is required to be settled in cash. Credit worthiness and collection procedures are reviewed properly and promptly. There are no significant concentrations of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date are as follows:

b. Liquidity Risk

Liquidity risk arises in situations where the Group have difficulties in obtaining funding sources to fund their working capital and capital expenditure. Liquidity risk also arises in situations where there is a mismatch between the funding sources and any obligations that have matured.

The Group mitigate liquidity risk by analyzing the cash flows availability as well as their funding structure in accordance with the Company's Internal Control Manual.

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Grup mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Grup memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Grup memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Grup memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perusahaan dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Tabel berikut ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan nonderivatif dan derivatif di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Liquidity Risk (Continued)

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash on hand and in banks. The Group manage liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The Group monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that it has sufficient cash to meet operational needs while always maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities so that the Group does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

Such forecasting takes into consideration the Company's debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash sweeping and pooling of funds across accounts in main operating banks can ensure the better concentration of funds and optimisation of liquidity.

The following table analyse the Group financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

	2025					
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Arus Kas Kontraktual/ Contractual Cash Flows	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	Antara 1 - 3 Tahun/ Between 1 - 3 Years	Lebih dari 3 Tahun/ More than 3 Years	
Utang usaha - pihak ketiga	1.789.752	1.789.752	1.789.752	-	-	Trade payables - third parties
Biaya masih harus dibayar	23.404.042	23.404.042	23.404.042	-	-	Accrued expenses
Jumlah	25.193.794	25.193.794	25.193.794	-	-	Total
	2024					
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Arus Kas Kontraktual/ Contractual Cash Flows	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	Antara 1 - 3 Tahun/ Between 1 - 3 Years	Lebih dari 3 Tahun/ More than 3 Years	
Utang usaha - pihak ketiga	932.400	932.400	932.400	-	-	Trade payables - third parties
Biaya masih harus dibayar	16.321.453	16.321.453	16.321.453	-	-	Accrued expenses
Jumlah	17.253.853	17.253.853	17.253.853	-	-	Total

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan di estimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 113 tentang "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2025		2024		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan bank	34.403.823	34.403.823	48.728.554	48.728.554	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	4.596.605	4.596.605	5.422.968	5.422.968	Trade receivables - third parties
Pendapatan masih harus diterima	3.860.256	3.860.256	895.466	895.466	Accrued revenue
Uang jaminan	45.571	45.571	40.471	40.471	Refundable deposits
Jumlah	42.906.255	42.906.255	55.087.459	55.087.459	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	1.789.752	1.789.752	932.400	932.400	Trade payables - third parties
Biaya masih harus dibayar	23.404.042	23.404.042	16.321.453	16.321.453	Accrued expenses
Jumlah	25.193.794	25.193.794	17.253.853	17.253.853	Total

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Fair Value Estimation

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK No. 113 on "Fair Value Measurements" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and
- Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and
- Other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

The following table shows the fair values of financial assets and liabilities:

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Estimasi Nilai Wajar (Lanjutan)

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan *discounted cash flows* berdasarkan tingkat suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya dan/atau kegagalan dari proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan layanan Grup.

e. Risiko Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Grup mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

28. TRANSAKSI NONKAS

Transaksi signifikan yang timbul dari aktivitas investasi yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Perolehan aset tetap melalui:		
Biaya masih harus dibayar	(9.618.084)	-
Surplus revaluasi	11.068.058	7.902.955

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Fair Value Estimation (Continued)

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

The fair value of long-term loans is estimated by using *discounted cash flows* applying the effective interest rate charged by the lenders for the last utilisation in each currency borrowings.

d. Operational Risk

Operational risk is a loss resulting from inadequacy and/or failure of internal processes, human factors, system failure, and/or the existence of external events. This risk is inherent in all business processes, operational activities, systems and services of the Group.

e. Capital Risk Management

The objectives of the Group when managing capital are to safeguard the ability of the Group to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, the Group may from time to time adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/reduce debt levels.

28. NON-CASH TRANSACTIONS

Significant transactions arising from investing activities that do not affect cash flows are as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Acquisition of fixed assets through:		
Accrued expenses	-	-
Revaluation surplus	11.068.058	7.902.955

29. SEGMENT OPERASI

a. Segmen Primer

	<u>Menara/Tower</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan		
Pihak ketiga	55.504.823	52.041.658
Hasil		
Beban pokok pendapatan	(20.671.969)	(19.984.011)
Hasil segmen	<u>34.832.854</u>	<u>32.057.647</u>

29. OPERATING SEGMENT

a. Primary Segment

Revenue
Third parties
Result
Cost of revenue
Segment result

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

29. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

29. OPERATING SEGMENT (Continued)

a. Segmen Primer (Lanjutan)

a. Primary Segment (Continued)

	Menara/Tower		
	2025	2024	
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi	(11.993.308)	(10.758.247)	Operating expenses which can not be allocated
LABA DARI OPERASI	22.839.546	21.299.400	PROFIT FROM OPERATION
Penghasilan bunga	1.366.738	1.483.686	Interest income
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan	147.415	(108.560)	Provision for expected credit losses - financial assets
Beban keuangan			Financial expenses
Pinjaman bank	-	(1.126.194)	Bank loans
Lain-lain - neto	401.804	42.948	Others - net
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	24.755.503	21.591.280	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Pajak penghasilan final	(4.987.095)	(4.144.035)	Final income tax
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	19.768.408	17.447.245	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan			Income tax expenses
Pajak kini	(725.474)	(582.973)	Current tax
LABA BERSIH	19.042.934	16.864.272	NET PROFIT
Aset segmen	348.436.000	314.195.000	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi	125.103.182	123.200.828	Unallocated assets
JUMLAH ASET	473.539.182	437.395.828	TOTAL ASSETS
Liabilitas tidak dapat dialokasi	44.209.799	37.858.824	Unallocated liabilities
JUMLAH LIABILITAS	44.209.799	37.858.824	TOTAL LIABILITIES

b. Segmen Sekunder

b. Secondary Segment

	2025					
	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Sumatra/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Sulawesi Papua/ Sulawesi Papua	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan	40.184.429	8.053.731	2.260.980	5.005.683	55.504.823	Revenue
Beban pokok pendapatan	15.451.046	2.821.432	781.500	1.617.991	20.671.969	Cost of revenue
Aset segmen yang dapat dialokasikan					348.436.000	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan					125.103.182	Segment assets which cannot be allocated
Jumlah aset					473.539.182	Total assets
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan					44.209.799	Segment liabilities which cannot be allocated
	2024					
	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Sumatra/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Sulawesi Papua/ Sulawesi Papua	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan	37.576.640	7.810.836	1.227.402	5.426.780	52.041.658	Revenue
Beban pokok pendapatan	14.929.848	2.601.966	815.104	1.637.093	19.984.011	Cost of revenue
Aset segmen yang dapat dialokasikan					314.195.000	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan					123.200.828	Segment assets which cannot be allocated
Jumlah aset					437.395.828	Total assets
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan					37.858.824	Segment liabilities which cannot be allocated

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

30. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK

Informasi keuangan entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan perubahan ekuitas.

Penyajian dan pengungkapan informasi keuangan tersebut merupakan informasi tambahan yang tidak disyaratkan oleh SAK Indonesia. Informasi tambahan tersebut menjadi bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian Grup.

Laporan Posisi Keuangan

	2025
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan bank	17.986.376
Piutang lain-lain - pihak berelasi	165.000
Uang muka dan biaya dibayar di muka	8.334
Jumlah Aset Lancar	18.159.710
Aset Tidak Lancar	
Investasi pada entitas anak	278.500.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	278.500.000
JUMLAH ASET	296.659.710

30. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY

Financial information of parent entity presents statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, and changes in equity.

The presentation and disclosure of such financial information are supplementary information which are not required by Indonesian SAK. The supplementary information are integral part of the Group's consolidated financial statements.

Statement of Financial Position

	2024	
		ASSETS
		Current Assets
		Cash on hand and in banks
		Other receivables - related parties
		Advance payments and prepaid expenses
		Total Current Assets
		Non-current Assets
		Investment in subsidiaries
		Total Non-current Assets
		TOTAL ASSETS

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

30. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (Lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

	<u>2025</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang lain-lain	800.000
Utang pajak	2.461
Biaya masih harus dibayar	800.295
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.602.756
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan pascakerja	1.130.049
JUMLAH LIABILITAS	2.732.805
EKUITAS	
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 1.500.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.277.276.000 saham	127.727.600
Tambahan modal disetor	147.755.833
Saldo laba	18.318.537
Penghasilan komprehensif lain	124.935
JUMLAH EKUITAS	293.926.905
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	296.659.710

30. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (Continued)

Statement of Financial Position (Continued)

	<u>2024</u>	
		LIABILITIES AND EQUITY
		LIABILITIES
		Current Liabilities
		Other payables
		Taxes payable
		Accrued expenses
		Total Current Liabilities
		Non-current Liabilities
		Post-employment benefits liabilities
		TOTAL LIABILITIES
		EQUITY
		Share capital - par value Rp 100 (full amount) per share Authorized - 1,500,000,000 shares Issued and fully paid - 1,277,276,000 shares
		Additional paid-in capital
		Retained earnings
		Other comprehensive income
		TOTAL EQUITY
		TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

30. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2025	2024
Pendapatan	3.300.000	3.600.000
Beban usaha	(2.526.596)	(2.561.908)
LABA OPERASI	773.404	1.038.092
Pendapatan (beban) lain-lain		
Penghasilan bunga	490.947	461.831
Lain-lain - neto	296.695	(24.748)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	787.642	437.083
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.561.046	1.475.175
Beban pajak penghasilan	(173.103)	(237.037)
LABA TAHUN BERJALAN	1.387.943	1.238.138
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan aktuarial - neto	46.969	139.983
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.434.912	1.378.121

30. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (Continued)

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive

	2025	2024
Revenue	3.300.000	3.600.000
Operating expense	(2.526.596)	(2.561.908)
PROFIT FROM OPERATIONS	773.404	1.038.092
Other income (expense)		
Interest income	490.947	461.831
Others - net	296.695	(24.748)
Other income (expense) - net	787.642	437.083
PROFIT BEFORE INCOME TAX	1.561.046	1.475.175
Income tax expense	(173.103)	(237.037)
PROFIT FOR THE YEAR	1.387.943	1.238.138
OTHER COMPREHENSIVE INCOME		
Item that will not be reclassified to profit or loss		
Actuarial gain - net	46.969	139.983
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	1.434.912	1.378.121

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (Lanjutan)

30. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (Continued)

	<i>Statement of Changes in Equity</i>				
	<i>Laporan Perubahan Ekuitas</i>	<i>Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital</i>	<i>Saldo Laba/ Retained Earnings</i>	<i>Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income</i>	<i>Jumlah Ekuitas/ Total Equity</i>
Saldo per 1 Januari 2024	127.727.600	147.755.833	15.692.456	62.017	291.113.872
Laba tahun berjalan	-	-	1.238.138	-	1.238.138
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - neto	-	-	-	139.983	139.983
Saldo per 31 Desember 2024	127.727.600	147.755.833	16.930.594	77.966	292.491.993
Laba tahun berjalan	-	-	1.387.943	-	1.387.943
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - neto	-	-	-	46.969	46.969
Saldo per 31 Desember 2025	127.727.600	147.755.833	18.318.537	124.935	293.926.905

Balance as of January 1, 2024

Profit for the year

Other comprehensive income for the year - net

Balance as of December 31, 2024

Profit for the year

Other comprehensive income for the year - net

Balance as of December 31, 2025

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

30. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (Lanjutan)

Laporan Arus Kas

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	3.300.000	3.600.000
Penerimaan jasa giro	490.947	461.751
Pembayaran pajak penghasilan	(174.554)	(178.693)
Pembayaran kas kepada karyawan	(1.659.973)	(1.732.922)
Pembayaran kepada pemasok	(667.639)	(766.052)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>1.288.781</u>	<u>1.384.084</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>-</u>	<u>-</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>-</u>	<u>-</u>
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	1.288.781	1.384.084
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	<u>16.697.595</u>	<u>15.313.511</u>
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u><u>17.986.376</u></u>	<u><u>16.697.595</u></u>

30. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (Continued)

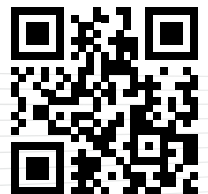
Statement of Cash Flows

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
<i>Cash receipt from customer</i>
<i>Interest received from current accounts</i>
<i>Payments of income tax</i>
<i>Cash paid to employees</i>
<i>Cash paid to suppliers</i>
Net Cash Provided by Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANK
CASH ON HAND AND IN BANK AT BEGINNING OF THE YEAR
CASH ON HAND AND IN BANK AT END OF THE YEAR



Kantor Pusat
Head Office

Menara Imperium Lt. 18 Suite C
Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav 1,
Guntur, Setiabudi
Jakarta Selatan - 12980
Telp. : 021-83707370 Ext 104



www.ptvti.co.id